SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan RKP Tahun 2023.

Pasal 3

(1) RKP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
   a. Narasi RKP Tahun 2023 yang terdiri atas:
      1. Bab I meliputi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;

2. Bab . . .

2. Bab II meliputi Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2021, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
3. Bab III meliputi Tema dan Sasaran Pembangunan yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Arahan Presiden, Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, serta Prioritas Nasional;
4. Bab IV meliputi penjabaran 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan Pendanaan Prioritas Nasional;
5. Bab V meliputi Kaidah Pelaksanaan yang memuat Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, serta Kerangka Evaluasi dan Pengendalian; dan
6. Bab VI meliputi Penutup.

b. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana;

c. Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.

(2) Ketentuan mengenai Narasi RKP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan mengenai Matriks Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Ketentuan mengenai Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Kerangka Ekonomi Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mencakup sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi.

(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dalam rangka mengawal sasaran kerangka ekonomi makro.

(3) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dijabarkan dalam daftar proyek prioritas yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

(1) RKP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan minimal untuk:

a. pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2023;

b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023;

c. sebagai dasar kementerian/lembaga dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga; dan

d. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, kementerian/lembaga menggunakan RKP Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjamin kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2023 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2023.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

(4) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja kementerian/lembaga dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 7

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

(2) Menteri . . .

(2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan hasil pemutakhiran RKP Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

(3) Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2023 yang telah dilaporkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

(1) Kementerian/lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik dan/atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk penyusun rencana kerja kementerian/lembaga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum

Lydia Silvanna Djaman

SK No 135359 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

NARASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

SK No 124935 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
Pendahuluan

SK No 113502 A

BAB I
PENDAHULUAN

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan adalah tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023, sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19.

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut.

Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

SK No 113776 A

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian *herd immunity*. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023 seiring dengan menurunnya angka kasus aktif COVID-19 memasuki fase transisi dari pandemi menuju endemi.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektivitas

SK No 113504 A

pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 terdiri dari (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Empat puluh lima Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran PN pada RKP Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman MP dilakukan dengan mekanisme *Clearing House*, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya *output* MP dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, pada RKP Tahun 2023 dilakukan upaya penguatan integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta. Hal ini dilakukan agar kontribusi sumber daya dari BUMN dan Swasta dapat teridentifikasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020–2024. Bagi pemerintah pusat, RKP merupakan acuan K/L dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sementara itu, RKP juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

1.3 Sistematika

Dokumen RKP Tahun 2023 yang disusun melalui proses teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagaimana ilustrasi di bawah ini.

SK No 113505 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang
- Isu strategis dan tema RKP
- Kedudukan RKP Tahun 2023 dalam pembangunan nasional
- Pendekatan dan penguatan dalam perencanaan

2 Tujuan
- Acuan dalam:
  - Penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
  - Penganggaran pembangunan nasional;
  - Pelaksanaan pembangunan nasional.

3 Sistematika
- Informasi struktur RKP Tahun 2023

BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1 Evaluasi RKP Tahun 2021
- Hasil evaluasi pada pencapaian 7 prioritas nasional RKP Tahun 2021

2 Kerangka Ekonomi Makro
- Perkembangan Ekonomi Terkini
- Prakiraan Ekonomi Tahun 2023
- Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
- Rencana Investasi Prioritas BUMN
- Rencana Investasi Prioritas Swasta

3 Strategi Pengembangan Wilayah
- Tujuan pengembangan wilayah
- Strategi pengembangan wilayah per pulau besar meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

4 Strategi Pendanaan Pembangunan
- Informasi prioritas, sumber dan optimalisasi pendanaan

BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1 Uraian RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden
- Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024
- Arahan Presiden

2 Tema, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
- Tema
- Sasaran
- Arah kebijakan
- Strategi pembangunan

3 Prioritas Nasional
- Uraian Tujuh Prioritas Nasional
- *Highlight Major Project*

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

1 Prioritas Nasional
- Sasaran dan indikator kinerja PN-PP
- Strategi/arah kebijakan Proyek prioritas strategis/*Major Project*

2 Pendanaan Prioritas Nasional
- Informasi alokasi pendanaan

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

1 Kerangka Kelembagaan
- Informasi Kebutuhan Kerangka Kelembagaan

2 Kerangka Regulasi
- Informasi Kebutuhan Kerangka Regulasi

3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- Kaidah pelaksanaan serta tahap evaluasi dan pengendalian

BAB VI PENUTUP

Garis besar RKP Tahun 2023 dalam mendukung keberhasilan pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024

SK No 113506 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

SK No 113507 A

BAB II
SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2021, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan, sebagai landasan dalam mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2021

Kinerja pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen). Namun demikian, masih terdapat dua PN yang kinerjanya masih perlu didorong dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan serta PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yang memiliki kinerja berkisar antara 60–90 persen.

Evaluasi RKP Tahun 2021 dilaksanakan sebagai mandat Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pasal 5 yang menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, maka dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.

Evaluasi RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV dilaksanakan dengan penekanan pada pencapaian PN 2021 sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Evaluasi RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV ini merupakan evaluasi *ex-post* yang difokuskan pada pencapaian tujuh PN RKP Tahun 2021. Ketujuh PN dalam RKP Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2021

Sumber: RKP Tahun 2021.

SK No 113508 A

Berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan hingga triwulan IV-2021, sebagian besar PN memiliki kinerja yang baik, dengan pencapaian kinerja di atas 90 persen. Prioritas Nasional yang memiliki kinerja efektivitas terbaik adalah PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan pencapaian kinerja sebesar 98,59 persen. Sementara itu, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim memiliki kinerja terendah, yaitu sebesar 85,77 persen. Pencapaian kinerja efektivitas pembangunan untuk setiap PN RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021

No.	Prioritas Nasional	Kinerja Efektivitas Pelaksanaan PN (Persen)	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	87,26	🟡
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	96,99	🟢
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	97,97	🟢
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	98,59	🟢
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	96,65	🟢
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	85,77	🟡
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	97,28	🟢

Sumber: Diolah dari hasil *self assessment* pencapaian sasaran PN-PP-KP dan dukungan *output* K/L Pelaksana serta data *e-Monev*.

Catatan: Pemutakhiran data capaian 2021 (per Juli 2022)

Keterangan
Kategori Kinerja: 🟢 realisasi >90% target (kinerja baik)
🟡 realisasi 60–90% target (kinerja cukup)

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memberikan kendala dan tantangan dalam pencapaian target-target pembangunan. Adanya pandemi COVID-19 telah memicu pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan *refocusing* anggaran, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama pada kegiatan fisik, dan dilakukannya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2021.

Pelaksanaan PN RKP Tahun 2021 hingga triwulan IV menghadapi kendala yang terkait dengan permasalahan regulasi dan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan regulasi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan adalah masih adanya ketidakpastian regulasi, terutama regulasi terkait energi terbarukan dan perizinan investasi. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum optimal. Adapun permasalahan SDM yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang kompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

SK No 113509 A

Berikut penjelasan ringkas kinerja efektivitas pencapaian sasaran setiap PN, yang memuat capaian masing-masing indikator.

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Dari 14 indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh indikator telah tercapai, dengan realisasi indikator penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan sebanyak 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP); nilai devisa pariwisata sebesar 0,55 miliar US$; kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata sebesar 4,2 persen; penyediaan lapangan kerja per tahun sebesar 2,60 juta orang; pertumbuhan ekspor industri pengolahan sebesar 35,11 persen; pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebesar 24,0 persen; dan rasio perpajakan terhadap PDB sebesar 9,1 persen. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, dengan realisasi porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 11,70 persen; skor pola pangan harapan sebesar 87,20; rasio kewirausahaan nasional sebesar 2,89 persen; pertumbuhan PDB pertanian sebesar 1,84 persen; pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 3,39 persen; kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 19,25 persen; dan pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 3,8 persen.

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator telah tercapai, dengan realisasi laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 4,86 persen. Sementara itu, lima indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen. Realisasi kelima indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI sebesar 60,62-76,88; persentase penduduk miskin KTI sebesar 11,62 persen; IPM Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 69,90–81,11; laju pertumbuhan PDRB KBI sebesar 3,43 persen; dan persentase penduduk miskin KBI sebesar 9,23 persen.

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari 24 indikator sasaran PN 3, 13 indikator telah tercapai, dengan realisasi angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) (per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun) sebanyak 2,24 rata-rata anak; persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar 99,00 persen; proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial sebesar 86,96 persen; Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 217 per 100.000 kelahiran hidup; insidensi tuberkulosis sebesar 252 per 100.000 penduduk; prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun sebesar 21,80 persen; persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun sebesar 9,00 persen; rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 8,97 tahun; Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 68,10; persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif sebesar 35,83 persen; persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 45,69 persen; jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 300 sebanyak 1 PT; dan jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 500 sebanyak 2 PT. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, dengan realisasi proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah sebesar 64,31 persen; prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 24,37 persen; harapan lama sekolah sebesar 13,08 tahun; Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,27; Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 54,00; proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 40,39 persen; dan peringkat *Global Innovation Index* dengan peringkat 87.

SK No 113510 A

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari tujuh indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai, dengan realisasi Indeks Capaian Revolusi Mental sebesar 70,78; Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 58,21; Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebesar 0,63; dan nilai budaya literasi sebesar 63,03. Sementara itu, tiga indikator lainnya belum tercapai, namun kinerjanya sudah di atas 90 persen, dengan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,39; Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 54,01; dan median usia kawin pertama perempuan sebesar 20,71 tahun.

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak empat indikator telah tercapai, dengan realisasi penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 sebesar 60 persen; persentase pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 33,75 persen (kumulatif); persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) sebesar 25 persen; dan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 6 kota (berlanjut). Sementara itu, enam indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, dengan realisasi rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 60,90 persen; persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi sebesar 5,00 persen (kumulatif); waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,22 jam/100 km; rasio elektrifikasi sebesar 99,45 persen; rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik sebesar 1.123 kWh/kapita; dan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) sebesar 97,50 persen.

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Indikator yang telah tercapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi sebesar 71,45. Sementara itu, indikator lainnya yang belum tercapai yaitu penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 0,57 persen.

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada triwulan IV-2021 menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah tercapai. Realisasi keenam indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 78,12; tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah sebesar 77,23 persen; Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional sebesar 112,06; persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: K/L sebesar 91,76 persen; persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: Provinsi sebesar 79,41 persen; dan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi sebesar 100 persen. Sementara itu, satu indikator lainnya belum tercapai yaitu persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas: Kabupaten/Kota sebesar 25,79 persen.

SK No 113511 A

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diprakirakan akan masuk kembali ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income* pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh pengendalian COVID-19 yang baik melalui perluasan program vaksinasi, serta stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak.

Pemulihan ekonomi yang kuat juga sejalan dengan membaiknya indikator dan sistem kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perkiraan vaksinasi yang telah mencapai *herd immunity* pada tahun 2022 mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Kondisi tersebut merupakan fondasi yang baik bagi pemerintah untuk dapat melanjutkan agenda transformasi ekonomi dalam rangka mengembalikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 maupun dalam Visi Indonesia 2045.

Namun, dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan khususnya bagi pembangunan sosial. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar terhambat. Hambatan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat menurunkan produktivitas perekonomian. Lebih lanjut, pasar tenaga kerja Indonesia juga terdampak cukup signifikan oleh pandemi COVID-19 yang membawa beberapa perubahan. *Retooling* dan *reskilling* pekerja sesuai dengan tren perkembangan pascapandemi perlu dilakukan agar daya saing tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif. Di sisi lain, urgensi penanganan perubahan iklim terus meningkat untuk menciptakan suatu perubahan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, maka upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan. Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah akan menata kembali agenda transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peningkatan produktivitas tersebut, perekonomian pada tahun 2023 diharapkan akan terakselerasi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Upaya transformasi ekonomi tersebut sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tantangan baru pascapandemi.

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun domestik. Oleh karenanya, evaluasi proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 akan sangat penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2023.

SK No 113512 A

2.2.1.1 Perkembangan Perekonomian Dunia

(1) Perkembangan Pemulihan Ekonomi Dunia

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. Varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diprakirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai *herd immunity*.

Gambar 2.2
Indeks PDB Riil Beberapa Negara Tahun 2019–2021 (Indeks, 2019=100)

Sumber: Oxford Economics, Februari 2022.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global pada tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada *Baltic Dry Index* (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Aktivitas perdagangan dunia pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan di tengah konflik Rusia dan Ukraina yang memperparah gangguan rantai pasok. Meski demikian, volume perdagangan dunia diprakirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 9,8 dan 3,0 persen, setelah terkontraksi hingga 5,0 persen pada tahun 2020[1]. Di sisi lain, *Purchasing Managers' Index* (PMI), baik *Manufacturing* maupun *Services* mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021.

[1] *Trade Statistics and Outlook* WTO (April 2022)

SK No 113513 A

Gambar 2.3
***Baltic Dry Index* (BDI)**

Gambar 2.4
PMI Global

Sumber: Bloomberg, IHS Markit, 2022.

(2) Perkembangan Sektor Keuangan Dunia

Volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, tecermin dari penurunan *Chicago Board Option Exchange's Volatility Index* (CBOE VIX *Index*) yang mendekati level prapandemi. Namun, pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX *Index* yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan *Morgan Stanley Capital International All Country World Index* (MSCI ACWI *Index*). Namun pada awal tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI *Index* seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru COVID-19 serta kebijakan pengurangan stimulus yang akan diambil oleh banyak negara.

Gambar 2.5
CBOE VIX dan MSCI ACWI *Index*

Gambar 2.6
***Monetary Base* (Persen, *yoy*)**

Sumber: Bloomberg, 2022.

Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun 2021, sehingga terjadi peningkatan *monetary base* dan likuiditas global. Namun, hingga akhir semester I tahun 2022, *monetary base* menunjukkan penurunan, dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga. Keputusan The Fed disebabkan oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Sementara itu, beberapa bank sentral negara lain seperti Bank of Russia, Bank of England, dan Bank of Korea juga melakukan normalisasi suku bunga lebih awal didorong pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi.

SK No 113514 A

(3) Perkembangan Harga Komoditas Dunia

Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga *Crude Palm Oil* (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan. Sementara itu, harga minyak mentah terus meningkat, utamanya disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Dampak konflik tersebut terus meluas dan memicu sanksi antara Rusia dan negara-negara lain khususnya Eropa dan Amerika Serikat.

Gambar 2.7
Harga Komoditas Internasional

Sumber: World Bank Commodities Price Data, Juni 2022.

(4) Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diprakirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan COVID-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022.

Gambar 2.8
Defisit Fiskal Negara Dunia 2020–2022 (Persen PDB)

Sumber: IMF April 2022, Kementerian Keuangan 2022.

Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing* untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada

SK No 113515 A

tahun 2021 serta tekanan inflasi yang persisten pada tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

Tabel 2.2
Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia

Negara	Februari 2022 (Persen)	Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19
Rusia	9,5	9 kali
Korea Selatan	1,75	5 kali
Inggris	1,25	5 kali
Amerika Serikat (AS)	1,75	3 kali
India	4,90	2 kali
Filipina	2,75	1 kali
Malaysia	2,00	1 kali
Indonesia	3,50	Belum Ada Kenaikan
Vietnam	2,50	Belum Ada Kenaikan
Cina	2,00	Belum Ada Kenaikan
European Union	0,00	Belum Ada Kenaikan
Jepang	(0,10)	Belum Ada Kenaikan

Sumber: CEIC, Juni 2022.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

2.2.1.2 Perkembangan Perekonomian Domestik

(1) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter, dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US$4.349,5 pada tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

SK No 113516 A

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya *"pent up demand"* pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan nilai tambah ekspor barang nonmigas yang mencapai 27,5 persen (*yoy*). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan *real estate* tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

SK No 113517 A

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, *yoy*)

Uraian	2021[1]		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN[2]	*Outlook* Pertumbuhan[3]	Sumber Pertumbuhan[3]
Pertumbuhan PDB	**3,7**	**3,7**	**5,4–5,7**	**5,0–5,5**	**5,0–5,5**
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	2,0	1,1	5,2–5,4	4,8–5,3	2,6–2,9
Konsumsi Pemerintah	4,2	0,3	4,5–4,6	(2,0)–(1,6)	(0,2)–(0,1)
Investasi (PMTB)	3,8	1,2	5,8–6,2	5,4–6,0	1,7–1,9
Ekspor Barang dan Jasa	24,0	4,7	3,9–4,2	11,0–11,6	2,6–2,7
Impor Barang dan Jasa	23,3	(3,4)	4,4–4,6	12,1–12,9	2,3–2,4

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022; 2) RPJMN 2020–2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka *outlook* mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, *permanent scar* yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan yang didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), penerapan industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

SK No 113518 A

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akmamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diprakirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Tabel 2.4
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 (Persen, *yoy*)

Uraian	2021[1)]		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN[2)]	*Outlook* Pertumbuhan[3)]	Sumber Pertumbuhan[3)]
Pertumbuhan PDB	**3,7**	**3,7**	**5,4–5,7**	**5,0–5,5**	**5,0–5,5**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,8	0,2	3,7–3,8	3,6–3,9[b)]	0,5–0,5[a)]
Pertambangan dan Penggalian	4,0	0,3	1,9–1,9	2,6–3,5[b)]	0,2–0,3
Industri Pengolahan	3,4	0,7	5,2–5,5	5,3–5,7	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas	5,5	0,1	5,2–5,2	5,3–5,8[b)]	0,1–0,1[a)]
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0	0,0	4,3–4,4	5,0–5,4[b)]	0,0–0,0[a)]
Konstruksi	2,8	0,3	5,8–6,1	5,9–6,3[b)]	0,6–0,6[a)]
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,7	0,6	5,6–6,0	4,7–5,1[b)]	0,6–0,7
Transportasi dan Pergudangan	3,2	0,1	7,1–7,4	10,8–13,1[b)]	0,4–0,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,9	0,1	6,1–6,3	6,3–7,0[b)]	0,2–0,2[a)]
Informasi dan Komunikasi	6,8	0,4	7,7–8,8	7,3–8,0[b)]	0,5–0,5[a)]
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	0,1	6,4–6,9	3,1–3,6[b)]	0,1–0,2
Real Estate	2,8	0,1	5,0–5,0	3,8–4,6[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Perusahaan	0,7	0,0	8,4–8,4	3,8–4,4[b)]	0,1–0,1[a)]
Administrasi Pemerintahan,	(0,3)	(0,0)	4,8–5,1	1,7–2,2[b)]	0,1–0,1[a)]

SK No 113519 A

Uraian	2021[1)]		2022		
	Realisasi Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan	RPJMN[2)]	*Outlook* Pertumbuhan[3)]	Sumber Pertumbuhan[3)]
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	0,1	0,0	5,2–5,2	2,7–3,5[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,5	0,1	7,6–8,0	8,0–8,7[b)]	0,1–0,1[a)]
Jasa Lainnya	2,1	0,0	9,3–9,5	5,2–5,7[b)]	0,1–0,1[a)]

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; b) Terdapat penyesuaian angka *outlook* pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi PDB 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka *outlook* mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

(2) Produktivitas Ekonomi

Produktivitas merupakan salah satu indikator penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa faktor, di antaranya (a) tenaga kerja, (b) modal, dan (c) *Total Factor Productivity* (TFP). Ketiga faktor ini saling berkaitan erat. *Total Factor Productivity* (TFP) dapat menggambarkan dampak ekonomi dari akumulasi modal dan tenaga kerja serta mengukur seberapa cepat perubahan teknologi suatu negara.

Selama sepuluh tahun terakhir, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia berdasarkan jam bekerja dan jumlah bekerja terus meningkat, dengan nilai masing-masing sebesar 1,35 dan 1,32 pada tahun 2019. Adapun kondisi ini berbanding terbalik dengan indeks produktivitas modal yang terus menunjukkan tren penurunan. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya, rata-rata pertumbuhan tahunan indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada level moderat, dan berhasil mengalami peningkatan pada tahun 2010–2019 setelah sebelumnya sempat menurun pada tahun 1990–2010.

Gambar 2.9
Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia 2010–2019 (2010 = 1,0)

Gambar 2.10
Rata-rata Pertumbuhan Tahunan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber: Asian Productivity Organization (APO) Productivity 2021 Database (per September 2021).

Secara lebih mendalam, tingkat produktivitas rendah menjadi sebuah permasalahan yang umumnya ditemui oleh negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Tingkat produktivitas

SK No 137849 A

rendah ini ditunjukkan oleh data APO, di mana TFP *Index* Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir dan berada pada tingkat sebesar 0,90 pada tahun 2019. Selanjutnya dibandingkan dengan negara lain, rata-rata tahunan TFP Indonesia tahun 2010–2019 tergolong rendah dan berada pada zona negatif.

Peningkatan produktivitas memiliki peran yang besar bagi Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong TFP, di antaranya (a) perkembangan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi masih terbatas, (b) ekspor *high technology* terus mengalami penurunan, (c) tenaga kerja berada di sektor bernilai tambah rendah masih dominan, (d) keterlibatan dalam rantai pasok global yang belum berkembang signifikan, dan (e) penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi yang belum optimal.

Gambar 2.11
***Total Factor Productivity Index* 2010–2019 (2010 = 1,0)**

Gambar 2.12
Rata-rata Pertumbuhan Tahunan TFP *Index*

Sumber: Asian Productivity Organization (APO) Productivity 2021 Database (per September 2021).

(3) Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 mencatatkan surplus tinggi mencapai US$13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan oleh surplus neraca transaksi berjalan sebesar US$3,3 miliar atau 0,3 persen dari PDB. Surplus pada neraca transaksi berjalan tersebut menjadi capaian yang sangat penting sejak surplus terakhir dicapai pada tahun 2011. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga turut berkontribusi mencatat surplus sebesar US$11,7 miliar.

Selanjutnya, kinerja transaksi berjalan yang mengalami surplus pada tahun 2021 didorong oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US$43,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar US$28,3 miliar. Kinerja positif neraca barang terakselerasi di tengah fenomena *commodity supercycle* yang mendorong harga komoditas internasional meningkat. Lebih lanjut, neraca pendapatan sekunder juga berkontribusi positif dengan mencatat surplus sebesar US$6,3 miliar. Adapun kenaikan surplus neraca berjalan lebih jauh masih tertahan oleh meningkatnya defisit neraca jasa–jasa mencapai US$14,8 miliar, sejalan dengan masih tertekannya neraca jasa perjalanan dan kenaikan defisit jasa transportasi. Selain itu, neraca pendapatan primer juga masih persisten mengalami defisit mencapai US$32,0 miliar, seiring dengan meningkatnya imbal hasil investasi yang masuk ke dalam perekonomian domestik.

SK No 113521 A

Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung dan investasi portofolio yang masing-masing mencapai US$16,5 miliar dan US$5,3 miliar yang mana capaian keduanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Positifnya kinerja investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 meskipun masih dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun 2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai US$144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 8 (delapan) bulan impor.

Tabel 2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021–2022 (US$ Miliar)

Uraian	2021[1)]	*Outlook* 2022[2)]
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	**13,5**	**6,7–7,5**
Neraca Transaksi Berjalan	**3,3**	**(4,0)–(6,0)**
(% PDB)	**0,3**	**(0,3)–(0,5)**
Neraca Perdagangan Barang	43,8	38,2-38,0
Neraca Perdagangan Jasa	(14,8)	(14,0)–(14,3)
Neraca Pendapatan Primer	(32,0)	(34,7)–(36,2)
Neraca Pendapatan Sekunder	6,3	6,4–6,6
Neraca Modal dan Finansial	**11,7**	**12,0–14,8**
Investasi Langsung	16,5	17,7–19,5
Investasi Portofolio	5,3	6,7–8,3
Investasi Lainnya	(10,5)	(12,5)–(13,1)
Posisi Cadangan Devisa	**144,9**	**151,6–152,4**
- dalam bulan impor	**8,0**	**7,5–7,4**

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2022.

Keterangan: Terdapat penyesuaian angka *outlook* 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis PDB 2021.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

Pada tahun 2022, NPI diprakirakan akan melanjutkan kinerja positif tahun sebelumnya terutama didorong dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 serta semakin tingginya tingkat vaksinasi baik di tingkat global maupun domestik. Selain itu, harga komoditas internasional juga masih akan cukup tinggi meskipun akan sedikit mengalami perlambatan. Lebih lanjut, likuiditas di tingkat global akan cenderung mengalami *shock* seiring dengan rencana kenaikan suku bunga (*tapering off*) The Fed di tengah meningkatnya inflasi di Amerika Serikat sehingga mendorong aliran investasi keluar dari negara-negara berkembang. Meskipun demikian, dampak dari *tapering off* diprakirakan tidak akan terlalu signifikan dibandingkan pada tahun 2013 yang lalu karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini yang lebih kuat dan resilien.

SK No 113522 A

Berdasarkan perkiraan perkembangan isu strategis di tingkat global dan domestik, *outlook* NPI tahun 2022 akan berkontribusi dalam mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik melalui stabilitas eksternal yang terus menguat. Neraca secara keseluruhan akan berada pada kisaran US$6,7–7,5 miliar dengan kinerja neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit terbatas sekitar US$4,0–6,0 miliar atau setara dengan 0,3–0,5 persen dari PDB. Perkembangan neraca barang akan sedikit menurun sebesar US$38,0–38,2 miliar, seiring dengan fenomena *commodity supercycle* yang berakhir. Neraca jasa-jasa akan mengalami perbaikan defisit menjadi US$14,0–14,3 miliar. Sementara neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang menyumbangkan defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjalan mencapai kisaran US$34,7–36,2, sejalan dengan meningkatnya imbal hasil investasi di tengah meningkatnya investasi langsung dan investasi portofolio. Adapun neraca pendapatan sekunder akan mengalami peningkatan mencapai sekitar US$6,4–6,6 miliar.

Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami akselerasi dengan prakiraan mencapai sekitar US$12,0–14,8 miliar. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh investasi langsung yang akan mencapai kisaran US$17,7–19,5 miliar sejalan dengan target investasi langsung yang terus meningkat serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik dan daya saing nasional. Lebih lanjut, kondisi pasar keuangan yang kondusif dan terus berkembang akan mendorong investasi portofolio pada kisaran US$6,7–8,3 miliar. Cadangan devisa diprakirakan akan terus berkembang mencapai sekitar US$151,6–152,4 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 7,4–7,5 bulan.

(4) Keuangan Negara

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dari dampak pandemi COVID-19, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2021 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2021, serta menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2020. Pendapatan negara dan hibah di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.011,3 triliun atau mencapai 115,4 persen dari target APBN 2021, dan meningkat sebesar 22,1 persen dibanding realisasi tahun 2020. Dari sisi komponen, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.547,8 triliun (9,1 persen PDB) atau mencapai 107,2 persen dari target APBN 2021, tumbuh sebesar 20,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp458,5 triliun (2,7 persen PDB) atau mencapai 153,8 persen dari target APBN 2021 dan tumbuh 33,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Dari sisi belanja negara, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja negara tahun 2021 mencapai Rp2.786,4 triliun (16,4 persen PDB) atau 102,4 persen dari pagu APBN, lebih tinggi 7,4 persen dari realisasi belanja negara di tahun 2020. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat ialah sebesar Rp2.000,7 triliun atau 11,8 persen PDB dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp785,7 triliun atau 4,6 persen PDB.

Selanjutnya, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN tahun 2021 berhasil dijaga di bawah sasaran defisit APBN 2021, dan turun dibandingkan realisasi tahun 2020. Defisit APBN terealisasi sebesar Rp775,1 triliun, atau 4,6 persen PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran ialah mencapai sebesar Rp871,7 triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp870,5 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp142,5 triliun, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp144,0 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun. Kelebihan pembiayaan tersebut menurun signifikan dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp245,6 triliun.

Dari sisi anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pemerintah di tahun 2021 telah menganggarkan sebesar Rp744,8 triliun yang terbagi ke dalam 5 klaster, yaitu kesehatan sebesar Rp215,0 triliun, perlindungan sosial sebesar

SK No 113523 A

Rp186,6 triliun, insentif usaha sebesar Rp62,8 triliun, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp162,4 triliun, serta program prioritas sebesar Rp117,9 triliun. Realisasi program PC-PEN di tahun 2021 ialah mencapai Rp655,1 triliun atau sebesar 88,0 persen dari pagu. Rincian realisasi tersebut meliputi (a) klaster kesehatan terealisasi sebesar Rp198,1 triliun (92,2 persen dari pagu); (b) klaster perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp167,7 triliun (89,9 persen dari pagu); (c) klaster insentif usaha terealisasi sebesar Rp67,6 triliun (107,6 persen dari pagu); (d) klaster dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar Rp116,2 triliun (71,5 persen dari pagu); dan (e) klaster program prioritas terealisasi sebesar Rp105,6 triliun (89,5 persen dari pagu).

Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1.846,1 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510,0 triliun atau 8,4 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp335,6 triliun atau 1,9 persen PDB. Belanja negara diprakirakan mencapai Rp2.714,2 triliun atau 15,2 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diprakirakan sebesar Rp1.944,5 triliun atau 10,9 persen PDB terdiri dari belanja non-K/L yang diprakirakan sebesar Rp998,8 triliun atau 5,6 persen PDB dan belanja subsidi sebesar Rp207,0 triliun atau 1,2 persen PDB, serta belanja TKD diprakirakan mencapai Rp769,6 triliun atau 4,3 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan direncanakan dialokasikan sebesar Rp455,6 triliun, yang direncanakan terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a) penanganan kesehatan sebesar Rp122,5 triliun; (b) perlindungan masyarakat sebesar Rp154,8 triliun; dan (c) penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,3 triliun.

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 4,9 persen PDB atau sebesar Rp868,0 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp182,3 triliun dan SAL sekitar Rp77,3 triliun.

Tabel 2.6
Gambaran APBN (Persen PDB)

Uraian	Realisasi 2021	2022
		APBN
Pendapatan Negara dan Hibah	11,9	10,3
Penerimaan Perpajakan	9,1	8,4
PNBP	2,7	1,9
Belanja Negara	16,4	15,2
Belanja Pemerintah Pusat	11,8	10,9
TKD	4,6	4,3
Keseimbangan Primer	(2,5)	(2,6)
Surplus / (Defisit)	(4,6)	(4,9)
Rasio Utang	40,7	42,1

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 dan UU No. 6/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, diolah.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

SK No 113524 A

(5) Moneter

Pada tahun 2021, secara keseluruhan stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi terjaga stabil ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang baik di tengah berlanjutnya ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Nilai tukar Rupiah ditutup stabil pada akhir tahun 2021 setelah sempat melemah pada bulan April dan Agustus dipengaruhi tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat peningkatan kasus COVID-19 dengan munculnya varian Delta, akselerasi pemulihan ekonomi AS, dan rencana normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed. Di sisi lain, tingkat inflasi yang rendah dan stabil pada tahun 2021 dipengaruhi oleh masih lemahnya konsumsi masyarakat akibat pandemi COVID-19, di tengah ketersediaan pasokan yang memadai.

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar 3,0±1 persen (*yoy*). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan sebesar 1,87 persen (*yoy*), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 yang sebesar 1,68 persen (*yoy*), mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun, peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seiring masih lemahnya permintaan di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru.

Memasuki triwulan I-2022, inflasi tahunan (*yoy*) Januari–Maret secara berturut-turut mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen. Untuk pertama kali sejak Juni 2020, inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0–4,0 persen (*yoy*) pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tecermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

Pada triwulan II-2022, inflasi tahunan (*yoy*) April-Mei tercatat 3,47 persen dan 3,55 persen, mengalami tren peningkatan namun berada dalam rentang sasaran tahun 2022. Peningkatan inflasi tahunan disebabkan oleh *base effect* inflasi 2021 yang rendah, serta kenaikan permintaan seiring dengan periode bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri.

Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan, di antaranya (a) kenaikan harga komoditas pangan global; (b) penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL), serta kebijakan cukai tembakau; (c) risiko pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan *imported inflation*; serta (d) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Di sisi lain, masih belum optimalnya pemulihan daya beli masyarakat disertai normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank sentral di beberapa negara berpotensi menahan laju inflasi sejalan dengan semakin terbatasnya ruang penurunan suku bunga acuan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diprakirakan lebih tinggi dari tahun 2021, cenderung mendekati batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 4,0 persen (*yoy*).

SK No 113525 A

Strategi pengendalian inflasi tahun 2022 berfokus pada (a) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis; (b) optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (d) mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar untuk mendukung kelancaran distribusi; (e) mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (f) meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta (g) optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi).

Gambar 2.13
Perkembangan Inflasi Bulanan
(Persen, *yoy*)

Gambar 2.14
Perkembangan Inflasi Berdasarkan
Komponen (Persen, *yoy*)

Sumber: BPS, 2022.

Nilai tukar Rupiah sepanjang 2021 terjaga stabil dalam kisaran Rp14.000–Rp14.600 per US$. Sepanjang triwulan I dan II, nilai tukar Rupiah sempat melemah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat naiknya *yield* US Treasury (UST), peningkatan kasus COVID-19 dengan munculnya varian Delta, serta sentimen negatif investor terhadap pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, yang berdampak pada berkurangnya aliran modal masuk (*capital inflow*) ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sepanjang triwulan III hingga triwulan IV tahun 2021, Rupiah mengalami penguatan didukung masuknya aliran modal asing karena persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, masih kompetitifnya imbal hasil aset keuangan domestik, kecukupan pasokan valuta asing domestik, berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, serta pelonggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada triwulan I-2022 (Gambar 2.15), nilai tukar Rupiah mengalami tekanan yang bersumber dari peningkatan ketidakpastian global. Pada Januari 2022 terbatasnya aliran modal dipengaruhi akselerasi normalisasi kebijakan moneter dan lonjakan penyebaran COVID-19 varian Omicron. Pada Februari 2022 membaiknya aliran masuk modal asing dan kecukupan pasokan valas domestik mendukung terjaganya nilai tukar Rupiah. Meningkatnya ketegangan konflik Rusia dan Ukraina pada Maret 2022 memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Namun demikian, nilai tukar Rupiah tetap terkendali pada kisaran Rp14.200–Rp14.400 per US$ ditopang kondisi fundamental domestik yang baik.

Sepanjang triwulan II-2022, ketidakpastian di pasar keuangan global terus berlanjut sejalan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina di tengah akselerasi normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara. Kondisi ini menghambat masuknya aliran modal asing utamanya dalam bentuk portofolio sehingga menekan nilai tukar Rupiah. Meski demikian, nilai tukar Rupiah tetap terjaga dalam rentang Rp14.300–Rp14.800 per US$ sepanjang triwulan II-2022.

SK No 113526 A

Pada tahun 2022 nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap terkendali pada kisaran Rp14.500 per US$ berada pada rentang Rp14.300–Rp14.700 per US$ ditopang oleh kondisi fundamental perekonomian domestik yang terjaga.

Gambar 2.15
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)

Sumber: Bloomberg, 2022.

Respons kebijakan moneter ditempuh Bank Indonesia dengan mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI7DRR pada level 3,50 persen sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22-23 Juni 2022. Langkah ini sejalan dengan pentingnya upaya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal yang ditandai dengan meningkatnya risiko terjadinya stagflasi di berbagai negara. Ke depan, Bank Indonesia diprakirakan akan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan secara bertahap, seiring dengan percepatan pengetatan kebijakan moneter The Fed dengan tetap memperhatikan kondisi makroekonomi dan keuangan domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Upaya tersebut ditempuh melalui langkah-langkah untuk mendorong ekspor serta menjaga efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar keuangan. *Burden sharing* pemerintah dan Bank Indonesia dalam penanganan COVID-19 dilanjutkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Melalui SKB ini, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) melalui *private placement* sebesar Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada tahun 2022, yang dipergunakan untuk (a) program vaksinasi, (b) program penanganan kesehatan terkait pandemi COVID-19, dan (c) program perlindungan masyarakat/usaha kecil terdampak.

(6) Sektor Keuangan

Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kinerja sektor jasa keuangan tercatat mengalami peningkatan positif, meskipun belum sepenuhnya pulih. Percepatan program vaksinasi, penyusunan harmonisasi kebijakan dan rencana induk sektor keuangan, serta perpanjangan berbagai stimulus sektor keuangan turut mendukung optimisme dan sentimen positif pada pasar.

Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pasar modal domestik mencatatkan kinerja yang sangat positif, bahkan lebih baik dibanding kinerja bursa saham Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kinerja positif tersebut tecermin dari peningkatan pertumbuhan indeks harga saham gabungan yang tinggi, pertumbuhan jumlah investor yang meningkat pesat, serta penghimpunan dana yang mencapai rekor tertinggi selama ini. Per 31 Maret

SK No 113527 A

2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.071,44 atau tumbuh sebesar 18,14 persen (*ytd*). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp8.910 triliun atau meningkat sebesar 26,00 persen (*yoy*). Capaian tersebut salah satunya didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan di sepanjang tahun 2021. Per 30 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99 persen dibandingkan akhir tahun 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Sementara itu, pada pasar obligasi, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan dan nilainya relatif terus menurun sepanjang tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada awal 2022. Kondisi penurunan *yield* ini mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar.

Gambar 2.16
Perkembangan *Yield Government Bonds*

Gambar 2.17
Perkembangan IHSG

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, 2022.

Perbaikan kinerja juga terjadi pada industri perbankan. Meningkatnya aktivitas ekonomi perlahan mendorong sektor perbankan mengalami perbaikan, yang tecermin dari peningkatan penyaluran kredit perbankan dan risiko kredit bermasalah yang mulai melandai. Setelah sempat mengalami kontraksi, penyaluran kredit perlahan terus mengalami peningkatan hingga tumbuh sebesar 9,1 persen pada triwulan I-2022. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan lapangan usaha penerima kredit, sebagian besar kredit disalurkan kepada sektor perdagangan (23,5 persen) dan industri pengolahan (22,9 persen). Selanjutnya, kredit perbankan juga disalurkan kepada UMKM, dengan salah satu kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target penyaluran sebesar Rp285 triliun, diberikan kepada 6,2 juta debitur pada tahun 2021. Sama halnya dengan kredit non-UMKM, penyaluran KUR juga didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 44,6 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, memasuki tahun 2022, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat terus meningkat dan masih bertahan pada level *double digit*. Namun demikian, penghimpunan DPK mayoritas berada pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4) yaitu 51,5 persen dari total DPK dan KBMI 3 (24,9 persen dari total DPK). Tingginya pertumbuhan DPK masih mencerminkan perilaku berjaga-jaga (*precautionary*) masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di sisi lain, dalam menghadapi pertumbuhan DPK yang tinggi, perbankan terlihat masih meminimalisir risiko. Hal tersebut tecermin dari pergerakan portofolio investasi perbankan yang cenderung memilih berinvestasi pada *risk-free asset* seperti obligasi daripada menyalurkan kredit ke sektor riil.

SK No 113528 A

Gambar 2.18
Pertumbuhan Kredit dan DPK

Gambar 2.19
Rasio Kredit Bermasalah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah terjaga positif hingga awal 2022 meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan akhir periode tahun 2021. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Februari 2022 yang mencapai angka Rp2.002,30 triliun atau tumbuh 9,00 persen (*yoy*). Perkembangan positif sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan termasuk ke sektor UMKM, peningkatan inovasi digital, serta meningkatnya literasi masyarakat terkait instrumen investasi termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

(7) Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

***Outlook* Pencapaian Sasaran Pembangunan 2022**

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diprakirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diprakirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan IPM meningkat.

Tabel 2.7
***Outlook* Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2022 (Persen)**

Uraian	2021[1)]	*Outlook* 2022[2)]
Sasaran Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,49	5,5–6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378
IPM (nilai)	72,29	72,65–72,69[a)]
Penurunan Emisi GRK	24,51	26,87
Indikator Pembangunan		
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106

Sumber: 1) Capaian indikator pembangunan tahun 2021 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2022.

Keterangan: a) Terdapat penyesuaian angka *outlook* IPM 2022 dari sasaran IPM pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi IPM 2021.

SK No 113529 A

(a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun 2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021). Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan jumlah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan upah yang lebih rendah.

Untuk mengurangi bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, pada tahun 2021 pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan melanjutkan desain "semi-bantuan sosial" bagi 5.931.574 orang penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 7.399.139 pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah atau di bawah upah minimum provinsi (UMP), dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,5–6,3 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema "semi-bantuan sosial" pada Semester I dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sesuai desain awal Kartu Prakerja sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada Semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

(b) Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021, angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan September 2020 atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial-Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai *platform* pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5–9,0 persen di tahun 2022.

SK No 113530 A

(c) Rasio Gini

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mulai dari awal tahun 2020 telah berpengaruh kepada berbagai macam aspek terutama sosial-ekonomi. Dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia dirasakan oleh seluruh kalangan termasuk masyarakat, sektor swasta hingga pemerintahan. Rasio gini, seperti yang sudah diprakirakan, mengalami kenaikan akibat dari pandemi COVID-19. Rasio gini merupakan indikator yang sensitif dan kompleks, karena penurunan ketimpangan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang menyasar pada masyarakat berpendapatan menengah ke bawah tetapi juga distribusi dan daya beli masyarakat di semua lapisan.

Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Sebelum masa pandemi, kondisi ketimpangan di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari capaian gini yang berada pada level 0,380 pada September 2019. Setelah itu, perlahan kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan seiring dengan memburuknya kondisi perekonomian dan sosial akibat dari pandemi COVID-19. Puncaknya, rasio gini berada pada level 0,385 pada bulan September 2020.

Kondisi ketimpangan setelah bulan September 2020 mengalami perbaikan secara perlahan. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik jika dibandingkan pada masa awal pandemi. Pada bulan Maret 2021, berdasarkan data dari BPS, angka rasio gini berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020. Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Keadaan ini diharapkan terus terjaga pada periode selanjutnya.

(d) Indeks Pembangunan Manusia

Pandemi COVID-19 varian Delta di pertengahan tahun 2021 memberikan tekanan terhadap perekonomian. Meskipun demikian, perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan mampu menjaga aktivitas perekonomian dan memberikan bantalan pada perekonomian Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebanyak 0,35 poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan baik di komponen kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat meningkat di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Namun, penyebaran varian baru COVID-19 (varian Omicron) mengharuskan pemerintah menerapkan kembali pembatasan kegiatan masyarakat yang diprakirakan akan memberikan tekanan pada aktivitas perekonomian. Meskipun demikian, pembatasan yang dilakukan tidak seketat dibandingkan pembatasan pada tahun 2021. Dampaknya dorongan ke bawah pada pengeluaran per kapita tahun 2022 diprakirakan tidak akan sebesar pada tahun 2021.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerataan ekonomi terutama dilakukan melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Terjaganya harga-harga yang merefleksikan stabilnya tingkat inflasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan esensial seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. Rendahnya cakupan imunisasi berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di masa depan, serta tidak tertanganinya berbagai penyakit yang menurunkan kualitas hidup manusia. Infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif maupun preventif relatif masih lemah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi melalui reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk menjamin aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada aspek pendidikan, pandemi meningkatkan risiko berkurangnya efektivitas pembelajaran (*learning loss*) dan berpengaruh besar terhadap penurunan mutu dan kualitas hasil belajar. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan

SK No 113531 A

mempertimbangkan zonasi risiko COVID-19 diterapkan untuk mencegah *learning loss* akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan. Ketidaksiapan keluarga dalam pendampingan siswa dan keterbatasan kemampuan untuk membiayai pembelajaran multimoda masih menjadi hambatan dalam peningkatan mutu belajar dan mencegah anak putus sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan akses, termasuk mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan kurikulum pembelajaran untuk mempercepat pemulihan kualitas pembelajaran (*learning recovery*).

(e) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Pada tahun 2022, aktivitas perekonomian diprakirakan terus mendekati kondisi normal seiring dengan dilakukannya upaya penanganan pandemi COVID-19 yang semakin kuat dan semakin meluasnya program vaksinasi kepada masyarakat, dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0–5,5 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 masih terus difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal untuk mengurangi *trade-off* dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat.

Gambar 2.20
Proyeksi Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, April 2022.
Keterangan: Tahun 2021 belum termasuk potensi penurunan emisi GRK sektor lahan.

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2022 diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, maka diproyeksikan penurunan emisi GRK akan dapat menguat dari 24,51 persen pada tahun 2021 menjadi 26,87 persen pada tahun 2022. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dan reforestasi, serta perluasan penerapan energi terbarukan.

(f) Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara nasional, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari hingga Desember 2021 adalah sebesar 104,64 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Sepanjang tahun 2021 NTP terus mengalami peningkatan dan mencapai tingkat tertinggi pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar 108,34 dan *trend* tersebut terus berlanjut hingga pada April 2022 NTP mencapai angka 108,83. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh terjadinya peningkatan harga komoditas pertanian strategis seperti kelapa sawit dan karet. Melihat pada grafik, NTP 2021 mulai dari bulan Maret selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, hal tersebut menjadi sinyal positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani Indonesia sepanjang 2021. Lebih detail melihat per subsektor, tingginya NTP pada 2021 tersebut didukung oleh subsektor perkebunan dan berlanjut di tahun 2022. Pada bulan Mei terjadi penurunan NTP akibat penurunan harga kelapa sawit dan karet di tingkat global. Meskipun demikian dengan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021 tersebut, diharapkan NTP pada akhir tahun 2022 dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 103-105.

SK No 113532 A

Gambar 2.21
Perkembangan Nilai Tukar Petani

Sumber: BPS, Juli 2022 (diolah).

(g) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2021 mencapai 104,69 atau tumbuh 4,26 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 100,22. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima (It) dengan indeks yang dibayar oleh nelayan (Ib). Hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap yang didorong oleh meningkatnya permintaan produk perikanan, baik untuk pasar domestik maupun pasar luar negeri. Salah satu hal yang mendorong peningkatan permintaan produk perikanan adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat produk perikanan untuk kesehatan. Selain itu, pengaturan level PPKM sesuai kondisi juga membantu kelancaran jalur logistik dan distribusi barang. Hal tersebut berkontribusi terhadap membaiknya indeks harga yang diterima oleh nelayan, sehingga capaian NTN tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2022, NTN Januari-Juni 2022 mencapai 107,07 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,30 persen dibandingkan NTN tahun 2021 pada periode yang sama, yaitu 103,65. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diharapkan NTN hingga akhir tahun 2022 mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 104–106.

Gambar 2.22
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan

Sumber: BPS dan KKP, Juli 2022 (tahun dasar 2018=100).

SK No 113533 A

(h) Pembangunan Wilayah

Pemulihan selama tahun 2021 terkendala akibat merebaknya virus COVID-19 varian Delta pada triwulan III-2021. Akibatnya, pemulihan ekonomi Wilayah Jawa-Bali tidak tumbuh setinggi dari prakiraan. Wilayah Jawa-Bali tercatat tumbuh sebesar 3,5 persen pada tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,7 persen. Pemulihan didorong oleh perbaikan kinerja pada sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, sejalan dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Pemulihan pada perekonomian Jawa-Bali menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan menjadi 9,0 persen. Pertumbuhan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali juga berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan TPT di Jawa-Bali turun menjadi 7,4 persen, lebih tinggi dari angka nasional.

Memasuki tahun 2022, Wilayah Jawa-Bali dihadapkan pada tantangan peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron. Namun, dampak ekonomi akibat peningkatan kasus akibat varian Omicron diprakirakan tidak seberat dampak dari varian Delta. Wilayah Jawa-Bali diprakirakan dapat tumbuh sebesar 4,9–5,3 persen, sejalan dengan membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Peningkatan ekspor diprakirakan sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara peningkatan permintaan domestik didukung oleh adanya peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan nusantara, meluasnya program vaksinasi, berlanjutnya program bantuan sosial, serta pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh berlanjutnya berbagai pembangunan PSN, di antaranya Tol Serang–Panimbang, Tol Serpong–Balaraja, Tol Jogja–Bawen, Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Pelabuhan Patimban. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,1–8,7 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 6,2–7,1 persen.

Pada Wilayah Sumatera, ekonomi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,2 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya sektor industri pengolahan, pertanian, serta ekspor luar negeri. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang utama serta kenaikan harga komoditas (di antaranya CPO, karet, dan timah). Di sisi lain, perbaikan permintaan domestik masih terbatas, tecermin dari rendahnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Perbaikan kondisi perekonomian Sumatera menjadi salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 9,8 persen. Perbaikan ini juga berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja sehingga TPT turun di Wilayah Sumatera menjadi 5,6 persen.

Pada 2022, pertumbuhan Wilayah Sumatera diprakirakan akan didorong oleh peningkatan permintaan komoditas primer, seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga yang tetap tinggi untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, minyak mentah, dan batu bara. Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta realisasi investasi swasta, diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,5–5,0 persen. Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target penurunan kemiskinan hingga 9,0–9,5 persen di Sumatera. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut diprakirakan dapat menurunkan TPT Wilayah Sumatera pada kisaran 4,9–5,5 persen.

Wilayah Kalimantan, yang juga berbasis komoditas, tercatat tumbuh sebesar 3,2 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya peningkatan permintaan eksternal dan membaiknya permintaan domestik, terutama investasi yang sejalan dengan proses pengembangan hilirisasi pertambangan dan pembangunan infrastruktur pendukung. Sementara itu, peningkatan permintaan eksternal sejalan dengan permintaan negara mitra dagang utama serta kenaikan yang signifikan pada harga komoditas, terutama golongan bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, karet, serta bijih, kerak, dan abu logam. Kondisi ini menjadi salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun

SK No 113534 A

2021 menjadi 5,8 persen. Perbaikan belum berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja dimana TPT naik menjadi 5,6 persen.

Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 diprakirakan akan tumbuh sebesar 4,6–5,5 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan kawasan industri hijau, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan menjadi 5,2–5,8 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut diprakirakan dapat menurunkan TPT Wilayah Kalimantan menjadi 4,7–5,4 persen.

Wilayah Nusa Tenggara menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan terendah di antara wilayah lainnya pada tahun 2021, yaitu sebesar 2,4 persen. Sektor konstruksi, pertanian, dan perdagangan menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara. Peningkatan sektor konstruksi sejalan dengan peningkatan investasi yang didorong oleh penyelesaian proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan *bypass*, penataan kawasan pariwisata, dan pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta peningkatan kualitas layanan jalan, penataan jalur pedestrian, dan penataan kawasan pariwisata di Labuan Bajo. Sementara, sektor perdagangan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan kendaraan dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat tecermin pada peningkatan data mobilitas dari Google yang bergerak meningkat di atas *baseline* pada akhir 2021. Perbaikan kondisi perekonomian Nusa Tenggara terutama permintaan domestik menjadi salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 17,2 persen. Perbaikan ini juga berdampak pada peningkatan penciptaan kesempatan kerja sehingga TPT turun di Wilayah Nusa Tenggara menjadi 3,4 persen.

Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diprakirakan tumbuh sebesar 4,8–5,9 persen yang sejalan dengan arah pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB) diprakirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina sebagai mitra dagang utama. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi pemerintah dan swasta, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi wisata, revitalisasi Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 15,0–15,9 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun diprakirakan akan menurun hingga pada kisaran 2,6–3,2 persen.

Perekonomian Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2021 tumbuh positif, masing-masing sebesar 5,7; 9,4; dan 10,3 persen. Wilayah Sulawesi tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, didorong oleh terjaganya kinerja industri baja dan besi, serta peningkatan produksi smelter baru *nickel pig iron* (NPI). Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak mampu membendung kenaikan angka kemiskinan akibat dampak pandemi menjadi 10,0 persen, di sisi lain TPT mampu turun menjadi 5,0. Sementara, perekonomian Maluku tumbuh positif yang didukung oleh pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara, seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi. Dengan pertumbuhan tersebut, angka kemiskinan turun menjadi 12,2 persen dan TPT turun menjadi 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua didorong oleh tumbuh positifnya sektor pertambangan dan penggalian, khususnya peningkatan produksi tembaga. Tingkat kemiskinan Wilayah Papua pada tahun 2021 menjadi 26,1 persen, sementara TPT turun menjadi 3,8 persen. Berkurangnya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pengangguran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tingkat pengangguran terbuka turun masing-masing sebesar 5,0; 6,0; dan 3,8 persen.

Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh masing-masing sebesar 5,9–7,2; 11,7–12,7; dan 8,4–11,5 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diprakirakan

SK No 113535 A

akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Hilirisasi di Morowali yang dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, serta barang logam bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana pengembangan lumbung ikan nasional diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan Wilayah Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua diprakirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor pertambangan. Di samping kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing menjadi 9,2–9,8 persen; 12,0–12,5 persen; dan 23,5–24,0 persen. Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua diprakirakan akan menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT di wilayah tersebut masing-masing sekitar 4,3–4,9 persen; 5,5–6,0 persen; dan 3,5–3,8 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja.

Pemulihan aktivitas ekonomi di Jawa-Bali sepanjang 2021 berdampak pada pergerakan menuju penciptaan kesempatan kerja. Namun, gelombang varian baru COVID-19 menyebabkan TPT di Jawa-Bali mencapai 7,4 persen atau lebih tinggi dari TPT nasional yang berada pada 6,49 persen. Tekanan pada pertengahan tahun 2021 juga berpengaruh pada TPT di wilayah Sumatera (5,6 persen), Nusa Tenggara (3,4 persen), dan Kalimantan (5,6 persen).

Proses pemulihan ekonomi di tahun 2022, meskipun diawali dengan munculnya varian Omicron COVID-19 diprakirakan akan menurunkan TPT secara moderat di kisaran 5,5–6,3 persen pada tingkat nasional. TPT untuk wilayah Sumatera diprakirakan akan sebesar 4,9–5,5 persen, Jawa-Bali 6,2–7,1 persen, Nusa Tenggara 2,6–3,2 persen, Kalimantan 4,7–5,4 persen, Sulawesi 4,3–4,9 persen, Maluku 5,5–6,0 persen, dan Papua 3,5–3,8 persen.

Tabel 2.8
Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2022

Wilayah	2021[a)]	*Outlook* 2022[b)]
Sumatera		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,2	4,5–5,0 [d)]
Tingkat Kemiskinan (%)	9,8[c)]	9,0–9,5[d)]
Tingkat Pengangguran (%)	5,6	4,9–5,5
Jawa-Bali		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5	4,9–5,3[d)]
Tingkat Kemiskinan (%)	9,0[c)]	8,1–8,7[d)]
Tingkat Pengangguran (%)	7,4	6,2–7,1
Nusa Tenggara		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,4	4,8–5,9[d)]
Tingkat Kemiskinan (%)	17,2[c)]	15,0–15,9[d)]
Tingkat Pengangguran (%)	3,4	2,6–3,2

SK No 113536 A

Wilayah	2021[a]	*Outlook* 2022[b]
Kalimantan		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,2	4,6–5,5[d]
Tingkat Kemiskinan (%)	5,8[c]	5,2–5,8[d]
Tingkat Pengangguran (%)	5,6	4,7–5,4
Sulawesi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,9–7,2[d]
Tingkat Kemiskinan (%)	10,0[c]	9,2–9,8[d]
Tingkat Pengangguran (%)	5,0	4,3–4,9
Maluku		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,4	11,7–12,7[d]
Tingkat Kemiskinan (%)	12,2[c]	12,0–12,5[d]
Tingkat Pengangguran (%)	6,0	5,5–6,0
Papua		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,3	8,4–11,5[d]
Tingkat Kemiskinan (%)	26,1[c]	23,5–24,0
Tingkat Pengangguran (%)	3,8	3,5–3,8

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022; c) Perhitungan Bappenas berdasarkan Susenas September 2021; dan d) Terdapat penyesuaian angka *outlook* 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis PDRB dan tingkat kemiskinan tahun 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka *outlook* mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen.

2.2.2 Prakiraan Ekonomi Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian

(1) Tantangan Ekonomi Global

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diprakirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda

SK No 113537 A

dibandingkan dengan negara maju yang diprakirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*).

Luka memar tecermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan *Fed Funds Rate* lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami *rebound* di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, April 2022) menurunkan prakiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 3,6 persen dari 4,4 persen pada tahun 2022, dipicu oleh risiko semakin meluasnya dampak perang Rusia dan Ukraina seperti memperparah gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas utamanya energi, tekanan inflasi yang persisten, dan risiko ketahanan pangan. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 2,9 dan 3,0 persen.

Gambar 2.23
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, *yoy*)

Sumber: WEO IMF, April 2022.

SK No 113538 A

(2) Tantangan Ekonomi Domestik

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diprakirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diprakirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami kontraksi.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *earnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diprakirakan akan menurunkan skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat *base effect*). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan *stunting* juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun 2021; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan *border* di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan *buyer*, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

SK No 113539 A

2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023

(1) Sasaran Ekonomi Makro

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 2.9
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Uraian	2021	2022 *Outlook*	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (%, *yoy*)	3,7	5,0–5,5	6,0–6,3	5,3–5,9
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	1,87	4,0	2,8	2,0–4,0
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US$ miliar)	144,9	151,6–152,4[c)]	146,8	158,9–160,9
- dalam bulan impor	8,0	7,5–7,4[c)]	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,3	(0,3)–(0,5)[c)]	(1,9)	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,1	8,4[a)]	10,5–11,7	9,3-10,0
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,5)	(2,6)[a)]	0,2–0,0	(0,5)-(0,6)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(4,6)	(4,9)[a)]	(1,6)–(1,7)	(2,6)-(2,9)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	40,7	42,1[a)]	28,9–29,6	40,6-42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,0	7,2–7,8	6,1–6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	901,0	968,4	1294,1	1.250–1.400

SK No 113540 A

Uraian	2021	2022 *Outlook*	2023	
			RPJMN	Sasaran
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,65–72,69[c)]	74,77[c)]	73,31–73,49
Penurunan Emisi GRK	24,51	26,87	26,80	27,02
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	105–107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69[b)]	104–106	106	107–108

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Sasaran APBN Tahun 2022, b) Capaian Rata-Rata Tahun 2021 (BPS), dan c) Terdapat penyesuaian angka *outlook* 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 setelah rilis realisasi angka 2021.

Catatan: Sesuai dengan perkembangan terkini, khususnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, maka *outlook* mengalami revisi ke bawah dari 5,2-5,5 menjadi 5,0-5,5 persen; Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah diprakirakan berada pada rentang Rp14.300,00–Rp14.800,00 per US$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2023 TPT diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–107 dan NTN pada kisaran 107–108.

(2) Arah Kebijakan

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity)* pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

SK No 113541 A

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

(a) Fokus Kebijakan Makro 2023

(i) Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

(ii) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan layak (*decent job*), serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

(iii) Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

(b) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

SK No 113542 A

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,9 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1–6,7 persen, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.250–1.400 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (ii) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (iii) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem *One Single Submission* (OSS) di daerah.

Tabel 2.10
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2023 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMN[a)]	Sasaran 2023[b)]	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	**6,0–6,3**	**5,3–5,9**	**5,3–5,9**
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,7–5,9	4,9–5,5	2,6–3,0
Konsumsi Pemerintah	4,8–5,1	0,6–1,2	0,0–0,1
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	7,2–7,8	6,1-6,7	1,9–2,1
Ekspor Barang dan Jasa	5,3–5,6	6,8–8,0	1,7–2,0
Impor Barang dan Jasa	5,0–5,1	6,6–7,8	1,3–1,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022.

Konsumsi masyarakat juga diprakirakan tumbuh positif mencapai 4,9–5,5 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh pada kisaran 0,6–1,2 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB.

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 6,8–8,0 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diprakirakan akan tumbuh 6,6–7,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

SK No 113543 A

Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen, *yoy*)

Uraian	RPJMN[a)]	Sasaran 2023[b)]	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	**6,0–6,3**	**5,3–5,9**	**5,3–5,9**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9–4,0	4,0–4,2	0,5–0,5[c)]
Pertambangan dan Penggalian	2,0–2,1	3,2–3,5	0,2–0,3
Industri Pengolahan	7,1–7,5	5,4–6,0	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,5–6,0	5,6–6,0	0,1–0,1[c)]
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,7–4,8	5,4–5,7	0,0–0,0[c)]
Konstruksi	6,4–6,7	6,3–6,9	0,6–0,7
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,2–6,7	5,0–5,6	0,7–0,7[c)]
Transportasi dan Pergudangan	7,5–7,9	8,5–9,5	0,3–0,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5–6,7	6,6–7,3	0,2–0,2[c)]
Informasi dan Komunikasi	8,9–9,4	7,8–8,3	0,5–0,5[c)]
Jasa Keuangan	7,1–7,7	3,4–3,8	0,1–0,2
Real Estate	5,3–5,3	4,3–4,8	0,1–0,1[c)]
Jasa Perusahaan	8,5–8,7	4,7–5,3	0,1–0,1[c)]
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,2–5,5	2,3–2,6	0,1–0,1[c)]
Jasa Pendidikan	5,5–5,6	3,3–3,8	0,1–0,1[c)]
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,4–8,5	8,7–9,3	0,1–0,1[c)]
Jasa Lainnya	9,6–9,6	5,9–6,5	0,1–0,1[c)]

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022; dan c) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diprakirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2023 antara lain (i) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat; (ii) pemulihan daya

SK No 113544 A

beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (*durable*); (iii) peningkatan permintaan terhadap produk industri pengolahan, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri; (iv) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri; (v) peningkatan utilisasi produksi; (vi) kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku; (vii) operasionalisasi Kawasan Industri (KI) dan *Smelter*; (viii) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; serta (ix) peningkatan penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari transisi penerapan industri hijau.

Sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama pandemi COVID-19, diprakirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan pada kisaran 4,0–4,2 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan *Food Estate* (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor konstruksi diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,3–6,9 persen, didukung oleh pembangunan infrastruktur IKN pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,2–3,5 persen, seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non–migas dan operasionalisasi KI yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0–5,6 persen, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diprakirakan akan tumbuh sebesar 7,8-8,3 persen, didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 6,6–7,3 persen, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan wisman dan wisnus. Pembukaan pintu masuk wisatawan mancanegara di berbagai lokasi juga menjadi momentum bagi pembukaan destinasi pariwisata prioritas sejalan dengan perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara.

Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diprakirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal. Secara terperinci, produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditentukan oleh (i) perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara; (ii) peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat di dalam negeri dan mancanegara; (iii) pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersier seperti pariwisata dan produk kreatif; (iv) peningkatan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri, termasuk produk kreatif; (v) peningkatan investasi khususnya di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang telah didukung penyediaan infrastruktur yang memadai; (vi) peningkatan penyelenggaraan *event*, festival, MICE, serta produksi film dan musik; (vii) percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif; dan (viii) perkembangan *start-up* ekonomi kreatif dan digital yang dijalankan oleh generasi muda di berbagai wilayah.

Sektor perdagangan di dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong perkuatan ekosistem perdagangan dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perekonomian. Hal ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama, yakni (i) penguatan logistik nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok melalui integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (ii) pemanfaatan teknologi digital dan *e-commerce* melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan; serta (iii) peningkatan persaingan usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan iklim persaingan usaha yang sehat dan *redesain* program perlindungan konsumen yang lebih

SK No 137850 A

bersifat *multi channel.* Pemanfaatan teknologi digital diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas penjualan pelaku usaha perdagangan semata, namun adopsi teknologi informasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional secara keseluruhan. Selain itu, akan dilakukan penyiapan ekosistem dan mekanisme pengawasan pelaku usaha yang efektif guna menjamin perkembangan teknologi digital dapat tetap selaras dengan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (i) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik; (ii) pengembangan pola perjalanan yang mudah diakses; (iii) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; (iv) peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan dukungan investasi pariwisata, *event* dan MICE; (v) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan; (vi) percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif; (vii) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital; (viii) *upskilling* dan *reskilling* SDM pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up The World*"; serta (x) perluasan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

(c) Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2023, perekonomian global diprakirakan akan semakin kondusif seiring dengan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut akan mendorong akselerasi aktivitas perdagangan internasional yang lebih tinggi serta tingkat likuiditas global yang relatif lebih kondusif sejalan dengan selesainya fase *tapering off.* Sektor pariwisata akan semakin menggeliat didorong pelonggaran yang terus dilakukan termasuk berakhirnya penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh jumlah penduduk yang divaksinasi lengkap dua dosis telah mencapai target. Perkembangan berbagai proyek strategis juga akan memperkuat perkembangan daya saing nasional terutama dalam mendorong integrasi ekonomi domestik. Tingkat perdagangan dan investasi juga diprakirakan akan terus terakselerasi seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin meningkat serta kondisi pasar keuangan yang semakin berkembang dan fundamental ekonomi yang semakin kuat sehingga akan semakin banyak mengundang investor. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan yang terus didorong pemerintah akan semakin memantik perkembangan investasi yang lebih tinggi di Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendorong peningkatan ekspor barang dan jasa yang lebih bernilai tambah tinggi guna meningkatkan produktivitas perekonomian, dengan berfokus pada peningkatan ekspor produk manufaktur melalui Gerakan "Ayo Ekspor" dan peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (*Global Value Chain*/GVC). Peningkatan ekspor produk manufaktur dan jasa akan ditempuh melalui (i) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah; (ii) penguatan informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju *one-stop service export*; serta (iii) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan eksportir. Sementara, peningkatan partisipasi dalam GVC akan dilakukan melalui (i) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor; (ii) fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) produsen untuk berpartisipasi dalam GVC; serta (iii) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor. Kedua strategi utama tersebut akan didukung oleh (i) pemanfaatan teknologi digital dan *online channel* (*e-commerce*); (ii) diversifikasi pembiayaan ekspor; serta (iii) penguatan diplomasi perdagangan terutama hambatan nontarif.

SK No 113546 A

Tabel 2.12
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 (US$ Miliar)

Uraian	RPJMN[1)]	Sasaran[2)]
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	-	**7,3–8,5**
Neraca Transaksi Berjalan	**(30,0)**	**(6,2)–(8,4)**
(% PDB)	**(1,9)**	**(0,4)–(0,6)**
Barang	7,5	38,3-38,5
Jasa-jasa	(4,9)	(13,8)–(14,1)
Pendapatan Primer	(40,6)	(37,5)–(39,4)
Pendapatan Sekunder	8,0	6,6–6,8
Neraca Transaksi Modal dan Finansial	**38,0**	**14,8–18,1**
Investasi Langsung	27,4	19,1–21,6
Investasi Portofolio	20,0	8,3–9,9
Investasi Lainnya	(9,5)	(12,7)–(13,4)
Posisi Cadangan Devisa	**146,8**	**158,9–160,9**
- **Dalam bulan impor**	**6,8**	**7,4–7,5**

Sumber: 1) RPJMN Tahun 2020–2024; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

Indonesia diprakirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang terus menguat pada tahun 2023. Neraca secara keseluruhan diprakirakan mencapai US$7,3–8,5 miliar. Capaian tersebut akan ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang akan mengalami defisit yang terjaga sekitar US$6,2–8,4 miliar atau setara dengan 0,4–0,6 persen dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial akan mencapai kisaran US$14,8–18,1 miliar. Perkembangan tersebut kemudian akan mendorong cadangan devisa meningkat mencapai sekitar US$158,9–160,9 miliar yang cukup untuk membiayai 7,4–7,5 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.

(d) Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan *recovery* dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 11,2–12,2 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,3–10,0 persen dari PDB dan PNBP sebesar 1,9–2,2 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan sebagai berikut

(1) kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup (a) melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang

SK No 113547 A

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); (b) penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta (c) memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier effect* yang kuat bagi perekonomian. Selain itu, seiring dengan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai *leading sector* yang akan melaksanakan kebijakan yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap nilai tambah nasional, penerimaan pajak dalam APBN 2023 diharapkan juga dapat meningkat dengan cara (a) optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan, dan penegakan hukum; (b) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara khususnya perpajakan, agar menghindari kebijakan yang memberatkan rakyat; dan (c) upaya-upaya pencapaian target penerimaan pajak harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena penerimaan pajak akan menjadi tolok ukur pencapaian konsolidasi fiskal dengan defisit APBN dibawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

(2) kebijakan PNBP diarahkan pada optimalisasi PNBP yang mencakup (a) pemanfaatan SDA optimal melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan pemanfaatan SDA, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (b) optimalisasi dividen BUMN dengan mendorong perbaikan kinerja dan efisiensi serta penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*; (c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan Badan Layanan Umum (BLU) serta optimalisasi pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN); dan (d) penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan.

(ii) Belanja Negara

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 13,8–15,1 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 9,9–10,9 persen PDB dan TKD sebesar 4,0–4,2 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja *(spending better)* agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui

(1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui: (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) transformasi sistem kesehatan, dan (c) akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif;
(2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
(3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi;
(4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
(5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas;
(6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;
(7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;
(8) memperkuat keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan kebijakan di belanja pemerintah pusat;
(9) meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Selanjutnya belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN.

SK No 113548 A

(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan sebagai berikut

mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur;

(1) melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan *sustainable*;
(2) mengendalikan tingkat risiko utang pada level yang aman dan terkendali;
(3) mendukung pendalaman pasar (*financial deepening*);
(4) pemanfaatan SAL untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian;
(5) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi;
(6) mendorong inovasi pembiayaan (al. penguatan peran BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV), serta mendorong skema KPBU lebih masif); serta
(7) pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang semakin selektif dengan mempertimbangkan kapasitas operasional dan kinerja keuangan BUMN serta kesinambungan fiskal.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB)

Uraian	RPJMN[a)]	Sasaran[b)]
Pendapatan Negara dan Hibah	12,8–14,1	11,2-12,2
Penerimaan Perpajakan	10,5–11,7	9,3-10,0
PNBP	2,2–2,3	1,9-2,2
Belanja Negara	14,3–15,8	13,8-15,1
Belanja Pemerintah Pusat	9,4–10,7	9,9-10,9
TKD	4,9–5,1	4,0-4,2
Keseimbangan Primer	0,2–0,0	(0,5)-(0,6)
Surplus/Defisit	(1,6)–(1,7)	(2,6)-(2,9)
Rasio Utang	28,9–29,6	40,6-42,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

(e) Stabilitas Moneter

Sejalan dengan prakiraan pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2023, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Kebijakan 4K tersebut menekankan akselerasi perbaikan struktural melalui digitalisasi secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut mencakup upaya menjaga (i) kestabilan

SK No 113549 A

harga melalui pengelolaan permintaan; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada produksi dalam negeri, CPP, dan penguatan kelembagaan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan; serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi.

Selanjutnya, untuk mitigasi risiko peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berasal dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara *Advanced Economies* (AEs) pada tahun 2023, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil (terutama ekspor). Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat *triple intervention* di pasar valas; (ii) memperkuat strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas *stance* kebijakan moneter akomodatif; (iii) menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (iv) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional; (v) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter melalui akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025; (vi) pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah; (vii) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional; serta (viii) memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama *cross border payment connectivity*, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar.

Sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global dan pandemi COVID-19 sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

(f) Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam perspektif ke depan, sektor jasa keuangan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan, baik dari domestik maupun global. Normalisasi kebijakan moneter berbagai negara di dunia yang dimulai pada awal tahun 2022 berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran modal ke Indonesia. Untuk itu, percepatan pendalaman sektor keuangan (baik konvensional maupun syariah), tetap dilakukan di tengah risiko normalisasi likuiditas dunia. Pemulihan sektor jasa keuangan difokuskan pada (i) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (ii) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil (termasuk pada UMKM), (iii) penguatan regulasi sektor keuangan, (iv) perluasan basis investor ritel, (v) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (vi) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, serta (vii) peningkatan pembiayaan hijau dan berkelanjutan.

(g) Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan

(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran positif sasaran pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan ekonomi diprakirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2023 diprakirakan akan berada di kisaran 5,3–6,0 persen.

Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diprakirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6–5,3 persen, Jawa-Bali 6,0–6,7 persen, Nusa Tenggara 2,7–3,1 persen, Kalimantan 4,5–5,2 persen, Sulawesi 4,2–4,8 persen, Maluku 5,4–5,9 persen, dan Papua 3,4–3,8 persen.

SK No 113550 A

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,5–8,5 persen. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Pada tahun 2023, strategi penurunan tingkat kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diterjemahkan dalam arah kebijakan sejalan dengan Reformasi Perlindungan Sosial yang mencakup (1) perluasan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi untuk memperbaiki pengelolaan data sosial ekonomi penduduk; (2) penguatan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis bukti melalui Digitalisasi Monografi Desa untuk memperbaiki pengelolaan data penduduk, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program, dan menurunkan kemiskinan ekstrem; (3) modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif; (4) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, melalui (a) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (b) perluasan penyaluran bantuan sosial secara digital, (c) pelaksanaan transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik), (d) pengembangan graduasi terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh program bantuan sosial; (5) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan integrasi program di lapangan; (6) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (8) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan akses permodalan, keperantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

(iii) Rasio Gini

Target rasio gini tahun 2023 berada pada *range* 0,375–0,378. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka rasio gini demi mencapai target RPJMN mencakup (1) kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi; (2) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta (3) keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui (1) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang meliputi pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan

SK No 113551 A

akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan; (5) pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata; dan (7) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 72,29 (2021). Walaupun meningkat, IPM hanya naik sebesar 0,35 poin dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen pengeluaran perkapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2020 sebagai hasil dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 juga akan bergantung pada penanganan dan pengendalian COVID-19.

Pada tahun 2023, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,31–73,49, melalui

(1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat;

(2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan

(3) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas di seluruh sektor, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, dan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diproyeksikan akan meningkatkan emisi GRK sejalan dengan aktivitas industri dan mobilitas penduduk yang kembali normal. Aksi pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemulihan dan transformasi ekonomi. Hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak *green jobs*, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, seperti (1) mempercepat transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), (2) revitalisasi perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi laju deforestasi, serta (3) mendorong usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah untuk mengurangi emisi dari limbah padat. Secara bersamaan, berbagai aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi juga perlu ditingkatkan, utamanya pada sektor lahan (*landbased*), energi, industri, pengelolaan limbah, serta pesisir dan laut (*blue carbon*).

SK No 113552 A

Secara khusus, transisi energi menjadi salah satu isu prioritas dalam pencapaian ekonomi hijau dan rendah karbon. Transisi menuju penggunaan energi yang rendah karbon untuk peningkatan produktivitas EBT dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu (1) optimalisasi penambahan kapasitas terpasang PLT EBT, terutama di daerah dengan defisit listrik, melalui mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal; (2) peningkatan kualitas data potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (*de-risking*) pengembangan proyek EBT; serta (3) pemenuhan produksi *biofuel* sesuai kebutuhan domestik. Sementara itu, strategi yang mendukung inklusivitas dalam transisi energi rendah karbon, antara lain: (1) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT energi terbarukan (ET) *on-grid* yang sudah termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021–2030, serta pembangunan PLT ET *off-grid* untuk daerah 3T; (2) restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi EBT secara bertahap; dan (3) penguatan kewenangan pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil.

Pencapaian target pembangunan rendah karbon dalam pengurangan emisi juga didukung oleh implementasi ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menggunakan pendekatan sistem dalam kegiatan produksi hingga konsumsi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya dan timbulan limbah, mempertahankan daya guna material, dan bersifat regeneratif. Penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan masa guna produk dan mengurangi kebutuhan material baru serta pengurangan emisi khususnya yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya dan produksi material. Dalam kegiatan industri, penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada *resource efficiency* berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan air, dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Selain itu, penerapan ekonomi sirkular juga dapat meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan hijau baru (*green jobs*). Ke depannya, arah kebijakan ekonomi sirkular perlu difokuskan kepada (1) penurunan emisi GRK; (2) peningkatan produktivitas material; (3) peningkatan substitusi penggunaan material daur ulang terhadap *virgin material* untuk penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi; (4) peningkatan tingkat daur ulang material; dan (5) standardisasi produk sirkular.

Ekonomi hijau dan rendah karbon juga perlu didukung oleh penerapan investasi hijau untuk dapat mencapai target transisi dan transformasi ekonomi. Arah kebijakan investasi hijau diarahkan pada (1) strategi perbaikan regulasi investasi yang komprehensif, (2) strategi perbaikan skema pendanaan dan keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi hijau, (3) program inovasi pembiayaan pembangkit EBT *blended financing*, (4) penerapan program pengembangan instrumen keuangan berbasis pasar, (5) perbaikan skema insentif untuk mendorong investasi transportasi ramah lingkungan, dan (6) pengembangan pertanian berkelanjutan.

Melalui berbagai kebijakan-kebijakan tersebut di atas, diharapkan kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2023 dapat mencapai 27,02 persen terhadap *baseline*. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa persentase penurunan emisi GRK kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

(vi) Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada tahun 2023, NTP dijaga pada kisaran 105-107. Dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada nilai 105-107 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta penciptaan nilai tambah pertanian melalui (1) jaminan ketersediaan input pertanian; (2) modernisasi pertanian (pertanian presisi, pertanian digital); (3) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (4) *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); (5) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan; (6) pertanian regeneratif; (7) standardisasi proses dan produk pertanian; (8) transformasi sistem pangan; (9) percepatan transformasi platform *e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*; serta (10) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian serta regenerasi petani.

SK No 113553 A

(vii) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka pencapaian sasaran NTN tahun 2023 pada kisaran 107–108, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan melalui (1) peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan tangkap melalui bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; (2) peningkatan mutu produk perikanan tangkap melalui penguatan sistem rantai dingin dan logistik perikanan; (3) peningkatan kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan, perbaikan penanganan hasil tangkapan, manajemen usaha, dan peningkatan kompetensi/sertifikasi nelayan melalui pendampingan dan pelatihan; (4) penguatan korporasi nelayan dan penataan kampung nelayan; (5) perlindungan nelayan, termasuk bantuan premi asuransi nelayan dan fasilitasi sertifikasi tanah nelayan; dan (6) kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan nelayan.

(viii) Pemerataan Pembangunan

Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, dampak program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi program lumbung ikan nasional, serta kinerja *food estate*. Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan akan tetap tinggi, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KTI. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah KTI diprakirakan sebesar 6,2–6,9 persen, sementara di KBI pertumbuhan diprakirakan sebesar 5,1–5,6 persen.

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2023 diprakirakan mencapai 5,1–5,7 persen, didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil program hilirisasi, serta peningkatan sektor pariwisata yang didukung oleh beroperasinya KEK Mandalika, terminal *multipurpose* Labuan Bajo, serta pembangunan infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut, tingkat kemiskinan diprakirakan akan menurun hingga 13,8–14,8 persen dan tingkat pengangguran menurun hingga 2,7–3,1 persen.

Ekonomi Wilayah Kalimantan diprakirakan tumbuh 5,5–6,0 persen. Pertumbuhan wilayah ini didukung oleh keberlanjutan proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) Kalimantan Tengah, pengembangan kawasan industri hijau, proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing, dan pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning, serta proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara seiring dengan pemulihan ekonomi global diprakirakan juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diprakirakan dapat juga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan hingga di angka 4,3–5,1 persen. Keberlanjutan proyek di Wilayah Kalimantan diprakirakan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru di wilayah tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran 4,5–5,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 7,1–7,8 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 4,2–4,8 persen. Mulai beroperasinya KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, operasionalisasi smelter, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi serta produk turunannya, merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,3–8,8 persen.

SK No 113554 A

Implementasi program lumbung ikan nasional, peningkatan produksi feronikel, dan pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diprakirakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai sebesar 9,2–10,0 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar 10,6–11,4 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,4–5,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2023 diprakirakan akan mencapai 7,3–8,4 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas. Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Bandara Nabire Baru dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 22,0–23,6 persen. Penguatan perekonomian di Papua diprakirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada kisaran 3,4–3,8 persen.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, pertumbuhan tersebut tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga komoditas CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan proyek jalan Tol Trans Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan tumbuh sebesar 4,7–5,2 persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 8,2–8,6 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diprakirakan menurun menjadi 4,6–5,3 persen.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh 5,3–5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk dilanjutkannya proyek infrastruktur strategi yang mendorong peningkatan investasi, seperti operasionalisasi KI Terpadu Batang, pengembangan KEK Lido, KEK Gresik, dan KEK Singhasari. Peningkatan efisiensi sistem logistik mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia. Perekonomian di Bali diprakirakan akan mulai pulih perlahan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan relaksasi perjalanan internasional seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi 6,9–7,6 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diprakirakan akan mampu menurunkan TPT di Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 6,0–6,7 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

SK No 113555 A

Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2023

Wilayah	RPJMN[a)]	2023[b)]
Sumatera		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	4,7–5,2
Tingkat Kemiskinan (%)	7,76[c)]	8,2–8,6
Tingkat Pengangguran (%)	3,6	4,6–5,3
Jawa-Bali		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,3–5,8
Tingkat Kemiskinan (%)	6,50[c)]	6,9–7,6
Tingkat Pengangguran (%)	4,1	6,0–6,7
Nusa Tenggara		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	5,1–5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	12,75[c)]	13,8–14,8
Tingkat Pengangguran (%)	2,1	2,7–3,1
Kalimantan		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	5,5–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	3,72[c)]	4,3–5,1
Tingkat Pengangguran (%)	3,4	4,5–5,2
Sulawesi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,6	7,1–7,8
Tingkat Kemiskinan (%)	7,74[c)]	8,3–8,8
Tingkat Pengangguran (%)	3,5	4,2–4,8
Maluku		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,3	9,2–10,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,45[c)]	10,6–11,4
Tingkat Pengangguran (%)	4,6	5,4–5,9
Papua		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	7,3–8,4
Tingkat Kemiskinan (%)	18,67[c)]	22,0–23,6
Tingkat Pengangguran (%)	2,5	3,4–3,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020–2024, sementara tingkat pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020–2024; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2022; c) *Trajectory* RPJMN Tahun 2020-2024 di tahun 2023.

SK No 113556 A

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi adalah sebagai berikut.

Gambar 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2023

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dibutuhkan investasi Rp6.630,5–6.705,5 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 85,9-87,6 persen dipenuhi oleh dunia usaha swasta dan masyarakat. Sementara itu, investasi pemerintah dan BUMN diprakirakan akan berkontribusi masing-masing pada kisaran 5,8–6,3 dan 6,7–7,8 persen dari total investasi yang dibutuhkan.

Secara umum, tahun 2023 adalah tahun dimana BUMN mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020–2024, tahun 2023 direncanakan sebagai fase dimana BUMN diarahkan untuk mengembangkan kemampuan khusus BUMN dan pembangunan keuntungan komparatif dengan meningkatkan kemampuan daya saing melalui efisiensi, peningkatan mutu, inovasi dan perbaikan layanan pelanggan.

Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2023 (Persen)

Uraian	*Share* (Persen)	Nilai (triliun)
(1) Investasi Pemerintah	5,8–6,3	382,1–419,3
(2) Investasi BUMN	6,7–7,8	441,1–525,0
(3) Investasi Swasta	87,6–85,9	5.807,4–5.761,2
Total Kebutuhan Investasi		6.630,5–6.705,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113557 A

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2023, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 72,4–76,3persen dari total pembiayaan investasi.

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2023 (Persen)

Uraian	*Share* (Persen)
Kredit Perbankan	6,8–7,2
Penerbitan Saham	1,2–1,3
Penerbitan Obligasi	11,3–14,0
Dana Internal BUMN	4,4–5,2
Dana Internal Masyarakat	76,3–72,4

Sumber: Perhitungan sementara Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

2.2.4 Rencana Investasi Prioritas BUMN

2.2.4.1 Peran Penting Investasi BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan nasional. Peran penting BUMN dalam pembangunan juga tercantum dalam UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud dan tujuan pendirian BUMN antara lain adalah untuk (1) memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, serta (2) menyelenggarakan kebermanfaatan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*), posisi BUMN adalah sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara yang bersih, sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu bentuk dukungan BUMN adalah investasi BUMN (*capital expenditure/capex)*, yang mendukung dan selaras dengan PN dan *Major Projects* (MP).

Investasi BUMN diklasifikasikan sebagai Proyek Prioritas BUMN dalam RKP Tahun 2023 jika memenuhi kriteria untuk mendukung pencapaian sasaran nasional tahun 2023. Adapun kriteria dari Proyek Prioritas BUMN dalam RKP Tahun 2023 adalah:

(1) investasi (*capex*) BUMN sebagai aksi korporasi, yang selaras dengan PN dan *Major Projects* tahun 2023;
(2) investasi (*capex*) BUMN sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung *Major Projects*. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh peraturan presiden, penugasan dari K/L, ataupun sebagai hasil kesepakatan; dan
(3) investasi melalui PMN sebagai penugasan dari pemerintah kepada BUMN.

Seiring dengan Proyek Prioritas BUMN yang merupakan proyek untuk mendukung PN, pemerintah akan berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan proyek tersebut, yang antara lain pengawalan dalam siklus *end-to-end* proyek yang dimulai dari inisiasi-perencanaan-*groundbreaking*-konstruksi-operasi-*project closure, monitoring, de-bottlenecking,* dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan dukungan, antara lain.

SK No 113558 A

(1) memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan Proyek Prioritas BUMN, seperti dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
(2) dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: *joint financing*, *Viability Gap Fund* (VGF), dan *Availability Payment* (AP); dan
(3) pengusulan PMN, jika ada keterbatasan permodalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Prioritas BUMN ini dituangkan dalam dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2023 yang menjadi dokumen pelengkap dari RKP Tahun 2023.

2.2.4.2 Proyek Prioritas Investasi BUMN

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam mendorong transformasi ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi salah satunya didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Dalam hal ini, pada tahun 2023 investasi BUMN diproyeksikan berkontribusi sebesar Rp325,3 triliun. Untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, dengan keberlanjutan proyek prioritas BUMN maupun dengan adanya proyek prioritas BUMN baru, dan juga didorong oleh kebijakan strategis baik dari sisi pemerintah maupun BUMN, diharapkan investasi BUMN diproyeksikan dapat berkontribusi lebih tinggi sebesar Rp441,0-Rp525,0 triliun.

Saat ini, terdapat 82 Proyek Prioritas BUMN yang mendukung *Major Project* pada RKP Tahun 2023 berasal dari kelanjutan proyek pada RKP Tahun 2022 dan penambahan usulan proyek dari BUMN dan Kementerian BUMN terkait, dengan jumlah BUMN yang terlibat sebanyak 40 BUMN dan total nilai investasi sebesar Rp263,71 triliun. Proyek Prioritas BUMN juga mendukung pencapaian 10 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yaitu Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; Penanganan Perubahan Iklim; Ekosistem Daratan; serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 2.25
Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.

Keterangan: a) Terdapat 10 proyek dengan nilai investasi yang belum teridentifikasi.

Catatan: Data bersifat sementara per tanggal 23 Juni 2022.

SK No 113559 A

Gambar 2.26
Kontribusi BUMN dalam Prioritas Nasional

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: Data bersifat sementara per tanggal 23 Juni 2022

Proyek Prioritas BUMN akan dilaksanakan secara merata di seluruh pulau di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 6 Proyek Prioritas BUMN yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Di Pulau Jawa, terdapat 29 Proyek Prioritas BUMN, serta 19 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan pada tahun 2023. Selanjutnya, terdapat 4 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Sulawesi dan Maluku, 2 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan 2 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Papua. Selain itu, terdapat 20 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah di Indonesia pada tahun 2023.

Gambar 2.27
Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Seluruh Indonesia

Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: Data bersifat sementara per tanggal 23 Juni 2022

SK No 113560 A

Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu, terdapat 26 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp35,52 triliun yang mendukung terlaksananya sasaran dan indikator pembangunan pada PN 1.

Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Terdapat 15 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp3,53 triliun yang mendukung *Major Project* pada PN 2.

Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 3 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp2,10 triliun yang mendukung *Major Project* pada PN 3.

Prioritas Nasional 4 fokus pada pengembangan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, terdapat 1 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp1,56 triliun yang mendukung PN 4.

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 37 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp220,99 triliun yang mendukung *Major Project* pada PN 5.

Tabel 2.17
Daftar Jumlah Proyek Investasi BUMN dalam *Major Project*

PN	No.	*Major Project*	Jumlah Proyek Investasi BUMN
PN 1	1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	2 proyek
	2	Destinasi Pariwisata Prioritas	4 proyek
	3	Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas	9 proyek
	4	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	6 proyek
	5	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	5 proyek
PN 2	6	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	14 proyek
	7	Pembangunan Wilayah Batam–Bintan	1 proyek

SK No 113561 A

PN	No.	*Major Project*	Jumlah Proyek Investasi BUMN
PN 3	8	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	3 proyek
PN 4	9	-*	1 proyek
PN 5	10	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	3 proyek
	11	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1 proyek
	12	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung	1 proyek
	13	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	4 proyek
	14	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta–Semarang dan Jakarta–Bandung)	1 proyek
	15	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	6 proyek
	16	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	13 proyek
	17	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	4 proyek
	18	Transformasi Digital	2 proyek
	19	Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	2 proyek
		Total	**82 proyek**

Keterangan: *) Proyek yang tercantum pada Prioritas Nasional 4 merupakan proyek Rumah Indonesia di Mekkah dan tidak termasuk ke dalam *Major Project* tertentu

Catatan: Data sementara per tanggal 23 Juni 2022

2.2.5 Rencana Investasi Prioritas Swasta

(1) Perkembangan Terkini Investasi Swasta di Indonesia

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi investasi dalam bentuk PMTB terhadap PDB rata-rata mencapai 32,4 persen. Pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 pun salah satunya didorong oleh investasi. Pertumbuhan PMTB terus menunjukkan tren yang positif sejak triwulan II-2021 didorong oleh tingkat kepercayaan investor yang membaik. Hingga pada akhir tahun 2021, pertumbuhan PMTB mampu mencapai 3,8 persen dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kedua terbesar setelah ekspor, walaupun secara nilai masih belum kembali ke level sebelum pandemi pada tahun 2019.

SK No 113562 A

Gambar 2.28
Perkembangan PMTB per Sub Komponen Tahun 2017-2021

Sumber: BPS, 2022.

Berdasarkan pelaku investasi dalam perekonomian, data *breakdown* PMTB tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar investasi dilakukan oleh swasta (baik sektor non-finansial maupun sektor finansial) yakni sebesar 67,0 persen dan investasi rumah tangga sebesar 15,8 persen. Sementara itu, peranan investasi pemerintah dan BUMN terhadap total investasi PMTB hanya pada kisaran 8,6 persen dan 7,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta sangat penting dalam membangun perekonomian yang kokoh.

Sama halnya dengan PMTB, realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di tahun 2021, nilai realisasi PMA dan PMDN tercatat sebesar Rp901,02 triliun, atau naik 9,04 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp826,32 triliun. Bahkan, angka realisasi PMA dan PMDN di tahun 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi di tahun 2019.

Gambar 2.29
Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber: Data statistik NSWI, Februari 2022.

SK No 113563 A

Dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di sektor sekunder (industri pengolahan) menunjukkan kenaikan cukup tinggi di tahun 2021, yakni mencapai 19 persen. Hal ini mengindikasikan kualitas investasi yang semakin baik, karena diharapkan mampu memberikan *spillover* lebih besar bagi perekonomian. Secara lebih khusus, investasi terbesar di sektor sekunder pada tahun 2021 adalah pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (Rp117,48 triliun atau tumbuh 23,90 persen); sektor industri makanan (Rp60,64 triliun atau tumbuh 19,38 persen); dan sektor industri kimia dan farmasi (Rp47,54 triliun atau terkontraksi 0,15 persen).

Gambar 2.30
Top 5 Sektor Industri dengan Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2021

Sumber: Data statistik NSWI, Februari 2022.

Tingginya realisasi investasi di tahun 2021 turut memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2021, investasi swasta di Indonesia berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan, yang terdiri dari 626.663 lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMA dan 581.230 lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMDN. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN di tahun 2021 lebih tinggi 4,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,15 juta lapangan pekerjaan.

Gambar 2.31
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (PMA dan PMDN) 2021

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022.

SK No 113564 A

Dari aspek spasial, mayoritas proyek investasi PMA dan PMDN masih berada di pulau Jawa, yaitu 82.802 proyek dari total 133.271 proyek investasi di tahun 2021, dengan total nilai investasi mencapai Rp432,76 triliun. Selanjutnya, disusul oleh pulau Sumatera dengan 23.582 proyek bernilai investasi Rp183,30 triliun, lalu Sulawesi dan Maluku dengan 6.979 proyek bernilai investasi Rp142,76 triliun. Wilayah dengan realisasi investasi terendah pada tahun 2021 adalah Papua dengan 923 proyek bernilai investasi Rp23,76 triliun.

Gambar 2.32
Sebaran Spasial Investasi PMA dan PMDN Tahun 2021

Sumber: Data statistik NSWI, Februari 2022.

Meskipun nilai realisasi investasi di Papua merupakan yang terendah, pertumbuhan realisasi investasinya mencapai yang tertinggi di tahun 2021 yakni sebesar 83,14 persen. Pertumbuhan realisasi investasi tertinggi selanjutnya adalah Sulawesi dan Maluku (29,59 persen) dan Kalimantan (24,84 persen). Sedangkan, wilayah dengan laju pertumbuhan nilai investasi terendah adalah Sumatera yang mengalami kontraksi nilai realisasi investasi sebesar 7,69 persen, lalu disusul oleh Jawa dengan pertumbuhan nilai realisasi yang hanya mencapai 5,89 persen.

(2) Potensi Investasi Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pada triwulan I-2022, realisasi PMA dan PMDN mencapai Rp284,4 triliun, atau tumbuh 28,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila dirinci lebih jauh, realisasi PMA menjadi sumber pertumbuhan investasi pada triwulan I-2022, yakni mencapai Rp147,2 triliun atau tumbuh 31,8 persen (*yoy*). Hal ini mengindikasikan kepercayaan investor luar negeri terhadap iklim investasi dan usaha di Indonesia yang semakin baik di periode pemulihan ekonomi nasional. Sebaran investasi secara spasial pun menunjukkan bahwa investasi di luar Jawa mencapai 52,7 persen dari total investasi Indonesia, sehingga diharapkan sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan wilayah.

SK No 113565 A

Kinerja investasi yang sedemikian baik ini diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun 2022, dan berlanjut pada tahun 2023. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3–5,9 persen pada tahun 2023, pertumbuhan investasi (PMTB) diharapkan mencapai 6,1–6,7 persen dan kebutuhan investasi swasta/masyarakat diprakirakan mencapai Rp5.761,2–Rp5.807,4 triliun, atau 85,9–87,6 persen dari total kebutuhan investasi. Investasi swasta tahun 2023 utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusifitas, seperti investasi pada sektor industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor dan atau mengubah kompleksitas ekspor nasional, investasi pada sektor digital dan berbasis teknologi, serta investasi yang memberikan dampak *multiplier* bagi perekonomian.

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2022, pengembangan wilayah pada tahun 2023 ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan konsumen ke arah gaya hidup sehat dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wilayah juga bertujuan untuk memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, dan meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian masing-masing wilayah. Dalam perspektif kesinambungan transformasi sosial ekonomi nasional, pengembangan wilayah diarahkan untuk semakin memperkuat integrasi perekonomian domestik dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan secara terpadu yang ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat konektivitas dan perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong realisasi investasi, khususnya di kawasan-kawasan strategis, melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Salah satu syarat agar sistem perizinan investasi OSS berjalan dengan efisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam format digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.

SK No 113566 A

Kawasan Strategis yang Menjadi Fokus Pengembangan

Upaya peningkatan daya tarik dan daya saing kawasan-kawasan strategis tersebut dilakukan dengan memadukan penyediaan paket insentif fiskal bagi pelaku usaha, penuntasan tata ruang dan penyediaan lahan/tanah, percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan, dan berbagai inisiatif badan usaha, termasuk badan usaha swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan (WM), kota besar, kota sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Nusantara, maupun kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-kota penyangganya, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan layanan infrastruktur.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2023, pemerataan pembangunan antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan dilakukan dengan memadukan kebijakan afirmatif pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya di kawasan dan daerah yang relatif Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Fokus pemerataan pembangunan wilayah pada tahun 2023 adalah percepatan penyediaan pelayanan dasar di daerah 3T, khususnya di pulau-

SK No 113567 A

pulau kecil terluar dan terdepan, dan di kawasan rawan bencana, serta kebijakan afirmatif peningkatan konektivitas daerah 3T dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat.

Selanjutnya, upaya pencapaian tujuan-tujuan pengembangan wilayah di atas perlu antisipasi tantangan dan risiko yang bersifat eksternal maupun domestik (nasional dan lokal). Isu-isu eksternal yang sudah diidentifikasi di subbab Tantangan dan Risiko Perekonomian berupa risiko berkepanjangannya pandemi COVID-19 dan efek luka yang ditimbulkannya pada perekonomian, instabilitas politik di Eropa (Rusia-Ukraina), kenaikan harga energi di pasar global, dan transisi kebijakan energi di Cina pada tingkat lokal. Selain itu, diperkirakan terdapat tantangan dan risiko peningkatan kesenjangan digital antarwilayah, ketidaksesuaian antara sisi penawaran *skill* angkatan kerja dan kebutuhan baru dunia usaha dalam pasar kerja pascapandemi, ketidaksiapan pelaku UMKM mengadopsi standar baru kesehatan, instabilitas harga kebutuhan pokok, belum pulihnya daya beli masyarakat, *backlog* pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, serta ketidaksiapan daerah mengantisipasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan wilayah pada Tabel 2.8 (Pembangunan Wilayah Tahun 2021 dan 2022), tantangan dan risiko domestik serta eksternal, dan sasaran pembangunan wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.14, secara khusus strategi pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah pulau atau kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan, dan mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan wilayah di sini terutama didasarkan pada tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha, kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi di daerah. Sedangkan penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan besaran risiko bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi, dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit (pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memperkuat peran Sumatera sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) memacu pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan, dan sektor pariwisata pascapandemi COVID-19 melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional; (3) mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T; dan (4) mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada hilirisasi komoditas-komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, tebu, serta perikanan tangkap dan budi daya. Selama ini sebagian besar komoditas-komoditas tersebut diekspor ke luar wilayah dalam bentuk bahan mentah sehingga potensi nilai tambah yang cukup besar dari proses pengolahan menjadi produk turunan tidak dapat diperoleh. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera sebagai berikut

(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI dan KEK secara penuh melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal terutama bagi KPBPB Sabang, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang, KI Bintan *Aerospace*, KI Sadai, KI Tenayan, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Nongsa, dan KEK Batam *Aero Technic*;

SK No 113568 A

(2) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, serta DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata terpadu;
(3) memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis;
(4) merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakyat;
(5) meningkatkan kapasitas, jangkauan, distribusi pelayanan dasar, dan sistem transportasi serta kelayakhunian kota-kota termasuk WM Medan, WM Palembang, dan kota-kota lainnya;
(6) meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam upaya peningkatan daya saing wilayah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT);
(7) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
(8) meningkatkan kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
(10) mengembangkan komoditas unggulan wilayah dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Sumatera sebagai berikut

(1) memastikan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi) dan layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);
(2) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial, serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil;
(3) mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar melalui peningkatan SPM dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan konektivitas (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat;
(4) mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur;
(5) memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis ekosistem pariwisata;
(6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(7) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat–daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
(8) mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh berbasis kinerja dan mempersiapkan *exit strategy* yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan provinsi dan perbaikan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

SK No 113569 A

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Sumatera sebagai berikut

(1) memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya gempa dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, serta kebakaran lahan dan hutan;
(2) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
(3) meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah;
(4) meningkatkan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap bencana;
(5) memperkuat kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2023 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.18. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.18
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023									
	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	4,0–4,5	5,4–5,9	5,2–5,7	3,1–3,7	4,5–5,1	5,5–6,1	5,1–5,6	4,9–5,3	5,2–5,4	5,1–5,6
Tingkat Kemiskinan[b)]	13,71–14,00	7,25–7,50	4,65–6,00	6,00–6,00	6,25–6,50	10,85–11,00	12,95–13,50	9,68–10,20	3,48–3,50	4,35–5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	5,07–6,01	5,42–6,07	5,43–6,18	3,90–4,28	3,90–4,65	4,04–4,80	3,01–3,48	3,71–4,47	3,85–4,51	8,03–8,75

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) memantapkan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk yang berorientasi ekspor; (2) mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah ke arah Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif; (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; serta (4) meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan mitigasi bencana. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Jawa-Bali sebagai berikut

(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya KI Terpadu Batang, KI Pancapuri, KI Subang, KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, serta KEK Gresik melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal yang disesuaikan dengan potensi/tema pengembangan kawasan;

SK No 113570 A

(2) mempercepat pengembangan kawasan-kawasan pariwisata unggulan berdasarkan keuntungan kompetitifnya yang meliputi DPP Borobudur dan sekitarnya, DPP Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi, serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali;
(3) meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan kawasan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, perbaikan kesesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi sesuai kebutuhan lapangan kerja, dan pengembangan BLK;
(4) meningkatkan kelayakhunian dan peran WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar dan beberapa kota lainnya sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan ekonomi kreatif;
(5) meningkatkan konektivitas kawasan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan distribusi melalui penyediaan sarana konektivitas inter dan intrawilayah, penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan, serta pengembangan sistem transportasi multimoda;
(6) meningkatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah, perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah melalui forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali;
(7) meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan, dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
(8) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
(9) meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, pengamanan lahan pertanian budi daya, dan pemantapan rantai nilai di wilayah Jawa-Bali.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Jawa-Bali sebagai berikut

(1) meningkatkan hubungan desa-kota di Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
(2) mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan, dan Bali bagian utara dengan Bali bagian selatan sebagai akselerator pemerataan ekonomi;
(3) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di daerah, khususnya pada bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum;
(4) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Jawa–Bali serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(5) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat–daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
(6) meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi) serta layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);
(7) mengoptimalkan pelaksanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis kinerja melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat istiadat berdasarkan *Grand Design* Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022–2042;
(8) meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Jawa-Bali sebagai berikut

SK No 113571 A

(1) pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;
(2) penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;
(3) peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini kebencanaan, dan pengembangan data kebencanaan;
(4) pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa disertai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bencana;
(5) revitalisasi mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 adalah (1) pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.19. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	5,3–5,7	5,1–5,7	5,2–5,7	5,7–6,2	5,3–5,9	5,3–5,8	4,8–5,4
Tingkat Kemiskinan[b)]	3,00–3,50	5,64–6,25	9,35–10,00	10,51–11,00	8,65–9,50	3,95–5,00	1,90–2,00
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	6,96–8,06	8,47–9,19	4,73–5,48	3,23–3,99	4,20–4,95	8,13–8,85	1,96–2,63

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata, dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) mendorong transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); (3) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan, dan pertambangan; dan (4) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

(1) menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;

SK No 113572 A

(2) meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan *hub* pariwisata internasional utama Bali;
(3) meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk *food estate* serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;
(4) mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;
(5) mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk penyiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
(6) mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan;
(7) meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
(8) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
(9) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
(10) mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
(11) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

(1) mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;
(2) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua dan PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
(3) menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
(4) meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;
(5) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial dan pekerjaan umum;
(6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(7) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat–daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Nusa Tenggara, sebagai berikut

(1) penguatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal;
(2) pemutakhiran data kebencanaan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini bencana;
(3) penguatan kerja sama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana;
(4) pengembangan sinergi multipihak dalam pembiayaan penanggulangan bencana. Adapun penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada wilayah berisiko tinggi bencana, kawasan-kawasan strategis pariwisata, dan daerah-daerah relatif padat penduduk.

SK No 113573 A

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.20. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel 2.20
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	4,9–5,5	5,4–5,9
Tingkat Kemiskinan[b)]	11,85–13,00	15,56–16,50
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	2,54–2,90	2,92–3,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) menjaga perannya sebagai paru-paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional; (2) mengurangi kesenjangan antarwilayah yang difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wilayah perbatasan; (3) mendorong diversifikasi ekonomi wilayah dan hilirisasi industri yang bertumpu pada komoditas-komoditas utama seperti batu bara, migas, bauksit, pasir zirkon, pasir kuarsa, bijih besi, karet, kelapa sawit, dan perikanan; dan (4) mengembangkan pusat pertumbuhan baru berbasis sistem tiga kota Ibu Kota Nusantara-Samarinda-Balikpapan. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan sebagai berikut

(1) membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya;
(2) meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KI Surya Borneo, KI Ketapang, KI Tanah Kuning, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang;
(3) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao dan perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya;
(4) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin, sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;
(5) mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dengan didukung korporasi petani;
(6) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan;
(7) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
(8) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

SK No 113574 A

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Kalimantan sebagai berikut

(1) memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan jalan Trans Kalimantan;
(2) mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal;
(3) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas;
(5) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(6) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat–daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
(7) meningkatkan akses masyarakat, khususnya di daerah 3T, terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja;
(8) meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan dinilai relatif aman dari ancaman bencana gempa, namun, memiliki risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau disebabkan oleh tingginya kandungan gambut, praktik membuka lahan baru dengan cara pembakaran, dan kondisi cuaca. Sedangkan pada musim hujan, kota-kota besar di Wilayah Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh ekosistem gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan permukiman yang sangat cepat sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan air, sempadan sungai, dan buruknya sistem drainase perkotaan. Untuk itu, strategi penguatan ketahanan bencana Kalimantan adalah

(1) penguatan kerja sama multipihak khususnya dengan perusahaan perkebunan dalam pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
(2) peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana;
(3) revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam tanggap bencana;
(4) peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di perkotaan, dalam rangka pencegahan banjir;
(5) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan;
(6) mendorong kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

SK No 113575 A

Tabel 2.21
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023				
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	5,6–6,1	5,9–6,3	4,8–5,2	5,5–6,0	5,8–6,4
Tingkat Kemiskinan[b)]	5,25–6,00	3,85–4,50	3,44–4,00	4,11–5,30	4,31–6,00
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	4,42–5,17	3,67–4,33	3,99–4,75	5,89–6,63	4,13–4,41

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk (1) memantapkan peran sebagai *hub* kawasan timur untuk jalur perdagangan internasional, (2) meningkatkan peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional, (3) meningkatkan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kesinambungan pertumbuhan wilayah melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata, (4) mendorong pemerataan pembangunan, dan (5) memperkuat mitigasi bencana khususnya di daerah yang memiliki kerawanan bencana alam tinggi. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan seperti kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, dan kelapa sawit untuk sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sulawesi, sebagai berikut

(1) memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui percepatan realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan meliputi KEK/KI Palu, KEK Bitung, KI Takalar, serta DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar;
(2) meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado;
(3) mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya;
(4) memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah;
(5) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
(6) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

SK No 113576 A

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Sulawesi, sebagai berikut

(1) memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, melalui percepatan penerapan SPM khususnya di bidang perumahan rakyat, air minum dan sanitasi, sosial, dan trantibumlinmas. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan *input* industrialisasi Wilayah Sulawesi, yaitu pendidikan menengah, pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan;
(2) meningkatkan pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal;
(3) mempercepat penyambungan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi;
(4) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sulawesi serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(5) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
(6) menguatkan upaya pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Sulawesi, sebagai berikut

(1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi;
(2) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
(3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemutakhiran data kebencanaan;
(4) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, dan (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran utama pembangunan Wilayah Sulawesi ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.22
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	5,3–6,0	9,9–10,9	6,7–7,3	6,5-7,3	6,3–6,9	5,5–6,2
Tingkat Kemiskinan[b)]	5,83–6,50	8,85–9,50	7,75–8,00	9,15–10,00	12,87–14,00	9,51-10,00
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	6,27–6,92	2,98–3,36	4,95–5,50	3,16–3,73	2,80–2,96	2,52–3,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2022 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

SK No 113577 A

2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk (1) mempercepat transformasi ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan wilayah yaitu perikanan, pertambangan, dan perkebunan; (2) memantapkan peran Wilayah Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN); (3) mempercepat pengembangan sektor pariwisata berbasis gugus pulau; dan (4) memperkuat konektivitas antarpulau dan intrapulau untuk mendukung transformasi ekonomi. Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Maluku sebagai berikut

(1) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda dan industri pengolahan potensial lainnya;
(2) mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
(3) meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui optimalisasi SKPT Moa, SKPT Saumlaki, SKPT Morotai dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di KTI;
(4) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan kelapa, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas;
(5) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya DPP/KEK Morotai sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun, dan pengembangan kawasan pariwisata potensial lainnya;
(6) mempercepat pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah;
(7) mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya dalam menghubungkan pusat pertumbuhan wilayah;
(8) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Maluku;
(9) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
(10) mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, strategi pemerataan intrawilayah Maluku sebagai berikut

(1) mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan meningkatkan peran kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal;
(2) memperkuat konektivitas antarpulau dan intrapulau khususnya dengan meningkatkan prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau dan jalan lingkar pulau;
(3) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan;
(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas;
(5) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Maluku serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(6) mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

SK No 113578 A

Selanjutnya, untuk strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Maluku sebagai berikut

(1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor;
(2) perbaikan sistem logistik/distribusi dan pengendalian harga pada komoditas strategis untuk mengantisipasi terganggunya pelayaran antarpulau akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang tinggi;
(3) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
(4) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan;
(5) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Maluku tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran utama pembangunan Wilayah Maluku ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.23
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023	
	Maluku	Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	5,3–5,9	12,6–13,7
Tingkat Kemiskinan[b)]	14,78–15,50	4,64–5,70
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	6,23–6,78	4,23–4,60

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada (1) mempercepat pembangunan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay melalui penyediaan pelayanan dasar serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua; (2) memfasilitasi transformasi ekonomi wilayah khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan pertanian; (3) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua; (4) memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah melalui pendekatan berbasis wilayah adat; (5) mengoptimalkan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat untuk memfasilitasi aktivitas sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan barang; serta (6) memperkuat peran distrik sebagai pusat data informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah. Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua sebagai berikut

(1) melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti KEK Sorong dan KI

SK No 113579 A

Teluk Bintuni, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;

(2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong dan kota sedang Jayapura yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman;

(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di Ibu Kota Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran Provinsi Papua;

(4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan seperti sagu, kopi, kakao, pala, kenaf, sapi, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dalam rangka penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa, serta pengembangan sentra produksi pangan (*food estate*) di Merauke;

(5) mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dan pariwisata bahari;

(6) mempercepat pengembangan kapasitas dan keterampilan hidup pemuda Papua untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*), serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda asli Papua;

(7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Papua;

(8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon;

(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, untuk strategi pemerataan intrawilayah Papua sebagai berikut

(1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, dalam rangka menuju Papua Sehat melalui percepatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat, akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan; serta pemenuhan tenaga kesehatan secara merata di wilayah Papua;

(2) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, dalam rangka menuju Papua Cerdas melalui percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik secara merata di Wilayah Papua;

(3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, dalam rangka menuju Papua Produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata; serta pengembangan pemerataan kawasan ekonomi;

(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas terutama di lokasi afirmatif seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, serta terus melakukan kebijakan pengembangan sekolah terpadu berpola asrama, *flying healthcare,* dan *telemedicine* untuk menjangkau pelayanan penduduk di daerah pegunungan dan terpencil;

(5) mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan perbatasan termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik;

SK No 113580 A

(6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan kampung (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Papua serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
(7) mengoptimalkan, fungsi dan peran GWPP, dalam memperkuat sinergi pusat–daerah, peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
(8) mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua melalui koordinasi penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024;
(9) mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan keamanan dan ketertiban.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Papua sebagai berikut

(1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi dengan risiko gempa bumi, tanah longsor, dan banjir;
(2) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
(3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan;
(4) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2023, sasaran utama pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada (1) terakselerasinya laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Papua tertuang dalam Tabel 2.24. Sasaran utama pembangunan Wilayah Papua ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 2.24
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2023	
	Papua Barat	Papua
Pertumbuhan Ekonomi[a)]	5,4–5,8	8,1–9,3
Tingkat Kemiskinan[b)]	17,05–19,00	23,45–25,00
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]	5,14–5,60	2,93–3,31

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

SK No 113581 A

2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif dengan menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan investasi publik dengan dampak langsung serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

2.4.1 Prioritas Pendanaan

Pandemi COVID-19 masih membayangi pembangunan nasional, namun dengan kondisi yang mulai mereda. Oleh karena itu, pada tahun 2023 pemerintah akan fokus mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah, dengan fokus pada kegiatan (1) mendorong produktivitas perekonomian pada beberapa sektor dengan nilai tambah tinggi, (2) menjaga daya beli masyarakat, dan (3) revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, terdapat beberapa agenda pembangunan lain yang akan menjadi fokus pemerintah pada tahun 2023 di antaranya pembangunan Ibu Kota Nusantara, persiapan pemilu 2024, serta berbagai agenda pembangunan prioritas lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia. Efisiensi dilakukan dengan penundaan kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan di antaranya melalui pinjaman, hibah, dan penerbitan SBN.

Dalam pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan *refocusing* TKD dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana COVID-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni pemulihan ekonomi dan transformasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (*last resort*). Adanya *refocusing*, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema pendanaan inovatif.

2.4.2 Sumber Pendanaan Pembangunan

2.4.2.1 Sumber Pendanaan dalam APBN

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti penerbitan SBN, pinjaman, dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral, (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank), dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha. Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan PNBP akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar serta pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi.

SK No 113582 A

Dengan adanya konsolidasi fiskal berdasarkan amanat UU No. 2/2020 bahwa mulai tahun anggaran 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Untuk itu, perlu dilakukan penajaman pemanfaatan pembiayaan baik melalui penerbitan SBN maupun pinjaman dengan fokus pada PN yang pencapaian targetnya didukung oleh MP, serta beberapa fokus lainnya seperti penanganan pandemi COVID-19, persiapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan percepatan pemulihan ekonomi dengan karakteristik kegiatan yang memiliki nilai tambah dan daya ungkit (*leveraging*) yang tinggi serta dimanfaatkan dengan prinsip efisien dan efektif.

Pemanfaatan pembiayaan melalui penerbitan SBN akan difokuskan pada kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas, baik PN yang pencapaian targetnya didukung oleh MP serta beberapa fokus lainnya seperti penanganan pandemi COVID-19, persiapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan percepatan pemulihan ekonomi. Adapun penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek, sebagai bagian dari SBN, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai *underlying*.

Penerbitan SBSN dapat digunakan untuk membiayai secara langsung PN melalui pelaksanaan kegiatan MP. Salah satunya yaitu untuk pembiayaan proyek yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum, seperti sektor pendidikan dan agama, pertanian dan perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya (*blended finance*). Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, pinjaman luar negeri juga digunakan untuk melanjutkan kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan; ketahanan air dan pangan; ketahanan energi; manajemen risiko bencana; mendukung kegiatan riset, inovasi, dan pengembangan teknologi; serta meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pinjaman luar negeri juga dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas lainnya secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan. Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1) peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, (2) menaikkan profil/kredibilitas proyek, (3) *capacity building*, dan (4) *derisking* proyek.

2.4.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Kebijakan TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam melaksanakan pembangunan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut

(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;

SK No 113583 A

(2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;
(3) memperkuat penggunaan TKD untuk mendukung sektor-sektor prioritas (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur);
(4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat;
(5) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui (a) pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/atau KPBU); (b) melakukan *integrated funding* (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan (c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan;
(6) mengalihkan alokasi program, kegiatan, dan anggaran kementerian yang telah menjadi urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kepada pemerintah daerah secara bertahap.

Pemanfaatan TKD juga didorong untuk pemerataan layanan khususnya pemenuhan SPM, perbaikan infrastruktur publik, dan pencapaian prioritas nasional.

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Arah kebijakan DBH TA 2023 adalah

(a) meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan;
(b) memperkuat kemampuan pemda dalam penanganan dampak lingkungan melalui pengalokasian DBH untuk daerah terdampak eksternalitas;
(c) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah;
(d) pengalokasian DBH berdasarkan data realisasi tahun 2022 (T-1), berupa data realisasi s.d. semester I/2022 yang disesuaikan hingga akhir tahun 2022;
(e) pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi;
(f) penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit untuk dukungan infrastruktur di daerah dan industri sawit;
(g) mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk mendukung sektor-sektor prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
(h) memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH sehingga pemerintah daerah dapat memahami penghitungan DBH;
(i) mempertimbangkan agar alokasi DBH perkebunan sawit bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Arah kebijakan DAU TA 2023 adalah sebagai berikut

(a) penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);

SK No 113584 A

(b) peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(c) meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*);
(d) meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD di antaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran;
(e) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi pelayanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus terdiri atas DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Kebijakan Alokasi DAK ditujukan untuk

(a) pencapaian Prioritas Nasional (PN);
(b) percepatan pembangunan daerah;
(c) mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
(d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
(e) mendukung operasionalisasi pelayanan publik.

DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Arah kebijakan DAK Fisik TA 2023, adalah

(a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:
    (i) pencapaian Prioritas Nasional (PN);
    (ii) percepatan pembangunan daerah;
    (iii) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; dan
    (iv) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(b) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal;
(c) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;
(d) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan;
(e) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya;
(f) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya;
(g) memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan anggota DPR RI untuk program DAK Fisik dengan mempertimbangkan poin a hingga f sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SK No 113585 A

Bidang DAK Fisik TA 2023 adalah

(a) DAK mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari bidang antara lain
   (i) bidang pendidikan;
   (ii) bidang kesehatan (termasuk KB);
   (iii) bidang air minum;
   (iv) bidang sanitasi.

(b) DAK mendukung konektivitas daerah, yaitu bidang jalan;
(c) DAK mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu
   (i) tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari bidang (1) pariwisata, (2) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (4) perdagangan, (5) lingkungan hidup, dan (6) jalan;
   (ii) tematik penanganan kawasan kumuh, terdiri dari bidang (1) air minum, (2) sanitasi, dan (3) perumahan dan permukiman;
   (iii) tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, terdiri dari bidang (1) transportasi perdesaan, (2) transportasi perairan, (3) jalan, dan (4) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET).

(d) DAK mendukung ketahanan pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu
   (i) tematik pengembangan *food estate*, terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) jalan, dan (4) kehutanan;
   (ii) tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) terdiri dari bidang (1) pertanian, (2) irigasi, (3) kelautan dan perikanan, dan 4) jalan.

Daftar menu kegiatan dan daerah lokasi prioritas DAK Fisik TA 2023 tertuang pada Sistem Informasi Krisna DAK berdasarkan hasil kesepakatan *Multilateral Meeting* DAK Fisik.

DAK Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Kebijakan DAK Nonfisik TA 2023 diarahkan untuk

(a) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;
(b) melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan *unit cost* majemuk untuk dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
(c) melanjutkan kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja;
(d) melanjutkan kebijakan perluasan target *output* Tunjangan Guru, dengan penambahan *output* guru PPPK untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), tambahan penghasilan (tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG);
(e) DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

DAK Nonfisik juga diarahkan untuk mendukung operasionalisasi layanan kesehatan serta layanan lain yang mendukung PN dan amanat regulasi.

Hibah Daerah

Hibah Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan Hibah Daerah TA 2023 diarahkan untuk

(a) melanjutkan dukungan penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah;
(b) sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah;

SK No 113586 A

(c) melanjutkan penguatan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian;
(d) penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah Daerah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output.*

Jenis Hibah Daerah TA 2023 antara lain

(a) Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yaitu
  (i) *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project* (IPDMIP);
  (ii) *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*;
  (iii) *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative* (READ-SI);
  (iv) *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND);
  (v) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/*National Urban Water Supply Project* (NUWSP).

(b) Hibah Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, yaitu
  (i) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia;
  (ii) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/*Palembang City Sewerage Project (PCSP);*
  (iii) *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL).

(c) Hibah Daerah yang bersumber dari APBN, yaitu
  (i) *Nationwide Water Hibah Program;*
  (ii) Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat);
  (iii) Hibah Jalan Daerah;
  (iv) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(4) Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan Dana Otsus TA 2023 adalah sebagai berikut

(a) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada kebijakan dalam rencana induk dan terintegrasi dengan rencana aksi agar target/capaian *output* jelas dan terukur, serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus;
(b) meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola Dana Otsus Aceh;
(c) pengalokasian Dana Otsus Aceh 1 persen dari pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU Otsus No. 11/2006;
(d) pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi.

Dana Otsus Aceh

Arah kebijakan umum Dana Otsus Aceh tahun 2023 adalah untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; pemberdayaan ekonomi rakyat; pengentasan kemiskinan; pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta program pembangunan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Pendanaan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam, peningkatan kesiapan mitigasi, dan ketahanan terhadap bencana serta pencapaian sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini).

Sehubungan dengan akan berkurangnya besaran Dana Otsus Aceh pada tahun 2023 turun sebesar 1 persen dari total DAU Nasional, maka dalam mendukung arah kebijakan Dana Otsus Aceh Tahun 2023 perlu dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut

SK No 113587 A

(a) menguatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil;
(b) meningkatkan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
(c) memperkuat koordinasi, kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten, kota, dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan dana;
(d) memperbaiki fokus, kualitas, dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam rangka persiapan usainya penyaluran Dana Otsus Aceh pada tahun 2028;
(e) mengalokasikan Dana Otsus sesuai bidang yang ditentukan dan selaras dengan isu strategis Provinsi Aceh terutama mengatasi kemiskinan yang tinggi, memperbaiki standar hidup layak, serta menurunkan prevalensi *stunting* bagi bayi;
(f) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otsus dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan; dan
(g) memperbaiki tata kelola Dana Otsus dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Dana Otsus Papua

Arah kebijakan umum Dana Otsus Papua tahun 2023 ditujukan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; pengembangan SDM seperti pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Pemanfaatan penerimaan daerah dalam rangka Otsus Papua terdiri atas (a) DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi sebesar 70 persen (tujuh puluh persen); (b) DBH sumber daya alam pertambangan gas alam sebesar 70 persen (tujuh puluh persen); (c) Dana Otsus sebesar 2,25 persen (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi DAU Nasional; dan (d) Dana Tambahan Infrastruktur yang besarannya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran. Selain kebijakan pemanfaatan tersebut, arah kebijakan umum Dana Otsus provinsi di Wilayah Papua dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut

(a) menetapkan pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional, hal ini sesuai dengan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen *block grant* dan 1,25 persen *performance based grant* berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(c) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah Papua dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah; menggunakan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi berbasis prinsip interoperabilitas; serta mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otsus di Wilayah Papua oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP); dan
(d) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otsus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan wilayah Papua sebagai berikut

SK No 113588 A

(a) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otsus dengan mengacu pada kebijakan dalam rencana induk dan terintegrasi dengan rencana aksi agar target/capaian *output* jelas dan terukur, serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus dengan tujuan untuk (i) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian; (ii) mendorong pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan kesejahteraan berbasis tujuh wilayah adat; (iii) mempercepat pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP); serta (iv) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua;
(b) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja Dana Otsus;
(c) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Papua secara bertahap hingga tercapainya Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif; dan
(d) memfokuskan pembangunan Wilayah Papua ditujukan untuk (i) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua yang ditunjang dengan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menuju Papua Sehat; (ii) meningkatkan masyarakat Papua yang berkepribadian unggul, berkarakter, dan berdaya saing untuk menuju Papua Cerdas; dan (iii) meningkatkan kompetensi, daya saing, kreativitas, dan inovasi masyarakat Papua dalam pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menuju Papua Produktif.

(5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dana Keistimewaan DIY adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY TA 2023 sebagai berikut
(a) meningkatkan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan;
(b) membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan;
(c) meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan dengan prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target *outcome* pusat–daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di DIY;
(d) memperkuat sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan, dengan memperhatikan

  (i) dampak langsung terhadap (1) penguatan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (2) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; serta (3) pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
  (ii) isu strategis Provinsi DIY, antara lain (1) masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan; (2) kurangnya akses layanan infrastruktur ekonomi (konektivitas antar wilayah, akses koneksi internet, dan pengelolaan sampah); serta (3) masih rendahnya produktivitas UMKM.

(e) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan DIY.

(6) Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebijakan Dana Desa TA 2023 adalah sebagai berikut

SK No 113589 A

(a) penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan

(i) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa;
(ii) *performance based* dalam melaksanakan pengelolaan DD dan dukungan desa dalam menyinergikan penggunaan DD sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan alokasi kinerja.

(b) melaksanakan pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian DD secara terpisah pada TA berjalan berdasarkan kriteria tertentu;
(c) penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk

(i) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen;
(ii) memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa.
(iii) pembangunan infrastruktur pemerintahan desa dan dana operasional pemerintahan desa;
(iv) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

(d) memperbaiki mekanisme penyaluran DD melalui

(i) memisahkan penyaluran DD *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan;
(ii) melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa;
(iii) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran DD dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus mandiri.

(e) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan DD;
(f) mengarahkan pemanfaatan DD untuk peningkatan produktivitas melalui diversifikasi ekonomi desa, peningkatan produksi pertanian bernilai tinggi dan berkualitas ekspor, intensifikasi pertanian, perluasan kesempatan dan lapangan kerja yang layak, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan vokasional dan manajerial;
(g) memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama bagi desa tertinggal dan berkembang melalui pembangunan/rehabilitasi pasar desa dan sarana prasarana kelompok usaha masyarakat desa, pembangunan sistem pembuangan dan daur ulang sampah, serta penguatan ketahanan bencana;
(h) meningkatkan akses pelayanan dasar desa terutama untuk fasilitas kesehatan dan jaringan air bersih dan sanitasi, serta elektrifikasi melalui energi baru terbarukan berkelanjutan berskala desa.

2.4.2.3 Sumber Pendanaan Nonpemerintah

Kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat, namun hal ini dihadapkan pada kondisi kapasitas APBN/APBD yang semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber pendanaan/pembiayaan nonpemerintah sebagaimana paradigma pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/APBD sebagai sumber daya terakhir (*last resort*) dan mendorong skema pembiayaan kreatif serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38/2015.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan badan usaha. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dilakukan

SK No 113590 A

untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*) pada penyediaan infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU, pemerintah melalui badan usaha pelaksana dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Skema pendanaan infrastruktur melalui KPBU memiliki beberapa keunggulan. Dari sisi pemerintah, KPBU menjadi opsi dalam menjawab tantangan keterbatasan pendanaan pemerintah. Sedangkan dari sisi badan usaha, KPBU memiliki nilai pengembalian yang kompetitif, pembagian risiko yang sesuai, peraturan dan regulasi pendukung yang lengkap, serta adanya penjaminan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan sudah mulai dikembangkan juga untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional, maka sesuai dengan Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2/2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada badan usaha yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar-K/L yang tergabung dalam Kantor Bersama KPBU sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan, penyiapan, transaksi, pelaksanaan, dan pengawasan (*monitoring*), serta pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Kantor Bersama KPBU juga berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan KPBU. Kantor Bersama KPBU juga telah memiliki SOP untuk proses fasilitasi kepada K/L/D maupun juga badan usaha. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama KPBU tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan proyek, arah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandardisasi proses penyeleksian proyek KPBU (*screening*) dengan memperkuat analisis *Value for Money* dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan proyek.

Untuk meningkatkan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, beberapa upaya juga dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) identifikasi proyek yang membutuhkan dan memungkinkan dilaksanakan melalui pembiayaan kreatif; (2) menghubungkan berbagai sumber pembiayaan kreatif seperti pemanfaatan dana filantropi, dana pensiun, serta dana kelolaan jangka panjang; dan (3) sinergi dan optimalisasi skema KPBU, pengelolaan hak terbatas dan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam pembiayaan kreatif.

Pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR), filantropi, dan dana keagamaan akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana tersebut akan diselaraskan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, diharapkan banyak investasi publik dapat didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar terutama yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) diperlukan

SK No 113591 A

beberapa langkah di antaranya menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan dan memosisikan pembiayaan pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan nonpemerintah.

Sejalan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan, berbagai sumber pembiayaan/pendanaan yang tidak memberatkan APBN/APBD juga diupayakan untuk dapat mendukung penyiapan, pembangunan, dan proses pemindahan Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, dilakukan pendalaman berbagai skema kerja sama serta bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pembiayaan/pendanaan dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2.4.2.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU, (3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian, pendanaan dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19, persiapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan percepatan pemulihan ekonomi dengan sumber utama berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP Tahun 2023 juga diarahkan untuk pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah, dan industri.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas K/L dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan; (2) pengembangan integrasi sistem serta data pada dokumen perencanaan dan penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian PN di daerah.

2.4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKP Tahun 2023 diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBN maupun non-APBN. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

(1) melanjutkan proyek yang sedang berjalan

Kementerian/lembaga perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai sebelum masa RPJMN berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

(2) mengakomodasi kegiatan prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi perlu dilaksanakan, sehingga dalam penyediaan pendanaannya K/L perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan *existing* dengan melakukan (a) penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas; (b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman; dan (c) mengoptimalkan alokasi yang telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

SK No 113592 A

(3) meningkatkan kesiapan proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu, diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2023 pendanaan terhadap kegiatan akan difokuskan pada (a) pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi; (b) prioritas nasional; (c) proyek prioritas strategis (*Major Project*) seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara; (d) prioritas lainnya seperti persiapan pemilu 2024; dan (e) arahan Presiden. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2023 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Kesiapan kegiatan khususnya aspek teknis seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti *Feasibility Study* (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Detail Engineering Design* (DED), dan dokumen lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek, prosedur pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

SK No 113593 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
Tema dan Sasaran Pembangunan

SK No 113594 A

BAB III
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tema RKP Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

3.1 RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden

3.1.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020. Dokumen RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap akhir yang menentukan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Dokumen RPJPN Tahun 2005–2025 mengamanatkan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing."

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024, RPJMN Tahun 2020–2024 menetapkan Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024

SK No 113777 A

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020–2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan Poin Nawacita Misi Presiden

SK No 113596 A

Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden juga mengamanatkan penyusunan Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Amanat ini juga ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia 2045 diarahkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan RPJMN periode 2020–2024 menjadi momentum awal upaya pencapaian Visi Indonesia 2045.

Dalam Visi Indonesia 2045 telah ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* (MIT) dan menjadi negara maju atau *high-income country* sebelum tahun 2045. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu mencapai rata-rata 5,7 persen sampai dengan tahun 2045. Kontribusi pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga terus didorong hingga mencapai 25 persen terhadap nasional. Sebagai titik awal pencapaian Visi Indonesia 2045, transformasi ekonomi dilakukan sesuai arahan Presiden sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024.

Gambar 3.1
Sasaran PDB per Kapita menuju *High-Income Country* Pasca COVID-19

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113597 A

3.1.2 Arahan Presiden

Arahan Presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1 Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2 Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4 Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan stuktural).

5 Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh raykat Indonesia.

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020–2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 yang meliputi (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selanjutnya tujuh agenda pembangunan ditetapkan menjadi tujuh prioritas nasional dalam

SK No 113598 A

RKP Tahun 2023. Pemetaan visi RPJMN 2020-2024 dijabarkan ke dalam masing-masing agenda pembangunan sebagai berikut.

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan

3.2.1 Tema Pembangunan

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

SK No 113599 A

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario *business as usual* (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Gambar 3.2
Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas

Sumber: BPS, Oxford Economics, Asian Productivity Database, 2021

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi COVID-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, *artificial intelegence* (AI) dan *big data*, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

SK No 113600 A

Transformasi ekonomi Indonesia dilaksanakan pada seluruh daerah. Provinsi Bali, yang paling terdampak negatif pandemi, menjadi daerah percontohan atau *pilot project* melalui pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi ekonomi Bali dilakukan melalui (1) Bali Pintar dan Sehat, (2) Bali Produktif, (3) Bali Hijau, (4) Bali Terintegrasi, (5) Bali *Smart Island*, dan (6) Bali Kondusif. Semangat transformasi ekonomi yang dilakukan di Provinsi Bali menjadi praktik baik yang perlu diadopsi oleh provinsi lain melalui penyelarasan strategi jangka menengah-panjang dengan transformasi ekonomi Indonesia.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya *scars* akibat krisis COVID-19, yaitu *learning loss*, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

SK No 113601 A

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan *legacy* pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas, sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian, dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar *gap* pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari MIT maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

SK No 113602 A

Gambar 3.3
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

(1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

SK No 113603 A

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

SK No 113604 A

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

3.3 Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.

SK No 113605 A

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut.

PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

SK No 113606 A

PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

(2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

(1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;

(3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis,* (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

(4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

(5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

(6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index.*

SK No 113607 A

PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

(1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

(2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

(3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

(4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

(5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga, dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

(2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;

(3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota), dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;

(4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);

(5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

SK No 113608 A

PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

(3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

(1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

(2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;

(3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;

(4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;

(5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

SK No 113609 A

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan MP dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan MP dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 terdapat 41 MP yang kemudian berkembang menjadi 43 MP pada RKP Tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, pada RKP Tahun 2022 jumlah MP kembali dikembangkan menjadi 45 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 45 MP disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing PN.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik dan signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, serta strategi pembangunan tahun 2023. Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

SK No 113610 A

***Highlight Major Project* RKP Tahun 2023**

Penerapan mekanisme *Clearing House* (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya *output* MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (*not only sent but delivered*). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan *cascading*, *executive summary*, dan *info memo* MP; serta (3) intensifikasi pelibatan *stakeholder* dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral *meeting)* guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian *output* MP pada tahun 2024.

SK No 113611 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Impact/Outcome

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp483,9 triliun (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023);
- Beroperasinya 9 Kawasan Industri Prioritas (2023);
- Dikembangkannya 6 Kawasan Industri Potensial (2023);
- Beroperasinya 31 smelter.

Output MP

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan mencapai 22,5 Juta orang (2024);
- Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp646,1 triliun (2024);
- Pembangunan 11 kawasan industri dan 31 smelter;
- Dukungan termasuk penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara K/L, badiklat, industri dan pemda;
- Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR di sekitar kawasan industri.

Infrastruktur Dalam Kawasan

Sumber Energi/Pembangkit Listrik

- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk.

Kemen ESDM

Infrastuktur Lainnya

- Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas (*Review* Perencanaan dan Pembangunan Pirnas) Kantor Pengelola dan Jalan.

Kemenperin

Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor

Fasilitasi Investasi

- Fasilitasi Rencana Penanaman Modal Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan;
- Fasilitasi Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kemeninves/BKPM

Pameran /*Roadshow* Investasi

- IIPC (*Indonesian Investment Promotion Center*);
- Promosi Penanaman Modal dalam Forum Internasional.

Kemeninves/BKPM

Pendampingan Investasi

- Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi;
- Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN.

Kemeninves/BKPM, Kemendag

Penyusunan Profil Investasi

- Kawasan Industri (KI) Prioritas Di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi*;
- Kawasan Industri (KI) yang Dikembangkan*;
- Analisis Negara Target dan Negara Pesaing;
- Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN.

Kemeninves/BKPM, Kemenperin

Penyelesaian Hambatan Perdagangan di Negara Mitra

- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal/Investasi Wilayah I;
- Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak;
- Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional;
- Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional.

Kemeninves/BKPM, Kemendag

Harmonisasi Regulasi dan Lainnya

Kebijakan Rantai Pasok Hulu Hilir

- Rekomendasi Peraturan Perizinan Investasi Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah yang Disimplifikasi, Diharmonisasi, dan Disinkronisasi;
- Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Mineral Logam Untuk Kebutuhan dalam Negeri;
- Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral;
- Industri Logam yang Terfasilitasi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas;
- Industri Smelter Logam Bukan Besi yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya.

Kemenperin

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113612 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 3)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16.4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Pengembangan jaringan usaha untuk 350 koperasi.

Aceh

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;
- Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor.

Kemen KUKM, Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk;
- Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang Diperkuat.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Jawa Tengah

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;
- Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor.

Kemen KUKM, Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk;
- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi Pangan.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Nusa Tenggara Timur

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok.

Kemen KUKM, Kemenperin, Kementan

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK;
- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk;
- Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang Diperkuat.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Kalimantan Timur

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK;
- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk;
- *Export Coaching Program*.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

SK No 113613 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (2 dari 3)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16.4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Pengembangan jaringan usaha untuk 350 koperasi.

Sulawesi Utara

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK;
- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk;
- *Export Coaching Program*.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Sumatera Utara

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK;
- Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor.

Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk;
- Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas *Gold/Platinum*.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kemen LHK

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- Fasilitasi Akses Permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

DI Yogyakarta

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK.

Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Fasilitasi Akses Permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Pendampingan SDM UMKM

- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin

SK No 113614 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 3)

Impact/Outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16.4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Pengembangan jaringan usaha untuk 350 koperasi.

Bali

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemenperin, Kementan

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK;
- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemenag, Kemendag, Kemen KUKM

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- *Export Coaching Program;*
- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi Pangan.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Fasilitasi Akses permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi;
- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Pendampingan SDM UMKM

- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk;
- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas *Gold/Platinum*.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kemen LHK

Kalimantan Selatan

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK.

Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- *Export Coaching Program;*
- Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT);
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan;
- Fasilitasi Akses Permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

Pendampingan SDM UMKM

- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk;
- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas *Gold/Platinum*.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kemen LHK

Sulawesi Selatan

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemenperin, Kemen KP

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Sertifikat Halal UMK.

Kemendag, BSN, Kemenag, Kemenparekraf

Pendampingan SDM UMKM

- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis;
- UKM yang Ditingkatan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk;
- Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas *Gold/Platinum*.

Kemen KUKM, BSN, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kemen LHK

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran.

Kemen KUKM, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Fasilitasi Akses Permodalan dan Penjaminan bagi Koperasi;
- Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

SK No 113615 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatkan ketersediaan beras (45,4 Juta ton, nasional);
- Produksi jagung (34,12 juta ton, nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (*baseline* 2020= 101,65; 2023 = 105-107);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023= Rp57 Juta/Orang/Tahun);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha di Kalimantan Tengah.

Output MP

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya kawasan *food estate* seluas 148.000 ha.

Kalimantan Tengah

Geospasial

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang - Pusat;
- Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Mendukung Ketahanan Pangan (*Food Estate*);
- Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Koridor Satwa yang Dikelola dalam Mendukung *Food Estate*;
- Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Lahan yang Dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- PBT Non Sistematis Kategori 3;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3.

Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemen LHK

On Farm

- Optimasi Lahan;
- Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi yang Mendukung *Food Estate;*
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
- Benih Sumber Padi Mendukung *Food Estate;*
- Kawasan Padi Mendukung *Food Estate;*
- Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Mendukung *Food Estate**.

Kementan, Kemendes PDTT

Off Farm

- Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan;
- Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan;
- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Mendukung *Food Estate*;*
- Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Insentif Fiskal bagi Perekonomian Indonesia (PN).

Kementan, Kemenkeu

Sumatera Utara

Geospasial

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- PBT Non Sistematis Kategori 3;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3.

Kemen ATR/BPN

On Farm

- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
- Areal Penanganan DPI;
- Optimasi Lahan;
- Kawasan Kopi.

Kementan

Off Farm

- Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan;
- Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan.

Kementan

Sumatera Selatan

Geospasial

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang.

Kemen ATR/BPN

On Farm

- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
- Optimasi Lahan;
- Kawasan Kelapa.

Kementan

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113616 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatkan ketersediaan beras (45,4 Juta ton, nasional);
- Produksi jagung (34,12 juta ton, nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (*baseline* 2020= 101,65; 2023 = 105-107);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023= Rp57 Juta/Orang/Tahun);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha di Kalimantan Tengah.

Output MP

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya kawasan *food estate* seluas 148.000 ha.

NTT

Geospasial

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- SHAT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi;
- PBT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi.

Kemen ATR/BPN

On Farm

- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
- Kawasan Kelapa;
- Optimasi Lahan;
- Kawasan Padi Mendukung *Food Estate;*
- Kawasan Jagung Mendukung *Food Estate;*
- Benih Sumber Padi Mendukung *Food Estate;*
- Benih Sumber Jagung Mendukung *Food Estate.*

Kementan

Off Farm

- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Mendukung *Food Estate.*

Kementan

Papua

Geospasial

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang.

Kemen ATR/BPN

On Farm

- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
- Optimasi Lahan;
- Kawasan Padi Mendukung *Food Estate;*
- Benih Sumber Padi Mendukung *Food Estate.*

Kementan

Off Farm

- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Mendukung *Food Estate.*

Kementan

SK No 113617 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,40% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 1,76-6,08 miliar US$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 600 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 14,85 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

Output MP

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 10,70-16,11 miliar US$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 706,8 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 15 juta orang pada tahun 2024.

Perintisan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)

- Destinasi Wisata Alam Prioritas, Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan*;
- Warisan Budaya yang Dilindungi;
- Sarana Prasarana Wisata Bahari*.

Kemen LHK, Kemendikbudristek, Kemen KP

Pembangunan Jalan di DPP

Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat, dan KA

- Peningkatan Jalur KA lintas Kisaran-Rantau Prapat Tahap I (Kisaran-Mambangmuda);
- Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas;
- Pembangunan Jalan Tol Malang - Kepanjen;
- Pembangunan Jalan Tol Ruas Probolinggo-Banyuwangi.

Kemenhub, BUMN

Pembangunan Bandara dan Pelabuhan

Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Laut

- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk dalam Tahap V.

Kemenhub

Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Udara

- Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong, Papua Barat - PN;
- Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN;
- Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN.

Kemenhub

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113618 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,40% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 1,76-6,08 miliar US$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 600 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 14,85 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

Output MP

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 10,70-16,11 miliar US$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 706,8 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 15 juta orang pada tahun 2024.

Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitasi BUMDes

Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata

- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata*;
- Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I dan II yang dikembangkan;
- Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata.

Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata

Pengembangan Amenitas Pariwisata

- Amenitas Wisata yang Dibangun/ dikembangkan;
- Amenitas dan Aksesibilitas yang Dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, dan Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Kemendes PDTT, Kemenparekraf

Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- *Be Creative* District (BCD) yang Dikembangkan;
- Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba, Borobudur, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru;
- Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Pariwisata.

Kemenparekraf, Kemen PUPR

Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- SDM dan Industri Pariwisata yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, dan Badan Otorita Labuan Bajo Flores;
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.

Kemenparekraf

Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Produk Wisata dan Kegiatan *(Events)* di Kawasan Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur dan Badan Otoritas Labuan Bajo Flores yang Dipromosi dan Dipublikasikan;
- Bahan Rumusan Skema Insentif bagi Industri kreatif Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen.

Kemenparekraf

Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi, dan Pemasaran

- *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas;
- Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan;
- Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP);
- Potensial Investor yang Difasilitasi Badan Otorita (APBN).

Kemeninves/BKPM, Kemenparekraf

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113619 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Impact/Outcome

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).

Output MP

- Pembangunan PLT ET 2 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);
- Pembangunan PLTS Atap 165 unit di lokasi pemda, dan 2 unit di gedung K/L;
- Tersedianya 1 rekomendasi volume *biofuel* untuk domestik;
- Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.

Pembangunan Aneka Energi Terbarukan

Pembangunan PLT Air

- Monitoring TKDN PLT Air;
- Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya*.

Kemen ESDM, BUMN

Pembangunan PLT Surya

- PLTS Atap (Gedung Pemda);
- PLTS Atap K/L;
- Monitoring TKDN PLT Surya;
- Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya*.

Kemen ESDM, KPPPA, Kemenpora, BUMN

Pembangunan PLT Bayu

- Monitoring TKDN PLT Bayu;
- Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya*.

Kemen ESDM, BUMN

Pengembangan Riset dan Inovasi

- Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa.

Kemen ESDM

Pembangunan Bioenergi

Pembangunan PLT Bioenergi

- Monitoring TKDN Bidang Bioenergi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya*.

Kemen ESDM, BUMN

Pembangunan *Greenfuel*

- Volume Biofuel untuk Domestik;
- Katalis Merah Putih*;
- Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat.

Kemen ESDM, Kementan, BUMN

Pengembangan *RDF Plant*

- Proyek Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Barat DKI Jakarta.

BUMN

Pembangunan Panas Bumi

Pembangunan PLT Panas Bumi

- Penawaran Wilayah Panas Bumi;
- Penetapan Wilayah Panas Bumi;
- Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya*.

Kemen ESDM, BUMN

Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi

- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.

Kemen ESDM

Konservasi Energi

Standar/Regulasi

- Penurunan Intensitas Energi Final;
- Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi.

Kemen ESDM

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113620 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Impact/Outcome

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

Output MP

- Pengembangan 8 Bandara;
- Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 47,9 km;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;
- Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).

Pengembangan Kawasan

Infrastruktur Kawasan

- Air Baku KEK Sorong yang Dibangun;
- Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi;
- Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi.

Kemen PUPR
Kemendes PDTT

Produksi Komoditas

- Kawasan Sagu;
- Kawasan Kopi;
- Kawasan Kakao.

Kementan

Kampung Terpadu

- Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD);
- Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama.

Kemendes PDTT

Industri

- Fasilitasi Investor dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni;
- Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi;
- IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk Melalui Dana Dekonsentrasi dan Pengembangan Produk.

Kemenperin

Pariwisata

- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata.

Kemendes PDTT

Infrastruktur Pendukung

Energi

- PLTS Atap;
- APDAL;
- Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T.

Kemen ESDM

Infrastruktur Jalan

- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP);
- Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP);
- Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN).

Kemen PUPR

Infrastruktur Bandar Udara

- Pengembangan Bandar Udara Anggi;
- Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III;
- Pengembangan Bandar Udara Rendani.

Kemenhub

Infrastruktur Pelabuhan

- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II.

Kemenhub

Angkutan Udara Perintis

- Angkutan Udara Perintis;
- Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis;
- Angkutan Kargo Perintis (MP).

Kemenhub

Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Permukiman

- Rumah Khusus;
- Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang Dibangun.

Kemen PUPR

Pendidikan

Tenaga Pendidik

- Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Pendampingan Pembelajaran.

Kemendikbudristek

Beasiswa Peserta Didik

- Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS.

Kemenag

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- PBK Kerjasama dengan Dunia Industri;
- Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten;
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas.

Kemen KP

Kesehatan

Tenaga Medis

- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM);
- Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat (SDM).

Kemenkes

Beasiswa

- Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat.

Kemenkes

SK No 113621 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Impact/Outcome

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,5 – 6,0% pada tahun 2023 (*baseline* 2019: 4,96%).

Output MP

- Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan ekosistem area IKN;
- Konservasi Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- Terbangunnya *Command Center* Smart Security KIPP IKN;
- Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
- Tersusunnya dokumen kebijakan pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara (PN);
- Tersusunnya 7 Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur;
- Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;
- Terbangunnya kawasan permukiman baru;
- Terlaksananya Pembangunan Jalan IKN;
- Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;
- Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya *Single Logistics Gateway* Penyelenggara Pos di IKN;
- Terlaksananya Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap III - PN.

Penyiapan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan Kebijakan

- Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan pembiayaan dan/atau Pendanaan Ibu Kota Nusantara (PN);
- Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur;
- Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Penyelenggaraan Telekomunikasi di IKN.

Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, Kemenkominfo

Perencanaan dan Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan Ekosistem Area IKN;
- Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.

Kemen LHK

Pengembangan Kawasan dan SDM

Pengamanan

- Pembangunan *Command Center Smart Security* KIPP IKN.

POLRI

Infrastruktur

- Pembangunan Baru Kawasan Permukiman;
- Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi*;
- Pembangunan Jalan IKN;
- Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap III - PN;
- Pembangunan Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Pembangunan *Single Logistics Gateway* Penyelenggara Pos di IKN.

Kemen PUPR, Kemenhub, BUMN

SDM

- Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN.

BKN

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113622 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Impact/Outcome

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5-2,0% di tahun 2023 dan 0-1% di tahun 2024.

Output MP

- Cakupan 100% daerah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022, 2023, dan 2024;
- Terbangunnya skema digitalisasi bantuan sosial;
- Terbangunnya skema perlindungan sosial adaptif untuk penanganan bencana;
- Cakupan 70% desa/kelurahan menggunakan digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk perencanaan penganggaran berbasis bukti;
- Penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan di 300 kabupaten/kota tahun 2023 dan 514 kabupaten/kota tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan instansi yang mendapatkan pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja;
- Peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial sebesar 13,3 juta peserta;
- Penyaluran program sembako bagi 15,6 juta KPM di tahun 2023 dan 2024;
- Penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta KPM di tahun 2023 dan 2024.

Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi

Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan

- Pendampingan Desa;
- Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional;
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemen KUKM

Pengelolaan Data

- Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT;
- Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesos.

Kemensos

Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial

- Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran;
- Sistem Informasi Bidang Kebencanaan;
- *Data Center* Nasional.

Kemendagri, BNPB, Kemenkominfo

Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial

Integrasi dan Perluasan Kepesertaan

- Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kemnaker

Integrasi Data Jaminan Sosial

- Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS;
- Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya dalam Rangka Perlindungan Nelayan;
- Pelayanan Koneksitas *Warehouse* Berbasis NIK Nasional.

Kemenkes, Kemen KP, Kemendagri

Penguatan Bantuan Sosial

Perluasan Pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village*;
- Literasi Digital.

Kemensos, Kemendes PDTT, Kemenkominfo

Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako;
- Penyediaan Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
- Siswa Madrasah MI/MTs/MA Penerima PIP;
- Siswa SD/SMP/SMA yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar.

Kemensos, Kemen ESDM, Kemendikbudristek, Kemenag

Penguatan Sistem Pendukung

- Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang Telah Mengikuti Proses Sertifikasi;
- Akses Internet.

Kemensos, Kemenkominfo

Keterangan :
- Lembaga lainnya yang terlibat: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

SK No 113623 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Impact/Outcome

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 211/100.000 penduduk pada tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk pada tahun 2024;
- Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 385 kab/kota pada tahun 2023 dan 405 kab/kota pada tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 75% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024;
- Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 71% puskesmas pada tahun 2023 dan 83% puskesmas pada tahun 2024;
- Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 85% RSUD kab/kota pada tahun 2023 dan 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
- Terakreditasinya 90% FKTP dan 95% RS pada tahun 2023 dan 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;
- Terwujudnya integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 90% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

Output MP

- Cakupan TB *Treatment Coverage* menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024;
- Kab/kota dengan API Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 kab/kota pada tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun 2024;
- Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024;
- Jumlah dokter *pasca internsip* dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024;
- Jumlah FKTP dan RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP dan 1.169 RS pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP dan 991 RS pada tahun 2024;
- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada tahun 2024;
- RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024;
- Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024;
- Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan

- Pendayagunaan Dokter Spesialis;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim dan Individu.

Kemenkes, KemenPAN-RB, BKN

Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

- Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarpras dan Alat RS termasuk RS TNI dan Polri;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan RS *Holding* BUMN.

Kemenkes, Kemhan, Polri, Kemenhub Kemen ESDM, Kemenkominfo, BUMN.

Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta;
- Pemenuhan Peningkatan Standar SPA Puskesmas.

Kemenkes, Kemhan, Polri

Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan

- Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri;
- Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi 10 Molekul Obat Sesuai Kebutuhan Dalam Negeri.

Kemenkes, BRIN, Kemenperin, BPOM, BUMN

Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan

- Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi *Emerging*;
- Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di Laboratorium termasuk Lab POM.

Kemenkes, Kementan, BPOM

Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi

- Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan.

Kemenkes, BPOM, Kemenaker, KemenPUPR.

Inovasi Pembiayaan Kesehatan

- Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan pada Program Kesehatan;
- Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan.

Kemenkes, BPJS Kesehatan

Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan;
- Pemberdayaan Masyarakat Germas di Berbagai Tatanan.

Kemenkes, Kemenkominfo

SK No 113624 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

***Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**

Impact/Outcome

- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,00% pada tahun 2023 dan 43,10% pada tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 25,10% pada tahun 2023 dan 26,08% pada tahun 2024.

Output MP

- Jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang bersertifikat kompetensi 7.500 orang pada tahun 2023;
- Jumlah SMK yang dikembangkan berbasis industri 4.0 31 SMK pada tahun 2023;
- Jumlah BLK yang ditransformasi 1 BLK pada tahun 2023 dan 1 BLK pada tahun 2024.

Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik

- SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi.

Kemendikbudristek

Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi

- Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri.

Kemendikbudristek

Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi

- Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi.

Kemendikbudristek

Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0

Revitalisasi SMK

- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0.

Kemendikbudristek

Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)

Peningkatan Kualitas Pelatihan

- Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga;
- Transformasi BLK Baru;
- Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas.

Kemnaker

SK No 113625 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Impact/Outcome

- Menurunkan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi 17,5% tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024;
- Menurunkan angka prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita sebesar 7,3% tahun 2023 dan 7% pada tahun 2024;
- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 194 tahun 2023 dan 183 tahun 2024 per 100.000 kasus kelahiran hidup.

Output MP

- Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 75% tahun 2023 dan 90% di tahun 2024;
- Persentase cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 27,57% tahun 2023 dan 28,39% di tahun 2024;
- Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93% tahun 2023 dan 95% di tahun 2024;
- Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 471 tahun 2023 dan 488 tahun 2024;
- Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO) sebesar 21,59% tahun 2023 dan 20% di tahun 2024;
- Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023 dan 10% pada 2024;
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 55% pada 2023 dan 80% di tahun 2024;
- Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya sebesar 80% pada 2023 dan 90% di tahun 2024.

Pemenuhan Intervensi Spesifik *Stunting*

- Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan;
- Suplementasi Gizi Mikro Balita Kurus;
- Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri.

Kemenkes

Pemenuhan Intervensi Sensitif *Stunting* pada Sasaran Prioritas

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan;
- Pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat;
- Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK;
- Pelatihan dan *Refreshing* dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Pemberdayaan Kampung KB dalam Rangka Penurunan *Stunting*.

Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, BKKBN, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, Kemendikbudristek, Kemen KP, Kemenkominfo, BPOM

Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal

- Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB;
- Bimtek Peningkatan Pelayanan KB Pasca Persalinan;
- Pembinaan RS PONEK;
- Pembinaan Operasi *Sectio Caesaria* Darurat dalam Waktu ≤30 menit untuk RS;
- Peningkatan Kapasitas Surveilans gizi dan KIA untuk Nakes/NonNakes;
- Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon).

Kemenkes, BKKBN

SK No 113626 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

***Major Project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**

Impact/Outcome

Meningkatkan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) sebesar 25% (pada tahun 2021) menjadi 26% (tahun 2023), dan 27% (tahun 2024) dari total pelayaran nasional.

Output MP

- Terbangunnya Pelabuhan Patimban;
- Standardisasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar;
- Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pelabuhan Tj.Priok, Jalan Akses Pelabuhan Kijing.

Pelabuhan Tanjung Priok

Standardisasi Pelabuhan

- Pengembangan Terminal Petikemas Pelabuhan Tj Priok.

BUMN

Konektivitas Integrasi dengan Hinterland

- Pembangunan *New Priok Eastern Access* (NPEA)[a].

BUMN

Pelabuhan Patimban

Standardisasi Pelabuhan

- Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)[a];
- Patimban *Port Development Project Phase* (1-2)[a];
- Pendampingan KPBU Pelabuhan Patimban.

Kemenhub

Konektivitas Integrasi dengan Hinterland

- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan – Akses Tol Patimban[a].

Kemen PUPR

Pelabuhan Makassar

Standardisasi Pelabuhan

- Pengembangan Pelabuhan Makassar[a].

BUMN

Konektivitas Integrasi dengan Hinterland

- Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar – Parepare Segman 4 dan 5[a] [b].

Kemenhub

Pelabuhan Kijing

Standardisasi Pelabuhan

Konektivitas Integrasi dengan Hinterland

- Relokasi Jalan Nasional akses Pelabuhan Kijing[a].

BUMN

a): Proyek Berstatus PSN
b): Pelaksanaan Setelah Tahun 2024

SK No 113627 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Transformasi Digital (1 dari 2)

Impact/Outcome

99,5% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2024 (Sasaran PP 5 PN 5 draft RKP 2023).

Output MP

Pembangunan baru 141 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G *On Air* pada 2024.

Akses dan Infrastruktur

Penyediaan Akses Internet Cepat

- OM BTS 4G /*Lastmile*;
- OM BTS 4G /*Lastmile* Papua dan Papua Barat;
- OM Akses Internet.

Kemenkominfo

Pengembangan Penyiaran Digital

- *Digital Broadcasting System* (DBS);
- Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital;
- Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital.

Kemenkominfo, TVRI

Frekuensi dan Perangkat TIK

- Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR);
- Pengembangan Infrastruktur SIMS;
- Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Broadband*.

Kemenkominfo

Layanan Pemerintahan

Pusat Data Nasional

- *Data Center* Nasional.

Kemenkominfo

Penerapan SPBE

- Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi);
- Penyelenggaraan Aplikasi Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

ANRI, Kemenkominfo

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*E-Services*) yang Terintegrasi

- Rancangan Portal Pelayanan Publik;
- Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga;
- *Core Tax System*.

KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu

Pendidikan

Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialihmediakan;
- Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pendidikan.

Perpusnas, Kemenkominfo

Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan

- Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan.

Kemenkes

Perdagangan, Perdesaan, Koperasi, dan UMKM

Digitalisasi UMKM

- Adopsi Teknologi Digital UMKM;
- UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi.

Kemen KUKM

Desa Digital

- Desa Digital yang dikembangkan melalui Platform Akademi Desa 4.0;
- Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village*.

Kemendes PDTT

***Start up* Digital**

- Startup Digital yang dikembangkan;
- Digital *Technopreneur*.

Kemenparekraf, Kemenkominfo

E-Commerce

- Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Sektor Non Pertanian dan Digital Perdagangan.

Kemendag

SK No 113628 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Transformasi Digital (2 dari 2)

Impact/Outcome

99,5% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2024 (Sasaran PP 5 PN 5 draft RKP 2023).

Output MP

Pembangunan baru 141 BTS USO 4G pada tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G *On Air* pada 2024.

Digitalisasi Bantuan Sosial

Digitalisasi dan Integrasi Pelaksanaan Bantuan Sosial secara Bertahap

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial.

Kemensos

Industri 4.0

Pengembangan ekosistem inovasi dan teknologi

- Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan;
- Lembaga/Komunitas /Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Kemenparekraf

Literasi Digital Masyarakat

Peningkatan Literasi Masyarakat

- Literasi Digital.

Kemenkominfo

SDM Digital Indonesia

Peningkatan kompetensi SDM pada bidang TIK

- Digital *Talent Scholarship;*
- Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan .

Kemenkominfo, Kemenag

Kebijakan dan Standarisasi Kompetensi pada Bidang TIK

- SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi;
- Sertikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo.

Kemenparekraf, Kemenkominfo

Vokasi untuk Industri 4.0

- Transformasi BLK Baru;
- Tenaga Kerja Industri 4.0.

Kemnaker, Kemenperin

Keamanan Siber

Pembangunan Pertahanan Siber

- Siber.

Kemhan

Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber

- Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang Teregistrasi;
- Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber.

BSSN, BIN

Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber

- Integrasi *Cyber Intelligent Analytics* (CIA);
- Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif.

Kemenkominfo, BIN

Penyelesaian Kejahatan Siber

- Penanganan Tindak Pidana Siber.

POLRI

SK No 113629 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

***Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3**

Impact/Outcome

Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,48 di tahun 2023 dan 69,74 di tahun 2024.

Output MP

- Meningkatkan kapasitas pengolahan limbah B3 sebesar ±254.500 ton pada tahun 2023;
- Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 10 unit pada tahun 2023 dan 11 unit pada tahun 2024;
- Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 1 unit pada tahun 2023 dan 2 unit pada tahun 2024;
- Penambahan kapasitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah ±19 ribu ton di tahun 2024;
- Penambahan kapasitas pengolahan limbah B3 dari sumber industri dan usaha/kegiatan lainnya sejumlah ±2 juta ton di tahun 2024.

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis

- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes.

Kemen LHK

Enablers

- Pelatihan Bidang Kesehatan Lingkungan;
- Pemantauan, Pendampingan, Fasilitasi Implementasi Penyehatan Lingkungan;
- Koordinasi Penyehatan Lingkungan.

Kemenkes

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu

- Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera;
- Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Wilayah Kalimantan;
- Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Wilayah Sumapapua.

KPBU dan Swasta
(koordinasi Kemen LHK)

Enablers

- Dukungan Teknis Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu;
- Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri.

Kemen LHK, Kemenperin

SK No 113630 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
Prioritas Nasional dan Pendanaannya

SK No 113631 A

BAB IV
PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian RPJMN 2020-2024, tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan di tahun 2023. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi target-target pembangunan.

4.1 Prioritas Nasional

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti pada Gambar 4.1 Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP).

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Kebijakan dan target yang disusun pada setiap PN RKP Tahun 2023 telah mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi terutama tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Selain itu, dijelaskan pula berbagai strategi dan upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap PN. Seluruh pelaksanaan PN didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas.

SK No 113632 A

4.1.1 Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan untuk mendukung proses transformasi ekonomi setelah pada tahun sebelumnya dihadapkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Proses transformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh sektor energi, sumber daya air, UMKM, pariwisata, pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dan sektor lainnya akan menghadapi tantangan yang membutuhkan kebijakan dan strategi untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), tantangan yang dihadapi terkait fokus produktivitas adalah tingginya ketergantungan terhadap energi fosil yang produktivitasnya semakin menurun dan berkontribusi terhadap defisit perdagangan dan nilai transaksi berjalan yang turut menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan yang terkait fokus pembangunan berkelanjutan adalah (1) pengembangan EBT masih terkendala dengan belum kompetitifnya harga jual dan (2) pengembangan EBT berbasis kelapa sawit masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Adapun tantangan yang terkait fokus inklusif yaitu (1) kebijakan subsidi dan insentif yang belum optimal, (2) kondisi kelistrikan yang *over-supply* di beberapa daerah sementara akses masyarakat daerah tertinggal pada energi khususnya EBT skala kecil masih sangat terbatas dengan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, dan (3) faktor *intermittence* dari beberapa teknologi Pembangkit Listrik Teknologi (PLT) EBT.

Upaya peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pada fokus peningkatan produktivitas air yaitu adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang disebabkan oleh semakin terbatasnya daya tampung dan ketersediaan air. Selanjutnya, tantangan pada fokus inklusif yaitu adanya potensi bencana terkait sumber daya air di berbagai daerah terutama peningkatan frekuensi banjir dan maupun kekeringan di berbagai daerah. Selain itu, tantangan yang dihadapi pada fokus pembangunan berkelanjutan adalah tingginya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis serta adanya perubahan iklim yang dapat mengubah pola iklim pada periode tertentu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan diarahkan antara lain pada rehabilitasi hutan dan lahan di DAS kritis, penyelamatan danau prioritas nasional, pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti waduk dan bendungan, dan penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya air. Upaya-upaya tersebut terus didorong demi menciptakan ketahanan pangan dan mendorong percepatan transformasi ekonomi.

Untuk mendukung peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, sektor pertanian merupakan sektor utama. Pada masa pandemi, sektor pertanian menjadi sektor penunjang pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif di saat sektor lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tantangan yang dihadapi di

SK No 113633 A

sektor pertanian pada fokus peningkatan produktivitas di antaranya (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian karena tingkat pendidikan yang rendah dan usia petani yang menua (*aging farmers*) dan (2) pemanfaatan teknologi serta digitalisasi di sektor pertanian yang berjalan lambat. Tantangan selanjutnya pada fokus pembangunan berkelanjutan yaitu sistem budi daya pertanian yang belum menerapkan sistem ramah lingkungan menyebabkan kualitas lahan menurun dan mengancam keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, tantangan pada fokus inklusif adalah tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ketersediaan dan harga pangan.

Untuk mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan, tantangan yang dihadapi pada fokus peningkatan produktivitas di antaranya (1) masih perlunya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari aspek pendataan stok perikanan dan perizinan untuk usaha perikanan; (2) produktivitas perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya masih belum optimal akibat usaha perikanan yang ada cenderung tersebar dan berskala kecil, dengan menggunakan teknologi tradisional, serta sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai; serta (3) kurangnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai dingin yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga distribusi produk perikanan masih terkendala. Sedangkan tantangan pada fokus inklusif adalah (1) kapasitas SDM kelautan dan perikanan yang masih perlu ditingkatkan, (2) minimnya literasi finansial, (3) akses pendanaan dan perlindungan usaha yang masih rendah, dan (4) kelembagaan usaha kelautan dan perikanan yang masih lemah.

Untuk mendukung penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi pada fokus peningkatan produktivitas antara lain (1) rendahnya nilai tambah produk UMKM, (2) kurangnya akses informasi terkait pembiayaan dan pemasaran, dan (3) terbatasnya kapasitas dan kemampuan manajerial pelaku UMKM dan koperasi. Selain itu, tantangan pada fokus inklusif di antaranya (1) minimnya UMKM yang menjalin kemitraan strategis dengan usaha besar, (2) rendahnya partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan BUMN, (3) rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha sehingga masih banyak usaha yang bergerak di sektor informal, serta (4) belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, beberapa sektor utama yang akan didorong adalah industri, pariwisata, dan investasi. Tantangan yang dihadapi sektor industri dan pariwisata adalah berbagai risiko baik di tingkat global maupun dalam negeri di tahun 2022. Pemulihan industri pengolahan berlangsung lebih cepat, namun menghadapi tantangan perlu ditingkatkannya produktivitas, risiko gangguan rantai pasok global, peningkatan harga bahan baku sebagai dampak peningkatan harga komoditas, serta percepatan adaptasi digital. Pada fokus berkelanjutan, tantangan di sektor industri pengolahan adalah transisi ke industri hijau. Sementara itu pada fokus inklusif, tantangan yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan yaitu masih rendahnya dan terbatasnya konsumsi serta daya beli masyarakat pada produk-produk industri pengolahan. Selanjutnya di sektor pariwisata, pemulihan berjalan lebih lambat. Tantangan di sektor pariwisata akan berada pada fokus berkelanjutan yaitu efektivitas penanganan kasus COVID-19, serta konsistensi penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety and Environmental sustainability* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata. Pembukaan Bali di tahun 2022 menjadi tonggak untuk peningkatan aksesibilitas yang disertai dengan kesiapan pengelolaan risiko dari pergerakan wisatawan. Keberhasilan pemulihan pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor investasi pada fokus produktivitas di antaranya (1) proses penyesuaian UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) berpotensi berpengaruh pada kepercayaan investor karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UUCK adalah inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaikinya, (2) persoalan status lahan

SK No 113634 A

dan juga kemudahan perizinan, serta (3) fasilitas dan juga insentif yang tepat sasaran diperlukan dalam menarik investor. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam menarik minat investor dan tidak hanya menjadi sebatas minat namun dapat menjadi sebuah realisasi investasi. Tren ekonomi dunia yang mengarah pada ekonomi hijau juga menjadi tantangan baru untuk menentukan arah kebijakan yang mengadopsi pemahaman tentang *green economy* khususnya terkait *green investment*. Kebijakan diarahkan pada (1) harmonisasi dan simplifikasi peraturan yang menghambat investasi di level pusat dan daerah, (2) percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagi daerah yang belum memiliki, dan (3) penguatan peran satgas investasi dengan melakukan pendampingan dan penyelesaian permasalahan investasi.

Upaya peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang perdagangan luar negeri, baik tantangan global maupun tantangan yang berasal dari dalam negeri. Tantangan pada fokus produktivitas di tingkat global di antaranya (1) pertumbuhan perdagangan global masih dibayang-bayangi penyebaran pandemi COVID-19, (2) gangguan rantai suplai global, serta (3) dampak dari perang Rusia-Ukraina yang dapat terus memicu ketidakseimbangan *supply-demand* minyak mentah dunia dan komoditas lain. Sementara itu dari dalam negeri, tantangan pada fokus produktivitas di antaranya (1) masih rendahnya tingkat produktivitas, persaingan usaha dan kemampuan inovasi, (2) terbatasnya akses bahan baku domestik dan impor, (3) terbatasnya kesiapan ekosistem dan infrastruktur untuk mendukung *e-commerce* lintas batas negara, (4) terbatasnya konektivitas logistik ekspor, serta (5) terbatasnya akses pasar dan *buyer*. Selanjutnya, tantangan pada fokus berkelanjutan di tingkat global yaitu kebijakan mitra dagang yang mengarah pada isu lingkungan dan *sustainability*. Tantangan lainnya pada fokus inklusif di dalam negeri yaitu belum terintegrasinya program fasilitasi promosi ekspor, seperti informasi dan layanan intelijen ekspor, akses pembiayaan ekspor, serta program pendidikan dan pelatihan ekspor.

Untuk penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi pada fokus produktivitas di antaranya (1) normalisasi kebijakan (pengetatan likuiditas) yang diambil oleh bank sentral khususnya *Federal Reserve* berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran modal ke Indonesia, (2) risiko kredit yang juga belum sepenuhnya pulih sehingga berpotensi mengurangi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan pembiayaan APBN, (3) masih rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB yang disebabkan belum tergalinya potensi pajak dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal, (4) terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya, dan (5) keandalan dan pemerataan konektivitas untuk mendukung tingginya arus pengiriman barang. Selanjutnya, tantangan pada fokus inklusif yaitu (1) transformasi digital pada sektor keuangan; (2) ketimpangan antara inklusi dengan literasi keuangan; (3) banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (4) kurang efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting; (5) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis *e-commerce*; (6) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah dibangun; serta (7) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, seperti adanya *crypto currencies* dan munculnya *metaverse*. Tantangan yang dihadapi pada fokus berkelanjutan di antaranya (1) belum optimalnya pembiayaan hijau dan (2) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional salah satunya melalui subsidi, baik energi maupun non-energi. Kebijakan subsidi menjadi bagian dari kebijakan belanja negara di tahun 2023 yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan sebagai upaya percepatan transformasi ekonomi.

Kontribusi PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang pelaksanaannya dititikberatkan pada tiga fokus utama yaitu peningkatan produktivitas, inklusif, dan pembangunan yang

SK No 113635 A

berkelanjutan. Peningkatan produktivitas, inklusif, dan pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi fokus untuk mendorong sektor pertanian, industri pengolahan, kelautan perikanan, sumber daya air, pariwisata, investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok produksi global, sistem logistik, UMKM, pengembangan EBT, sistem keuangan dan reformasi fiskal.

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan**						
1.1	Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	9,18	11,20	11,70	15,70	17,90	~23,00
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	87,90	86,30	87,20	92,40	94,00	95,20
1.3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	11	11	11	11	11	11
2.	**Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian**						
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27	2,93	2,89	3,75	3,21[b)]	3,23[b)]
2.2	Pertumbuhan PDB pertanian (%)[f)]	3,61	1,77	1,84	3,60–3,80	4,0–4,2	4,00–4,10
2.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,81	0,73	5,45	4,00–6,00	5,00–6,00	8,71
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	3,8	-2,93	3,39	5,30–5,70	5,4–6,0	8,10
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1)[a)] (%)	19,70	19,87	19,25	19,90	20,60	21,00
2.6	Nilai devisa pariwisata (8.9.1)[c)a)] (miliar US$)	18,45	3,46	0,55	0,86–1,71	1,76–6,08	10,70–16,11

SK No 113636 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)[a] (%)	4,8	4,0	4,2[g]	4,3	4,4	4,5
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)[e]	2,47	-0,30	2,60	2,6–3,1	2,7–3,1	2,7–3,0
2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,4	-4,9	3,8	5,4–6,3	6,1-6,7	5,8–7,7
2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-2,60	3,61	35,11	8,45	11,18	10,10
2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-0,9	-7,7	24,0	5,1–5,5	6,8-8,0	6,2
2.12	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1)[a] (%)	9,76	8,33	9,1[c]	8,44	9,30–10,00[h]	10,22–10,71[d]

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022;

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); b) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional 2023–2024 sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020–2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka Realisasi Sementara; d) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas; e) Angka target tahun 2023 masih dalam perhitungan; f) Indikator pertumbuhan PDB pertanian sama dengan pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan; g) Angka Proyeksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf; serta h) Angka Kesepakatan Panja.

4.1.1.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) seperti yang tercantum dalam Gambar 4.2. Sementara, sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2.

SK No 113637 A

Gambar 4.2
Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)							
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)							
1.1	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	10,29	10,50	11,15	13,91	14,31	19,20
1.2	Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik (juta kilo liter)	6,39	8,40	9,30	9,60	10,00	17,40
PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi							
Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi							
2.1	Produktivitas air (*water productivity*) (m^3/kg)[g]	N/A[f]	3,34[1]	3,51[1]	3,57[1]	3,63	3,67[1]

SK No 113638 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan							
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan							
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,90	101,65	104,64	103,00–105,00	105,00–107,00	105,00
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.138,00	2.125,00	2.143,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,87	62,05	62,28	57,00	57,00	57,00
3.4	*Prevalence of Undernourishment (PoU)* (%)	7,63	8,34	8,49	5,50	5,20	5,00
3.5	*Food Insecurity Experience Scale (FIES)* (%)	5,42	5,12	4,79	4,50	4,20	4,00
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan							
Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan							
4.1	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1)a) (juta ha)	23,14	24,11	28,40	25,10	29,10	30,00
4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1)[a] (%)	53,60	56,91	59,69	≤72	≤76	≤80
4.3	Produksi perikanan (juta ton)	23,86	23,16	24,48[e]	29,42	30,58	32,75
4.4	Produksi garam (juta ton)	2,85	1,37	1,09	2,60	2,00	3,40
4.5	Nilai Tukar Nelayan	100,23	100,22	104,69	104,00–106,00	107,00–108,00	107,00
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi							
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi							
5.1	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%) (8.10.1)[c] [d]	19,89[1]	19,67	21,02	20,88	21,44	22,00

SK No 113639 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
5.2	Pertumbuhan wirausaha (%)	1,71[1)]	-7,17	0,08	3,00	2,74[b)]	2,90[b)]
5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	6,20	6,20	5,30	5,40	5,50
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi							
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi							
6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,34	-2,52	3,67	5,30–5,70	5,50–6,08	8,40
6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	17,88	17,36	18,00–18,10	18,80	18,90
6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.153,4	1.049,5	1.191,0	1.236,0	1.279,0	1.347,0
6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,90	17,48	18,69	20,90	21,70	22,50
6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2)[a)] (%)	14,96	13,61	14,30	15,00	15,50	15,70
6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2)[a)] (juta orang)	14,96	13,90	14,70[e)]	14,70	14,85	15,00
6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,24	18,76	19,19	19,91	20,68	21,54
6.8	Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	809,6	826,3	901,0	968,4	1.250–1.400	1.239,3
6.9	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	215,9	272,9	325,4	352,5	483,9	646,1
6.10	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)	3,31	2,13	1,08	3,60–3,80	3,60–3,80	3,60–3,80

SK No 113640 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
7.1	Neraca perdagangan barang (miliar US$)	3,5	28,3	43,8	31,4–31,7[1)]	38,3–38,5	15,0[2)]
7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-4,3	-0,6	41,5	0,8–1,2[1)]	3,9-4,7	9,8[2)]
7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1)[a)] (juta kunjungan)	16,1	4,0	1,6	1,8–3,6	3,5–7,4	9,5–14,3
7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)[1)]	722,2	518,6	530,0[c)]	550,0	600,0	706,8
7.5	Nilai ekspor hasil perikanan (miliar US$)	4,93	5,21	5,72	7,13	7,66	8,00
7.6	Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)[e)]	-8,2	2,4	37,7	8,2–10,1[1)]	8,5–10,7	11,5
PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
8.1	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24	4,51	4,34	4,55–4,56	4,53–4,57	4,57–4,58
8.2	Skor *logistic performance index* (skor)	3,15	3,15	3,15	3,4[1)]	3,4[2)]	3,5[2)]
8.3	Rasio M2/PDB (%)	44,7	46,4	48,0	48,3–49,4	48,3–49,4	50,7–51,4
8.4	Peringkat *travel and tourism competitiveness index* (peringkat)	40	40	N/A[1)]	36–39	35–39	29–34
8.5	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) (%)	0	1,97	29	66[j)]	96[j)]	100

SK No 113641 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
8.6	Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara (%)	7,30	6,99	6,37	menu-run	menu-run	menu-run
8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,38	26,05	26,18	28,94	31,94	34,94
8.8	Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (*database*)[g]	5[k]	8[k]	6[k]	6[k]	8	8

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022; 1) Target Pemutakhiran RKP 2022; dan 2) Target Pemutakhiran RPJMN 2020-2024.

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); b) Penyesuaian target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020 – 2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs; d) Indikator pada level KP yang baru diusulkan untuk naik menjadi indikator level PP; e) Angka realisasi 2021 masih dalam perhitungan; f) Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis; g) Angka realisasi 2021 dan target 2023 masih dikonfirmasi; g) Indikator baru pada level PP; i) Perhitungan menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi *Mobile Positioning Data* (MPD); j) Berdasarkan hasil *Trilateral Meeting* Renja Kementerian Keuangan TA 2022; k) Merupakan angka target dan realisasi indikator pada level KP; dan l) Data TTCI terbit 2 tahun sekali pada tahun ganjil.

Sebagai upaya dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan mencakup tiga fokus yaitu peningkatan produktivitas, inklusif, dan pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut

(1) pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT, transisi menuju energi rendah karbon yang mendukung fokus peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui berbagai strategi yaitu (a) optimalisasi penambahan kapasitas terpasang PLT EBT terutama di daerah defisit listrik melalui mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal, (b) peningkatan kualitas data potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (*derisking*) pengembangan proyek EBT, (c) optimalisasi produksi *biofuel* disertai kebijakan *demand management* dalam negeri, serta (d) pengembangan energi baru terutama *Dimethyl Ether* (DME) dan *green hydrogen*. Sedangkan strategi yang mendukung fokus inklusif dalam transisi energi rendah karbon, antara lain (a) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT energi terbarukan (ET) *on-grid* yang sudah termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara (RUPTL PLN) 2021-2030, serta pembangunan PLT ET *off-grid* untuk daerah 3T, (b) restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi EBT secara bertahap, dan (c) penguatan kewenangan Pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil. Sementara itu, strategi lain dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung fokus pembangunan berkelanjutan yang dilakukan adalah (a) perumusan dan penetapan harga beli EBT yang berkeadilan dan (b) pengembangan teknologi penyimpanan energi.

(2) pada PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, strategi pada fokus peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui (a) akselerasi penyelesaian pembangunan waduk multiguna dan pemanfaatannya serta (b) peningkatan layanan dan efisiensi pada sistem irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. Strategi dalam fokus inklusif dilaksanakan melalui

SK No 113642 A

program padat karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air serta penguatan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) sebagai upaya kolaboratif pengelolaan DAS antarsektor, antarwilayah dan antarpemangku kepentingan. Selanjutnya, strategi pada fokus berkelanjutan di antaranya (a) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada DAS kritis; (b) sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pengelolaan hutan; (c) upaya konservasi daerah tangkapan air dan ekosistemnya; (d) memperketat alih fungsi lahan dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi pengendalian pemanfaatan ruang; (e) peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; (f) memanfaatkan perkembangan teknologi satelit dalam rangka pemantauan dan pengelolaan hutan; (g) melakukan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan praktik tata kelola hutan yang tidak berkelanjutan; (h) mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan perhutanan sosial; serta (i) menyelamatkan daerah aliran sungai dan danau prioritas nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata. Aspek keberlanjutan diwujudkan dalam konservasi ekosistem air dari hulu ke hilir, menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk menjamin ketersediaan air pada masa mendatang. Berbagai fokus kegiatan PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air juga dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen seperti pelibatan masyarakat melalui program kegiatan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan program padat karya percepatan peningkatan tata guna air.

(3) pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi yang dilakukan pada fokus peningkatan produktivitas yaitu (a) peningkatan ketersediaan pangan dengan pengawalan produksi di masa pandemi, produksi pangan yang beragam, pengembangan kawasan sentra produksi pangan, dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian; (b) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir serta penguatan data petani; dan (c) mendorong terciptanya sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan pertanian (korporasi petani), modernisasi pertanian dan peningkatan peran penyuluh pertanian. Selanjutnya, strategi yang dilakukan pada fokus inklusif di antaranya (a) penguatan tata kelola sistem pangan dengan penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan serta (b) peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) dan peningkatan konsumsi sayur dan buah. Pada fokus berkelanjutan, strategi yang dilakukan yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dengan upaya konservasi lahan produktif, budi daya rendah karbon, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.

(4) PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Strategi yang dilakukan pada fokus produktivitas mencakup (a) peningkatan produktivitas usaha kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam; (b) penyediaan sarana dan prasarana perikanan bertaraf internasional, termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar bertaraf internasional; (c) pengembangan usaha berbasis sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan budi daya, kampung nelayan, serta desa wisata bahari; (d) penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (e) penguatan kelembagaan usaha melalui pengembangan korporasi, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inklusif termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan; dan (f) penguatan teknologi dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan.

SK No 113643 A

(5) pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi yang mendukung fokus produktivitas mencakup (a) digitalisasi usaha; (b) perbaikan iklim usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha; (c) pembangunan basis data tunggal UMKM; (d) optimalisasi pengelolaan terpadu UMKM berbasis potensi wilayah, termasuk fasilitasi ruang produksi bersama; (e) peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN; (f) akselerasi penerapan kemitraan usaha; (g) peningkatan kurasi dan standardisasi produk UMKM, termasuk sertifikasi halal; (h) penyediaan akses pembiayaan yang luas melalui KUR, Kredit UMi, PNM Mekaar dan ULaMM, dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM); serta (i) subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni (a) penguatan lembaga dan model layanan pendampingan usaha, (b) penguatan literasi keuangan dan digital, (c) penyediaan informasi pasar melalui *market intelligence*, (d) fasilitasi kemitraan usaha, (e) percepatan transformasi usaha informal menjadi formal, serta (f) optimalisasi layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

(6) pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, strategi yang mendukung fokus produktivitas mencakup (a) peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok dan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (b) peningkatan lokalisasi produk dan bahan baku impor; (c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan rakyat yang bernilai tambah; (e) peningkatan kualitas dan inovasi produk; (f) percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, *event*, dan *meeting, incentive, conference and exhibition*; (g) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (h) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem OSS di daerah; (i) peningkatan investasi skala besar dan menyerap tenaga kerja, utamanya pada sektor industri pengolahan; (j) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung promosi investasi kepada investor; serta (k) peningkatan investasi pada sektor teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni (a) pengembangan produk dan industri halal dan (b) penguatan desa wisata. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) peningkatan investasi utamanya di kawasan industri, serta yang berorientasi ekspor dan hijau; (b) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) fasilitasi kemudahan investasi hijau; serta (d) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan.

(7) pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN, peningkatan produktivitas perekonomian melalui ekspor barang dan jasa utamanya dilakukan dengan meningkatkan ekspor produk manufaktur dan jasa melalui Gerakan "Ayo Ekspor" serta meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global (*Global Value Chain*/GVC). Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah, (b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor, (c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up the World*", serta (e) pemanfaatan teknologi digital dan *online channel (e-commerce)*. Dalam rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor, (b) penguatan informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju *one-stop service export*, (c) fasilitasi UKM produsen untuk berpartisipasi dalam GVC, (d) diversifikasi pembiayaan ekspor, (e) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan eksportir, dan (f) perluasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dalam rangka mendukung fokus berkelanjutan,

SK No 113644 A

strategi yang dilaksanakan mencakup penguatan diplomasi perdagangan terutama hambatan nontarif dan diplomasi terkait isu-isu keberlanjutan dari produk ekspor Indonesia.

(8) pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi yang mendukung fokus produktivitas meliputi (a) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan (termasuk pada UMKM), melalui perpanjangan stimulus restrukturisasi kredit dan program kredit pada UMKM; (b) perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (c) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (d) peningkatan perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (e) penyiapan ekosistem untuk perdagangan komoditas baru, seperti *crypto* dan *metaverse*; serta (f) penguatan kebijakan *asymmetric fiscal incentive* dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi. Dalam rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek risiko perlindungan konsumen; (b) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian; (c) integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah; (d) redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat *multi-channel*; (e) penguatan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi logistik nasional dan dunia usaha; (f) penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (g) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik terkait perkembangan ekonomi; (h) pelaksanaan sensus pertanian 2023 untuk menyediakan data pokok pertanian nasional; dan (i) penguatan pembinaan statistik sektoral untuk mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia. Dalam rangka mendukung fokus berkelanjutan, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan pembiayaan hijau dan (b) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan.

4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga proyek dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa fokus yaitu, urgensi, *impact/outcome/output*, pelaksana, lokasi, *highlight* proyek, dan sumber pendanaan. Sembilan MP tersebut yaitu (1) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (2) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (3) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, (4) Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, (5) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, (6) Pengelolaan Terpadu UMKM, (7) Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas, (8) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, dan (9) Destinasi Pariwisata Prioritas.

SK No 113645 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

- Target porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional mencapai 23% di tahun 2025 (RUEN). Sampai dengan tahun 2021, capaian porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional baru mencapai 11,7%;
- Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 419,3 gigawatt. Pemanfaatan energi terbarukan sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 11,15 gigawatt;
- Indonesia memiliki perkebunan sawit rakyat mencapai 5,8 juta ha. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia;
- Intensitas energi final (indikator konservasi energi) ditargetkan turun 1%/tahun sampai dengan tahun 2025 (KEN dan RUEN);
- Pengurangan emisi GRK sektor energi ditargetkan mencapai 116 juta ton CO_2.

Urgensi

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen ESDM dan BUMN.

Lintas K/L/D:
- Kementan, Kemenpora, Kemen PPPA, dan Pemda.

Lokasi

- Pusat;
- Tersebar 33 provinsi.

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9 persen pada 2023 dan menuju 23 persen pada 2024;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar 135,2 SBM/Miliar rupiah pada tahun 2023 dan 133,8 SBM/Miliar rupiah pada tahun 2024;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8 persen pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).

***Highlight* Proyek**

- Penetapan Wilayah Panas Bumi [APBN];
- PLTS Atap Gedung Pemda [APBN];
- PLTS Atap Gedung K/L [APBN];
- Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, dan Biomassa [APBN];
- Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya [BUMN]*;
- Katalis Merah Putih [BUMN]*;
- Monitoring TKDN [APBN];
- Penurunan Intensitas Energi Final [APBN];
- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi [APBN];

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

- Adanya kemungkinan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh buruk terhadap ketahanan pangan sebagaimana peringatan dini *Food and Agriculture Organization* (FAO) kepada seluruh pemimpin negara;
- Sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta orang telah menderita akibat kekurangan pangan;
- Adanya peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan.

Urgensi

Pelaksana

Lintas K/L/D:
- Kementan, Kemen LHK, Kemendes PDTT, Kemenkeu, dan Kemen ATR/BPN.

Lokasi

7 lokasi *Food Estate*
Banyuasin, Belu, Humbang Hasundutan, Kapuas, Merauke, Pulang Pisau, dan Sumba Tengah.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan ketersediaan beras (45,4 juta ton, nasional);
- Produksi jagung (34,12 juta ton, nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (*baseline* 2020= 101,65; 2023 = 105–107);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023= Rp57 Juta/Orang/Tahun);
- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha di Kalimantan Tengah.

***Highlight* Proyek**

- Optimasi Lahan [APBN];
- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Mendukung *Food Estate* [APBN]*;
- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang [APBN];
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan [APBN];
- Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Mendukung *Food Estate* [APBN]*;
- Kawasan Kopi [APBN];
- Kawasan Kelapa [APBN].

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113646 A

MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional

Urgensi

- Produktivitas perikanan tangkap masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang belum optimal. Produksi perikanan tangkap laut tahun 2019 mencapai 7,8 juta ton (62,3% MSY). Batas optimal pemanfaatan sumber daya ikan adalah 80% MSY (FAO, 1995);
- Pada tahun 2019, ekspor perikanan baru mencapai 4,94 miliar US$, atau berada di posisi 15 negara-negara eksportir produk perikanan. Untuk masuk ke dalam 5 besar eksportir produk perikanan, nilai ekspor produk perikanan perlu ditingkatkan, setidaknya mencapai >USD8 miliar. Terdapat hambatan nontarif ekspor perikanan antara lain berupa keamanan produk pangan/sertifikasi produk;
- Infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap belum memiliki fasilitas yang memadai sesuai standar internasional yang berdampak pada mutu dan nilai tambah hasil tangkapan yang didaratkan.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen KP (untuk Minahasa Utara dan Rokan Hilir) dan Kemenhub (untuk Maluku).

Lintas K/L/D:
- Kemen ESDM dan Kemen ATR/BPN.

Lokasi

Kab. Minahasa Utara, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Maluku.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Produksi perikanan tangkap 9,00 juta ton pada tahun 2023 dan 10,10 juta ton pada 2024;
- Nilai Tukar Nelayan 107–108 pada tahun 2023 dan 107 pada tahun 2024;
- Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US$ pada tahun 2024;
- Terbangunnya 3 pelabuhan perikanan terintegrasi pada tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional [APBN];
- Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan [APBN];
- Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Provinsi Maluku [APBN];
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk [APBN]

MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Urgensi

- Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian berbasis produksi pertanian dengan akses pasar;
- Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23%;
- Adanya keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi, dan pasar;
- Perlunya peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nelayan, Nilai Tukar Petani tahun 2021: 104,64, Nilai Tukar Nelayan tahun 2021: 104,69.

Pelaksana

Lintas K/L/D:
- Kementan, Kemen KP, dan BUMN.

Lokasi

150 Klaster Korporasi.

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP 105–107);
- Meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp57,00 juta/tenaga kerja/tahun;
- Peningkatan Nilai Tukar Nelayan 107–108;
- Terbentuk 150 klaster korporasi petani.

***Highlight* Proyek**

- Sarana Pakan dan Obat Ikan yang Dikembangkan untuk Mendukung Korporasi Perikanan Budi daya [APBN];
- Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya (Korporasi Nelayan) [APBN];
- Kawasan Korporasi Perbenihan [APBN];
- Kawasan Korporasi Serealia [APBN];
- Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani [APBN];
- Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis Digital [BUMN].

SK No 113647 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Urgensi

- Udang merupakan komoditas utama perikanan Indonesia. Pada tahun 2019 nilai ekspor udang nasional mencapai 1,72 miliar US$ (34,83 persen total ekspor perikanan nasional) dengan negara tujuan utama AS dan Jepang;
- Indonesia adalah negara produsen udang terbesar kedua setelah Cina. Pada tahun 2018, produksi udang Indonesia mencapai 908 ribu ton atau 11,8% produksi udang dunia;
- Bandeng merupakan komoditas unggulan dengan pasar domestik;
- Potensi lahan budi daya air payau Indonesia sebesar 2,96 juta hektar baru dimanfaatkan sekitar 756,92 ribu ha, atau 25,58% (2018);
- Pemanfaatan lahan budi daya masih dilakukan secara tradisional, sehingga rata-rata produktivitas lahan hanya mencapai 1,5 ton/ha/tahun.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen KP, Pemda.

Lintas K/L/D:
- Kemen PUPR, Kemendag, Kemen ATR/BPN.

Lokasi

Banten, Pantai Utara Jabar, Pantai Utara Jateng, Pantai Utara Jatim, Sulsel, Lampung, dan NTB.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Peningkatan produksi ikan budi daya 9,48 juta ton pada 2023 dan 10,32 pada 2024;
- Peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan (Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan 104 pada tahun 2023 dan 105 pada tahun 2024);
- Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US$ pada 2024 (udang menyumbang 35–40%);
- Jumlah kluster kawasan sentra produksi perikanan budi daya komoditas unggulan (termasuk kluster udang) sebanyak 50 kawasan di tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat [APBN];
- Kluster Kawasan di Lokasi *Major Project* Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng [APBN];
- Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP)[APBN];
- Infrastruktur Budi Daya Udang Berkelanjutan yang Ditingkatkan [APBN];
- Sarana Pascapanen Mendukung Revitalisasi Tambak [APBN];
- Mobil Refrigasi (Berpendingin) Mendukung Revitalisasi Tambak [APBN];
- Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat [APBN];
- Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat [APBN].

MP Pengelolaan Terpadu UMKM

Urgensi

- UMKM berkontribusi pada 57% PDB Nasional serta menyerap 97% dari total jumlah pekerja;
- Pelaksanaan program pengembangan UMKM tersebar di berbagai K/L, dan belum terintegrasi dengan baik;
- UMKM menghadapi kendala pada berbagai aspek usaha di antaranya bahan baku, proses produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan SDM;
- UMK yang menjalin kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global masih rendah, yaitu sebesar 7%;
- Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14% terhadap total ekspor Indonesia.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen KUKM

Lintas K/L/D:
- BSN, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenparekraf, Kemen PPPA, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kementan, KKP, KLHK, dan KPPU.

Lokasi

Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024;
- Terbangunnya 10 Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing;*
- Pengembangan jaringan usaha untuk 350 koperasi.

***Highlight* Proyek**

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* [APBN];
- Sertifikat Halal UMK [APBN];
- Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk [APBN];
- UKM/*Start-Up* yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis [APBN];
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM [APBN];
- Perluasan Jaringan Usaha Koperasi Pangan [APBN].

SK No 113648 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas

Urgensi

- Kontribusi PDB industri menurun menjadi <20% dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional;
- Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju lebih rendah dari pertumbuhan produktivitas di negara lain;
- Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara sejajar; dan
- Potensi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri sangat besar.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemenperin.

Lintas K/L/D:
- Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemenparekraf, Kemendag, BSN, KPPU, BUMN dan Swasta

Lokasi

Terbuka untuk 34 provinsi dengan fokus pada 7 subsektor prioritas (Industri tekstil, Industri makanan dan minuman, industri kimia, industri farmasi, industri elektronika, industri otomotif, dan industri alat kesehatan).

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menjadi 5,50–6,08% dan kontribusi PDB industri pengolahan non migas menjadi 18,80% (2023);
- Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan menjadi 11,18%(2023);
- Meningkatnya rerata Indonesia *Industry* 4.0 *Readiness Index* menjadi ≥ 3.0 (2023);
- Meningkatnya perusahaan dengan nilai Indonesia *Industry* 4.0 *Readiness Index* menjadi ≥ 3.0 sebanyak 52 perusahaan (2023).

***Highlight* Proyek**

- Pendampingan penerapan Industri 4.0 [APBN];
- Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia Dasar Intermediate dan Bahan Baku Obat (BBO) [BUMN];
- Pembangunan Pabrik Amurea Papua Barat [BUMN];
- Pabrik Aluminium *Fluoride*-II PKG [BUMN].

MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Urgensi

- Nilai kontribusi PDB industri pengolahan menurun dibawah nilai 20%, dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional;
- Tingginya ketergantungan impor di mana sekitar 71% impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri;
- Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara sejajar;
- Masih rendahnya investasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk mineral; dan
- Kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dalam bentuk kawasan industri dan smelter di luar Pulau Jawa.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, BUMN dan Swasta.

Lintas K/L/D:
- Kemenperin, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemen ESDM, Pemda, BUMN, dan Swasta.

Lokasi

Kawasan Industri
15 kawasan industri yang terletak di Provinsi: Sumatera Utara, Kep. Riau (2), Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Smelter
31 Smelter yang terletak di Provinsi: (1) Nusa Tenggara Barat, (3) Kalimantan Tengah, (8) Kalimantan Barat, (1) Kalimantan Selatan, (6) Maluku Utara, (1) Sulawesi Selatan, (4) Sulawesi Tengah, (7) Sulawesi Tenggara.

Sumber Pendanaan

APBN

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4–6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp483,9 triliun (2023) dan Rp646,1 triliun (2024);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023) dan 22,5 juta orang (2024);
- Beroperasinya 9 Kawasan Industri Prioritas (2023);
- Dikembangkannya 6 Kawasan Industri Potensial (2023);
- Beroperasinya 31 Smelter.

***Highlight* Proyek**

- Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi [APBN]*;
- Industri Logam yang Terfasilitasi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas [APBN];
- Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas (*Review* Perencanaan dan Pembangunan Pirnas) Kantor Pengelola dan Jalan [APBN];
- Industri Smelter Logam Bukan Besi yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya [APBN].

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113649 A

MP Destinasi Pariwisata Prioritas

4.1.1.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian;
(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat;
(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru; dan
(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi.

SK No 113650 A

4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.1 Pendahuluan

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 ditekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah dengan strategi dan pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Arah kebijakan tersebut termasuk dalam Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan keunggulan wilayahnya masing-masing. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar, wilayah-wilayah yang saling tersambung, serta ekonomi lokal yang makin inovatif dan kreatif. Tujuannya untuk mencapai peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, nilai tambah, dan ekspor yang lebih baik. Saat ini pengembangan wilayah masih dihadapkan pada tantangan pemulihan pascapandemi. Selain itu, perlunya *safe-guarding* dalam penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 dan defisit APBN kembali ke level maksimal 3 persen (Amanat UU No. 2/2020) juga menjadi tantangan untuk tahun 2023.

Maka dari itu, pengembangan wilayah pada tahun 2023 diarahkan pada upaya-upaya (1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, (2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, (3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan (4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2020–2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

SK No 113651 A

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline*	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)**						
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)[a]	3,86	-0,82	4,86	5,79–6,15	6,2–6,9	7,90
1.2	IPM KTI (nilai min–maks)[b]	60,84–76,61	60,44–76,24	60,62–76,88	62,06–78,11	62,54–78,18	63,94–79,25
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%)[c]	11,60	11,99	11,62	10,97	9,4–10,2	7,13
2	**Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)**						
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)[a]	5,23	-2,30	3,43	4,99–5,33	5,1–5,6	6,30
2.2	IPM KBI (nilai min–maks)[b]	69,57–80,76	69,69–80,77	69,90–81,11	70,51–82,99	70,48–82,43	71,90–84,23
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%)[c]	8,61	9,74	9,23	8,64	7,3–7,9	6,33

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 dan 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 dan 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 dan 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020–2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020–2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2023 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020–2024.

SK No 113652 A

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

No.	Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	N/A[a]	-0,29[b]	-0,34[b]	>1	>1	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan						
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	10[c]	10	10	10	10	10 (kumulatif)
	Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (jumlah destinasi)	N/A[d]	9	9	9	9	9 (kumulatif)
	KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	14	14 (kumulatif)	18 (kumulatif)	18 (kumulatif)
	KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI)	8 (kumulatif nasional)	5	11	11 (kumulatif)	15 (kumulatif)	27 (kumulatif)
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (jumlah KPBPB)	2	2	2	2	2	2
3	Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun[e]						
	Kelapa Sawit (%)	9,9	2,5	-4,3	5,9	N/A[f]	6,0
	Kakao (%)	-4,3	-2,9	-0,9	2,5	2,6	2,7
	Kopi (%)	-0,5	0,2	2,8	1,5	1,5	1,5
	Kelapa (%)	-0,01	-0,1	1,5	0,7	0,8	0,9
	Tebu (%)	2,6	-4,3	13,5	6,0	6,5	1,5
	Karet (%)	-9,1	-12,6	8,2	0,9	1,5	1,9
	Lada (%)	-0,7	0,7	-2,5	0,1	0,2	0,4
	Pala (%)	-7,7	-0,3	8,6	0,1	0,2	0,1
	Cengkeh (%)	7,5	0,01	-5,7	0,1	0,1	0,1
	Perikanan Tangkap (%)	2,3	2,3	4,9**	9,9	4,9[g]	7,1
	Perikanan Budidaya (%)	3,5	-5,3	31,2	5,2	5,1	4,8
	Garam (%)	5,6	-51,9	-20,4	-16,1	15,95	3,0

SK No 113653 A

No.	Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3	3	3
5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6	6	6
6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4	4	4
7	Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha)	N/A[h)]	N/A[h)]	N/A[h)]	6.671[i)]	6.671[i)]	6.671[i)]
8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota)	20	11	52	52	52	52[j)]
9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11[k)]	4	4	4	4	4
10	Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1*	1	0	0
11	Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPerpres)	1	1	3	6	6	0
12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) (jumlah materi teknis dan Rancangan Peraturan)	0	2	2*	1	5	0
13	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen)	0	0	0*	1[l)]	0	0
14	Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen)	0	0	1	4	1	0

SK No 113654 A

No.	Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
15	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52 (Mandiri 1.444; Berkembang 54.291; Tertinggal 19.152)	58,71	60,05	61,00	61,50	62,05 (Mandiri 6.444; Berkembang 59.291; Tertinggal 9.152)
16	Persentase kemiskinan perdesaan (%)	12,60	13,20	12,53	11,20–11,70	10,80–11,20	9,90–10,40
17	Jumlah revitalisasi Badan Usaha Milik (BUM) Desa berdasarkan status (BUM Desa)	Maju 600; Berkembang 5.000	Maju 800; Berkembang 6.000	Maju 1.000; Berkembang 7.000	Maju 1.250; Berkembang 8.000	Maju 1.500; Berkembang 9.000	Maju 1.800; Berkembang 10.000
18	Jumlah revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan status (BUM Desa Bersama)	Maju 120; Berkembang 200	Maju 130; Berkembang 210	Maju 150; Berkembang 230	Maju 170; Berkembang 260	Maju 150; Berkembang 230	Maju 200; Berkembang 300
19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,10	61,32[m)]	61,32[m)]	55,66	58,40	58,70
20	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,55	48,74[n)]	51,85[n)]	53,12	55,31	57,50
21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222[o)]	56[o)]	112[p)]	176[p)]	222
22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (nilai)	0,42	0,43[o)]	0,45[o)]	0,47	0,50	0,52
23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	62[q)]	62[q)]	62[q)]	37 (terentaskan 25 kabupaten)
24	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	25,5	24,3–24,8	24,0–24,5	23,5–24,0

SK No 113655 A

No.	Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal (nilai)	58,91	59,02	59,33	60,7–61,2	61,5–62	62,2–62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	N/A[r)]	29	42	50	75	100
27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	159	22[s)]	84[t)]	74	76	76
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	328	359	409	455	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	51	360	318	475	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	66,05[u)]	69,55[v)]	82,85	90,90	100
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km^2)	49.728 (nasional)	4.903	0	989.342	498.162[w)]	14.000
32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km^2)	40.216 (nasional)	17.95,79	13.207	584.030	479.647[w)]	14.000
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.339	4.000	4.000	4.000
34	Jumlah layanan data *center* jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	14	34	51	46	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	34,25[x)]	65,13	24	30	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	50[y)]	219[z)]	318	426	542

SK No 113656 A

No.	Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	24.279.103,73 (kumulatif)	2.240.576 (4.481.153 Bidang)	2.443.986 (4.887.971 Bidang)	2.438.817 (4.877.634 Bidang)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	35.721.146,84 (kumulatif)	1.532.250	2.022.250	505.182	7.110.790
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	90	62	492 (kumulatif)
41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1.339	2.386,37	2.906,47	519	5.000
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10	3	33	33	10	33
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR)	59 (nasional)	25	26	51	43	42
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi Teknis RDTR (materi Teknis dan Raperda RDTR)	15 (nasional)	9	0*	0	0	5
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KRB/KPPN) (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	13 (nasional)	5	16*	12	0	10
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Raperda RDTR)	99	25	81	182	189	313

SK No 113657 A

No.	Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	36	40	38	48	43	43
49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	12	0	1	1	5	2
50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	4 (nasional)	3	2	0	8	2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) Nilai *baseline* rasio investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) tidak tercantum dalam RPJMN 2020-2024, selain itu *baseline*nya bernilai N/A juga dikarenakan ketidaktersediaan data yang mengakibatkan belum dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); c) Jumlah DPP yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam RPJMN 2020-2024, sehingga tahun 2019 belum terdapat ditentukan nilai *baseline*nya; e) Angka sangat sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Kementerian PPN/Bappenas; f) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023; g) Penjabaran lokasi pengembangan perikanan tangkap masih menunggu tahapan perencanaan lebih lanjut pada unit kerja pengampu sektor terkait; h) Proses pengkajian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; i) Sesuai dengan Tahap I di dalam Lampiran II UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara; j) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020–2024; k) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); l) Angka target 2022 termutakhir dari dokumen perpres pemutakhiran RKP Tahun 2022, penentuan target belum selesai di tahun 2021 karena menunggu disahkannya UU IKN, kegiatan perlu dilanjutkan ke 2022; m) Jika mengacu pada pemutakhiran keterangan yang termuat adalah Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN dari total 62 KPPN; n) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendes PDTT No. 132/PRC.04.01/III/ 2022 tanggal 31 Maret 2022; o) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No. PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No. HMS.65/1705/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022; p) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Rancangan Perpres Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020–2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); q) Sesuai PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2023 tidak mengalami perubahan atau tetap 62 kabupaten; r) *Baseline* N/A karena ketika terjadi bencana belum dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; s) Setelah adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19, target diturunkan menjadi level provinsi; t) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan Prioritas Nasional Triwulan IV TA. 2021 pada lingkup Kemendagri; u) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Desember 2021; v) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Mei 2022; w) Kegiatan dilaksanakan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Alokasi anggaran sepenuhnya berasal dari investasi BUMN; x) Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; y) Rekapitulasi capaian Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD yang disampaikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pada Juni 2022; z) Rekapitulasi capaian Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD yang disampaikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pada Juni 2022; *) Hingga TW III; **) Angka target 2021 pada Pemutakhiran RKP 2022.

4.1.2.3 Program Prioritas Nasional

Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas (PP) sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.3. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN 2 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

SK No 113658 A

Gambar 4.3
Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera							
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera							
1.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun)[a]	4,55	-1,20	3,18	4,43–4,74	4,7–5,2	5,60
1.2	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min–maks) [b]	69,57–75,48	69,69–75,59	69,90–75,79	70,51–76,91	70,48–77,01	71,90–78,19
1.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%) [c]	9,82	10,22	9,75	9,13	8,2–8,6	7,06
PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali							
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali							
2.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun)[a]	5,47	-2,68	3,52	5,20–5,55	5,3–5,8	6,30

SK No 113659 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2.2	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min–maks) b)	71,50–80,76	71,71–80,77	72,14–81,11	73,26–82,99	73,05–82,43	74,60–84,23
2.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) c)	8,16	9,56	9,03	8,45	6,9–7,6	6,05
PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara							
3.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun) a)	4,47	-0,71	2,39	5,12–5,47	5,1–5,7	5,10
3.2	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min–maks) b)	65,23–68,14	65,19–68,25	65,28–68,65	66,87–70,20	66,63–69,59	68,35–71,91
3.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%) c)	17,38	17,81	17,22	16,75	13,8–14,8	10,69
PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan							
4.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun) a)	4,96	-2,28	3,18	5,22–5,52	5,5–6,0	5,40
4.2	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min–maks) b)	67,65–76,61	67,66–76,24	67,90–76,88	69,60–78,11	68,91–78,18	71,22–79,25
4.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%) c)	5,81	6,16	5,84	5,15	4,3–5,1	2,91
PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi							
5.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun) a)	6,95	0,23	5,67	6,58–7,07	7,1–7,8	6,90
5.2	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min–maks)b)	65,73–72,99	66,11–72,93	66,36–73,30	67,72–74,48	67,73–74,45	69,41–75,83
5.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%) c)	10,06	10,41	10,04	9,58	8,3–8,8	6,48
PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku							
6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) a)	5,79	1,98	9,41	6,66–6,99	9,2–10,0	6,00

SK No 113660 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)[b]	68,70–69,45	68,49–69,49	68,76–69,71	70,92–71,08	70,71–71,18	72,25–72,33
6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%)[c]	13,24	13,45	12,20	12,19	10,6–11,4	8,21
PP 7. Pembangunan Wilayah Papua							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua							
7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun)[a]	-10,69	1,40	10,29	5,92–6,26	7,3–8,4	6,00
7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks)[b]	60,84–64,70	60,44–65,09	60,62–65.26	62,06–65,92	62,54–66,55	63,94–67,24
7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)[c]	25,43	25,65	26,12	23,84	22,0–23,6	16,29

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 dan 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 dan 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 dan 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020–2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.

Masing-masing PP dalam PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2023 didukung oleh lima Kegiatan Prioritas (KP). Fokus untuk masing-masing KP tersebut antara lain:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis terbagi ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu (a) tahap pembangunan kawasan; (b) tahap operasionalisasi kawasan; dan (c) tahap peningkatan investasi. Setiap jenis kawasan strategis memiliki arah pengembangan tersendiri.

Pengembangan kawasan strategis berbasis industri difokuskan pada pengembangan beberapa kawasan yang terdiri dari (a) Kawasan Industri (KI), (b) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, dan (c) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB). Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) menjaga keselarasan Kawasan Industri yang akan dikembangkan dengan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri yang disusun, (c) mengembangkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis, serta (d) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha potensial. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis industri pada tahap operasionalisasi kawasan meliputi (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar kawasan dan (b) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal.

SK No 113661 A

Selain kawasan strategis berbasis industri, terdapat kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi (a) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), (b) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi, serta (c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengembangkan amenitas pariwisata didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) memperkuat aspek mitigasi bencana khususnya pada kawasan dengan risiko bencana tinggi, (c) meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional, (d) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan *hinterland*-nya, dan (e) menjaga keselarasan Kawasan Strategis Pariwisata yang akan dikembangkan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata yang disusun. Pada tahap operasionalisasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengoptimalkan peranan kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah, serta (b) meningkatkan kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan *multistakeholder* di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(2) Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan

(a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;
(b) penguatan manajemen bencana (alam dan nonalam), khususnya di perkotaan yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi, dan investasi besar;
(c) penguatan kota sedang dan kota kecil (*intermediary cities*) untuk meningkatkan ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;
(d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan *compact* dan *mixed-use cities*, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas, meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (*urban sprawling*) dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa mendatang.

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

(a) peningkatan produktivitas desa dan pemulihan ekonomi desa melalui penguatan BUM Desa dan pengembangan desa wisata serta penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif;
(b) peningkatan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis berbasis kawasan skala lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
(c) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
(d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
(e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;

SK No 113662 A

(f) perluasan akses, serta penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
(g) fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis terhadap upaya pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
(h) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa, serta penataan aset desa.

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

(a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa;
(b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, inovasi daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif;
(c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung investasi dan kemudahan berusaha di daerah;
(d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung transformasi digital;
(e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
(f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal melalui TKD berbasis kinerja;
(g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui penguatan *Local Taxing Power* dan pemanfaatan sumber pendanaan lainnya;
(h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
(i) peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan penganggaran dan pengalokasian yang efisien, sinergis, dan berkesinambungan dengan berfokus pada pemerataan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai karakteristik daerah;
(j) penyelesaian rencana tata ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kota untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik *(Online Single Submission),* peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan *Aerospace*, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam *Aero Technic* yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;

SK No 113663 A

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, pala, lada, tebu, pengembangan perikanan tangkap serta perikanan budi daya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air tawar, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, ikan air laut serta pemberian sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

SK No 113664 A

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Sumatera

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Lampung	Pesisir Barat*
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai*
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara*
Sumatera Utara	Nias*, Nias Utara*, Nias Barat, Nias Selatan

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; KEK Singhasari, KEK Gresik, DPP Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KI Pancapuri dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang dan KEK Lido yang

SK No 113665 A

berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kakao, garam, pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul udang, ikan air tawar, dan benih udang, ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau dan kepiting, serta sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar; Kota Baru Maja; 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023 yaitu KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Magelang, KPPN Pandeglang, dan KPPN Pamekasan dari total 8 KPPN; percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berlandaskan *Grand Design* Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022–2042, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

SK No 113666 A

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

4.1.2.3.3 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelapa, kakao, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut kepada masyarakat dan sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat. Pengembangan komoditas cengkeh juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan

SK No 113667 A

Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.7; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113668 A

Tabel 4.7
Daerah Tertinggal (DT) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara*
Nusa Tenggara Timur	Malaka*, Sumba Timur*, Lembata*, Kupang*, Belu*, Sumba Barat*, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.4 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; KI Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas karet, kelapa, lada, kopi, pengembangan perikanan tangkap, serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan memberikan calon induk unggul, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat. Pengembangan komoditas kakao juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, dan PKSN Long Nawang, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Paloh Aruk, PKSN Long Nawang, dan PKSN Nunukan; serta penanganan terhadap 35 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan, 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung

SK No 113669 A

pengembangan *food estate* yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif Presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; pengembangan 11 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Berau dan KPPN Barito Kuala; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR Ibu Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

4.1.2.3.5 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-

SK No 113670 A

Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kakao, kopi, kelapa, garam, tebu, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, dan kepiting, serta sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, dan Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; revitalisasi 18 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); pengembangan 16 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Minahasa Utara dan KPPN Pinrang; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.8; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, Peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

SK No 113671 A

Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.8
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Sulawesi

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una*

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.6 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan tangkap, dan perikanan budidaya melalui pemberian benih ikan air laut serta sarana produksi usaha yang akan disalurkan ke masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan satu kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki, dengan mengutamakan pembangunan

SK No 113672 A

infrastruktur pada PKSN Daruba; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 29 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; revitalisasi 3 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai), pengembangan 2 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 1 KPPN yaitu KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.9; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113673 A

Tabel 4.9
Daerah Tertinggal (DT) di Kepulauan Maluku

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur*, Kepulauan Aru*, Seram Bagian Barat*, Buru Selatan*, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar
Maluku Utara	Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula*

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.7 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sagu, kopi, kakao, kelapa, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas pala, sapi dan kenaf juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan satu kota baru (Sorong) dan satu kota sedang (Jayapura);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 27 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom, Kawasan Transmigrasi Salor, dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); pengembangan 4 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Kota Jayapura dan KPPN Raja Ampat; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.10; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi), percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan

SK No 113674 A

dan penetapan RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.10
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Papua

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Papua	Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*, Yalimo*, Puncak*, Lanny Jaya*, Intan Jaya*, Dogiyai*, Paniai*, Mamberamo Tengah*, Mamberamo Raya*, Jayawijaya*, Deiyai*, Mappi*, Asmat*, Pegunungan Bintang*, Nabire*, Supiori*, Keerom*, Waropen, Boven Digoel
Papua Barat	Sorong Selatan*, Tambrauw*, Teluk Wondama*, Sorong, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Maybrat, Pegunungan Arfak

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 .

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP)

Pada tahun 2023, perencanaan dan penganggaran PN 2 akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yakni Pembangunan Batam-Bintan; Pengembangan Wilayah (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; Pembangunan Ibu Kota Nusantara; Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay; Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda; PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria). Dengan rincian informasi urgensi, *outcome/impact/output*, pelaksana, lokasi, sumber pendanaan dan *highlight* proyek yang dijabarkan sebagai berikut.

SK No 113675 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

Urgensi

- Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau pada 4 tahun terakhir (2018–2021) berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, sementara itu pada tiga wilayah tersebut telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Terdapat beberapa pusat pertumbuhan ekonomi namun belum optimal pengembangannya, yaitu KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan *Aerospace*, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PPN/Bappenas.

Lintas K/L/D:
- BPKPB Batam, Kemenparekraf; Kemenperin, Kemendes PDTT, dan BUMN.

Lokasi

Kota Batam, Kabupaten Bintan.

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,1–5,6% di tahun 2023;
- Tercapainya rasio pertumbuhan investasi kawasan Batam-Bintan terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau > 1 di tahun 2023 dan 2024.

***Highlight* Proyek**

- Pengembangan Bandara Hang Nadim [BUMN];
- Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong–*Underpass* Pelita) - Kota Batam [APBN];
- Jalan Jend. Sudirman Simpang Nagoya Gate–Simpang Bandara [APBN];
- *Water Treatment Plant* (WTP) kapasitas 350 liter/detik [APBN];
- Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil [APBN].

MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar

Urgensi

- Peningkatan jumlah penduduk perkotaan;
- Pada tahun 2045, 67,1% penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan atau setara dengan 220 juta jiwa;
- Urbanisasi belum menyejahterakan;
- Kenaikan 1% penduduk perkotaan hanya meningkatkan PDB sebesar 1,4%;
- Kontribusi jumlah penduduk dan PDRB WM;
- Sekitar seperempat penduduk Indonesia tinggal di 10 WM dan kontribusi PDRB WM hampir setengah PDB Nasional tanpa migas.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian.

Lintas K/L/D:
- Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ATR/BPN, dan BPS.

Lokasi

- WM Palembang: Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan);
- WM Denpasar: Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan (Provinsi Bali);
- WM Banjarmasin: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan);
- WM Makassar: Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan).

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Wilayah Metropolitan sebesar 2% menjadi 50,69 (Skenario Rendah) di tahun 2023 dan 4% menjadi 51,87 (Skenario Rendah) di tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- Pengendalian banjir Sungai Lambidaro–Sekanak yang dibangun - Provinsi Sumatera Selatan [APBN];
- Bendungan Sidan yang dibangun - Provinsi Bali [APBN]*;
- Publikasi/Laporan Metropolitan *Statistical Area* - Provinsi Sulawesi Selatan [APBN];
- Bendungan Pamukkulu yang dibangun - Provinsi Sulawesi Selatan [APBN]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113676 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Urgensi

- Kesenjangan KBI dan KTI: Kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi dengan angka 79.30% dari PDB Indonesia;
- Sekitar 56,25% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa & Sumatera terus menarik mayoritas investasi langsung luar negeri (FDI);
- Konversi Lahan Terbesar terjadi di Pulau Jawa;
- Penurunan daya dukung lingkungan Jakarta.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Otorita IKN.

Lintas K/L/D:
- Kemen PPN/Bappenas[b)], Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemenkeu[b)], Kemenhub, Kemen Kominfo, Kemen Investasi/BKPM, ANRI, BKN, POLRI, BUMN.

Lokasi

Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur).

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,5–6,0% pada tahun 2023 (*baseline* 2019: 4,96%)

***Highlight* Proyek**

- Pemulihan ekosistem Area IKN [APBN];
- Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya [APBN];
- Pembangunan *Command Center Smart Security* KIPP IKN [APBN];
- Pembangunan Baru Kawasan Permukiman [APBN];
- Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi [APBN][a)];
- Pembangunan Jalan IKN [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap III – PN [APBN];
- Pembangunan infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara [BUMN];
- Pembangunan Jaringan Interkoneksi (listrik) [BUMN];
- Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi [BUMN];
- Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara [BUMN].

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN;
b) : Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran IKN.

MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Urgensi

- Adanya tren urbanisasi yang terus meningkat tetapi tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Sebagai percontohan pengembangan kota publik inklusif yang terencana dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- Adanya potensi kolaborasi pemerintah dan badan usaha dalam memaksimalkan keuntungan aglomerasi perkotaan.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian;

Lintas K/L/D:
- Kemen PUPR, Kemen ESDM, dan Kemenhub.

Lokasi

- Maja (Kab. Lebak, Provinsi Banten);
- Tanjung Selor (Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara);
- Sofifi (Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara);
- Sorong (Kota Sorong, Provinsi Papua Barat).

Sumber Pendanaan

APBN dan KPBU.

Impact/ Outcome/ Output

Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Kota Baru sebesar 3% menjadi 37,98 (Skenario Rendah) di tahun 2023 dan 6 % menjadi 39,14 (Skenario Rendah) di tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- KSCS - Pipa Cabang WTP Rangkas Bitung yang dibangun - Provinsi Banten [APBN];
- PLTS Atap - Provinsi Kalimantan Utara [APBN];
- PLTS Atap - Provinsi Maluku Utara [APBN];
- Air baku KEK Sorong yang dibangun - Provinsi Papua Barat [APBN];
- SPAM Karian–Serpong (Sisi Hulu) (*Unsolicited*) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) [KPBU]*;
- Jalan Tol Serpong–Balaraja (*Unsolicited*) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) [KPBU]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113677 A

MP Wilayah Adat Papua:
Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Urgensi

- Masih banyaknya daerah tertinggal;
- Kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit;
- Kualitas SDM terendah;
- Jumlah penduduk miskin tertinggi.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PPN/Bappenas.

Lintas K/L/D:
- Kemendes PDTT, Kemen ESDM, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenperin, Kementan, Kemenhub, Kemenag, Kemnaker, Kemen KP, dan LPP RRI.

Lokasi

- Wilayah adat Laa Pago (Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak);
- Wilayah adat Domberay (Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong).

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2–50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 64,3–64,8 pada tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2–51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,0–65,5 pada tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- Air Baku KEK Sorong yang dibangun [APBN];
- Kawasan Sagu [APBN];
- Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) [APBN];
- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (MP) [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Anggi – PN [APBN];
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II [APBN];
- Rumah Khusus [APBN];
- Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran [APBN];
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM) [APBN].

MP Pemulihan Pascabencana:
Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

Urgensi

- Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki kegiatan pascabencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan untuk setiap sektornya;
- Masih minimnya manajemen penanganan pascabencana lintas sektor pembangunan;
- Belum tuntasnya target pemulihan di wilayah pascabencana sesuai dengan target dalam RPJMN 2020-2024.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PPN/Bappenas dan BNPB.

Lintas K/L/D:
- BNPB, Kemendes PDTT, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kemensos, dan Kemenhub.

Lokasi

- Provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kab. Donggala);
- Provinsi NTB;
- Provinsi Banten (Kab. Serang dan Kab. Pandeglang).

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

Memulihkan pelayanan publik yang terdampak akibat bencana sampai dengan 75% pada tahun 2023 dan 100% pada Tahun 2024 hingga berfungsi untuk melakukan pelayanan masyarakat.

***Highlight* Proyek**

- Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu [APBN];
- *Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction* Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala, dan Pelabuhan Wani - Provinsi Sulawesi Tengah [APBN];
- Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah [APBN];
- Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana - Kab. Pandeglang [APBN];
- Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pascabencana [APBN].

SK No 113678 A

MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara

Urgensi

- Mendorong pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Belum optimalnya aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan negara sehingga perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan negara;
- Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Lokasi

- PKSN Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas);
- PKSN Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan);
- PKSN Atambua (Provinsi NTT, Kabupaten Belu);
- PKSN Kefamenanu (Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara);
- PKSN Jayapura (Provinsi Papua, Kota Jayapura);
- PKSN Merauke (Provinsi Papua, Kabupaten Merauke).

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN menjadi 0,50 di Tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk menjadi 0,50 di tahun 2023 dan 0,52 di tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua menjadi 0,46 di tahun 2023 dan 0,48 di tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura menjadi 0,43 di tahun 2023 dan 0,45 di tahun 2024.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- BNPP sebagai koordinator pembangunan.

Lintas K/L/D:
- Kemen KP, Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan, dan Kemendes PDTT.

Sumber Pendanaan

APBN.

***Highlight* Proyek**

- Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi) [APBN];
- Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan [APBN];
- Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - BTS. Kota Atambua–Motoain [APBN];
- Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Batas Kota Soe–Kefamenanu–Olefaub [APBN];
- Jalan Desa Strategis yang Ditingkatkan di Kawasan Perbatasan - Kab. Sambas [APBN];
- Embung yang Dibangun di Kawasan Perbatasan [APBN];
- Kawasan Kelapa - Kab. Sambas [APBN];
- Kawasan Sagu - Provinsi Papua [APBN];
- Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Merauke [APBN].

MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)

Urgensi

- Adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat;
- Pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat yang telah dilakukan secara masif belum secara signifikan mengurangi ketimpangan pemilikan lahan karena pemberian sertipikat tanah selama ini lebih banyak sebagai jaminan hukum terhadap tanah yang telah dikuasai masyarakat (Legalitas Aset Tanah);
- Kesejahteraan masyarakat pemilik tanah masih rendah.

Lokasi

Bali, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah menjadi 5 di tahun 2023 dan 2024;
- Menurunkan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah sebesar 0,0047 di tahun 2023 dan 0,0061 di tahun 2024;
- Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria sebesar 20% di tahun 2023 dan 25% di tahun 2024.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen ATR/BPN.

Lintas K/L/D:
- Kemendes PDTT, Kemen KUKM, Kementan, dan KSP.

Sumber Pendanaan

APBN.

***Highlight* Proyek**

- Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan [APBN];
- PBT Redistribusi Tanah [APBN];
- SHAT Redistribusi Tanah [APBN];
- Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun ke 2 [APBN];
- Data GTRA Provinsi [APBN];
- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR,SHAT) [APBN];
- Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan [APBN];
- Fasilitasi Pengembangan BUM Desa [APBN].

SK No 113679 A

4.1.2.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;
(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Perubahan Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3) Revisi Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);
(4) Revisi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;
(5) Revisi Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara;
(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional;
(8) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Barat;
(9) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur I;
(10) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur II;
(11) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara;
(12) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape*;
(13) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser;
(14) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Cagar Budaya Muarajambi.

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

4.1.3.1 Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menghambat pencapaian sebagian besar target pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya mencapai 72,29 pada tahun 2021. Jumlah penganggur pun masih tinggi, yaitu sebanyak 8,4 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen (Sakernas, Februari 2022). Kondisi orang yang bekerja pun belum pulih. Pekerja informal masih sebesar 59,45 persen dari seluruh pekerja. Jumlah setengah penganggur juga masih sebanyak 10,65 juta orang, meskipun telah menurun dari 11,42 juta pada bulan Februari 2021. Tingkat pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurun dari 11,45 persen menjadi 10,38 persen dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menurun dari 8,55 persen menjadi 8,35 persen.

SK No 113680 A

Fokus utama pembangunan masih pada pengendalian pandemi, yang menyebabkan pelayanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan tidak berjalan optimal. Pelayanan kesehatan yang tidak berjalan optimal antara lain pelayanan antenatal bagi ibu hamil, imunisasi dasar bagi balita, pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Kualitas pembelajaran terhambat karena pembelajaran tatap muka baik di tingkat pendidikan dasar, menengah maupun tinggi terdampak pembatasan aktivitas masyarakat, sementara kualitas pembelajaran daring terhambat oleh kualitas jaringan internet dan keterbatasan alat pendukung siswa dan tenaga pendidik.

Cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di daerah 3T juga masih rendah, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan pemanfaatan data kependudukan belum optimal. Statistik hayati perlu terus dikembangkan agar data kependudukan lebih akurat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi penyusunan kebijakan. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) misalnya menjadi landasan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,71 persen pada September 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,19 persen. Penurunan penduduk miskin diperkirakan sebanyak 1,05 juta orang. Perluasan program perlindungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional berdampak positif terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin. Namun demikian, kondisi pandemi menghambat perluasan kepesertaan, baik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah utilisasi dan akses peserta kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kanal dan saluran pendaftaran, serta tata kelola kelembagaan, khususnya koordinasi antarpenyelenggara jaminan sosial yang masih belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan efisiensi. Selain itu, pemahaman masyarakat akan jaminan ketenagakerjaan masih belum sesuai dengan tujuan program. Pembinaan olahraga prestasi tidak optimal sehingga berpengaruh pada daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia. Pembatasan sosial selama masa pandemi berpotensi meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2023 adalah (1) percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah 3T dan pengembangan statistik hayati; (2) reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif untuk mengurangi kerentanan dan kemiskinan, serta menghapuskan kemiskinan ekstrem; (3) pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional untuk mempercepat pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, akselerasi penemuan kasus dan pengobatan penyakit, serta penguatan upaya promotif dan preventif; (4) peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, memperkuat layanan satu tahun prasekolah, memperkuat pendidikan tinggi, memperkuat pembelajaran dan pengajaran terutama pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penjaminan mutu dan peningkatan tata kelola pendidikan; (5) pewujudan lingkungan ramah anak, menurunkan ketimpangan gender serta meningkatkan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, utamanya di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan politik, memperkuat upaya dan tata kelola pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak (KTA), termasuk perdagangan orang, perkawinan anak, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (6) perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan ekonomi melalui keperantaraan yang efektif dan inklusif serta potensi pembiayaan usaha; dan (7) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja antara lain melalui *reskilling*, *upskilling*, dan pembekalan keahlian digital, meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja, memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi berjalan dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung

SK No 113681 A

pemulihan ekonomi nasional, serta memastikan pemassalan dan perbaikan tata kelola pembinaan olahraga di pusat dan daerah untuk optimalisasi prestasi di tingkat dunia.

Arah kebijakan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023 ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, memulihkan aktivitas masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan khususnya yang pencapaiannya terhambat karena pandemi. Adapun arah kebijakan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing antara lain

(1) **Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan** dengan strategi pada

(a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah 3T dan kelompok rentan yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020;
(b) pemanfaatan data kependudukan pelayanan publik dan transformasi digital; dan
(c) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.

(2) **Reformasi sistem perlindungan sosial,** yang difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif dengan strategi yang terdiri dari

(a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial yang akan difokuskan kepada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya sektor informal, melalui mekanisme kolaboratif;
(b) perluasan akses pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan antarpenyelenggara jaminan sosial dan pemangku kepentingan terkait;
(c) peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem;
(d) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;
(e) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi program-program bantuan sosial;
(f) perluasan asesmen dan penjangkauan rehabilitasi sosial yang terintegrasi terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya;
(g) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi;
(h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif; dan
(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan.

(3) **Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**, dengan fokus pada

(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut melalui penguatan sistem rujukan maternal, pendampingan ibu hamil dengan risiko tinggi, penguatan kapasitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, pascapersalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, revitalisasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di RS (PKBRS), perluasan jangkauan di wilayah khusus dan sasaran khusus serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup untuk mengurangi risiko "4 terlalu" serta penggunaan KB pasca persalinan;

SK No 113682 A

(b) percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik antara lain perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil dan balita, pendampingan pemerintah daerah dan keluarga melalui satgas *stunting* dan tim pendamping keluarga, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, serta penyediaan data intervensi dengan fokus pada daerah dengan jumlah dan prevalensi balita *stunting* tinggi;

(c) pengendalian penyakit melalui pencegahan dan penemuan kasus penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS, kusta, malaria dan penyakit tropis terabaikan, skrining atau deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta tata laksana kasus secara komprehensif;

(d) pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit melalui penguatan dan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap, penambahan antigen baru, register imunisasi, peningkatan kapasitas laboratorium dalam deteksi dini dan respons KLB, serta pemenuhan sarana prasarana terutama rantai dingin dan tenaga imunisasi;

(e) pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan ketahanan kesehatan, inovasi pendidikan tenaga kesehatan melalui peningkatan kuota mahasiswa dan *academic health system* untuk percepatan produksi tenaga kesehatan, serta inovasi pendayagunaannya melalui salah satunya beasiswa wajib penempatan, perluasan kuota ASN tenaga kesehatan dan redistribusi tenaga kesehatan, inovasi pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan puskesmas di setiap kecamatan, pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama terutama di daerah sulit akses serta pengembangan RS Rujukan Nasional dan RS dengan layanan unggulan secara merata dan digitalisasi pelayanan kesehatan serta percepatan akreditasi dengan pelibatan pemerintah daerah, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan pengawasan obat dan makanan; dan

(f) peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

(4) **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas**, yang akan difokuskan pada

(a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (*student well-being*), serta kesehatan mental dalam pendidikan;

(b) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana;

(c) kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dan penguatan layanan satu tahun prasekolah; dan

(d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

SK No 113683 A

(5) **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.**

Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada

(a) penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
(b) optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak;
(c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
(d) peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
(e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
(f) penciptaan lingkungan ramah anak.

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada

(a) percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di pusat, daerah, dan desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola;
(b) perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi;
(c) peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah;
(d) penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan, serta kebijakan anggaran yang lebih proporsional; dan
(e) penguatan tata kelola layanan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta optimalisasi DAK Nonfisik dan sinergi antarsumber pembiayaan.

Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada

(a) penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah, termasuk mendorong penyusunan regulasinya di tingkat daerah;
(b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi, serta keikutsertaan dalam forum internasional; dan
(c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

(6) **Mengentaskan kemiskinan.** Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, serta menghapus kemiskinan ekstrem, melalui

(a) peningkatan keperantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan;
(b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial;

SK No 113684 A

(c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19 dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan; dan
(d) pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi.

(7) **Meningkatkan produktivitas dan daya saing**, melalui

(a) reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui reorientasi dari *supply-driven* menjadi *demand-driven* (*link and match*) dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta terkoordinasi agar kualitas lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki tingkat produktivitas, keterampilan, dan daya saing yang tinggi dalam memasuki dunia kerja;
(b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia;
(c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan transformasi kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi kompetensi dan mampu menjawab kebutuhan masa depan;
(d) penguatan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi;
(e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan ekosistem riset dan inovasi khususnya jaringan dengan industri di antaranya melalui kerja sama inovasi *Triple-Helix* di *Science Techno Park* (STP);
(f) pemfokusan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian target *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020–2024 serta mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi; dan
(g) perbaikan pembinaan olahraga di antaranya melalui penguatan pembinaan atlet elite jangka panjang melalui penyelenggaraan *training centre*, mendorong penyusunan regulasi desain olahraga di daerah, penyelenggaraan *event* olahraga internasional, mendorong penataan dan pengembangan wadah serta peningkatan kualitas pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah serta memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional.

4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak COVID-19, sasaran utama pembangunan SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial melalui MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, dan Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas). Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

SK No 113685 A

Tabel 4.11
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan**						
1.1	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)* (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)	2,28[1]	2,40[2]	2,24[3]	2,21	2,19	2,10
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17[4]	98,00[5]	99,00[5]	99,00	99,00	100,00
2	**Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk**						
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)						
	2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,61[6]	82,07[6]	86,96[6]	87,00	91,00	98,00
	2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60[4]	65,10[4]	64,31[4]	75,00	78,00	80,00
3	**Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan**						
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305[1]	230[a]	217[b]	205	194	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,00[2]	20,6[a]	19,50[b]	18,60	17,6	16,00
3.3	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67[7]	24,10[a]	24,37[7]	18,40	17,50	14
3.4	Insidensi *tuberkulosis* (per 100.000 penduduk)	312[8]	301[8]	252[b]	231	211	190
3.5	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285[9]	320[9]	347[9]	365	385	405

SK No 113686 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.6	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	368[9]	401[9]	415[9]	458	482	514
3.7	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80[10]	21,80[a]	21,80[b]	21,80	21,80	21,80
3.8	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	9,10[10]	9,10[a]	9,00[b]	8,90	8,80	8,70
3.9	Nilai rata-rata hasil PISA:						
	3.9.1 Membaca	371[11]	371[a]	394[b]	394	394	396
	3.9.2 Matematika	379[11]	379[a]	385[b]	385	385	388
	3.9.3 Sains	396[11]	396[a]	399[b]	399	399	402
3.10	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75[4]	8,90[4]	8,97[4]	9,13	9,24	9,36
3.11	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95[4]	12,98[4]	13,08[4]	13,57	13,22	13,30
4	**Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda**						
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72[12]	66,89[12]	66,10[12]	69,87	71,66	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,07[13]	91,06[13]	91,27[13]	91,11–91,35	91,17–91,44	91,24–91,54
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,67[14]	51,00[14]	54,00[14]	55,61	56,65	57,67
5	**Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan**						
5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40[4]	31,85[4]	35,83[4]	36,00	38,00	40,00
6	**Meningkatnya produktivitas dan daya saing**						
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72[15]	44,35[15]	45,69[15]	46,87	48,00	49,75
6.2	Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT):						

SK No 113687 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
	6.2.1 Top 200	0[16]	0[16]	0[16]	0	0	1
	6.2.2 Top 300	1[16]	1[16]	1[16]	1	1	2
	6.2.3 Top 500	2[16]	2[16]	2[16]	2	2	3
6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60[15]	40,02[15]	40,39[15]	41,92	43,00	43,10
6.4	Peringkat *Global Innovation Index*	85[17]	85[17]	87[17]	80–85	75–80	75–80

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017; 3) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 4) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020, 2021; 5) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; 6) Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; 7) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019 & 2021; 8) *Global Tuberculosis Report*, 2020-2021; 9) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 10) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 11) *Programme for International Student Assessment* (PISA), 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020, 2021; 13) BPS, 2019, 2020, 2021; 14) Diolah dari Susenas KOR dan Sakernas, 2021 serta Susenas MSBP, 2018; 15) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020, 2021; 16) QS *World University Rankings*, 2019–2021; 17) INSEAD-WIPO *Global Innovation Index Report*, 2019-2021.

Keterangan: a) Merupakan angka target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; b) Merupakan angka target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022.

4.1.3.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; dan (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.11. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.12.

SK No 113688 A

Gambar 4.11
Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.12
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan							
Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan							
1.1	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35,00[1)]	43,00[1)]	58,00[1)]	78,00	89,00	100,00
1.2	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16,00[2)]	30,00[2)]	40,00[2)]	60,00	80,00	100,00

SK No 113689 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1.3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15,00[1)]	30,00[1)]	24,00[1)]	80,00	90,00	100,00
1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun (%)	86,01[3)]	93,80[4)]	95,00[4)]	97,00	98,00	100,00
1.5	Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)	5[2)]	5[2)]	30	20	50	50
PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial							
Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan							
2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,61[5)]	82,07[5)]	86,96[5)]	87,00	91,00	98,00
2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	14,85[3)]	14,53[3)]	15,12[3)]	13,00	12,00	11,00
2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	11,12[3)]	11,24[3)]	11,81[3)]	10,50	10,00	<10,00
2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (%)	3,50[2)]	6,40[2)]	9,12[2)]	11,65	15,00	20,00
2.5	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan						
	2.5.1 Pekerja formal (%)	56,51[6)a)]	63,82[6)b)]	53,98[6)]	56,19	67,40[c)]	74,57
	2.5.2 Pekerja informal (%)	3,85[6)a)]	3,21[6)]	8,14[6)]	13,06	16,93[c)]	25,94
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan							
Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah							
3.1	Persentase persalinan di fasyankes (%)	85,90[3)]	87,90[3)]	88,91[3)]	91,0	93,0	95,0

SK No 113690 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) (%)	57,20[7]	57,90[8]	57,00[9]	62,50	62,92	63,41
3.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)* (%)	10,60[7]	13,40[8]	18,00[9]	8,00	7,70	7,40
3.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	36[7]	31,90[8]	20,50[9]	21,00	20,00	18,00
3.5	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,90[10]	70,00[12]	65,8[11]	71,00	75	90,00
3.6	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19[10]	8,08[d]	7,08[11]	7,50	7,30	7,00
3.7	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *Treatment Coverage*) (%)	67,50[12]	42,89[12]	42[12]	90	90	90
3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kabupaten/kota)	160[12]	149[12]	124[12]	119	110	95
3.9	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24[12]	0,18[12]	0,18[12]	0,19	0,19	0,18
3.10	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	84,56[12]	88[12]	88[12]	90	90	90
3.11	Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	366[12]	111[12]	221[12]	280	380	420
3.12	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota)	258[12]	279[12]	319[12]	424	474	514
3.13	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46[12]	57,00[12]	56,40[12]	85	90	100

SK No 113691 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.14	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70[12)]	88,00[12)]	88,40[12)]	95	95	100
3.15	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23[12)]	39,60[12)]	48,17[12)]	65	71	83
3.16	Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70[12)]	69,77[2)]	75,31[12)]	80	85	90
3.17	Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,60[13)]	90,60[13)]	95,21[13)]	92,25	96	97
3.18	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76[13)]	79,68[13)]	85,59[13)]	83	86	87
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas							
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas							
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)						
	4.1.1 SMA/SMK/MA Sederajat	0,77[3)]	0,77[3)]	0,76	0,81	0,82	0,83
	4.1.2 Pendidikan Tinggi	0,18[3)]	0,28[3)]	0,29[3)]	0,30	0,31	0,32
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)						
	4.2.1 Membaca	30,10[14)]	30,10[d)]	33,00[e)]	33,00	33,00	34,10
	4.2.2 Matematika	28,10[14)]	28,10[d)]	30,00[e)]	30,00	30,00	30,90
	4.2.3 Sains	40,00[14)]	40,00[d)]	42,60[e)]	42,60	42,60	44,00
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)						
	4.3.1 Literasi	53,20[15)]	57,20[d)]	58,20[e)]	59,20	60,20	61,20
	4.3.2 Numerasi	22,90[15)]	26,50[d)]	27,40[e)]	28,30	29,20	30,10

SK No 113692 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)						
	4.4.1 SD/MI/sederajat	95,48[16)]	96,00[16)]	97,37	97,93	98,41	98,94
	4.4.2 SMP/MTs/sederajat	85,23[16)]	87,89[16)]	88,88	90,54	91,08	93,33
	4.4.3 SMA/SMK/MA/ sederajat	58,33[16)]	63,95[16)]	65,94	69,08	69,68	71,71
4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30[3)]	62,48[3)]	61,93	69,63	71,20	72,77
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28[3)]	30,85[3)]	31,19[1)]	31,52	31,89	32,28
PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda							
Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha, dan pencegahan perilaku berisiko							
5.1	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	10,82[3)]	10,35[3)]	9,23[3)]	9,44	9,08	8,74
5.2	Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki 61,70 Perem-puan 62,00[17)]	Menu-run[d)]	Laki-laki 34,00 Perem-puan 41,05[f)]	menu-run	menu-run	menu-run
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,24[18)]	75,57[18)]	76,26[18)]	75,57–76,73	75,60–77,18	79,16–81,21
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,89[19)]	53,13[19)]	53,34[19)]	53,76	54,38	55,00
5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40[20)]	menu-run[d)]	8,70[20)]	menu-run	menu-run	menu-run
5.6	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	81,36[21)]	81,36[g)]	82,58[e)]	mening-kat	mening-kat	82,58[b)]

SK No 113693 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
5.7	Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,36[21)]	6,36[g)]	6,72[c)]	mening-kat	mening-kat	6,72
5.8	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar* (%)	0,47[19)]	0,44[19)]	0,41[19)]	0,45	0,50	0,55
5.9	Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (%)	8,78[3)]	8,58	10,23	N/A*	7,05	6,87
PP 6. Pengentasan Kemiskinan							
Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan							
6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23[3)]	21,60[3)]	20,55[3)]	40	45	50
6.2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668.040[22)]	290.902	444.147	419.935	332.757[23)]	201.890
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing							
Meningkatnya produktivitas dan daya saing							
7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78[24a)]	5,94[24b)]	6,45[24c)]	3,30[24d)]	2,60	2,80
7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	42,76[19)]	40,46[19)]	34,34[19)]	24,11	25,10	26,08
7.3	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	44,02[19)]	58,21[19)]	58,39[19)]	59,71	60,71	61,71
7.4	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94[25)]	22	13	219	231	243
7.5	Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143[25)]	158[25)]	139[26)]	400	550	600

SK No 113694 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
7.6	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	52[25)]	46[25)]	129[26)]	150	180	210
7.7	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1.362[27)]	1.278[28)]	4.456[26)]	2.500	2.750	3.000
7.8	Jumlah paten *granted* (domestik) (paten)	790[27)]	1.218[28)]	4.450[26)]	900	950	1.000
7.9	Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	13,73[29)]	14,14[25)]	14,79[30)]	14,96	17,00	20,00
7.10	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	81[25)]	109[31)]	114[26)]	126	132	138
7.11	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)[c)]	6[31)]	2[32)]	4[26)]	11	13	10
7.12	Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan	45[33)]	4[32)]	6[30)]	8	8	8
	7.12.1 Berbasis perguruan tinggi (unit)	17[33)]	3[32)]	5	5	5	5
	7.12.2 Berbasis nonperguruan tinggi (unit)	28[33)]	1[32)]	1	3	3	3
7.13	Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	N/A**	0[25)]	1[26)]	1	10	40
7.14	Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan						
	7.14.1 Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)	12[33)]	14[34)]	5[26)]	15	20	24
	7.14.2 Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	35[33)]	35[34)]	42[26)]	35	35	35

SK No 113695 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
7.15	Peringkat pada SEA Games	4[35]	N/A[36]	N/A[36]	3[37]	4	N/A[36]
7.16	Peringkat pada ASEAN Para Games	1[38]	N/A[36]	N/A[36]	1	1	N/A[36]

Sumber: 1) Kemensos, 2019, 2020, 2021; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020, 2021; 3) Susenas, 2019, 2020, 2021, 2022; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, 2020; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019, 2020, 2021; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020; 7) SDKI, 2017; 8) Perhitungan BKKBN, 2020; 9) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 10) Riskesdas, 2018; 11) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021; 12) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 13) BPOM, 2019-2021; 14) *Programme for International Student Assessment* (PISA), 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 15) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 16) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO *Institute for Statistics*; 17) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018 (*baseline*) dan 2021; 18) BPS, 2019, 2020, 2021; 19) Sakernas, 2019, 2020, 2021; 20) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016 (*baseline*) dan 2021; 21) Susenas, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018; 22) Kementerian ATR/BPN, 2019; 23) Hasil *exercise* awal Direktorat TRPB terhadap Reviu Angka Dasar Pagu Indikatif 2023; 24a) Tanpa Kartu Prakerja; 24b) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 Kementerian/Lembaga (430.870 orang) dan Kartu Prakerja (5,5 juta orang); 24c) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 11 Kementerian/Lembaga (515.442 orang) dan Kartu Prakerja (5,93 juta orang); 24d) Revisi target dengan rincian 2,7 juta penerima Kartu Prakerja skema "semi-bantuan sosial", 100 ribu penerima Kartu Prakerja skema peningkatan keahlian, dan 500 ribu dilaksanakan Kementerian/Lembaga; 25) Kemenristekdikti/BRIN, 2017–2018; 26) BRIN, 2022; 27) KemenkumHAM, 2018; 28) Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 29) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 30) Kemendikbudristek dan BRIN, 2022; 31) KNAPP, 2018; 32) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 33) Kemenristekdikti dan LPNK IPTEK, 2019; 34) LPNK IPTEK, 2020; 35) SEA Games, 2019; 36) Tidak dipertandingkan pada tahun dimaksud; 37) Merupakan realisasi perolehan peringkat pada SEA Games Hanoi 2021 yang pelaksanaannya diundur ke tahun 2022; 38) ASEAN Para Games, 2017.

Keterangan: a) pemutakhiran (data realisasi); b) pemutakhiran target; c) pemutakhiran metode perhitungan dengan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU, PBPU, dan Jasa Konstruksi; d) merupakan target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; e) merupakan target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022; f) SNPHAR 2021; g) *baseline* sesuai Susenas MSBP, 2018 (data tersedia tiga tahunan); N/A* Indikator bukan merupakan indikator program prioritas pada RKP Tahun 2022; N/A** Data tidak tersedia karena indikator baru diaplikasikan dalam RPJMN 2020-2024 di tahun 2020.

4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, *impact/outcome/output*, pelaksana, lokasi, *highlight* proyek, dan sumber pendanaan. Kelima *Major Project* tersebut yaitu MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas), Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional akan dijabarkan pada gambar di bawah ini.

SK No 113696 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Urgensi

Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi
- AKI 305 per 100.000 kelahiran hidup SUPAS 2015;
- Penurunan 5 tahun terakhir: 2,4%/tahun, dibutuhkan penurunan 5%/tahun untuk mencapai target RPJMN.

Prevalensi *stunting* pada balita masih tinggi
- Termasuk kategori tinggi (24,4%, SSGI 2021);
- Diperlukan percepatan penurunan 3,5%/tahun untuk mencapai target RPJMN 14%.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemenkes (AKI) dan BKKBN (*Stunting*).

Lintas K/L/D:
- Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemen KP, Kemenkominfo, BKKBN, BPOM.

Lokasi
- Percepatan penurunan *stunting* di 514 kab/kota;
- Skema khusus di 12 provinsi dengan jumlah & prevalensi balita *stunting* tertinggi;
- Lokus penurunan kematian ibu tahun 2023: 514 kab/kota.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output
- Menurunkan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi 17,5% tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024;
- Menurunkan angka prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita sebesar 7,3% tahun 2023 dan 7% pada tahun 2024;
- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 194 tahun 2023 dan 183 tahun 2024 per 100.000 kelahiran hidup.

***Highlight* Proyek**

AKI
- Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB [APBN];
- Bimtek Peningkatan Pelayanan KB Pasca Persalinan [APBN];
- Pembinaan RS PONEK [APBN];
- Pembinaan Operasi *Sectio Caesaria* Darurat dalam Waktu ≤30 Menit untuk RS [APBN];
- Peningkatan Kapasitas *Surveilans* Gizi dan KIA untuk Nakes/Non Nakes [APBN];
- Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) [APBN].

Stunting
- Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK [APBN];
- Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri [APBN];
- Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus [APBN].

MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas)

Urgensi
- Kinerja inovasi Indonesia belum berkembang, ditandai stagnasi capaian *Global Innovation Index* (GII) Indonesia tahun 2021 yang hanya berada di peringkat ke-87 dari 132 ekonomi negara di dunia. Padahal, di era *knowledge economy* kapabilitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi menjadi penghela utama pertumbuhan ekonomi;
- Pemusatan komersialisasi direncanakan dilakukan di STP. Namun berdasarkan penilaian Tingkat Maturitas di 22 STP tahun 2019 oleh Kemendikbudristek, hanya 10 STP saja yang berada pada Tingkat Madya. Indonesia belum memiliki KST Tingkat Utama yaitu STP yang berfungsi secara penuh mengelola riset menuju inovasi yang diadopsi oleh industri. Hal ini karena keterbatasan fasilitas, lemahnya SDM pengelola, dan kurangnya kemitraan dengan industri;
- Pandemi COVID-19 menuntut adanya kemampuan nasional untuk memanfaatkan hasil riset menjadi produk inovasi yang siap diproduksi di industri.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemendikbudristek.

Lokasi

Institut Teknologi Bandung; Institut Pertanian Bogor[b)]; Universitas Indonesia; Universitas Gadjah Mada.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output
- Terbangunnya 5 gedung STP di IPB, ITB, UI pada tahun 2023 dan terbangunnya 7 gedung STP di IPB, ITB, UI, UGM pada tahun 2024;
- Pembangunan sarana inkubator bagi *tenant* sebesar 75%;
- Pemenuhan instalasi STP sebesar 65%;
- Pengembangan STP ITB IPB, UI, dan UGM sebesar 100%.

***Highlight* Proyek**
- Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (PHLN) [APBN] [a)];
- Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (PHLN) [APBN] [a)];
- Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (SBSN) [APBN] [a)];
- Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (SBSN) [APBN][a)].

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN;
b) : Pada tahun 2023, belum terdapat program pembangunan prasarana dan revitalisasi sarana pada IPB. Namun, IPB tetap menjadi salah satu 4 *Major* Universitas.

SK No 113697 A

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif belum dapat dipenuhi dengan baik
- Sakernas, 2019: Pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54%);
- Sakernas 2019: Proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60%.

Industri 4.0 merupakan salah satu megatren global yang harus diadopsi untuk meningkatkan daya saing Indonesia
- Angkatan kerja harus memiliki keahlian yang bisa memanfaatkan teknologi dalam industri 4.0 secara maksimal;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja menjadi upaya utama untuk memastikan penyediaan keahlian angkatan kerja ini.

Urgensi

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemendikbudristek dan Kemnaker.

Lokasi

Diarahkan untuk fokus pada pengembangan wilayah prioritas, KEK, dan KI yang mendukung 6 subsektor industri, yaitu (1) makanan dan minuman; (2) tekstil dan pakaian; (3) otomotif; (4) kimia; (5) elektronik; dan (6) alat kesehatan dan farmasi.
Lokasi RO: pusat dan 34 provinsi.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output
- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,00% pada tahun 2023 dan 43,10% tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 25,10% pada tahun 2023 dan 26,08% tahun 2024.

***Highlight* Proyek**
- Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri [APBN];
- SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi [APBN];
- Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi [APBN];
- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 [APBN];
- Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga [APBN];
- Transformasi BLK Baru [APBN].

MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Ketepatan sasaran program bantuan sosial masih rendah
- Maret 2021, sekitar 1,9 juta rumah tangga miskin ekstrem tidak menerima program sembako, meningkat sebanyak 100 ribu dari September 2020 (Susenas, Maret 2021).

Angka kemiskinan ekstrem masih tinggi
- Penduduk miskin ekstrem meningkat sekitar 1,3 juta orang selama pandemi COVID-19;
- September 2021, angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,73% dari total penduduk Indonesia (Susenas, September 2021).

Cakupan program jaminan sosial masih terbatas
- Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2021 sebesar 86,96%.

Urgensi

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemiskinan ekstrem (Kemenko PMK); Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (Kemensos, Kemendagri, Kemendes PDTT); Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (Bappenas dan Kemenkeu); Lanjutan pendataan awal di tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Bappenas tahun 2023 (BPS); dan Pemanfaatan data Regsosek untuk perencanaan penganggaran di daerah (Kemendagri dan Kemendes PDTT).

Lintas K/L/D:
- Kemenko Perekonomian, Kemen PUPR, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemen BUMN, KSP, Kemenkominfo, Kementan, BPS, BNPB, Kemen KP, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemnaker, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan;
- Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan.

Lokasi
- Lokus penghapusan kemiskinan ekstrem: 514 kabupaten/kota;
- Lokus perluasan Registrasi Sosial Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan: 514 kabupaten/kota.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output
- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5–8,5% di tahun 2023 dan 6–7% di tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5–2,0% di tahun 2023 dan 0–1% di tahun 2024.

***Highlight* Proyek**
- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat [APBN];
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako [APBN];
- Siswa SD/SMP/SMA yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [APBN];
- Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesos [APBN];
- Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT [APBN];
- Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang Telah Mengikuti Proses Sertifikasi [APBN];
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM [APBN];
- Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS [APBN];
- Pelayanan Koneksitas *Warehouse* Berbasis NIK Nasional [APBN];
- Data *Center* Nasional [APBN].

SK No 113698 A

4.1.3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

(1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

4.1.3.6 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

(1) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

(a) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

(2) PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

(a) Rancangan Perpres Peta Jalan Vaksin Halal;
(b) Rancangan UU Praktik Kedokteran; dan
(c) Rancangan PP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

SK No 113699 A

4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.

4.1.4.1 Pendahuluan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Modal sosial dan budaya mampu membangun relasi sosial yang harmonis, serta memperkuat solidaritas dan daya rekat masyarakat untuk saling tolong-menolong, kerja sama, gotong royong, dan kolaborasi antarwarga dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pada masa pandemi, ketahanan sosial budaya masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya meningkat dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 74,01 pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan dan memanfaatkan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam upaya **penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila**, menghadapi tantangan antara lain (1) belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan *responsive* belum optimal; (3) proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter kurang optimal; (4) belum optimalnya peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) masih terbatasnya pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di K/L, dan kabupaten/kota serta pelaksanaan lima program GNRM di tingkat daerah; serta (6) kurangnya daya tarik koperasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan modernisasi koperasi untuk meningkatkan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Upaya **pemajuan dan pelestarian kebudayaan** juga masih menghadapi tantangan antara lain (1) khazanah budaya bangsa belum secara optimal dimanfaatkan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19; (2) pelindungan dan pelestarian cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat belum optimal berjalan; (3) belum optimalnya pengembangan warisan budaya tak benda untuk peningkatan kesejahteraan; (4) pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal melalui fasilitasi pelaku seni budaya di daerah belum efektif; (5) pengembangan kualitas talenta seni budaya berkelas internasional belum optimal; dan (6) belum terlaksananya penyelamatan dan pengolahan arsip melalui digitalisasi arsip untuk persiapan pemindahan IKN di K/L.

Sementara itu, upaya **penguatan moderasi beragama** masih menghadapi tantangan meliputi (1) masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain; (2) masih kurangnya pengembangan dialog yang menumbuhkan semangat kerja sama di kalangan umat lintas agama; (3) belum optimalnya pengembangan dana sosial keagamaan

SK No 113700 A

untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan; dan (4) belum meratanya kualitas layanan keagamaan bagi semua agama.

Adapun tantangan dalam upaya **meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas** yaitu masih kurangnya kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial-ekonomi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Untuk itu, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan sebagai berikut

(1) **Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila** melalui

(a) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik dengan upaya (i) perluasan pengajaran dan pembelajaran dengan penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan pemahaman terkait cinta lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan; (ii) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan moral, dan budi pekerti; serta (iii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan;

(b) penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

(c) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya melalui penerapan penguatan budaya kerja ASN;

(d) penerapan disiplin, *reward,* dan *punishment* dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja;

(e) peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter melalui (i) komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengasuhan balita; (ii) pengasuhan berbasis hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan; (iii) penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta edukasi kepada keluarga yang memiliki remaja, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus; (iv) penyediaan layanan konseling keluarga; dan (v) peningkatan kapasitas keluarga lansia dalam pendampingan pelayanan ramah lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga;

(f) penguatan peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah untuk menginternalisasikan nilai esensial revolusi mental beserta kelima program GNRM di masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental; serta

(g) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui modernisasi koperasi yang meliputi (i) penguatan kelembagaan koperasi; (ii) pengadopsian teknologi; (iii) peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui pendidikan dan pelatihan; (iv) fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan dan pemasaran; serta (v) penciptaan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing.

(2) **Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat** melalui (a) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan; (b) pengembangan ekosistem budaya rempah dari hulu ke hilir untuk memperkuat diplomasi dan meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (c) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai sebagai pusat kegiatan seni budaya; (d) pengembangan manajemen talenta nasional seni budaya; (e) penguatan peran pemerintah daerah dalam

SK No 113701 A

pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi pelaku seni budaya di daerah; (f) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif; dan (g) digitalisasi arsip persiapan pemindahan IKN di K/L untuk menjaga kelestarian arsip dan dapat menjadi sumber pembelajaran di masa depan.

(3) **Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial** melalui (a) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat; (b) pengembangan dialog yang menumbuhkan kerja sama umat lintas agama; (c) pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: mekanisme *blended finance* untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat, KUA percontohan ekonomi umat); (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Penjamin Halal (LPH); serta (e) fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan Islam.

(4) **Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan**, melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b) pengembangan konten literasi terapan; (c) pengembangan pusat-pusat layanan literasi berbasis digital; (d) pengembangan jejaring nasional perpustakaan, mencakup penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu; dan (e) pengembangan Pusat Naskah Nusantara sebagai khazanah budaya bangsa.

4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya**						
1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	68,30[a)]	69,57[a)]	70,78[a)]	71,96	73,13	74,29
1.2	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	74,00[a)]	75,53[a)]	76,78[a)]	77,93[a)]	79,08	80,16

SK No 113702 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2	**Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan**						
2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	55,91	54,65	58,21[a)]	59,71	61,20	62,70
3	**Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial**						
3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,61 (2018)	0,62[a)]	0,63[a)]	0,64	0,65	0,65
4	**Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat**						
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	73,83	74,22[a)]	72,39[b)]	74,70	75,00	75,80
5	**Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa**						
5.1	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	53,57 (2018)	53,94	54,01[c)]	57,00	59,00	61,00
5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	20,71[c)]	22,00	22,10	22,10
6	**Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif**						
6.1	Nilai Budaya Literasi (nilai)	59,11	61,63	63,03[a)]	65,70	68,37	71,04

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2021.

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Hasil survei Indeks KUB Tahun 2021, c) Pendataan Keluarga Tahun 2021.

4.1.4.3 Program Prioritas

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial; serta (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.12. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.14.

SK No 113703 A

Gambar 4.12
Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter							
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu							
1.1	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	78,98[a)]	79,06[a)]	79,14[a)]	79,22	79,30	79,38
1.2	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	68,98[a)]	69,97[a)]	70,96[a)]	71,96	72,95	73,95
1.3	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	76,42[a)]	76,96[a)]	77,34[a)]	77,64	77,88	78,08
1.4	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	50,08[a)]	53,46[a)]	56,70[a)]	59,93	63,16	66,39
1.5	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	67,03[a)]	68,40[a)]	69,74[a)]	71,06	72,36	73,65
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila							
1.6	Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	81,17[a)]	82,19[a)]	83,18[a)]	84,14[a)]	85,08	86,01
1.7	Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	76,65[a)]	77,53[a)]	78,10[a)]	78,60[a)]	78,94	79,21
1.8	Nilai Dimensi Persatuan Indonesia (nilai)	84,97[a)]	86,33[a)]	87,57[a)]	88,70[a)]	90,02	91,12
1.9	Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (nilai)	68,02[a)]	71,27[a)]	73,26[a)]	75,21[a)]	77,18	79,13
1.10	Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	59,21[a)]	60,34[a)]	61,78[a)]	63,00[a)]	64,19	65,34

SK No 113704 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter							
1.11	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	12,29	11,92	10,95[b)]	11,00	10,50	10,00
1.12	Indeks Karakter Remaja (nilai)	N/A	79,60	72,97[b)]	68,92	69,42	69,92
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan							
2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	43,89	41,00	49,36[a)]	52,11	54,85	57,60
2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	37,14	35,82	37,79[a)]	38,19	38,60	39,01
2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	33,79	26,96	40,28[a)]	43,52	46,76	50,00
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial							
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama							
3.1	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	85,91	N/A[c)]	N/A[c)]	85,97	85,99	86,00
3.2	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	77,28	78,00[d)]	78,90	82,00	83,00	84,00
3.3	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,37	72,75[a)]	68,72[e)]	72,29	72,59	73,39
3.4	Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	73,72	73,98[a)]	75,03[e)]	76,23	76,53	77,33
3.5	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	75,40	75,95[a)]	73,41[e)]	75,86	76,16	76,96
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter							
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif							
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	10,12	12,93	13,54	13,00	15,00	15,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2021.

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Pendataan Keluarga Tahun 2021, c) Tahun 2020 dan 2021, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19, d) Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-19, dan e) Hasil survei Indeks KUB Tahun 2021.

SK No 113705 A

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki MP. Namun demikian pada RKP Tahun 2023 PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) MP Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, dan (4) MP Transformasi Digital, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.13.

Sebagai contoh, dalam rangka mendukung MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek prioritas, antara lain (1) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (2) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (3) pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

Gambar 4.13
Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan *Major Project*

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

4.1.4.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diperlukan kerangka kelembagaan yang terstruktur, efisien dan efektif. Untuk itu, diusulkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Perwalian Kebudayaan untuk mendukung peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

SK No 113706 A

4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4.1.5.1 Pendahuluan

Dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 diarahkan pada (1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi; (2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (*food estate*), industri, dan pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan; (4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); serta (5) pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam peningkatan infrastruktur pelayanan dasar untuk mencapai akses perumahan yang layak dan terjangkau adalah memperluas akses penyediaan dan akses pembiayaan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan tidak tetap (*non-fixed income*) yang membangun rumahnya secara swadaya. Sebagai kebutuhan dasar, perumahan yang layak harus terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas termasuk air minum, air limbah, persampahan, jalan lingkungan, dan drainase. Namun demikian, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman masih sangat rendah, sedangkan kondisi akses air minum dan sanitasi layak memiliki variasi yang besar antarprovinsi. Di samping itu, pemenuhan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), air limbah domestik, dan persampahan masih terbatas dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, belum optimalnya kapasitas pelaksana penyelenggara SPAM, air limbah dan persampahan, kurangnya kesiapan masyarakat (*demand*) untuk mengakses sistem air minum yang terbangun, serta rendahnya permintaan masyarakat untuk mendapatkan layanan air limbah domestik. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor air minum dan sanitasi serta memastikan kesiapan kelembagaan dan pendanaan untuk pengoperasian infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang terbangun, juga masih rendah sehingga pemanfaatan infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang telah terbangun belum optimal. Pada infrastruktur persampahan, masih rendahnya pemilahan sampah sedekat mungkin dengan sumber menyebabkan pengelolaan persampahan sangat bertumpu di hilir. Diperlukan penerapan teknologi inovatif untuk mendukung percepatan pengelolaan persampahan, khususnya di perkotaan.

Selanjutnya dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dibutuhkan peningkatan pengelolaan sumber daya air yang terbagi atas tiga aspek, yaitu konservasi Sumber Daya Air (SDA), pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Setiap aspek tersebut memiliki tantangan masing-masing, yaitu (1) tantangan yang terkait dengan konservasi SDA adalah tingkat pencemaran badan air tinggi yang berdampak pada turunnya kualitas air, kemampuan lahan untuk menyimpan air berkurang yang menyebabkan kekeringan pada musim kemarau, kualitas dan kuantitas air menurun akibat kurangnya pemeliharaan, dan alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman yang tinggi; (2) tantangan terkait pendayagunaan SDA adalah efisiensi alokasi penggunaan air irigasi rendah, kompetisi penggunaan air tinggi, pemanfaatan waduk belum optimal; serta (3) tantangan terkait

SK No 113707 A

pengendalian daya rusak air adalah frekuensi bencana alam hidrometeorologi yang meningkat, arus urbanisasi yang meningkat, dan terjadinya perubahan iklim.

Selain itu, dalam upaya penyelenggaraan keselamatan transportasi tantangan yang dihadapi pada moda jalan adalah terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tingginya kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya *Over Dimension Over Load* (ODOL), daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) yang belum tertangani secara baik, dan lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan. Pada moda transportasi perkeretaapian masih terdapat isu terbatasnya penanganan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Pada moda transportasi laut dan penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama maupun *feeder* pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran. Demikian pula dengan moda transportasi udara yang masih terkendala dalam keterbatasan sistem navigasi. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas sarana, prasarana dan SDM pencarian dan pertolongan.

Dalam pembangunan infrastruktur konektivitas yang mendukung produktivitas untuk mencapai transformasi ekonomi masih menghadapi tantangan antara lain (1) layanan dan sistem transportasi yang belum efektif dan efisien pada koridor utama angkutan penumpang dan barang (*backbone*) yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta api, serta pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi; (2) belum memadainya ketersediaan konektivitas untuk mendukung kawasan prioritas; (3) belum terstandarnya fasilitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan utama sebagai simpul angkutan barang; (4) belum efisiennya jaringan rute penerbangan; serta (5) terbatasnya layanan, sarana dan prasarana, serta keterbatasan penyediaan keperintisan angkutan jalan laut, penyeberangan dan udara di wilayah 3T.

Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, masih menghadapi tantangan yaitu (1) belum adanya kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang mampu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan lintas batas administrasi dan lintas moda angkutan dalam satu wilayah metropolitan, (2) belum mapannya pendekatan perencanaan mobilitas perkotaan terpadu di wilayah metropolitan, (3) belum terbangunnya skema pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, serta (4) tantangan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah.

Pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta TIK berperan penting dalam mendukung agenda transformasi ekonomi. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dihadapkan pada tiga isu utama yaitu (1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan, (2) pemerataan akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, dan (3) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat terbatas, jauh dari yang diharapkan sehingga berdampak pada penurunan mutu lingkungan akibat emisi CO_2. Hal ini didorong oleh kebijakan yang kurang ramah mendukung investasi dan biaya investasi yang masih mahal. Peningkatan listrik terbarukan masih dibatasi oleh kondisi pasokan yang berlebih di pusat-pusat permintaan listrik sebagai dampak pembatasan kegiatan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga menghambat pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi dan tenaga listrik yang berakibat pada belum meratanya akses serta jangkauan energi dan ketenagalistrikan. Selain itu, pandemi juga berpengaruh terhadap penurunan konsumsi energi dan tenaga listrik oleh masyarakat, bisnis, dan industri yang berakibat pada kesenjangan antara pasokan maupun permintaan energi dan tenaga listrik. Permasalahan keandalan pasokan energi dan tenaga listrik serta masih terbatasnya pola konsumsi khususnya pada daerah di luar Pulau Jawa juga berakibat pada rendahnya konsumsi energi dan tenaga listrik terutama untuk peningkatan produktivitas.

SK No 113778 A

Sementara itu, pembangunan infrastruktur TIK dan pemanfaatannya dalam mendorong transformasi digital menghadapi beberapa tantangan, antara lain adalah (1) jangkauan dan keandalan akses infrastruktur TIK yang berkualitas belum merata; (2) terbatasnya spektrum frekuensi untuk mendukung kegiatan ekonomi; (3) belum terintegrasinya data antarplatform digital terutama pada layanan pemerintah; (4) terbatasnya kemampuan adopsi teknologi digital pada pelaku sektor-sektor prioritas seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata maupun industri; (5) perlunya penguatan literasi digital masyarakat dan kapasitas SDM era digital; (6) belum terjaminnya keamanan data dalam mendukung transformasi digital; serta (7) belum meratanya jangkauan dan kualitas produksi siaran penyiaran digital.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan untuk menjawab isu dan tantangan yang telah diuraikan, telah dirumuskan sejumlah **arah kebijakan** pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 salah satunya melalui pendekatan skala prioritas pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah (1) meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan regulasi, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur; (2) memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan skema pembiayaan kredit mikro perumahan, pengembangan operasionalisasi layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA); (3) melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh serta pengembangan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu; (4) menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan perluasan sambungan rumah; (5) memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan; (6) meningkatkan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang didukung implementasi teknologi; (7) meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, pemanfaatan kapasitas SPAM terpasang, penurunan tingkat air tidak berekening (*non-revenue water*), peningkatan dan pembangunan SPAM, baik skala kabupaten/kota maupun lintas wilayah (SPAM Regional), dan pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum, serta pengelolaan aset dari SPAM terbangun; (8) memperkuat mekanisme pembinaan berjenjang untuk pemerintah daerah dan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM guna meningkatkan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi; dan (9) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya.

Arah kebijakan untuk pengelolaan sumber daya air terbagi berdasarkan tiga aspek, yaitu (1) aspek konservasi SDA melalui peningkatan operasi dan keamanan bendungan *existing*, serta konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga kuantitas dan kualitas sumber air; (2) aspek pendayagunaan SDA melalui peningkatan ketersediaan dan keamanan air dengan cara pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penyedia air, peningkatan pengelolaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta peningkatan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi baru untuk komoditas padi dan komoditas pertanian bernilai tinggi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi *existing*, serta modernisasi irigasi khususnya dalam mendukung pengembangan *food estate;* serta (3) aspek pengendali daya rusak air melalui penguatan ketahanan bencana berbasis wilayah melalui

SK No 113709 A

perencanaan dan penyediaan infrastruktur ketahanan bencana yang diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata. Selain itu, dari sisi penganggaran perlu dilakukan akselerasi dan optimalisasi pemanfaatan pendanaan PHLN dan SBSN serta diiringi dengan peningkatan kualitas belanja tidak langsung yang mendukung kebijakan dan pembinaan infrastruktur seperti penyelesaian peraturan turunan UU SDA, studi pembiayaan alternatif, serta reviu pola dan rencana SDA. Terkait kebijakan operasi dan pemeliharaan (OP), diperlukan penguatan OP untuk keberlanjutan manfaat infrastruktur sumber daya air melalui pendekatan yang dapat berdampak langsung bagi masyarakat.

Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan, yaitu (1) mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), yang di dalamnya termasuk pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi Keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan; (2) meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan maupun keamanan transportasi antara lain pemenuhan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) prasarana perkeretaapian, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas *Surveillance* dan navigasi penerbangan terintegrasi; serta (3) meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.

Arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi antara lain (1) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (*food estate*, industri dan pariwisata); (3) melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan *hub and spoke* penerbangan, serta pembangunan bandara perairan (*waterbase airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan; (5) menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T dan daerah-daerah yang masih memiliki kesenjangan yang tinggi, termasuk keperintisan, program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; (6) meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran APBD dan pemanfaatan skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang; serta (7) melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar infrastruktur lainnya.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, terutama dalam penataan beberapa aspek yang selaras dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan, yaitu (1) dalam aspek kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi; (2) dalam aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan angkutan massal perkotaan yang berbasis wilayah fungsional dengan berfokus pada aksesibilitas pusat kegiatan sosial dan ekonomi; (3) dalam aspek pendanaan, dikembangkan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan

SK No 113711 A

usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat dengan tetap menjamin kepemilikan *(ownership)* serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) mengembangkan angkutan komuter di wilayah perkotaan; (5) melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema *Buy the Service* (BTS) dan *Public Service Obligation* (PSO); serta (6) mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (*smart city*).

Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon mencakup (1) membangun infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi; (2) menyediakan subsidi dan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan; (3) peningkatan dan perluasan pemanfaatan tenaga listrik untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan industri; (4) mempercepat kebijakan penetapan harga beli listrik dari energi terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal yang ada; (5) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta pengembangan dan pembangunan kilang minyak; (6) optimalisasi pemerataan akses BBM dan gas bumi melalui pelaksanaan BBM satu harga; dan (7) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di antara para pelaku (pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha) maupun antar sektor (seperti industri dan teknologi), termasuk melalui dana transfer daerah.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digital meliputi (1) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan kualitas layanannya, termasuk pada daerah nonkomersial dan kawasan prioritas; (2) mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya terbatas termasuk spektrum frekuensi untuk mengadopsi teknologi baru; (3) melakukan pengintegrasian data dan sistem pemerintahan melalui penggunaan infrastruktur pusat data bersama; (4) meningkatkan pemanfaatan TIK pada sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri dan lainnya; (5) meningkatkan literasi digital masyarakat disertai penguatan keamanan informasi untuk mendukung produktivitas ekonomi; (6) mendorong penyelenggaraan sistem elektronik yang aman dan sehat untuk mendukung aktivitas masyarakat yang produktif; dan (7) penguatan sarana dan prasarana serta produksi penyiaran publik dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur 2023 juga diprioritaskan dalam mendukung pembangunan fasilitas dasar Ibu Kota Nusantara, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur sesuai arah pengembangan wilayah, serta mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung pencapaian target Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* Infrastruktur.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.15.

SK No 113712 A

Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar**						
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	59,54	60,90	65,10	67,88	70[1)]
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	62	63	65
1.3	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	5,00	5,00	10,00	19,65
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	30,00	31,72	33,75	35,00	37,50	38,92
2	**Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar**						
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	2,30	2,16	2,22	2,09	2,08	1,90
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) (%)	23	24	25	26	26	27
2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	82,83	90,36	91	91,16	94
2.4	Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara (%)	85,73	86	87	88	89	90
3	**Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan**						
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6
3.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	61,09	64,64	64,64	68,20	70,77	73

SK No 113713 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
4	**Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan**						
4.1	Rasio elektrifikasi (%)	98,89	99,20	99,45	~100	~100	~100[2)]
4.2	Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	1.084	1.089	1.123	1.268	1.336	1.400
4.3	Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	54,80	64,40	69,50	91	116	142
5	**Meningkatnya layanan infrastruktur TIK**						
5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	97,25	97,50	97,50[3)]	98,50	99	100

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: 1) RPJMN 2020–2024; 2) mendekati 100; 3) capaian TW III

4.1.5.3 Program Prioritas

Pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, (2) Infrastruktur Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan Ketenagalistrikan, dan (5) Transformasi Digital. Untuk sasaran, indikator, dan target PP dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.14
Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

SK No 113714 A

Tabel 4.16
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/ Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar							
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau							
1.1	Rasio *outstanding* KPR terhadap PDB (%)	2,90 (2018)	3,22	3,21	3,30	3,60	4,00
1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	91,62[1)]	92,15	93,56	94	94,63	95[2)]
1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	80,75[1)]	82,20	82,47	84,08	86,00	87[2)]
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	57,98	61,17	63,94	63,20	64,20	65,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman							
1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	89,27	90,21	90,78	95,10	97,55	100
1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	6,70 (2018)	11,90	11,90 (2020)	13,45	14,22	15
1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20,18	20,69	19,06	25,57	28,01	30,45
1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,08	69,52	71,72	69,53	69,54	69,55
1.9	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	58,95	61,76	58,00	83,60	91,80	100

SK No 113715 A

No.	Sasaran/ Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,4 layak termasuk 7,49 aman	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	80,29 layak, termasuk 7,25 aman	82,07 layak, termasuk 11,5 aman	86,03 layak, termasuk 13 aman	90 layak, termasuk 15 aman
1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	6,19	5,69	2,98	1,49	0
1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan (2016)	54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan (2019)	54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan (2019)	75,28 penanganan dan 9,13 pengurangan	77,64 penanganan dan 14,57 pengurangan	80 penanganan dan 20 pengurangan
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi							
1.13	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	27,50	27	26	25,50	25
Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan							
1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	154	163	173	180	185	200
Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi							
1.15	Volume tampungan air per kapita (m^3/kapita)	51,30	52,57	53,35	53,90	54,50	56,98
1.16	Persentase luas sawah beririgasi (%)	52,60	53,80	53,92	54,10	54,50	59,30
1.17	Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	0	308.704	308.704	350.000	597.226
PP 2. Infrastruktur Ekonomi							
Meningkatnya konektivitas wilayah							
2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%)	92/68/ 57	90/68/ 57	92/71/ 67	91/72/ 62	93/73/ 63	97/75/ 65

SK No 113716 A

No.	Sasaran/ Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km)	1.461[a)]	246	339,80	327,70	415	2.500[b)]
2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (km)	3.387[a)]	255,50	811,62	347	303,6	3.000[b)]
2.4	Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)	6.164	6.325	6.466	6.565	6.724	7.451
2.5	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1 (berlanjut)	2 (berlanjut)	3 (berlanjut)	5 (berlanjut)	7
2.6	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	21	32	35	35	25
2.7	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24 (22 selesai, 2 berlanjut) [a)]	9 (berlanjut)	13 (3 selesai, 10 berlanjut)	10 (4 selesai, 6 berlanjut)	6 (4 selesai, 2 berlanjut)	36[b)]
2.8	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	15[a)]	7 (berlanjut)	10 (berlanjut)	10 (berlanjut)	12 (berlanjut)	21[b)]
2.9	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	39	42	43	43
PP 3. Infrastruktur Perkotaan							
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan							
3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/*flyover*/*underpass* (kota)	3	0	5 (berlanjut)	5 (berlanjut)	5 (berlanjut)	6
3.2	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	1	1 (berlanjut)	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6
3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	0	5	8	10
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan							
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien							
4.1	Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)	275.900,00	272.420,00	210.601,00[c)]	382.696,10	406.325	431.281,20

SK No 113717 A

No.	Sasaran/ Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
4.2	Penurunan emisi CO_2 pembangkit (juta ton)	3,88	8,78	10,37	5,36	5,91	6,07
4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	75.705	78.663	81.530	81.217	83.219	85.216
4.4	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah)	537.936[a)]	673.222	848.097	1.288.870	1.688.870	4.010.445
4.5	Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (*Barrel per Calendar Day*/BPCD)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.176.000	1.276.000	1.276.000
PP 5. Transformasi Digital							
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi							
5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	9,42	10,58	6,83	9,80–10,00	8,80	8,80
5.2	Persentase pengguna internet (%)	64,80	73,70	73,70	79,20	80,70	82,30
5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	63,53	62,84	57,48	73	74	75,70

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022, 1) Susenas 2019; 2) RPJMN 2020–2024.

Keterangan: a) kumulatif 2015–2019; b) kumulatif 2020–2024; c) Realisasi TW III 2021.

4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*

Dalam mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang *Major Project* (MP) sebagai berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 DAS Kritis; (5) 18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Kereta Api Makassar-Pare Pare; (9) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (*Medium Speed* Jakarta-Semarang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung); (10) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (11) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (12) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong; (13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15) Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA); (16) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (17) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); (18) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta (19) Transformasi Digital.

SK No 113718 A

Gambar 4.15
Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2023

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113719 A

MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Urgensi

Akses air minum jaringan perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang lebih menjamin layanan dan kualitas air minum untuk masyarakat. Hingga tahun 2021, baru 19,06% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 1,63% dari tahun 2020 (20,69%). Dengan demikian, diperlukan percepatan penyediaan air minum melalui *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah).

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kemen PUPR, Ditjen. Cipta Karya dan Kemen PUPR, Ditjen. SDA.

Lintas K/L/D:
- Kemendagri. Ditjen. Bina Pembangunan Daerah; Kemenkes, Ditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Kemen ESDM; Pemda; dan BUMD Air Minum.

Lokasi

Tersebar pada seluruh provinsi.

Sumber Pendanaan

APBN dan Badan Usaha.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,06% di tahun 2021 menjadi 28,01% di tahun 2023 dan 30,45% di tahun 2024;
- Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target sebesar 14,22% di tahun 2023 dan 15% di tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- Pembangunan SPAM di 13 Kabupaten/Kota [APBN]*;
- Peningkatan SPAM di 5 Kabupaten/Kota [APBN];
- Perluasan SPAM di 20 Kabupaten/Kota [APBN]*;
- Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat tersebar di 509 Kabupaten/Kota [APBN];
- Pembangunan SPAM Regional [Badan Usaha]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Urgensi

- Perlunya penyediaan sanitasi yang terkelola dengan aman untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatan kesehatan lingkungan;
- Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka 1,49% (tahun 2023) dan 0% (tahun 2024);
- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% (tahun 2023).

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PUPR, Ditjen Cipta Karya.

Lintas K/L/D:
- Kemendagri, Ditjen Bina Pembangunan Daerah; Kemenkes, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Kemen LHK; Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan Pemda.

Lokasi

Tersebar di seluruh kab/kota di Indonesia.

Sumber Pendanaan

APBN dan APBD.

Impact/ Outcome/ Output

Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 86,03% pada tahun 2023 dan 90% Rumah Tangga pada tahun 2024.

***Highlight* Proyek**

- SPALD-T Skala Permukiman [APBN];
- SPALD-T Berbasis Masyarakat [APBN];
- SPALD-S Skala Kota [APBN];
- SPALD-S Skala Individu [APBN];
- Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi [APBN];
- Penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi [APBN];
- Pembangunan sambungan rumah [APBD];
- Layanan Lumpur Tinja Terjadwal [APBD].

SK No 113720 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Pemulihan 4 DAS Kritis

MP 18 Waduk Multiguna

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113721 A

MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Urgensi

- Banjir rob terjadi di Kawasan Pantura Jawa;
- Kualitas air di Kawasan Pantura Jawa tercemar sedang hingga berat;
- 5–20 cm/tahun muka tanah di Kawasan Pantura Jawa mengalami penurunan akibat ekstraksi air tanah berlebihan.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:
- Kemen ESDM, Kemendagri, dan Pemda.

Lokasi

Kawasan Pantura Jawa
- Jabodetabek: Jakarta, Bekasi;
- Cirebon Raya: Cirebon, Indramayu;
- Petanglong: Pekalongan;
- Gerbangkertosusila: Lamongan.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Pembangunan pengaman pantai 8,67 km;
- Pembangunan pengendali banjir 0,3 km;
- Mengurangi laju penurunan tanah dan dampaknya.

***Highlight* Proyek**

- Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun [APBN]*;
- Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun [APBN];
- Pengaman Pantai Kabupaten Cirebon yang dibangun [APBN];
- Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun [APBN];
- Sudetan *Floodway* Sedayu lawas yang ditingkatkan [APBN];
- Pengendalian banjir rob Sungai Loji Banger yang dibangun [APBN];
- Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (PATGTL) [APBN];
- Rekomendasi Geologi Hasil Pemantauan Penurunan Muka Tanah [APBN];
- Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah [APBN].

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Urgensi

- Biaya logistik masih mahal, saat ini 24% dari Total PDB;
- Pelabuhan simpul peti kemas yang belum mampu menampung kapal besar;
- Dibutuhkan kawasan yang terkoneksi dengan infrastruktur konektivitas yang memadai;
- Perlunya sistem data untuk mempercepat proses administrasi pelayanan kapal.

Pelaksana

- Kemenhub, Kemen PUPR, BUMN dan Swasta.

Lokasi

Pelabuhan Patimban, Tj.Priok, Makkasar, dan Kijing.

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) sebesar 25% (pada tahun 2021) menjadi 26% (tahun 2023), dan 27% (tahun 2024) dari total pelayaran nasional;
- Terbangunnya Pelabuhan Patimban;
- Standardisasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar;
- Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pel. Tj. Priok, dan Jalan Akses Pel. Kijing.

***Highlight* Proyek**

- Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) [APBN]*;
- Patimban *Port Development Project Phase* (I-2) [APBN]*;
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - AKSES TOL PATIMBAN [APBN]*;
- Pembangunan *New Priok Eastern Access* (NPEA) [BUMN]*;
- Pengembangan Pelabuhan Kijing-Relokasi jalan Nasional Akses Pelabuhan Kijing [BUMN]*;
- Pengembangan Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok [BUMN];
- Pengembangan Pelabuhan Makassar [BUMN]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113722 A

MP Kereta Api Makassar-Pare Pare

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113723 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Urgensi

- *Backbone* konektivitas utama kondisinya kurang efisien dengan waktu tempuh rata-rata >2,5 jam per 100 Km;
- Biaya logistik yang relatif mahal (24% dari PDB).

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:
- Kemenkeu, Kemen LHK, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, Pemda, BUMN, KPPIP, dan LMAN.

Lokasi

Tahap Konstruksi
- Ruas Binjai–Langsa, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Indrapura–Kisaran, Pekanbaru–Padang, dan Kayu Agung–Palembang–Betung.

Tahap Penyiapan
- Ruas Betung–Tempino–Jambi dan Jambi–Rengat.

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

- Menurunkan waktu tempuh pada jalur lintas utama pulau pada tahun 2023 menjadi 2,08/100 km;
- Menurunkan waktu tempuh Aceh–Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam pada tahun 2024; Target 2023 : 37 jam.

***Highlight* Proyek**

- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - DEVELOPMENT OF NEW TUNNEL PAYAKUMBUH – PANGKALAN [APBN]*;
- Jalan Tol Trans Sumatera [BUMN]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, Dan Terdepan

Urgensi

- Infrastruktur konektivitas di wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan yang masih terbatas baik dari aspek kualitas dan kapasitas;
- Biaya transportasi di wilayah 3T yang relatif mahal.

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten).

Lintas K/L/D:
- Kementerian LHK, Kemendagri, Kemenko Marves, dan Pemda.

Lokasi

Provinsi Maluku (Kei Besar, Buru, Seram); Provinsi Maluku Utara (Morotai); Provinsi Sumatera Barat (Mentawai); Provinsi Sumatera Utara (Nias); Provinsi Bengkulu (Enggano); dan Provinsi Papua (Biak).

Sumber Pendanaan

APBN

Impact/ Outcome/ Output

- Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023 = 93/73/63 persen (pada tahun 2024 97/75/65);
- Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, tahun 2023 = 2,08 jam/100 km.

***Highlight* Proyek**

- Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Afulu–Bts Kab Nias Barat (P. Nias) [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Sioban–Katiet (P. Mentawai) [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan trans Pulau Enggano (Banjarsari–Malakoni–Kahyapu) [APBN];
- Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Maluku [APBN];
- Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Maluku Utara [APBN].

SK No 113724 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Jalan Trans Papua Merauke - Sorong

Urgensi

- Jaringan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Papua dan Papua Barat yang masih sangat terbatas;
- Biaya transportasi yang tinggi mengakibatkan harga logistik bahan pokok relatif sangat mahal.

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kemen PUPR.

Lintas K/L/D:
- Kemen LHK, Kemenko Marves, dan Pemda.

Lokasi

Provinsi Papua Barat dan Papua Terbagi menjadi 2 segmen di Provinsi Papua Barat dan 8 segmen di Provinsi Papua.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Meningkatkan Konektivitas mulai terbangunnya jalan sepanjang 47,9 km pada tahun 2023 dan jembatan sepanjang 1.388,8 m;
- Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023 = 93/73/63 persen;
- Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, tahun 2023 = 2,08 jam/100 km.

***Highlight* Proyek**

- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMEH - KARUAN [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TOWE HITAM - OKSIBIL [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - IWUR - WAROPKO II [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN ELELIM - MAMBERAMO II [APBN];
- Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - YETTI - SENGGI - MAMBERAMO [APBN].

MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Urgensi

- Infrastruktur konektivitas di wilayah papua yang sangat terbatas dari aspek kapasitas dan kualitas;
- Sistem jaringan jalan di Papua masih terbatas dan masih sangat tergantung dengan moda udara untuk distribusi barang dan mobilitas manusia;
- Harga bahan pokok yang sangat mahal akibat terbatasnya jaringan dan layanan infrastruktur transportasi di Wilayah Papua;
- Kondisi bandara yang ada memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan subsidi perintis baik untuk penumpang maupun kargo.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemenhub.

Lintas K/L/D:
- Kemendag, Pemda, dan Badan Usaha.

Lokasi

Wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 8.1–9.3 persen dan target 2024 sebesar 7,5 persen (berdasarkan RPJMN 2020-2024);
- Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah Papua sampai dengan 20–30% pada tahun 2023 hingga 2024;
- Target jumlah rute jembatan udara di Wilayah Papua pada tahun 2023 sebanyak 35 rute (dari total 43 rute se-Indonesia);
- Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 8 lokasi.

***Highlight* Proyek**

- Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Ilaga [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin - Timika, Papua [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Ewer - Asmat, Papua [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Mopah - Merauke, Papua [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Oksibil [APBN];
- Pengembangan Bandar Udara Sobaham [APBN];
- Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo [APBN];
- Angkutan Kargo Perintis [APBN];
- Angkutan BBM untuk Kargo Perintis [APBN].

SK No 113725 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar

Urgensi

- Jakarta, Surabaya, dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia;
- Pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih di bawah 20 persen;
- Kemacetan berdampak pada kerugian ekonomi;
- Dalam rangka mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan.

Lokasi

Metropolitan Jakarta, Metropolitan Surabaya, Metropolitan Bandung, Metropolitan Medan, Metropolitan Semarang, dan Metropolitan Makassar.

Impact/ Outcome/ Output

Angkutan umum massal perkotaan yang dibangun atau dikembangkan tahun 2023 hingga tahun 2024 sebanyak 6 Metropolitan.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemenhub

Lintas K/L/D:
- Kemenhub PPN/Bappenas, Pemda, dan Badan Usaha.

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

***Highlight* Proyek**

- *Area Traffic Control System* (ATCS) Terpadu Jabodetabek [APBN];
- LRT Jabodebek [BUMN]*;
- Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian Jatinegara – Bogor & Manggarai - Jakarta Kota [APBN];
- *Enginering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage 1* [APBN]*;
- *Enginering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II* [APBN]*;
- Jabodetabek *Railway Capacity* (*Enhancement Phase I*) [APBN];
- Surabaya *Regional Railway Line* (*Phase I*) [APBN];
- Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap I (Medan – Labuan) [APBN];
- Pembangunan Jalur KA Medan – Binjai [APBN].

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA

Urgensi

- Tingkat layanan tenaga listrik belum optimal;
- Tingkat konsumsi listrik per kapita masih rendah jika dibandingkan dengan negara berpendapatan tinggi;
- Mulai berkembangnya moda transportasi berbasis listrik;
- Komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi GRK.

Lokasi

- Pusat;
- Tersebar di 34 provinsi.

Impact/ Outcome/ Output

Meningkatkan akses, keandalan, dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik dengan:
- Meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi ~100% pada tahun 2023;
- Meningkatkan rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik 1.336 kWh/kapita pada tahun 2023;
- Penurunan emisi CO_2 pembangkit 5,91 juta ton pada tahun 2023.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
Kemen ESDM
- Perwakilan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait regulasi ketenagalistrikan.

BUMN
- Pemilik izin usaha dan wilayah usaha ketenagalistrikan serta pelaksana proyek.

Lintas K/L/D:
- Daerah (penyediaan lahan dan perizinan);
- Badan Usaha (pelaksana proyek).

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

***Highlight* Proyek**

- *Cofiring* Pembangkit Batu Bara [BUMN]*;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan (PLTA *Pumped Storage*, PLTA Asahan, PLTA Peusangan) [BUMN]*;
- Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik [APBN];
- *Advance Metering Infrastructure* (AMI) [BUMN];
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik [APBN] ;
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk [APBN];
- Rekomendasi Penerapa Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotorlistrik berbasis baterai [APBN];
- Jaringan *Backbone* Interkoneksi [BUMN]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

SK No 113726 A

MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Urgensi
- Mengurangi impor gas khususnya LPG untuk sektor rumah tangga;
- Menghemat subsidi LPG.

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kemen ESDM dan BUMN.

Lintas K/L/D:
- Kemen ESDM dan Badan Usaha.

Lokasi

Lokasi masih dalam pembahasan dengan KESDM dan Badan Usaha.

Sumber Pendanaan

BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

Mengurangi biaya rumah tangga sampai dengan Rp. 90.000–100.000/bulan per keluarga.

***Highlight* Proyek**
- Pembangunan Jaringan Gas Kota [BUMN]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

Urgensi
- Mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan antara sumber gas dengan pengguna baik untuk rumah tangga, transportasi, industri, dan kelistrikan untuk wilayah Kalimantan;
- Mendukung penyediaan energi untuk calon Ibu Kota Negara (IKN);
- Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna.

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kemen ESDM.

Lokasi

Pusat*.

**: Lokasi menunggu penetapan RIJTDGBN.*

Sumber Pendanaan

Menunggu penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur pipa transmisi.

Impact/ Outcome/ Output

Terlaksananya dukungan pembangunan pipa gas bumi dengan target panjang ruas pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2023 (kumulatif tersebar) sepanjang 19.800 km*.

**: Outcome ini dapat tercapai apabila RIJTDGBN telah ditetapkan.*

***Highlight* Proyek**

Menunggu penetapan Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur pipa transmisi.

SK No 113728 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

Urgensi
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk BBM,
- Mengurangi tingginya volume impor BBM,
- Mendukung produk olahan lainnya.

Pelaksana

Penanggung jawab Proyek:
- Kemen ESDM dan BUMN.

Lintas K/L/D:
- Kemen ESDM dan Badan Usaha.

Lokasi

Pusat dan Daerah (Kab. Tuban, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Cilacap, Kota Balikpapan, Kab. Indramayu).

Sumber Pendanaan

APBN dan BUMN.

Impact/ Outcome/ Output

Meningkatnya jumlah kapasitas kilang minyak (kumulatif) sebanyak 1.276.000 (*Barrel per Calendar Day*/BPCD) pada tahun 2023.

***Highlight* Proyek**
- Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi [APBN],
- Pembangunan *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban [BUMN]*,
- RDMP *Rescaling* RU II Dumai [BUMN]*,
- RDMP *Rescaling* RU III Plaju [BUMN]*,
- RDMP *Rescaling* RU IV Cilacap [BUMN]*,
- RDMP *Rescaling* RU V Balikpapan [BUMN]*,
- RDMP *Rescaling* RU VI Balongan [BUMN]*.

Keterangan:
* : Proyek Berstatus PSN.

MP Transformasi Digital

Urgensi
- Memperluas pemanfaatan platform *e-commerce* yang efisien untuk meraih potensi ekonomi digital yang optimal;
- Meningkatkan, efisiensi, efektivitas kegiatan belajar dan mengajar, serta aksesibilitas pengguna dan fleksibilitas waktu peserta didik dalam proses pembelajaran;
- Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas kegiatan layanan kesehatan publik, serta aksesibilitas dan fleksibilitas waktu pasien dan tenaga medis.

Pelaksana

Penanggung Jawab Proyek:
- Kemenkominfo.

Lintas K/L/D:
- ANRI, BIN, BPPT, BSSN, Kemenag, Kemendagri, Kemen Desa PDTT, Kemen KP, Kemenkes, Kemnaker, Kemenkeu, Kemenko Polhukam, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemen PANRB, Kemdikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kemhan, Kemensos, POLRI, Perpusnas RI, dan Televisi Republik Indonesia.

Lokasi

Tersebar pada 34 Provinsi di Indonesia.

Sumber Pendanaan

APBN.

Impact/ Outcome/ Output
- 99,5% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2023 dan 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2024,
- Pembangunan baru 141 BTS USO 4G pada Tahun 2023 dan tersedianya 9.568 BTS USO 4G On Air pada tahun 2024.

***Highlight* Proyek**
- BTS 4G/*Lastmile* [APBN],
- Data Center Nasional [APBN],
- Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialihmediakan [APBN],
- Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan [APBN],
- Adopsi Teknologi Digital UMKM [APBN],
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [APBN],
- Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menunju Industri 4.0 melalui pendampingan [APBN],
- Literasi Digital [APBN],
- *Digital Talent Scholarship* [APBN],
- Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah yang Terintegrasi [APBN].

SK No 113729 A

4.1.5.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar antara lain

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
(2) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
(3) Revisi Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan.

4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

4.1.6.1 Pendahuluan

Tantangan besar yang akan dihadapi pada tahun 2023 untuk agenda pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim meliputi perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan masyarakat melalui (1) penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sampah, dan bahan pencemar lainnya; (2) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah; (3) penguatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim; serta (4) penguatan implementasi pembangunan rendah karbon untuk menjaga keseimbangan aktivitas perekonomian dan upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berpotensi semakin meningkat seiring pulihnya aktivitas perekonomian pascapandemi COVID-19.

Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi (1) upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; (2) penanganan limbah B3 dan sampah spesifik; serta (3) optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut akan diperkuat oleh edukasi, penyadartahuan, dan penguatan kapasitas kelembagaan di pusat dan daerah. Upaya tersebut juga didukung dengan penguatan sistem perizinan, pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Peningkatan ketahanan bencana dan iklim akan didorong melalui penguatan sistem ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana, baik yang bersifat bencana seketika (*sudden onset disasters*), seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, cuaca ekstrem, dan banjir bandang; maupun bencana yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim. Selain itu, dalam rangka

SK No 113730 A

meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam membangun ketangguhan bencana, maka perlu dilakukan (1) mengembangkan kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah dan pemerintah daerah serta mitra kerja pemerintah untuk memperkuat program dan kegiatan mitigasi bencana pada daerah-daerah yang rawan bencana melalui geladi dan simulasi penanggulangan bencana, peningkatan literasi kebencanaan, peningkatan sistem informasi kebencanaan, dan penguatan sarana prasarana infrastruktur kebencanaan; (2) memodifikasi konsep Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) menjadi perangkat kolaborasi program-program ketangguhan bencana di tingkat desa yang dimiliki oleh K/L dan institusi non pemerintah lainnya; (3) memperkuat tata kelola penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) pada masa kedaruratan bencana serta mengoptimalkan dana transfer khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanganan bencana dan rehabilitasi pascabencana melalui Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Hibah RR); (4) membangun Sistem Peringatan Dini Multiancaman Bencana; dan (5) mengintegrasikan klaster-klaster penanganan darurat bencana ke dalam mekanisme Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

Strategi pembangunan rendah karbon bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK. Pembangunan rendah karbon merupakan *"backbone"* dalam transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu (1) pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi; (2) pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan; (3) pengembangan industri hijau; (4) rendah karbon pesisir dan laut melalui pemulihan ekosistem *mangrove*; serta (5) penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Sehubungan dengan target Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pemerintah mendukung penuh komitmen tersebut melalui implementasi pembangunan rendah karbon untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan dicapai dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**						
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	66,55	70,27	71,45	69,22	69,48	69,74
2	**Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim**						
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A[a)]	0,37	0,57[b)]	0,91	1,10	1,25

SK No 113731 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3	**Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline***						
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)						
	a. Kumulatif	24,92	26,44	24,51*)	26,87	27,02	27,27
	b. Tahunan	11,01	39,55	5,90*)	26,70	26,80	27,30
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	38,01	5,90*)	21,54	22,07	23,22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, Juni 2022; *) belum termasuk perhitungan penurunan emisi sektor lahan

4.1.6.3 Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri atas 3 (tiga) PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16
Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Selanjutnya, penjabaran sasaran, indikator, dan target PP sebagaimana pada Tabel 4.18.

SK No 113732 A

Tabel 4.18
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							
Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut							
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	52,65	53,53	52,82	55,30	55,40	55,50
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	N/A[a)]	68,94	81,04	59,50	60,00	60,50
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	86,57	87,21	87,36	84,30	84,40	84,50
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)	62,00	59,54	60,72	63,50	64,50	65,50
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim							
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat							
2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A[a)]	0,08[b)]	0,09[b)]	0,10	0,10	0,10
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A[a)]	0,29	0,48[b)]	0,81	1,00	1,15
2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,5	4,00	3,50	3,00
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon							
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)							
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi (%)						
	a. Kumulatif	4,29	4,87	5,37	9,70	9,99	10,15
	b. Tahunan	9,31	9,39	9,52	13,2	12,8	11,8

SK No 113733 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan (%)						
	a. Kumulatif	47,00	50,02	33,25[c)]	34,77	36,36	37,79
	b. Tahunan	13,39	78,80	50,7[c)]	53,1	58,3	57,2
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah (%)						
	a. Kumulatif	4,03	4,35	4,67	6,53	6,78	6,99
	b. Tahunan	6,90	7,15	7,58	9,3	9,4	9,4
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU (%)						
	a. Kumulatif	5,44	6,03	5,56[c)]	5,24	4,97	4,77
	b. Tahunan	11,35	10,66	0,16[c)]	2,59	2,45	2,87
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan (%)						
	a. Kumulatif	N/A[a)]	11,10	10,80	6,60	6,80	6,90
	b. Tahunan	6,30	11,10	10,50	6,80	7,04	7,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, Juni 2022; c) angka target 2021

4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim disusun 2 (dua) MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga urgensi, *impact/outcome/output*, pelaksana, lokasi, sumber pendanaan, dan *highlight* proyek. Kedua MP tersebut sebagai berikut

***Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3** akan mencakup dua kegiatan utama, yaitu (1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu dan (2) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan limbah B3 dengan dilatarbelakangi oleh tren timbulan limbah B3 yang semakin meningkat setiap tahunnya, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 dan peningkatan aktivitas perekonomian yang menghasilkan limbah B3. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, mengingat terbatasnya ketersediaan fasilitas pengolahannya yang belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

SK No 113734 A

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana meliputi empat klaster pengembangan, yaitu (1) bencana geofisika, tsunami, dan gunung api; (2) bencana hidrometeorologi; (3) bencana lingkungan; dan (4) penguatan tata kelola peringatan dini bencana secara keseluruhan. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu ke hilir.

Dari sisi hulu (*upstream*) atau struktur, penguatan sistem peringatan dini bencana akan difokuskan pada optimalisasi pemasangan peralatan peringatan dini multiancaman bencana dengan teknologi termutakhir untuk meningkatkan kerapatan dan luas jangkauan pemantauan serta diseminasi. Peningkatan sistem dan kapasitas untuk memprediksi multiancaman bencana yang menjadi ujung tombak keakuratan sistem peringatan dini, didasarkan pada data dan informasi valid dan kuat. Dengan usaha di atas, diharapkan dapat mencapai sasaran peningkatan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.

Dari sisi hilir (*downstream*) atau kultur, upaya peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, difokuskan pada strategi untuk: (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (*penta helix*); (2) menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT)); dan (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif untuk berbagai ancaman.

MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

SK No 113735 A

MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memperkokoh upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

4.1.7.1 Pendahuluan

Sesuai RPJMN 2020–2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) tahun 2023 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah NKRI. Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi COVID-19, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan *(law and order)* dalam situasi politik yang stabil secara nasional dan global, serta terus berkontribusi terhadap bantuan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

SK No 113736 A

Beberapa isu strategis bidang Polhukhankam masih akan dihadapi di tahun 2023. Pada bidang politik dalam negeri, tahun 2023 merupakan momentum penting dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024, di antaranya terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Presiden beserta Wakil Presiden, kampanye pemilu, serta produksi dan distribusi logistik pemilu. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dan memperkuat tata kelola pemilu. Masalah tingginya biaya politik dan maraknya korupsi perlu terus ditangani karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, rusaknya tatanan sosial, dan hancurnya nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, perkembangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai salah satu pilar demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya terkait pendanaan dan keragaman kualitas OMS. Status Indonesia yang berada pada *middle-income country*, serta adanya pandemi COVID-19 menyebabkan bantuan pendanaan dari mitra pembangunan kepada OMS semakin berkurang. Hal ini menjadi tantangan serius bagi OMS untuk tetap berperan dalam pembangunan, serta mewujudkan masyarakat sipil yang mandiri sebagai salah satu syarat demokrasi yang terkonsolidasi. Selanjutnya, beberapa isu strategis bidang komunikasi, antara lain belum optimalnya kualitas konten dan akses informasi; belum efektifnya komunikasi publik pemerintah; dan talenta digital yang masih harus ditingkatkan untuk mendukung transformasi digital sebagai strategi kunci transformasi ekonomi Indonesia.

Untuk menjawab tantangan bidang politik dan komunikasi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal yang dapat diwujudkan melalui

(1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi dengan strategi (a) penguatan penyelenggaraan pemilu sebagai persiapan tahapan pemilu serentak tahun 2024; (b) penguatan peraturan perundangan bidang politik; (c) peningkatan bantuan keuangan partai politik; (d) penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; serta (e) penguatan demokrasi secara umum yang dapat direfleksikan dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setiap tahunnya;
(2) peningkatan kesetaraan dan kebebasan dengan strategi (a) pendidikan politik dan pendidikan pemilih, khususnya kelompok pemilih pemula; (b) peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; dan (c) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; dan
(3) peningkatan kualitas komunikasi publik dengan strategi (a) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (b) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T); (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; (d) peningkatan literasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) masyarakat; (e) penelitian strategis bidang komunikasi dan informatika; (f) peningkatan peran lembaga pers dan jurnalis, serta (g) peningkatan kualitas lembaga penyiaran.

Pada bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, dinamika geopolitik masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Negara-negara di dunia tengah berupaya memulihkan kondisi ekonomi, namun di lain sisi, krisis kemanusiaan juga terjadi akibat meningkatnya rivalitas antarnegara seiring dengan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi, dilakukan penguatan diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan platform digital, serta didukung dengan momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN yang akan menguatkan kepemimpinan Indonesia, baik di kawasan maupun tingkat global. Isu sengketa perbatasan masih menjadi potensi ancaman bagi integritas wilayah nasional, oleh karena itu penyelesaian perundingan perbatasan masih akan menjadi prioritas. Pada sisi pelindungan, berbagai kasus seperti ancaman keamanan akibat konflik internal/antarnegara, isu kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK), hingga isu rasisme masih dihadapi oleh WNI di luar negeri. Sebagai *middle-income country*, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendukung transformasi ekonomi

SK No 113737 A

nasional maupun penguatan arsitektur kesehatan global. Kerja sama pembangunan internasional diarahkan untuk (1) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang mendorong struktur perekonomian berbasis inovasi dan bernilai tambah tinggi; serta (2) pemberian hibah yang lebih efektif ke negara sahabat. Lebih lanjut, keanggotaan Indonesia dalam berbagai Forum/Organisasi Internasional (Forum/OI) diarahkan agar memiliki manfaat yang terukur, termasuk untuk mendorong Indonesia sebagai hub vaksin di kawasan dengan didukung penguatan citra di tingkat regional dan global.

Guna pelaksanaan kebijakan luar negeri yang optimal, arah kebijakan dan strategi di tahun 2023 akan difokuskan pada (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) pemutakhiran data dan integrasi Portal Peduli WNI dengan data kependudukan terkait, serta pemutakhiran Data Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) bagi pemilu 2024; (3) percepatan penyelesaian perundingan penetapan batas maritim; (4) peningkatan citra positif Indonesia; dan (5) dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, pemerintah terus mendorong partisipasi swasta dalam KSST untuk mendukung pembangunan di sektor *green economy, blue economy,* industri halal, pertanian, dan kesehatan; serta (6) terus berkontribusi terhadap solidaritas, perdamaian, dan pembentukan tata kelola global, baik melalui forum/OI maupun pemberian hibah.

Pada bidang pembangunan hukum terdapat beberapa isu strategis di antaranya, yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari sisi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum optimal. Dalam aspek pembaharuan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar-Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, serta belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya (1) perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi; (2) perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim; (3) penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; (4) perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait pelaksanaan manajemen ASN, di antaranya adalah perbaikan manajemen data Pegawai Negeri Sipil (PNS), penguatan koordinasi pelaksanaan Manajemen Talenta ASN, serta masih adanya pelanggaran netralitas/disiplin ASN. Pada bidang pelayanan publik, di antaranya belum terintegrasinya pelayanan publik pada portal pelayanan publik berbasis elektronik (*e-services*), belum adanya perluasan dukungan pelayanan publik terhadap kelompok rentan, masih belum terintegrasinya jaringan inovasi pelayanan publik, dan standar inovasi yang masih beragam. Pada aspek kelembagaan dan proses bisnis, tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya pelaksanaan percepatan kebijakan SPBE, serta penyelenggaraan proses bisnis yang belum tertata berdasarkan isu/tematik dan lintas sektor. Pada konteks pelaksanaan

SK No 113738 A

reformasi birokrasi (RB), tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya nilai RB di daerah karena belum meratanya *knowledge* terkait pelaksanaan RB terutama di kabupaten/kota. Dalam mengatasi isu/tantangan tersebut, arah kebijakan yang dilakukan tahun 2023 di antaranya (1) penguatan manajemen talenta nasional ASN berbasis prinsip merit; (2) transformasi pelayanan publik; (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan; dan (4) penguatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja pembangunan.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2023 di antaranya adalah potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan global, peningkatan pelanggaran wilayah, pembangunan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara, digitalisasi layanan kepolisian, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme, dan pengamanan wilayah laut Natuna. Arah kebijakan menjaga stabilitas keamanan nasional diwujudkan melalui (a) penguatan keamanan dalam negeri, (b) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM), (c) penguatan keamanan laut, (d) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta (e) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal**						
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia[1)] (nilai)	74,92	73,66	78,12	78,06	78,37	78,66
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah[2)] (%)	69,43	70,4	77,23	75	78	79
2	**Optimalnya Kebijakan Luar Negeri**						
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional[3)] (nilai)	95,20	96,58	112,06	96,30	96,77	97,07
3	**Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap**						
3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,62	0,54[a)]	0,55[b)]	0,56 [c)]	0,57[c)]	0,58[c)]

SK No 113739 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
4	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**						
4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai) 4)	3,63	3,84	3,79	3,80d)	3,90d)	4,00d)
5	**Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**						
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)5)	100	100	100	100	100	100

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan.

Keterangan: a) penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015-2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019; b) penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022; c) penghitungan nilai IPH dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan nilai IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 2025; d) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB.

4.1.7.3 Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17
Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113740 A

Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 1. Konsolidasi Demokrasi							
Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif							
1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai)	78,73	75,66	75,67	77,25	79,50	80,23
1.2	IDI Aspek Kebebasan (nilai)	77,20	79,40	79,72	83,00	83,50	84,00
1.3	IDI Aspek Kesetaraan (nilai)	70,71	67,85	78,86	78,82	79,67	80,47
1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	2	3	5	2
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri							
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional							
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	48	13	14	16
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,78	3,82	3,98	3,90	3,95	4,00
2.3	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	89,91[a)]	88,35	92,61	88,00	91,00	92,00
PP 3. Penegakan Hukum Nasional							
Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan							
3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,70	3,84	3,88	4,06	4,09	4,14

SK No 113741 A

No.	Sasaran/Indikator	*Baseline* 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi							
4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai)						
	4.1.1 Kementerian/Lembaga	3,83	4,00	4,00	4,00	4,10	4,20
	4.1.2 Provinsi	3,36	3,70	3,88	3,80	3,90	4,00
	4.1.3 Kabupaten/Kota	3,42	3,65	3,27	3,60	3,70	3,80
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional							
Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan							
5.1	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	0,28	0,26	0,22	0,24	0,21	0,20
5.2	Indeks Terorisme Global (nilai)	5,07	4,63	4,39	4,34	4,29	4,24
5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)[b]	53,32	62,80	62,80[c]	>55	>60	>60
5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	4,23[d]	4,23	3,91	3,20	3,30	3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) data *baseline* 2019 menggunakan metode perhitungan lama; b) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk SDGs; c) data tahun 2020; d) indikator baru tahun 2020.

Pada tahun 2023 kondisi ekonomi dan pandemi COVID-19 diharapkan sudah menuju ke arah pemulihan yang makin baik. Namun demikian, upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19 akan terus dilakukan secara masif dan simultan. Untuk meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, para pemangku kepentingan telah menyusun perangkat regulasi yang kompatibel dan adaptif terhadap kondisi pandemi, di antaranya melalui penguatan sistem informasi teknologi kepemiluan. Kegiatan-kegiatan penting yang akan dilakukan di bidang politik dan komunikasi adalah (1) pelaksanaan tahapan pemilu oleh KPU RI; (2) pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu oleh Bawaslu RI; (3) peningkatan bantuan keuangan partai politik dan penguatan sistem integritas partai politik; (4) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; (5) pelaksanaan strategi komunikasi publik yang merata dan berkeadilan terkait kebijakan pemerintah, termasuk penanganan dan pemulihan COVID-19, serta kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara; (6) optimalisasi pendidikan dan pelatihan talenta digital; dan (7) peningkatan peran lembaga independen bidang komunikasi dan informatika.

SK No 113742 A

Kegiatan-kegiatan prioritas di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional meliputi upaya pelindungan WNI dan percepatan pemulihan ekonomi, antara lain (1) pelindungan WNI terhadap ancaman global, penyelesaian kasus WNI di luar negeri, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemenuhan hak finansial PMI, penyanderaan, jeratan hukuman mati, masalah keimigrasian, dan keamanan ABK melalui penguatan kebijakan pelindungan dari hulu ke hilir; (2) intensifikasi perundingan perbatasan dengan negara prioritas; (3) pemberdayaan diaspora; (4) peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan, salah satunya dengan penyelenggaraan Keketuaan ASEAN Tahun 2023; dan (5) optimalisasi platform digital diplomasi ekonomi.

Selain itu, kerja sama pembangunan internasional akan terus diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi melalui (1) penguatan pemberian hibah yang efektif; (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif, mitigasi krisis iklim, dan penguatan arsitektur kesehatan global melalui pendekatan kemitraan multi-pihak (KMP); (3) penguatan sinergi diplomasi publik untuk diplomasi komoditas berkelanjutan mendukung pemulihan pariwisata dan meningkatkan citra sebagai stabilisator di kawasan, termasuk melalui *International Conference on Digital Diplomacy*; serta (4) penguatan kepemimpinan Indonesia melalui (a) keanggotaan di berbagai forum/organisasi internasional antara lain, (i) Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA); (ii) United Nation Social Economic and Social Council (ECOSOC); (iii) pencalonan di *Executive Board* UNESCO (2023-2027); serta (iv) penyelenggaraan Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Donor Conference to Mobilise Support for the Implementation of the Strategic Sectoral Development for East Jerussalem; (b) peningkatan peran dalam mendorong pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), serta perdamaian dan stabilitas keamanan global, seperti melalui Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) dan penyampaian *compliance* terhadap pemenuhan HAM; dan (c) pengukuran pemanfaatan partisipasi Indonesia dalam forum/OI.

Kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya (1) penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara; (2) perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi; (3) penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana; (4) penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata; (5) implementasi *digital signature* dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing APH; (6) penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim; (7) perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan (8) peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan pelindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara, antara lain (1) transformasi manajemen ASN, (2) percepatan penerapan manajemen talenta berbasis merit, (3) integrasi layanan pada portal pelayanan publik (*e-services*), (4) pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan, (5) Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional, (6) pemetaan proses bisnis dan penataan kelembagaan tematik, (7) koordinasi percepatan implementasi kebijakan SPBE, (8) koordinasi percepatan dan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di instansi pusat dan daerah, dan (9) koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional.

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) penguatan kemampuan pertahanan; (2) penguatan digitalisasi layanan kepolisian; (3) peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja; (4) penguatan keamanan dan ketahanan siber; (5) kerja sama penanggulangan terorisme, pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu; dan (6) penguatan kapasitas penegakan keamanan laut dan pengamanan wilayah laut Natuna.

SK No 113743 A

4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terdapat dua *Major Project* (MP), yaitu (1) Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), serta (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Lebih lanjut MP tersebut dijabarkan pada uraian di bawah ini.

***Major Project* Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT**

Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020–2024 yang didasari oleh direktif presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT, diketahui bahwa target pada awal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 mengalami penyesuaian akibat pandemi COVID-19. Pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan pemerintah perlu melakukan *refocusing* anggaran yang ditindaklanjuti dengan perubahan metode pelaksanaan kegiatan pada K/L terkait. Sebagai dampak dilakukannya *refocusing,* beberapa *output* prioritas nasional harus diatur kembali target dan waktu pelaksanaannya agar dapat diselesaikan pada 2024. Namun demikian, beberapa *output* yang berdampak langsung terhadap kemajuan capaian pelaksanaan MP, seperti pembentukan CSIRT pada pemerintah pusat, pembentukan CSIRT pada pemerintah daerah, dan pengembangan SDM keamanan siber, tetap tercapai sesuai target RPJMN 2020–2024.

MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

SK No 113744 A

***Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna**

Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di Wilayah Natuna dan meningkatnya risiko perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*; serta *transnational crimes*. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya, serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (alpalkamla).

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna, menurunkan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUU *Fishing,* serta *transnational crimes*. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun.

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna

4.1.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020–2024, yang meliputi:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
(4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
(5) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
(6) Revisi UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum;
(7) Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
(8) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
(9) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan
(10) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

SK No 113745 A

4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun-tahun akhir RPJMN 2020-2024. Oleh sebab itu, pendanaan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target agenda pembangunan guna mendorong Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengacu pada pencapaian target RPJMN 2020–2024 dengan ketersediaan anggaran belanja K/L yang masih cukup ketat seiring dengan penurunan defisit kembali ke angka di bawah 3 persen pada tahun 2023. Hal ini membuat pemilihan kegiatan/proyek harus lebih selektif dengan mempertimbangkan prioritas, kesiapan, dan penuntasan. Penekanan pendanaan tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan persiapan pemilihan umum serentak di tahun 2024, pemenuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan membiayai agenda prioritas pembangunan untuk penyelesaian penuntasan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pengentasan kemiskinan melalui berbagai program bantuan dan jaminan sosial yang lebih terukur dan tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan pariwisata, peningkatan ketahanan pangan, serta pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas.

Tabel 4.21
Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	Indikasi Pendanaan (Rp. Triliun)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	40,6
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	126,4
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	227,3
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5,8
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	105,5
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	10,8
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	72,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L dan KPBU. Belum memperhitungkan Transfer ke Daerah dan Investasi Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan beberapa langkah strategis. Langkah strategis pertama yaitu pemerataan pembangunan melalui penuntasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai sarana prasarana dasar masyarakat dan pendorong produktivitas dunia usaha.

SK No 113746 A

Kedua, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui sistem jaminan dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran serta peningkatan akses dan ketahanan pangan. Untuk penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job* dengan melakukan penyediaan lapangan usaha dengan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui revitalisasi industri dan pariwisata serta pengembangan UMKM. Dalam peningkatan kualitas SDM, dilakukan melalui penguatan sistem kesehatan nasional dan sistem pendidikan serta pendidikan karakter.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, langkah strategis yang dilakukan adalah melalui transisi energi (merespons perubahan iklim) dan ekonomi rendah karbon dengan terus meningkatkan proporsi penggunaan EBT. *Sustainability* dari sisi ketahanan nasional, juga didukung oleh penekanan prioritas di sektor pertahanan dan keamanan terutama untuk menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

Dari langkah-langkah strategis yang telah disusun, maka penekanan dalam Proyek Prioritas Strategis/MP RKP 2023 yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Untuk itu, integrasi kebijakan merupakan salah satu pilihan strategi yang akan dilaksanakan, khususnya dalam MP yang bersifat lintas sektor atau kewilayahan, sedangkan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas lebih diarahkan untuk memastikan tidak ada proyek yang terbengkalai/mangkrak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain integrasi kebijakan, juga dilakukan penguatan integrasi sumber pendanaan dari APBN antara lain melalui belanja K/L, belanja non-K/L (subsidi/*Public Service Obligation*), dan Transfer ke Daerah (DAK, Hibah Daerah). Selain itu, untuk peningkatan optimalisasi pembiayaan non-APBN, keterlibatan BUMN dan swasta baik melalui skema kerja sama KPBU maupun investasi langsung BUMN dan swasta juga penting untuk didorong agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

SK No 113747 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V
Kaidah Pelaksanaan

SK No 113748 A

BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk memastikan upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian pada pelaksanaan RKP Tahun 2023.

5.1 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan outcome pembangunan secara efektif, dibutuhkan adanya kerangka kelembagaan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perkembangan lingkungan strategis pembangunan, peraturan perundangan yang berlaku, dan pembagian kewenangan pusat dan daerah, dengan memperhatikan asas manfaat, efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan membatasi pembentukan kelembagaan baru, namun mengedepankan kerja sama multipihak yang kolaboratif yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kerangka Kelembagaan (KK) berperan mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Fokus kebijakan KK pada RKP 2023 diselaraskan dengan kebijakan dalam RPJMN 2020–2024 yang ditujukan pada (1) penataan kelembagaan dalam arti pembentukan kelembagaan; serta (2) pembentukan institusi koordinasi ad-hoc yang dilaksanakan dengan basis kinerja, digitalisasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, urgensi KK dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk

(1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dan *Major Project* serta merespons berbagai perubahan dan permasalahan yang ada;

(2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan pencapaian PN tidak terkendala oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik.

Berdasarkan RPJMN 2020–2024, penyusunan KK dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana gambar berikut.

SK No 113749 A

Gambar 5.1
Prinsip Kerangka Kelembagaan (KK)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, diperlukan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

(1) Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" yaitu Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Usulan KK pada Prioritas Nasional 3 ini sesuai dengan amanat RKP 2023, yakni Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, yang di dukung dengan UU No. 6/2014 tentang Desa, serta UU No. 13/2011 tentang Fakir Miskin. Reformasi sistem perlindungan sosial khususnya di masa pascapandemi COVID-19 difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif. Salah satunya melalui peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala.

Terkait hal tersebut, pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dilakukan untuk menguatkan dan mengintegrasikan kelembagaan yang sudah ada terutama dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perencanaan dan penganggaran berbasis data, serta penyelenggaraan layanan sosial dan rujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pemutakhiran DTKS langsung oleh desa/kelurahan menggunakan sistem digitalisasi monografi desa/kelurahan berperan penting untuk membantu ketepatan sasaran program dan memotong rantai birokrasi pemutakhiran data yang berlapis, yang bermuara pada pengalokasian APBN untuk perlindungan sosial yang berdayaguna lebih tinggi untuk mengentaskan kemiskinan.

SK No 113750 A

(2) Prioritas Nasional 4 "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" yaitu Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Perwalian Kebudayaan

Usulan KK pada Prioritas Nasional 4 ini sesuai dengan amanat RKP 2023 yakni Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan, yang didukung dengan UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Perpres No. 111/2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, yang di dalamnya juga mengatur Dana Abadi Kebudayaan yang ditanamkan untuk dimanfaatkan dalam pemajuan kebudayaan. Pengelolaan dana perwalian kebudayaan menjadi upaya penting untuk mendukung penguatan serta pengembangan ekosistem seni dan budaya nasional, yang berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Dalam hal ini, Lembaga Pengelola Dana Perwalian Kebudayaan akan memiliki kewenangan mengelola Dana Abadi Kebudayaan, mengintegrasikan pendanaan baik yang bersumber dari alokasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan strategi serta program pemajuan kebudayaan.

5.2 Kerangka Regulasi

Sebagai sarana untuk menjamin sinergitas antara pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Strategis (Major Project) Tahun 2023 dengan regulasi pendukungnya, maka dibutuhkan adanya suatu kerangka regulasi yang disusun dengan memperhatikan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap kerangka regulasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pengelolaan Kerangka Regulasi (KR), sejak awal proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, agar dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyusunan kerangka regulasi dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menjalin sinergi antara kebijakan dengan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Strategis (*Major Project*/MP) pembangunan pada RKP 2023. Untuk mewujudkan pelaksanaan kerangka regulasi yang mendukung PN dan MP sebagaimana disebutkan dalam RKP ini, diperlukan koordinasi antarkementerian/lembaga baik pada tingkat pusat dan daerah. Peran kerangka regulasi dapat dijabarkan pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2
Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

SK No 113751 A

Pengusulan kerangka regulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan kerangka regulasi seperti yang terdapat dalam Gambar 5.3 berikut.

Gambar 5.3
Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Kerangka Regulasi yang dapat diusulkan dalam RKP pada bab ini seperti pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Kriteria Pengusulan Kerangka Regulasi

Jenis	Kriteria
Rancangan Undang-Undang (RUU)	Merupakan RUU usulan Pemerintah Sudah memiliki Naskah Akademik, Kajian, draf RUU dan/atau kajian analisis biaya dan manfaat.
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)	Sudah memiliki draf RPP serta hasil kajian yang mendukung usulan tersebut. Bukan pengulangan dari progsun PP/Perpres tahun sebelumnya tidak termasuk daftar luncuran tahun sebelumnya, tidak dalam proses izin Prakarsa, dan bukan pengulangan RKP sebelumnya.
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)	Sudah memiliki draf RPerpres serta hasil kajian yang mendukung usulan tersebut. Bukan pengulangan dari progsun PP/Perpres tahun sebelumnya tidak termasuk daftar luncuran tahun sebelumnya, tidak dalam proses izin Prakarsa, dan bukan pengulangan RKP sebelumnya.
Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan	Sudah memiliki draf Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan dimaksud. Dapat dipastikan selesai pada tahun pelaksanaan.

SK No 113752 A

Pada proses pengusulan Kerangka Regulasi RKP 2023, perlu dilakukan kajian berdasarkan batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek beban yang ditimbulkan seperti pada Gambar 5.4 berikut.

Gambar 5.4
Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi bertujuan untuk mengukur kebutuhan dan urgensi usulan kerangka regulasi dalam RKP 2023.

Dalam rangka penyesuaian dengan penyusunan rencana legislasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan Program Penyusunan (Progsun) yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kerangka regulasi yang diusulkan harus memenuhi kriteria kerangka regulasi sebagaimana disebutkan di atas. Di samping itu, usulan kerangka regulasi perlu melalui beberapa proses, antara lain sebagai berikut

1. Usulan kerangka regulasi yang berbentuk rancangan undang-undang (RUU) pada RKP 2023, perlu melalui pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK), penyelarasan naskah akademik, dan harmonisasi draf rancangan undang-undang pada tahun anggaran 2023. Namun, jika belum selesai pada tahun anggaran 2023, maka usulan RUU dapat dimasukkan kembali dalam RKP pada tahun anggaran berikutnya.

SK No 113753 A

Gambar 5.5
Mekanisme Usulan Kerangka Regulasi dalam Bentuk RUU pada RKP 2023

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

2. Usulan kerangka regulasi yang berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), dan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen)/Rancangan Peraturan Kepala (RPerka) pada RKP 2023, perlu melalui pembahasan Panitia Antarkementerian (PAK) dan harmonisasi draf rancangan peraturan pemerintah dan draf rancangan peraturan presiden pada tahun anggaran 2023. Khusus untuk rancangan peraturan pemerintah, diharapkan dapat diselesaikan pembentukannya pada tahun anggaran 2023.

Gambar 5.6
Mekanisme Usulan Kerangka Regulasi
dalam Bentuk RPP/RPerpres/RPermen/RPerka pada RKP 2023

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

SK No 113754 A

5.2.1 Indikasi Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Kerangka regulasi yang mendukung pencapaian prioritas nasional yang memuat analisis urgensi dan target pelaksanaan pada RKP Tahun 2023, disampaikan sebagai berikut

Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan"

Indikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta KP Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi ini akan menghapus UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dimana UU ini tidak dapat mengakomodir permasalahan koperasi yang terjadi saat ini. Dengan adanya RUU ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi/simpanan di koperasi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pengelolaan Terpadu UMKM.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Perpres No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Perpres No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Perpres No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Perpres No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.

(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Perpres No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Perpres No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.

SK No 113755 A

(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari PerPres No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Perpres No. 64/2014 tentang Koordinasi Startegis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.

Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan"

Indikasi kebutuhan Kerangka Regulasi sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan perkotaan Indonesia di masa depan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; dan MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait Pengaturan Pembangunan Fisik dan Infrastruktur Perkotaan.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan dan KP 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Kerangka regulasi ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa diperlukan penyesuaian substansi bersifat khusus (pengaturan sistem dan kewenangan khusus bagi Jakarta dalam beberapa urusan pemerintahan), serta dalam rangka penanaman modal menjadi salah satu kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta tujuannya untuk kemudahan investasi, akan didiskusikan dengan K/L terkait. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(3) Revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup matra darat dan matra laut. Revisi RTRWN juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti: Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perpres No. 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar (Sarbagita).

SK No 137851 A

(4) Revisi Peraturan Presiden tentang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Strategis. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 12/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Perpres No. 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal–Pemalang serta Rencana Induk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya.

(5) Revisi Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara serta KP Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup matra darat dan matra laut. Kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2020-2024.

(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang membagi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan; dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha. Kerangka regulasi ini mengatur pembagian wilayah menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang yang akan diatur oleh peraturan setingkat Perpres, bukan peraturan dibawahnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur mengenai skema pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara. Skema pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional diperinci dalam peraturan turunan melalui Perpres tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ini. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

SK No 113757 A

(8) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Barat

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Barat. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(9) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur I

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Timur I. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(10) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur II

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Timur II. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(11) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP KIPP. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

SK No 113758 A

(12) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape*

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa – Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merujuk pada Pasal 6 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi yang dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang didasarkan pada RDTR. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk melestarikan Kawasan Subak-Bali *Landscape* sebagai warisan budaya dunia melalui perwujudan tata ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape* yang berkualitas sebagai daerah irigasi tradisional, kawasan pertanian pangan tradisional, dan kawasan kegiatan adat yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, serta mengembangkan ekonomi lokal masyarakat dengan mendorong komoditas pertanian dan pariwisata yang berdaya saing serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

(13) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Sumatera serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan yang bernilai strategis nasional dalam mendukung penataan ruang wilayah nasional sesuai dengan amanat PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(14) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Cagar Budaya Muarajambi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Sumatera serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan salah satu dari tujuh kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Sosial-Budaya dalam PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan yang bernilai strategis nasional dalam mendukung penataan ruang wilayah nasional sesuai dengan amanat PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing"

Indikasi kebutuhan Kerangka Regulasi sebagai berikut:

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) guna mengatur penyelenggaraan tata kelola data registrasi sosial ekonomi antar instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Vaksin Halal

SK No 113759 A

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mengatur tahapan dan langkah yang akan di lakukan oleh seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun swasta dalam mewujudkan penyediaan vaksin halal di Indonesia. Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mendukung kemudahan dalam proses registrasi dan perizinan bagi dokter/dokter gigi yang akan berpraktik, termasuk dokter/dokter gigi yang sedang menjalankan pendidikan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Kesehatan dan pemenuhan dokter/dokter gigi di fasyankes. Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

(4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan perkembangan hukum dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha. Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Prioritas Nasional 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"

Indikasi kebutuhan Kerangka Regulasi sebagai berikut:

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini turut mendukung ProP Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.

(2) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar serta KP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman. Kerangka regulasi ini merupakan turunan dari UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air, dan Revisi PP No. 122/2015 tentang Penyelenggaraan SPAM. Kerangka regulasi ini akan mengatur terkait teknis pengembangan penyelenggaraan SPAM untuk mengefektifkan *business process* penyelenggaraan SPAM, sehingga dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi investasi dalam bidang penyelenggaraan SPAM. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah).

SK No 113760 A

(3) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan revisi dari PP No. 34/2006 tentang jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan dan Jalan Trans Papua Merauke Sorong.

Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik"

Indikasi kebutuhan Kerangka Regulasi sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam praktik penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang kompetitif.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka Regulasi ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup objek jaminan benda bergerak, termasuk gadai dan jaminan resi gudang yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penyusunan RUU ini juga dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan terkait dengan gadai dan jaminan atas kapal dan pesawat (hipotek) yang masih merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta pengaturan lain yang masih tersebar di masing-masing undang-undang. Unifikasi pengaturan mengenai jaminan kebendaan sejalan dengan kebutuhan sistem jaminan kebendaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan dan pembiayaan. Kerangka regulasi ini juga dimaksudkan untuk menyambut perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan merespons dunia usaha agar proses pembiayaan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan memberikan kepastian hukum.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk memperbaharui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku lebih dari 10 tahun. Pembaruan substansi pengaturan badan usaha melalui penyusunan RUU ini diharapkan dapat mengakomodir pengaturan mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). RUU Badan Usaha mengupayakan adanya unifikasi ke dalam satu undang-undang. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menciptakan dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

(4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kerangka regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengaturan hukum acara perdata terkait substansi yang menimbulkan multitafsir, materi muatan yang tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak optimal dalam mendukung penyelesaian sengketa di bidang perdata.

SK No 113761 A

(5) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Kerangka regulasi ini dimaksudkan untuk memperbaharui hukum pidana nasional, terutama untuk memenuhi tuntutan perubahan akibat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Saat ini, KUHP yang diberlakukan merupakan sistem hukum pidana yang tersebar dan tidak utuh karena terdapat pasal-pasal yang diubah, ditambah, maupun dihapus dengan berbagai undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta belum mengakomodir upaya pembaharuan sistem hukum pidana.

(6) Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memperluas kategori Penerima Bantuan Hukum. Dalam UU Bankum saat ini, terutama Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam rangka peningkatan dan perluasan akses terhadap keadilan, kategori penerima bantuan hukum didorong agar ditujukan kepada kelompok rentan lainnya yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, tidak hanya orang atau kelompok orang miskin.

(7) Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memperbaharui pengaturan mengenai HAM dan disesuaikan dengan perkembangan terkini nasional dan dinamika global. Beberapa pengaturan mengenai HAM yang belum diatur secara eksplisit dalam UU HAM saat ini misalnya mengenai perlindungan data pribadi, serta terkait bisnis dan HAM. Selain itu, revisi UU HAM dilakukan untuk mengkaji kembali peran strategis kelembagaan Komnas HAM yang telah berjalan kurang lebih selama 20 tahun. Dalam hal ini, kedudukan dan peran strategis Komnas HAM sebagai lembaga nasional HAM yang independen dan berintegritas perlu untuk diperkuat, termasuk penataan tugas, fungsi dan wewenang dengan instansi terkait lainnya yang beririsan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Komnas HAM.

(8) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Kerangka regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV/2006 yang membatalkan secara keseluruhan UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sejak tahun 2006 hingga saat ini, belum ada UU baru yang khusus mengatur mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

(9) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan suatu mekanisme baru terkait penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwa. Mekanisme tersebut dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya *(in rem forfeiture)*, sehingga pemulihan atau pengambilan aset hasil tindak pidana dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan dalam perkara pidana *Non Conviction Based* (NCB) *asset forfeiture*. RUU ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya.

SK No 113762 A

(10) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Kerangka regulasi ini dimaksudkan untuk mempertajam materi muatan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berintegritas.

5.2.2 Hasil Penajaman Kerangka Regulasi

Berdasarkan hasil kesepakatan penajaman kerangka regulasi, dari seluruh usulan kerangka regulasi sebagaimana disebutkan dalam indikasi kerangka regulasi pada sub bab 5.2.1 di atas, terdapat beberapa kerangka regulasi yang telah memenuhi kriteria masuk dalam rencana legislasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan Program Penyusunan (Progsun), antara lain sebagai berikut

Prioritas Nasional 1

(1) Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian;
(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat;
(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru;
(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi.

Prioritas Nasional 2

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;
(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3) Revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);
(4) Revisi Peraturan Presiden tentang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;
(5) Revisi Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara;
(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional;
(8) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Barat;
(9) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP KIPP;
(10) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur I;
(11) Peraturan Kepala Badan Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Timur II;
(12) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape*;
(13) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser;
(14) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Cagar Budaya Muarajambi.

SK No 113763 A

Prioritas Nasional 3

(1) Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran;
(2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Vaksin Halal;
(4) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Peraturan Pendukung Pembentukan Sekretariat Nasional (Gugus Tugas) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Prioritas Nasional 5

(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
(2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
(3) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34/2006 tentang Jalan.

Prioritas Nasional 7

(1) Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
(2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan, terutama pada pelaksanaan RKP dimaksudkan untuk (1) menggambarkan perkembangan terkini atas proses kebijakan evaluasi dan pengendalian, dan (2) menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan korektif selama pelaksanaan pembangunan. Dinamika perkembangan proses penyusunan RKP Tahun 2023 tentunya sangat memengaruhi kerangka evaluasi dan pengendalian, terutama dalam upaya mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Prioritas Strategis/ Major Project (MP).

5.3.1 Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023 meliputi tujuan, ruang lingkup, pelaksana, mekanisme, dan metode evaluasi pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Tujuan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Tujuan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk (a) mengukur hasil capaian kinerja pembangunan yaitu pencapaian PN, PP, KP, ProP, dan MP sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; serta (b) memberi *feedback* dan landasan dalam perumusan tema dan sasaran pembangunan pada RKP Tahun 2025. Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP Tahun 2023 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

(2) Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan RKP

Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 terdiri dari evaluasi atas kinerja pelaksanaan PN, PP, KP, ProP, serta MP. Adapun evaluasi atas kinerja pelaksanaan MP dilakukan terutama terhadap 14 MP yang menjadi penekanan (*highlight*) dalam RKP Tahun 2023 dengan tidak mengesampingkan MP lainnya dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun substansi evaluasi RKP Tahun 2023 mencakup kinerja pembangunan tahunan berdasarkan dua hal, yaitu:

(a) Kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan meliputi (i) pencapaian sasaran PN sebagai capaian *outcome,* (ii) pencapaian sasaran PP sebagai capaian *immediate outcome,* (iii) pencapaian sasaran KP sebagai capaian *output* 1, (iv) pencapaian

SK No 113764 A

sasaran ProP dan MP sebagai capaian *output* 2, dan (v) pencapaian *output* (rincian *output*/RO) K/L sebagai capaian *output* 3.

(b) Kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan meliputi (i) kinerja optimalisasi pada level PN; (ii) kinerja optimalisasi pada level PP; (iii) kinerja optimalisasi pada level KP; (iv) kinerja optimalisasi pada level ProP; dan (v) kinerja optimalisasi pada MP yang diukur berdasarkan aspek pencapaian sasaran, capaian kinerja dukungan RO K/L, dan penyerapan anggaran.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, disimpulkan nilai kinerja akhir yaitu perbandingan antara kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan dan kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan.

(3) Pelaksana Evaluasi RKP

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan data dan informasi dari K/L sebagai pelaksana RKP dan Kementerian PPN/Bappenas selaku penanggung jawab penyusunan RKP. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, hasil evaluasi RKP digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan tema, sasaran pembangunan, serta masukan untuk penyusunan narasi RKP periode selanjutnya.

(4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP

Mekanisme evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 terdiri dari dua tahap, yaitu:

(a) Evaluasi pelaksanaan RKP tahap I, yaitu evaluasi kinerja RKP Tahun 2023 berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III. Alur evaluasi pelaksanaan RKP tahap I (Gambar 5.1) terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data *e-Monev;* (ii) identifikasi data capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian (Evadal) per Bidang Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan RO K/L; (iv) pengolahan dan analisis data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan sasaran pembangunan tahun 2025. Hasil evaluasi ini sebagai masukan dalam persiapan penyusunan tema dan sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025.

Gambar 5.7
Alur Evaluasi RKP Tahap I (capaian hingga triwulan III)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113765 A

(b) Evaluasi pelaksanaan RKP tahap II, yaitu evaluasi kinerja RKP Tahun 2023 berdasarkan pemutakhiran data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan IV. Alur evaluasi pelaksanaan RKP tahap II (Gambar 5.2) terdiri dari (i) pemutakhiran data pada kertas kerja evaluasi pelaksanaan RKP oleh para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas maupun K/L pelaksana; (ii) pertemuan untuk melakukan konfirmasi/finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan laporan evaluasi RKP Tahun 2023; serta (iv) hasil pemutakhiran yang akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP Tahun 2025, yaitu pada Subbab Evaluasi RKP.

Gambar 5.8
Alur Evaluasi RKP Tahap II (capaian hingga triwulan IV)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

(5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP

Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja pencapaian pembangunan pada evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 yaitu (a) evaluasi kinerja efektivitas dengan menggunakan metode analisis gap dan rata-rata tertimbang; serta (b) evaluasi kinerja optimalisasi dengan menggunakan metode indeks optimalisasi. Berdasarkan dua evaluasi kinerja tersebut, disimpulkan nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio yaitu perbandingan antara kinerja efektivitas pelaksanaan pembangunan dan kinerja optimalisasi pelaksanaan pembangunan. Metodologi evaluasi pelaksanaan RKP secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.2
Metodologi Evaluasi Pelaksanaan RKP: Kinerja Pencapaian Pembangunan

Aspek	Uraian
I. Evaluasi Kinerja Efektivitas	
(1) Metode Evaluasi	Metode Analisis Gap dan Rata-Rata Tertimbang
(2) Sumber Data	1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-KP-ProP-MP (*self assessment* pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-MP Kementerian PPN/Bappenas). 2. Data *e-Monev* Kementerian PPN/Bappenas. 3. *Self assessment* dukungan *output* (RO) K/L.

SK No 113766 A

Aspek	Uraian
(3) Mekanisme Penghitungan	Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan 1. pencapaian sasaran PN sebagai capaian *outcome*. 2. pencapaian sasaran PP sebagai capaian *immediate outcome*. 3. pencapaian sasaran KP sebagai capaian *output* 1. 4. pencapaian sasaran ProP dan MP sebagai capaian *output* 2. 5. pencapaian *output* (RO) K/L capaian *output* 3.
(a) Pencapaian Sasaran PN	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan membandingkan angka capaian terhadap target PN
(b) Pencapaian Sasaran PP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan membandingkan angka capaian terhadap target PP
(c) Pencapaian Sasaran KP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan membandingkan angka capaian terhadap target KP
(d) Pencapaian Sasaran ProP dan MP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran ProP dan MP dengan membandingkan angka capaian terhadap target ProP dan MP
(e) Pencapaian *Output* (RO) K/L	Penghitungan persentase pencapaian dukungan *output* (RO) K/L berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya
(4) Kategori Kinerja	Kategori kinerja terdiri atas 1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen. 2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen. 3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen. 4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.
II. Evaluasi Kinerja Optimalisasi	
(1) Metode Evaluasi	Metode Indeks Optimalisasi
(2) Sumber Data	1. Data capaian sasaran PN, PP, KP, ProP, dan MP dari PJ PN-PP-KP-ProP-MP (*self assessment* pencapaian sasaran PN-PP-KP-ProP-MP Kementerian PPN/Bappenas). 2. Data *e-Monev* Kementerian PPN/Bappenas. 3. *Self assessment* dukungan *output* (RO) K/L.
(3) Mekanisme Penghitungan	Pencapaian kinerja ditentukan berdasarkan 1. kinerja optimalisasi PN. 2. kinerja optimalisasi PP. 3. kinerja optimalisasi KP. 4. kinerja optimalisasi ProP. 5. kinerja optimalisasi MP.

SK No 113767 A

Aspek	Uraian
(a) Kinerja optimalisasi PN	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN
(b) Kinerja optimalisasi PP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP
(c) Kinerja optimalisasi KP	Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP
(d) Kinerja optimalisasi ProP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan *output* (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran ProP
(e) Kinerja optimalisasi MP	Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan *output* (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran MP
(4) Kategori Kinerja	Kategori kinerja terdiri atas 1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen. 2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen. 3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen. 4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.
III. Rasio Kinerja	
Mekanisme Penghitungan	Nilai kinerja akhir dalam bentuk rasio yang dihitung berdasarkan perbandingan antara kinerja efektivitas PN/PP/KP/ProP/MP dengan kinerja optimalisasi PN/PP/KP/ProP/MP. Rasio kinerja terdiri atas 1. rasio >1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN relatif lebih baik dibandingkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran). 2. rasio <1 menunjukkan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran) relatif lebih baik dibandingkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN. 3. rasio =1 menunjukkan kinerja efektivitas pelaksanaan PN setara dengan kinerja optimalisasi pelaksanaan PN (termasuk kemampuan penyerapan anggaran). 4. N/A menunjukkan nilai rasio kinerja belum dapat dihitung.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

5.3.2 Kerangka Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka pengendalian pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023 meliputi tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan mekanisme, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 adalah untuk menjaga pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih dengan pertimbangan strategis dari program/kegiatan/proyek strategis dan besaran anggaran minimal yang ditentukan) sesuai dengan rencana

SK No 113768 A

atau *on-track*, dengan memperhatikan rekomendasi atas hasil evaluasi dalam menentukan PN/PP/KP/ProP/MP yang menjadi fokus pengendalian pelaksanaan pembangunan.

(2) Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 berupa rekomendasi tindakan korektif atas pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Adapun pengendalian pelaksanaan RKP tahun 2023 dilakukan pada semester kedua tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.9
Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

(3) Pelaksana Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait dan/atau pemerintah daerah. Pengendalian pelaksanaan pembangunan utamanya didukung oleh data dan informasi tertentu atas (a) capaian sasaran pembangunan, (b) laporan hasil pemeriksaan, (c) realisasi anggaran dan evaluasi kinerja, serta (d) laporan hasil pengawasan. Hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan disampaikan kepada K/L pelaksana berupa rekomendasi tindakan konstruktif, yaitu *refocusing* atau penajaman/pemfokusan kembali langkah percepatan pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).

(4) Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dilakukan melalui penilaian (*assessment*) atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (a) penentuan fokus pengendalian; (b) *assessment* berupa pengisian instrumen pengendalian dan *crosscheck* lapangan konfirmasi atas pelaksanaan pembangunan; (c) perumusan tindakan konstruktif; serta (d) pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif.

Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023, rekomendasi tindakan korektif terhadap PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu *refocusing* atau penajaman/pemfokusan kembali langkah percepatan pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Mekanisme pengendalian RKP dapat dilihat pada Gambar 5.4.

SK No 113769 A

Gambar 5.10
Mekanisme Pengendalian RKP

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

(5) Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dalam RKP Tahun 2023 meliputi (a) deskripsi dan *logical framework* PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); (b) *self assessment* atas perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); serta (c) *early warning* mitigasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.3
Metode Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

	Deskripsi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dan *Logical Framework*	***Self Assessment* atas Perencanaan Strategis, Manajemen Pelaksanaan, dan Kinerja Pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)**	***Early Warning* Mitigasi PN/PP/KP/ProP/MP, Utamanya ProP (terpilih)**
Definisi	Merupakan data dan informasi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) yang terdiri atas: (1) indikator, target, alokasi pendanaan, sumber pendanaan, penanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas, K/L pelaksana; dan (2) sasaran, indikator, dan target *output, outcome,* dan *impact* dari PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	Merupakan penilaian (*self assessment*) terhadap pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)	Merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi dan berpotensi terjadi di masa depan yang dapat menghambat pencapaian tujuan PN/PP/KP/ProP/MP, utamanya ProP (terpilih)

SK No 113770 A

	Deskripsi PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dan *Logical Framework*	***Self Assessment* atas Perencanaan Strategis, Manajemen Pelaksanaan, dan Kinerja Pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih)**	***Early Warning* Mitigasi PN/PP/KP/ProP/MP, Utamanya ProP (terpilih)**
Tujuan	(1) Memberikan gambaran umum atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). (2) Memberikan informasi *cascading* sasaran dan indikator sasaran *output, outcome,* serta *impact* dari PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	(1) Memberikan penilaian terhadap perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). (2) Memberikan indikasi awal tindakan korektif atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih).	(1) Mengidentifikasi dan menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko. (2) Mengidentifikasi langkah atau tindakan yang akan diambil jika risiko terjadi.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

SK No 113771 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI
Penutup

SK No 113772 A

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat kebijakan nasional yang komprehensif, sistematis, dan tanggap akan perubahan, sebagai penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tahun 2023 merupakan momentum melanjutkan pemulihan ekonomi yang berhasil tumbuh positif pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2022. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dokumen RKP Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tema RKP Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Proses penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu secara substantif RKP disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menjadi penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam (1) kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Perumusan tema dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah arahan presiden dan hasil evaluasi. Perumusan tema juga dilakukan dengan menjaring usulan publik melalui forum konsultasi publik dengan tetap memperhatikan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema juga memperhatikan berbagai isu strategis, dinamika pandemi COVID-19, dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Selaras dengan tema tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 serta strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut

(1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) penguatan sistem jaminan sosial, (b) percepatan modernisasi pertanian, dan (c) peningkatan pemerataan pembangunan;

(2) peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi (a) penguatan sistem kesehatan nasional, dan (b) peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter);

(3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, dilaksanakan melalui strategi perluasan penyediaan lapangan usaha;

(4) mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) percepatan revitalisasi pariwisata, dan (b) memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;

(5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi (a) percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, dan (b) penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;

(6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), dilaksanakan melalui strategi (a) mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, dan (b) percepatan transisi energi dengan pengembangan energi ramah lingkungan;

SK No 113773 A

(7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dilaksanakan melalui strategi (a) peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, (b) percepatan pemerataan infrastruktur digital, dan (c) percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas;

(8) pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, tujuh PN RKP Tahun 2023 yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PN.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023, diperlukan penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023. Oleh sebab itu, ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (*highlight*) yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Perencanaan MP tetap dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme *Clearing House* (CH). Pada tahun 2023 mekanisme CH dipertajam untuk menjamin tercapainya *output* MP yang dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024. Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan *cascading*, *executive summary*, dan *info memo* MP; serta (3) intensifikasi pelibatan *stakeholders* dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak (trilateral/multilateral *meeting)* guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian *output* MP pada tahun 2024.

Proses penajaman untuk menciptakan sinergi perencanaan pembangunan antar-pusat dan pusat-daerah juga terus dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. Beberapa penguatan tersebut di antaranya adalah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan para Gubernur (Rakorgub) dan Forum Trilateral/Multilateral *Meeting.*

Berbagai langkah peningkatan produktivitas didorong untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Langkah-langkah tersebut bersifat lintas pelaku, lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas tingkat pemerintahan. Oleh sebab itu dibutuhkan orkestrasi serta koordinasi sejak tahap perencanaan hingga implementasi

SK No 113774 A

kebijakan secara terintegrasi. Dengan demikian, RKP Tahun 2023 akan menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh sektor dan level pemerintahan. Dalam skala yang lebih luas, RKP Tahun 2023 juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Yana Silvanna Djaman

SK No 124936 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

MATRIKS PEMBANGUNAN

SK No 004421 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2023

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01 **PN:** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Porsi EBT dalam bauran energi nasional		17,90 %	40.647.506,4	
		02 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		94,00 nilai		
		03 - Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan		11 WPP		
	02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	01 - Rasio kewirausahaan nasional		3,21 %		
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian		4,0—4,2 %		
		03 - Pertumbuhan PDB perikanan		5,00—6,00 %		
		04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan		5,4—6,0 %		
		05 - Kontribusi PDB industri pengolahan		20,60 %		

SK No 081502 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Nilai devisa pariwisata		1,76—6,08 miliar US$		
		07 - Kontribusi PDB pariwisata		4,4 %		
		08 - Penyediaan lapangan kerja per tahun		2,7—3,1 juta orang		
		09 - Pertumbuhan investasi (PMTB)		6,1—6,7 %		
		10 - Pertumbuhan ekspor industri pengolahan		11,18 %		
		11 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa		6,8—8,0 %		
		12 - Rasio perpajakan terhadap PDB		9,30—10,00 %		
01.01 **PP:** Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif)	2, 5	14,31 gigawatt	4.066.841,5	
		02 - Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik	2, 5	10,00 juta kilo liter		
01.01.01 **KP:** Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT	2, 5	2.099 megawatt	183.478,3	

SK No 081503 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.01.01.01 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan	01 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Air	2, 5	409 megawatt	183.478,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi	2, 5	190 megawatt		
		03 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi	2, 5	159 megawatt		
		04 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTS	2, 5	1.308 megawatt		
		05 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bayu	2, 5	33 megawatt		
01.01.02 **KP:** Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati	01 - Jumlah pemanfaatan *biofuel* untuk domestik	5	14,60 juta kilo liter	3.874.317,7	
01.01.02.01 **PRO-P:** Akselerasi Pengembangan BBN	01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN	01 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil	5	30 %	3.874.317,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
01.01.03 **KP:** Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	01 - Intensitas energi primer	2	135,2 SBM/miliar rupiah	4.137,3	
		02 - Penurunan intensitas energi final	2	0,8 SBM/miliar rupiah		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.01.03.01 **PRO-P:** Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	2	100 %	4.137,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
01.01.04 **KP:** Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik	01 - Alokasi batu bara untuk Kepentingan dalam Negeri (DMO) yang direncanakan	2, 5	184 juta ton	3.945,5	
		02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik	2, 5	67 %		
01.01.04.01 **PRO-P:** Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif	01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri	2	1 laporan	3.945,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
01.01.05 **KP:** Pengembangan Industri Pendukung EBT	01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT	01 - TKDN sektor pembangkit EBT	2	44,6 %	962,7	
01.01.05.01 **PRO-P:** Pengembangan Industri EBT	01 - Terlaksananya pengembangan industri EBT	01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	2	55,45 skala 100	962,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
01.02 **PP:** Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01 - Produktivitas air (*water productivity*)	2	3,63 m^3/kg	13.874.837,7	

SK No 081505 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.02.01 **KP:** Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	5	65 juta ha	224.158,9	
01.02.01.01 **PRO-P:** Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	5	7 ekoregion	35.409,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.01.02 **PRO-P:** Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif	01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi	5	3.500 desa	188.749,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.02 **KP:** Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan produksi	2	34,5 juta ha	79.817,7	
01.02.02.01 **PRO-P:** Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan	5	30 juta m^3	10.656,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.02.02 **PRO-P:** Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya	5	80 KPH	69.161,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.03 **KP:** Penyediaan Air untuk Pertanian	01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	5.500 ha	1.614.946,1	

SK No 081506 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.02.03.01 **PRO-P:** Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	5	5.500 ha	1.614.946,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	5	105.000 ha		
01.02.04 **KP:** Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	2 m^3/detik	572.438,5	
01.02.04.01 **PRO-P:** Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan penyediaan air baku	5	2 m^3/detik	572.438,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
01.02.05 **KP:** Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	01 - Peningkatan tutupan hutan	2	450.000 ha	786.870,1	
01.02.05.01 **PRO-P:** Rehabilitasi Hutan dan Lahan	01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	01 - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	5	475.000 ha	762.155,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.02.05.02 **PRO-P:** Revitalisasi/Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Terlaksananya revitalisasi/penyelamatan Danau Prioritas Nasional	01 - Perbaikan kualitas Danau Prioritas Nasional	5	15 danau prioritas	24.714,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.02.06 **KP:** Pengembangan Waduk Multiguna	01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif)	2	15,9 miliar m^3	10.596.606,4	
		02 - Jumlah tampungan yang ditingkatkan pemanfaatannya	2	22 unit		
01.02.06.01 **PRO-P:** Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai	5	13 unit	10.396.606,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
01.02.06.02 **PRO-P:** Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi rencananya	5	22 unit	200.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya	5	1 unit		
01.03 **PP:** Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	01 - Nilai Tukar Petani (NTP)	5	105,00—107,00	6.506.829,7	
		02 - Angka Kecukupan Energi (AKE)	5	2.100,00 kkal/kapita/hari		
		03 - Angka Kecukupan Protein (AKP)	5	57,00 gram/ kapita/hari		
		04 - *Prevalence of Undernourishment* (PoU)	5	5,20 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - *Food Insecurity Experience Scale* (FIES)	5	4,20 %		
01.03.01 **KP:** Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,4 kg/kapita/tahun	847.019,9	
		02 - Konsumsi protein asal ternak	5	12,7 gram/kapita/hari		
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	301,3 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi ikan	5	61,02 kg/kapita/tahun		
		05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	90—95 %		
		06 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi	5	150.000 ha		
		07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	5	80 % penerima BPNT		
		08 - Persentase pangsa pangan organik	5	15 %		
01.03.01.01 **PRO-P:** Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	01 - Konsumsi daging	5	14,4 kg/kapita/tahun	8.342,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
		02 - Konsumsi protein asal ternak	5	12,7 gram/kapita/hari		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Konsumsi sayur dan buah	5	301,3 gram/kapita/hari		
		04 - Konsumsi kacang-kacangan	5	29,2 gram/kapita/hari		
01.03.01.02 **PRO-P:** Peningkatan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya keamanan pangan	01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan	5	94 %	603.177,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase pangan hewani yang memenuhi syarat keamanan pangan	5	88 %		
01.03.01.03 **PRO-P:** Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan	5	1 VUB	235.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Produksi padi biofortifikasi	5	840 ribu ton GKG		
01.03.02 **KP:** Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	01 - Penggunaan benih bersertifikat	5	75,0 %	3.603.465,9	
		02 - Ketersediaan beras	5	45,4 juta ton		
		03 - Ketersediaan protein hewani	5	2,78 juta ton		
		04 - Produksi jagung	5	34,12 juta ton		
		05 - Produksi daging	5	5,9 juta ton		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Produksi umbi-umbian	5	25,2 juta ton		
		07 - Produksi sayuran	5	15,50 juta ton		
		08 - Produksi buah-buahan	5	29,29 juta ton		
01.03.02.01 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Padi	01 - Meningkatnya produksi padi	01 - Pertumbuhan produktivitas padi	5	3,00 %	740.619,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	5	5,00 %		
01.03.02.02 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Jagung	01 - Meningkatnya produksi jagung	01 - Pertumbuhan produktivitas jagung	5	1,20 %	296.138,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.03 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Kedelai	01 - Meningkatnya produksi kedelai	01 - Pertumbuhan produktivitas kedelai	5	1,10 %	450.238,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.04 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Daging	01 - Meningkatnya produksi daging	01 - Produksi daging	5	5,9 juta ton	1.604.268,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.02.05 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Hortikultura	01 - Meningkatnya produksi hortikultura	01 - Pertumbuhan produktivitas sayuran	5	5,34 %	489.660,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan produktivitas buah-buahan	5	2,20 %		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.03.02.06 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Umbi-Umbian	01 - Meningkatnya produksi umbi-umbian	01 - Pertumbuhan produktivitas ubi kayu	5	1,50 %	22.540,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Pertumbuhan produktivitas ubi jalar	5	3,65 %		
01.03.03 **KP:** Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar	01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani	5	80—90 %	347.875,5	
		02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	5	57,0 juta rupiah/tenaga kerja/tahun		
01.03.03.01 **PRO-P:** Asuransi Pertanian	01 - Terlaksananya asuransi pertanian	01 - Luas area yang difasilitasi asuransi usaha tani padi	5	1.000.000 ha	177.920,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah ternak yang difasilitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau	5	200.000 ekor		
01.03.03.03 **PRO-P:** Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang	01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	1	100 %	15.927,1	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	5	21 %		
01.03.03.04 **PRO-P:** Korporasi Petani	01 - Berkembangnya korporasi petani	01 - Jumlah korporasi petani yang dikembangkan	5	150 unit	154.028,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.03.04 **KP:** Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Meningkatnya produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	90 %	1.567.986,3	
		02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	30 dan 8 varietas unggul baru dan galur		
		03 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	5	4.250 aksesi		
01.03.04.01 **PRO-P:** Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian	01 - Luasan rehabilitasi jaringan irigasi	5	269.884 ha	733.203,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.04.02 **PRO-P:** Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	01 - Luas lahan sawah yang ditetapkan LP2B tiap tahunnya	5	6.717.553,2 ha	834.532,4	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
01.03.04.03 **PRO-P:** Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Meningkatnya varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	5	45 varietas unggul baru dan galur	250,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
01.03.05 **KP:** Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	01 - Meningkatnya tata kelola sistem pangan nasional	01 - *Global food security index*	5	68,4	140.482,1	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.03.05.03 **PRO-P:** Penguatan Cadangan Pangan Nasional	01 - Menguatnya cadangan pangan nasional	01 - Cadangan beras	5	6—10 Juta ton	140.482,1	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.04 **PP:** Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	01 - Konservasi kawasan kelautan	5	29,10 juta ha	1.625.852,2	
		02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	5	≤76 %		
		03 - Produksi perikanan	5	30,58 juta ton		
		04 - Produksi garam	5	2,00 juta ton		
		05 - Nilai Tukar Nelayan	5	107,00—108,00		
01.04.01 **KP:** Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	01 - Pengelola WPP	5	11 unit	67.715,0	
		02 - Akurasi pendataan *stock* dan pemanfaatan WPP	4	11 WPP		
		03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	30 RZ		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.04.01.01 **PRO-P:** Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	01 - Jumlah model percontohan WPP yang melaksanakan penangkapan terukur	4	9 WPP	16.980,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.01.02 **PRO-P:** Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir	01 - Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT dan antarwilayah laut	5	23 RZ	35.910,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
01.04.01.03 **PRO-P:** Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	01 - Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	5	34 lokasi	14.825,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.02 **KP:** Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	5	15.800.000 ha	12.015,0	
01.04.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	10 kawasan	9.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.02.02 **PRO-P:** Pengembangan *Marine Bioproduct* dan Bioteknologi	01 - Terlaksananya pengembangan *marine bioproduct* dan bioteknologi	01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan	5	2 paket	2.315,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03 **KP:** Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	01 - Produksi ikan	5	18,48 juta ton	1.200.291,4	
		02 - Produksi rumput laut	5	12,10 juta ton		
		03 - Produksi garam	5	2,00 juta ton		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.04.03.01 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Perikanan	01 - Meningkatnya produksi perikanan	01 - Produksi ikan tangkap	5	9,00 juta ton	991.691,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Produksi ikan budidaya	5	9,48 juta ton		
01.04.03.02 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Rumput Laut	01 - Meningkatnya produksi rumput laut	01 - Jumlah produksi rumput laut	5	12,10 juta ton	0,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.03 **PRO-P:** Peningkatan Produksi Garam	01 - Meningkatnya produksi garam	01 - Jumlah produksi garam	5	2,00 juta ton	97.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.03.04 **PRO-P:** Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	01 - Rasio pengendalian ekspor, impor, dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi di *exit/entry point*	5	100 %	110.900,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.04 **KP:** Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	01 - Meningkatnya fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	5	9,91 triliun rupiah	140.508,7	
		02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	5	104		
01.04.04.01 **PRO-P:** Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi	5	155.000 orang	6.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.04.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budi daya	5	15.000 bidang	120.386,9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
01.04.04.03 **PRO-P:** Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah	4	34 provinsi	13.621,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.05 **KP:** Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta *Database* Kelautan dan Perikanan	01 - Meningkatnya SDM dan inovasi teknologi kemaritiman dan kelautan serta *database* kelautan	01 - Jumlah model/teknologi kelautan dan perikanan yang layak adopsi	5	5 produk	205.322,1	
01.04.05.01 **PRO-P:** Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	01 - Jumlah masyarakat yang disuluh	1	44.000 orang	139.100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.04.05.02 **PRO-P:** Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	01 - Inovasi teknologi KP yang diadopsi	5	5 Paket	66.222,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.05 **PP:** Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	5	21,44 %	1.616.130,2	
		02 - Pertumbuhan wirausaha	1	2,74 %		
		03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB	1, 5	5,40 %		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.01 **KP:** Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	1, 5	10,00 %	442.487,6	
		02 - IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor sektor ekonomi lainnya	5	160 IKM (kumulatif)		
01.05.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	1, 5	10.000 UMKM	309.335,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.05.01.02 **PRO-P:** Perluasan Kemitraan Usaha	01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya	1, 5	360 UMKM	34.019,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
01.05.01.03 **PRO-P:** Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	1, 5	10.500 UMKM	99.132,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.02 **KP:** Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	1, 5	29,27 %	90.919,5	
		02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	5	4,10 %		
		03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	5	75,00 %		
01.05.02.01 **PRO-P:** Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha	5	3.000 orang	72.567,3	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
01.05.02.02 **PRO-P:** Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan	5	11.000 UMKM	16.226,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.02.03 **PRO-P:** Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya	5	150 UMKM	2.125,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03 **KP:** Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	340 unit (kumulatif)	44.179,8	
01.05.03.01 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	1, 5	5.000 orang	19.700,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.03.02 **PRO-P:** Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi	1, 5	1.600 kelompok masyarakat/koperasi	7.850,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.03 **PRO-P:** Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya	5	470 koperasi	16.200,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.03.04 **PRO-P:** Pengembangan Inovasi Koperasi	01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi	5	210 koperasi	429,8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.05.04 **KP:** Peningkatan Penciptaan *Start-Up* dan Peluang Usaha	01 - Meningkatnya penciptaan *start-up* dan peluang usaha	01 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	5	19,6 %	1.006.843,3	
		02 - Penumbuhan *start-up*	5	2.800 *start-up* (kumulatif)		
		03 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	12.000 WUB		
01.05.04.01 **PRO-P:** Pelatihan Kewirausahaan	01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang dilatih	1, 5	42.000 orang	447.739,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SK No 081520 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.04.02 **PRO-P:** Inkubasi Usaha	01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi	1, 5	4.900 wirausaha/*start-up*/UMKM	39.700,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.05.04.03 **PRO-P:** Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	247 UMKM	501.104,1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
01.05.04.04 **PRO-P:** Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	01 - Terlaksananya pengembangan sentra industri kecil dan menengah	01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	5	38 sentra IKM (kumulatif)	10.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.05.04.05 **PRO-P:** Pembinaan Wirausaha Mapan	01 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan	01 - Jumlah wirausaha mapan yang terbentuk	1, 5	150 orang	7.800,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
	02 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan yang memperoleh dukungan akses pasar	01 - Jumlah wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar	1, 5	330 UMKM		
01.05.05 **KP:** Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	01 - Kontribusi usaha sosial	5	2,3 %	31.700,0	
01.05.05.01 **PRO-P:** Pembinaan Wirausaha Sosial	01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial	5	38 lembaga	19.200,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.05.05.02 **PRO-P:** Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	01 - Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan	01 - Jumlah usaha yang dibina	1, 5	11.500 orang/wirausaha	12.500,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.06 **PP:** Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5	5,50—6,08 %	5.552.755,8	
		02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	5	18,80 %		
		03 - Nilai tambah ekonomi kreatif	5	1.279,0 triliun rupiah		
		04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	5	21,70 juta orang		
		05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	5	15,50 %		
		06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata	5	14,85 juta orang		
		07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	5	20,68 juta orang		
		08 - Nilai realisasi PMA dan PMDN	5	1.250—1.400 triliun rupiah		
		09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	5	483,9 triliun rupiah		

SK No 081522 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	5	3,60—3,80 %		
01.06.01 **KP:** Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir	01 - Pertumbuhan PDB perkebunan	5	5,00 %	2.658.305,0	
		02 - Pertumbuhan PDB hortikultura	5	5,9 %		
		03 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	5	6,30—6,85 %		
01.06.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	01 - Peningkatan produksi kakao	5	2,6 %	1.488.014,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
		02 - Peningkatan produksi kopi	5	1,50 %		
		03 - Peningkatan produksi kelapa sawit	5	6,00 %		
		04 - Peningkatan produksi kelapa	5	0,9 %		
		05 - Peningkatan produksi karet	5	1,9 %		
		06 - Peningkatan produksi sagu	5	4,9 %		
		07 - Peningkatan produksi tebu	5	1,5 %		
		08 - Peningkatan produksi lada	5	0,1 %		
		09 - Peningkatan produksi pala	5	0,1 %		

SK No 081523 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Peningkatan produksi cengkeh	5	0,1 %		
01.06.01.02 **PRO-P:** Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	01 - Peningkatan produksi sayuran	5	3,0 %	853.242,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Peningkatan produksi buah-buahan	5	5,2 %		
		03 - Peningkatan produksi florikultura	5	5,4 %		
01.06.01.03 **PRO-P:** Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	01 - Penumbuhan PDB industri furnitur	5	4,50—5,10 %	56.545,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
01.06.01.04 **PRO-P:** Pengembangan Industri Kemaritiman	01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	01 - Pertumbuhan PDB perikanan	5	5,00—6,00 %	243.602,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.01.05 **PRO-P:** Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Logam	01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam	01 - Pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional	5	8,50—9,50 %	16.900,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.06.02 **KP:** Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	5	16 KI-KEK industri	38.220,3	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	5	6,40—7,50 %	31.570,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
01.06.02.02 **PRO-P:** Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah	01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah	01 - Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	5	78,86 %	6.650,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara	5	50 %		
01.06.03 **KP:** Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	5	10 destinasi	1.922.326,6	
		02 - Revitalisasi destinasi Bali	5	1 destinasi		
		03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	5	25 unit		
		04 - Destinasi wisata berbasis *geopark*	5	16 destinasi		
		05 - Destinasi wisata bahari	5	6 destinasi		
01.06.03.01 **PRO-P:** Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas	5	25 destinasi	61.955,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.03.02 **PRO-P:** Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi serta daya dukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya	5	10 destinasi	1.748.067,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.06.03.03 **PRO-P:** Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	5	13 destinasi/provinsi	17.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
01.06.03.04 **PRO-P:** Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	5	3 destinasi	33.099,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.03.05 **PRO-P:** Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark*	01 - Terlaksananya pengembangan 16 *geopark* untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	01 - Jumlah koordinasi pengembangan *geopark*	5	1 kegiatan	62.204,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.04 **KP:** Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5	5,4—5,9 %	148.758,1	
		02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	5	7 %		
01.06.04.01 **PRO-P:** Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan *Brand*	01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan *brand*	01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan *brand*	4	2 skema	59.446,4	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.02 **PRO-P:** Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	5	1.500 kegiatan	5.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.03 **PRO-P:** Fasilitasi Rantai Pasok dan *Scale-up* Karya dan Platform Kreatif Unggulan	01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan *scale-up* karya dan platform kreatif unggulan	01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok dan *scale-up* karya dan platform kreatif unggulan	5	200 kerja sama	6.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.04 **PRO-P:** Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif	5	5 kawasan	40.250,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.05 **PRO-P:** Pengembangan '*Start-Up Parks*' dan *Center of Excellence*	01 - Terlaksananya pengembangan '*Start-Up Parks*' dan *Center of Excellence*	01 - Jumlah '*Start-Up Parks*' dan *Center of Excellence* yang dikembangkan	5	1 kerja sama	10.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

SK No 081527 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.04.06 **PRO-P:** Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	01 - Jumlah pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	5	184 kegiatan	27.311,7	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.04.07 **PRO-P:** Pengembangan Kawasan *Be Creative District* (BCD)	01 - Terlaksananya pengembangan kawasan *Be Creative District* (BCD)	01 - Jumlah kawasan *Be Creative District* (BCD) yang dikembangkan	5	1 kegiatan	750,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.06.05 **KP:** Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	01 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	5	48,9 %	779.895,8	
		02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	5	48,5 %		
01.06.05.01 **PRO-P:** Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi	5	1 usulan rekomendasi	54.225,4	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.02 **PRO-P:** Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III, IV, dan V	5	115 perusahaan	140.993,8	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

SK No 081528 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.06.05.03 **PRO-P:** Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan	01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	5	7.056.010 orang	584.676,7	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.06.06 **KP:** Pengembangan Industri Halal	01 - Terlaksananya pengembangan industri halal	01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi	5	3 sektor industri	5.250,0	
01.06.06.01 **PRO-P:** Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	01 - Jumlah kawasan industri tematik yang difasilitasi	5	3 kawasan industri	5.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07 **PP:** Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Neraca perdagangan barang	5	38,3—38,5 miliar US$	3.178.543,7	
		02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas	5	3,9—4,7 %		
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara	5	3,5—7,4 juta kunjungan		
		04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5	600,0 juta perjalanan		
		05 - Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	5	8,5—10,7 %		
		06 - Nilai ekspor hasil perikanan	5	7,66 miliar US$		

SK No 081529 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.01 **KP:** Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	01 - Nilai ekspor industri pengolahan	5	170,9 miliar US$	2.421.804,8	
		02 - Kontribusi ekspor industri pengolahan	5	75 %		
		03 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara)	5	12,5 %		
		04 - Ekspor hasil pertanian (fob)	5	4,7 miliar US$		
		05 - Pertumbuhan ekspor pertanian	5	9,0—10,0 %		
		06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan	5	10 miliar US$		
		07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB	5	1,7—1,8 %		
		08 - Nilai ekspor produk rempah-rempah	5	1.785,84 juta US$		
01.07.01.01 **PRO-P:** Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan	5	60 perusahaan	3.775,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SK No 081530 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.01.02 **PRO-P:** Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk	5	175 produk	52.934,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.07.01.03 **PRO-P:** Perluasan Ekspor Gastronomi *Indonesia Spice Up The World*	01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	01 - Jumlah restoran Indonesia di luar negeri	5	3.000 unit	2.365.095,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
01.07.02 **KP:** Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	01 - Jumlah negara tujuan ekspor	5	222 negara	176.467,9	
		02 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	5	2,3 %		
		03 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional	5	3,90 %		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.02.01 **PRO-P:** Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	01 - Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	5	51 kegiatan promosi	120.230,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.07.02.02 **PRO-P:** Fasilitasi Ekspor	01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor	01 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan)	5	1.009.200 badan usaha	15.672,0	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.07.02.03 **PRO-P:** Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE	5	46,81 miliar US$	40.565,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
		02 - Nilai ekspor produk industri sektor agro	5	62,61 miliar US$		
		03 - Nilai ekspor produk industri IKFT	5	38,85 miliar US$		
		04 - Nilai ekspor produk industri aneka	5	12,36 miliar US$		
01.07.03 **KP:** Pengelolaan Impor	01 - Meningkatnya pengelolaan impor	01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	5	52,0 %	31.283,2	
01.07.03.01 **PRO-P:** Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri	01 - Jumlah pengawasan *post border*	5	3.162 produk	31.283,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SK No 081532 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.04 **KP:** Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	01 - Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	5	7.640 produk (kumulatif)	137.911,9	
01.07.04.01 **PRO-P:** Pengembangan Sistem Katalog	01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog	01 - Jumlah kontrak katalog lokal/sektoral	5	50 katalog	137.911,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
01.07.05 **KP:** Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	01 - Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global	5	2 kesepakatan	113.000,0	
01.07.05.01 **PRO-P:** Peningkatan Investasi (*Inbound* & *Outbound*) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	01 - Terlaksananya peningkatan investasi (*inbound* dan *outbond*) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi	01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam global *value chain*	5	25 badan usaha	113.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.07.06 **KP:** Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif	01 - Jumlah *branding Wonderful* Indonesia	5	10 destinasi *branding*	151.680,3	
		02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	5	26,46 miliar US$		
		03 - Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (*cultural heritage regeneration*)	5	2 lokasi		

SK No 081533 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.06.02 **PRO-P:** Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru	5	48 regional pemasaran	142.680,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
01.07.06.04 **PRO-P:** Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran	01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran	1, 5	7.000 orang	9.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.07.07 **KP:** Peningkatan Efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	01 - Meningkatnya efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi	01 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	96 negara	146.395,6	
		02 - Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	5	75 negara		
		03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	5	4 ratifikasi		
		04 - Jumlah promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI) terintegrasi	5	9 promosi terintegrasi		
		05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati	5	35 (kumulatif) kesepakatan		
01.07.07.01 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center	01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator	5	80 orang	2.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SK No 081534 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.07.07.02 **PRO-P:** Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional	01 - Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	5	145 dokumen kesepakatan/perundingan	117.085,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.07.07.03 **PRO-P:** Promosi Terintegrasi	01 - Terlaksananya promosi terintegrasi	01 - Jumlah promosi terintegrasi	5	9 pameran	27.309,8	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08 **PP:** Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	5	4,53—4,57 %	4.225.715,7	
		02 - *Skor logistic performance index*	5	3,4 skor		
		03 - Rasio M2/PDB	5	48,3—49,4 %		
		04 - Peringkat *travel and tourism competitiveness index*	5	35—39 peringkat		
		05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)	5	96 %		
		06 - Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara	5	menurun %		
		07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	5	31,94 %		

SK No 081535 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas	5	8 *database*		
01.08.01 **KP:** Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	01 - Rasio kredit/PDB	5	33,3—34,0 %	1.308,1	
		02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 penduduk dewasa	5	57,1 unit		
		03 - Jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk dewasa	5	15,3 unit		
		04 - Skema pembiayaan berbasis HKI	5	1 skema		
01.08.01.01 **PRO-P:** Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	01 - Indeks inklusi keuangan	5	88 %	408,1	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.08.01.02 **PRO-P:** Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah	01 - *Turnover* rasio SBN	5	5,11 %	900,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
01.08.02 **KP:** Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	01 - Kontribusi ekonomi digital	5	6,00 %	125.935,8	
		02 - Nilai transaksi *e-commerce*	5	843,4 triliun rupiah		

SK No 081536 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.08.02.01 **PRO-P:** Penguatan Industri *Fintech, e-Commerce, On-Demand Service,* dan *Internet Of Things*	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	5	200 orang	87.065,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.02.02 **PRO-P:** Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	01 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia *Industry* 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0	5	52 perusahaan	38.870,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.03 **KP:** Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	01 - Skor *logistic performance index*	5	3,4	251.307,0	
		02 - Tingkat inflasi	5	2,0—4,0 %		
01.08.03.01 **PRO-P:** Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun	5	87 unit	233.307,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08.03.02 **PRO-P:** Pengendalian Inflasi	01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak	01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak	5	5,9 %	18.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08.04 **KP:** Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	5	6 %	79.186,0	
		02 - Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	5	11 lokasi		
01.08.04.01 **PRO-P:** Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	5	11 destinasi	60.186,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SK No 081537 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.08.04.02 **PRO-P:** Penerapan Industri Hijau	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	61 perusahaan	19.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
01.08.05 **KP:** Reformasi Fiskal	01 - Terlaksananya reformasi fiskal	01 - Persentase realisasi penerimaan negara	5	100 %	562.895,8	
01.08.05.01 **PRO-P:** Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah Proses Bisnis *Core Tax System*	5	3 Kegiatan (*Test*, *Data Migration*, dan *Initial Deploy*) Proses Bisnis	545.956,8	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.03 **PRO-P:** Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan	01 - Terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	01 - Persentase terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan	5	100 %	16.605,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.05.05 **PRO-P:** Pembangunan dan Pengembangan *Data Analytic*	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan *data analytic*	01 - Persentase pembangunan dan pengembangan *data analytic*	5	100 %	333,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
01.08.06 **KP:** Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	5	4 *database*	3.205.083,1	
		02 - Ketersediaan data dan informasi statistik *e-commerce*	5	1 *database*		
		03 - Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	5	3 *database*		
		04 - Ketersediaan data statistik disagregasi PMTB	5	1 *database*		

SK No 081538 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
01.08.06.01 **PRO-P:** Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan	5	4 *database*	180.876,2	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
01.08.06.02 **PRO-P:** Pengembangan Statistik *e-Commerce*	01 - Terlaksanakannya pengembangan statistik *e-commerce*	01 - Jumlah publikasi/laporan statistik *e-commerce* yang dikembangkan	5	1 *database*	10.184,8	BADAN PUSAT STATISTIK
01.08.06.03 **PRO-P:** Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	01 - Terlaksananya sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	01 - Jumlah publikasi/laporan sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan	5	3 *database*	2.990.556,4	BADAN PUSAT STATISTIK
01.08.06.04 **PRO-P:** Penyediaan Data Disagregasi PMTB	01 - Terlaksananya penyediaan data disagregasi PMTB	01 - Jumlah publikasi/laporan disagregasi PMTB	5	1 *database*	23.465,7	BADAN PUSAT STATISTIK

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

SK No 081539 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02 **PN:** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	01 - Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI		6,2—6,9 % per tahun	126.388.668,8	
		02 - IPM KTI		62,54—78,18 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KTI		9,4—10,2 %		
	02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI		5,1—5,6 % per tahun		
		02 - IPM KBI		70,48—82,43 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin KBI		7,3—7,9 %		
02.01 **PP:** Pembangunan Wilayah Sumatera	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	5	4,7—5,2 % per tahun	39.011.942,9	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	1	70,48—77,01 nilai minimum—nilai maksimum		

SK No 081540 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	1	8,2—8,6 %		
02.01.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	2.810.330,5	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	17 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	2 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	6 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI pengembangan	5	5 jumlah KI		
		07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	5	2 jumlah kawasan		
02.01.01.01 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	58.996,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target		Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.01.02 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5		>1	1.402.655,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.01.03 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara	5		>1	982.988,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.01.04 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat	5		>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.01.01.05 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5		>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SK No 081542 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target		Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.01.06 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5		>1	340.294,3	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
02.01.01.07 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5		>1	2.619,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.08 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5		>1	10.100,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.01.10 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan *Aerospace*	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Bintan *Aerospace*	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5		>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.11 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Sadai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5		>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081543 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.01.12 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Sabang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	12.676,9	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
02.01.01.13 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan	01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau	5	>1	0,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.14 **PRO-P:** Percepatan Operasionalisasi KEK Batam *Aero Technic*	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Batam *Aero Technic*	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.01.15 **PRO-P:** Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau	5	>1	0,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.01.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	3—5 %	61.480,7	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2—4 %		

SK No 081544 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet	5	2—3 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	2—4 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4—6 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	2—4 %		
		11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	4—6 %		
02.01.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kopi	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kakao	5	6—7 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.04 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - pala	5	3—5 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.07 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh - perikanan budidaya	5	5—7 %	7.410,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.10 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - karet	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.11 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kopi	5	2—4 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.15 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - perikanan budidaya	5	23—25 %	4.472,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.17 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - kopi	5	2—4 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.22 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - perikanan budidaya	5	1—2 %	520,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.24 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - karet	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081547 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.25 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kelapa	5	2—3 %	5.172,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.27 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.472,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.31 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - karet	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.33 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kopi	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.35 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - perikanan budidaya	5	1—3 %	7.027,1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.37 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - karet	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081548 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.38 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - tebu	5	5—7 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.42 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - perikanan budidaya	5	4—6 %	4.675,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.49 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - kopi	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.50 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - karet	5	5—7 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.53 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - tebu	5	2—5 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.54 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan tangkap	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081549 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.55 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan budidaya	5	5—7 %	17.779,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.56 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - lada	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.63 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kopi	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.64 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - kopi	5	3—5 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.65 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kelapa	5	1—2 %	379,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.66 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kelapa	5	2—3 %	598,1	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081550 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.67 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - kelapa	5	1—2 %	742,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.68 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - kelapa	5	1—3 %	2.035,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.69 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - kelapa	5	1—2 %	770,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.70 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - pala	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.71 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - pala	5	3—5 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.72 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.472,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081551 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.02.73 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - perikanan budidaya	5	1 %	220,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.02.75 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kelapa	5	2—3 %	734,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.02.76 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - kakao	5	11—12 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.01.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (angka perhitungan sementara)	5	48,57	4.456.017,3	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (angka perhitungan sementara)	5	44,88		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (angka perhitungan sementara)	5	40,82		

SK No 081552 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (angka perhitungan sementara)	5	40,87		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (angka perhitungan sementara)	5	58,45		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (angka perhitungan sementara)	5	61,58		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (angka perhitungan sementara)	5	56,66		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (angka perhitungan sementara)	5	38,76		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (angka perhitungan sementara)	5	48,54		
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (angka perhitungan sementara)	5	43,31		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (angka perhitungan sementara)	5	49,54		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (angka perhitungan sementara)	5	59,78		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (angka perhitungan sementara)	5	63,08		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (angka perhitungan sementara)	5	44,62		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (angka perhitungan sementara)	5	49,79		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (angka perhitungan sementara)	5	50,33		
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (angka perhitungan sementara)	5	56,81		

SK No 081554 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (angka perhitungan sementara)	5	46,76		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (angka perhitungan sementara)	5	46,7		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (angka perhitungan sementara)	5	47,6		
		21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (angka perhitungan sementara)	5	48,82		
		22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (angka perhitungan sementara)	5	52,5		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	20 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.01.03.01 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	5	4 kota	2.390.832,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.02 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Bengkulu	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	171.191,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.03 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	75.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.04 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.05 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	5.164,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SK No 081556 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.03.06 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	1.334,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.01.03.07 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	383.166,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.01.03.08 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota	158.804,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.01.03.09 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	5.144,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.01.03.10 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota	5.185,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.01.03.11 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	1.083.659,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 081557 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.03.12 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	126.533,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
02.01.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Sumatera	1, 5	61,30	31.567.823,7	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	61,45		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera	5	61,41		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sumatera	1	9,8—10,1 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	7 kabupaten		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	36 kecamatan		

SK No 081558 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52 IPKP		
02.01.04.07 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Aceh	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Aceh	1, 5	60,45	2.231.879,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
02.01.04.08 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur	1, 5	67,69	21.580,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.09 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	59,79	3.811,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.10 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh	5	3 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.11 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,50 IPKP	200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081559 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.12 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Utara	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara	1, 5	55,72 nilai indeks	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.13 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Samosir	1, 5	67,72	36.556,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.14 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara	5	2 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.04.15 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	18,1—18,6 %	123.223,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara	1	64,1—64,6		
02.01.04.16 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Barat	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat	1, 5	69,87 nilai indeks	900,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.17 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Agam	1, 5	57,55	54.471,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.18 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	72,08	1.278,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.19 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	11,3—11,8 %	82.496,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN SAR NASIONAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	1	62,3—62,8		
02.01.04.20 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Riau	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Riau	1, 5	64,65 nilai indeks	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.21 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau	5	7 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

SK No 081563 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.23 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Jambi	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jambi	1, 5	64,00	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.24 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi	1, 5	59,20	29.240,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.25 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Jambi	5	25,65	76,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.26 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan	1, 5	63,85	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.27 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin	1, 5	63,69	32.438,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081564 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.28 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan	5	62,34	1.782,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.29 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	17,8—18,3 %	28.845.678,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1	66,9—67,4		
02.01.04.30 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Bengkulu	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bengkulu	1, 5	59,85	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.31 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah	1, 5	56,84	10.665,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.32 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu	5	74,09	2.833,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081565 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.33 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Lampung	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Lampung	1, 5	65,85	570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.34 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang Bawang	1, 5	62,30	22.881,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.35 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung	5	57,40	1.543,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.36 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	13,6—14,1 %	1.836,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1	66,1—66,6		
02.01.04.37 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1, 5	73,05 nilai indeks	910,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081566 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.38 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	1, 5	55,72	40.286,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.39 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung	5	73,86	303,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.40 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Riau	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Riau	1, 5	64,80	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.41 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun	1, 5	59,65	18.379,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.42 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau	5	24 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

SK No 081567 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.04.43 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,50 IPKP	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.01.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,23	116.290,7	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	50,3 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	135 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	130 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	16.123 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	22 daerah		

SK No 081568 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	130 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	9 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,58 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	4.293.338 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	2.804.853 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	85 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	90 persetujuan substansi RDTR		

SK No 081569 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	16 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	10 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.01.05.04 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.824 dokumen	7.626,3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,39 %		

SK No 081570 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	20 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	19 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	19 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi		
02.01.05.05 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	592.825 bidang	3.468,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	578.151 bidang		

SK No 081571 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	2.415 bidang		
02.01.05.06 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan	1.200,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.07 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.440 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,45 %		

SK No 081572 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	39 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	28 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	26 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	26 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.08 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	25.941 bidang	13.453,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	181.475 bidang		

SK No 081573 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.09 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	8 rekomendasi kebijakan	3.916,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.10 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.016 dokumen	216,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	87 %		

SK No 081574 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	87,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	16 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	16 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.11 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	132.973 bidang	8.982,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	382.131 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	15.720 bidang		

SK No 081575 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.12 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan	1.235,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.13 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.777 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,97 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	45 %		

SK No 081576 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.14 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	405.852 bidang	35.221,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	431.614 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3.516 bidang		
02.01.05.15 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.670,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081577 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.16 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	644 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,47 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	44 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		

SK No 081578 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.17 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	164.700 bidang	2.371,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	1.052 bidang		
02.01.05.18 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan	1.460,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.01.05.19 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.204 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,33 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	72 %		

SK No 081579 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.20 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	137.831 bidang	9.440,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	256.456 bidang		
02.01.05.21 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.614,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.22 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	2.227 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,37 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	52 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		

SK No 081581 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.23 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	607.685 bidang	6.288,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	731.099 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	172.443 bidang		
02.01.05.24 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.529,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan		

SK No 081582 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.25 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	969 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,29 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	43 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		

SK No 081583 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.26 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	70.555 bidang	6.126,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	260.453 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.854 bidang		
02.01.05.27 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.354,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		

SK No 081584 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.28 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.377 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,36 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	48 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		

SK No 081585 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.29 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	242.700 bidang	4.577,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	87.299 bidang		
02.01.05.30 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan	1.229,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.01.05.31 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	645 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		

SK No 081586 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,36 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	43 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	7 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	7 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.01.05.32 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	106.537 bidang	1.435,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	106.537 bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.01.05.33 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.874,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02 **PP:** Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	5	5,3—5,8 % per tahun	46.808.904,1	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	1	73,05—82,43 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	1, 5	6,9—7,6 %		
02.02.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	949.933,5	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	12 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		

SK No 081588 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi	5	3 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	5 kawasan		
		06 - KI prioritas dan KI Pengembangan	5	2 jumlah KI		
02.02.01.01 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.02 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	1.953,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.01.03 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	129.004,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK No 081589 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.01.05 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	300,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.02.01.04 **PRO-P:** Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta	5	>1	408.966,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.02.01.06 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.07 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	409.708,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 081590 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.01.08 **PRO-P:** Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.09 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.02.01.11 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Subang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Subang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.12 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batang	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Batang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.01.13 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri	01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten	5	>1	0,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081591 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.01.14 **PRO-P:** Percepatan Operasionalisasi KEK Lido	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Lido	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat	5	>1	0,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.02.01.15 **PRO-P:** Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.01.16 **PRO-P:** Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur	5	>1	0,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.02.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	3—4 %	122.587,4	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	3—5 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		

SK No 081592 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	2—4 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2—4 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	8—10 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		

SK No 081593 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - lada	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - pala	5	1—2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - cengkeh	5	3—5 %		
02.02.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kopi	5	5—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.03 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kelapa	5	2—3 %	1.512,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.04 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - tebu	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.06 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - garam	5	10—12 %	1.300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081594 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.07 **PRO-P:** Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - tebu	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.08 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - kopi	5	8—9 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.09 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - garam	5	10—12 %	77.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.10 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - tebu	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.11 **PRO-P:** Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - tebu	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.12 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - kopi	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081595 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.14 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - garam	5	10—12 %	6.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.17 **PRO-P:** Pengembangan komoditas unggulan kopi di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kopi	5	3—4 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.18 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kelapa	5	2—3 %	407,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.19 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kakao	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.02.02.23 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan budidaya	5	3—5 %	10.875,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.25 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan budidaya	5	4—6 %	1.656,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.02.26 **PRO-P:** Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi di DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - perikanan budidaya	5	5—7 %	220,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.28 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan budidaya	5	2—4 %	8.466,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.29 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - perikanan budidaya	5	4—6 %	7.220,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.02.31 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - perikanan budidaya	5	1—2 %	7.428,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (angka perhitungan sementara)	5	61,29	44.521.819,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (angka perhitungan sementara)	5	43,03		

SK No 081597 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (angka perhitungan sementara)	5	44,40		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (angka perhitungan sementara)	5	45,47		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (angka perhitungan sementara)	5	45,37		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (angka perhitungan sementara)	5	50,25		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (angka perhitungan sementara)	5	51,22		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (angka perhitungan sementara)	5	46,73		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (angka perhitungan sementara)	5	48,40		

SK No 081598 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (angka perhitungan sementara)	5	77,15		
		11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (angka perhitungan sementara)	5	44,66		
		12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (angka perhitungan sementara)	5	52,51		
		13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (angka perhitungan sementara)	5	47,00		
		14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (angka perhitungan sementara)	5	47,88		
		15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (angka perhitungan sementara)	5	45,97		
		16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (angka perhitungan sementara)	5	48,95		

SK No 081599 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (angka perhitungan sementara)	5	32,22		
		18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (angka perhitungan sementara)	5	64,26		
		19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (angka perhitungan sementara)	5	56,47		
		20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (angka perhitungan sementara)	5	68,85		
	02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	4 WM		
	03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	14 kota		
	04 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
	05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		

SK No 081600 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.03.05 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	6.347.244,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.02.03.06 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	3.793.850,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.02.03.07 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	13.151.639,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.02.03.08 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	97.679,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.02.03.09 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	2.879.848,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.03.10 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	4 kota	1.107.201,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.11 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	9.991.434,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.02.03.12 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur	01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	355.388,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.13 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	5 kota	2.714.201,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.02.03.15 **PRO-P:** Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	3.105.213,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
02.02.03.16 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	35.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 081602 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.03.17 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten	01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa	01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	5	1 WM	19.313,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.03.18 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali	01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	923.804,3	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.02.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu dan Kawasan Perdesaan	01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Jawa-Bali	1, 5	70,84	220.145,9	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	66,06		
		03 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Jawa-Bali	1, 5	10,9—11,3 %		
02.02.04.04 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Barat	1, 5	73,10	90,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.02.04.05 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah	1, 5	72,15	900,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.04.06 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi DI Yogyakarta	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi DI Yogyakarta	1, 5	79,30	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.02.04.07 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Timur	1, 5	72,30	4.150,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.02.04.08 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Banten	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Banten	1, 5	66,00	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.02.04.09 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bali	1, 5	76,85	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.02.04.10 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi	1, 5	56,48	54.211,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.04.11 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal	1, 5	65,85	52.471,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081604 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.04.12 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Banyuwangi	1, 5	83,75	63.296,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.04.13 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang	1, 5	76,08	24.884,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.04.14 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Klungkung	1, 5	70,56	4.225,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.02.04.15 **PRO-P:** Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	75,00 %	15.916,6	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
02.02.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,52	994.417,7	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	72,90 %		

SK No 081605 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	111 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	101 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	10.535 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	23 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	101 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	5 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,96 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.836.596 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	713.782 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	51 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	36 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	8 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	10 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	2 materi teknis dan Raperpres RTR		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	20 perkara		
	12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	01 - Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan		
02.02.05.05 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	334 dokumen	62.067,5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,83 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	100 %		
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	1 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	1 daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	1 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.06 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	250 bidang	128.865,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	40 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta dasar pertanahan	01 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	505.182 ha		
02.02.05.07 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	2.751 dokumen	216,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,70 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	59,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	25 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	22 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	22 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.08 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	3.092.937 bidang	231.439,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	2.640.000 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	8.226 bidang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.09 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan	3.773,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	20 perkara		
02.02.05.10 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat	01 - Terlaksananya layanan data *center*	01 - Jumlah layanan data *center* jaringan informasi geospasial nasional beroperasi	2	1 layanan	78.604,5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.02.05.11 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.766 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kera sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		

SK No 081611 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,30 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	69 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	31 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	27 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	27 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.12 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	3.004.409 bidang	222.471,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	1.785.647 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	11.505 bidang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.13 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	7 rekomendasi kebijakan	3.637,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	11 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.15 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	675 dokumen	616,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	96,74 %		
	03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	80,00 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		
	07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara.	4	1 rekomendasi		
02.02.05.16 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	5.928 bidang	6.516,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	155 bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5.416 bidang		
02.02.05.17 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.531,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.18 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.169 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,93 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	86 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	32 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	30 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	30 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.19 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	1.498.164 bidang	226.183,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	1.964.820 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	6.045 bidang		
02.02.05.20 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	14 rekomendasi kebijakan	2.773,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	13 rekomendasi kebijakan		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.22 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	966 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,84 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	52 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.23 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	592.632 bidang	6.842,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	360.528 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5.976 bidang		
02.02.05.24 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.760,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		

SK No 081618 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.02.05.26 **PRO-P:** Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	874 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	94,41 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	60 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	8 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	8 daerah		

SK No 081619 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	8 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.02.05.27 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	87.719 bidang	5.527,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	461 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	4.335 bidang		
02.02.05.28 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	9 rekomendasi kebijakan	1.356,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.02.05.31 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan	10.235,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.03 **PP:** Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	5	5,1—5,7 % per tahun	3.961.656,4	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara	1	66,63—69,59 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara	1	13,8—14,8 %		
02.03.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	806.605,3	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		

SK No 081621 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.01.01 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	>1	806.605,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.03.01.02 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.03.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	1—2 %	478.472,9	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		

SK No 081622 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	1—2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	10—12 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	7—9 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	4—6 %		
02.03.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kelapa	5	1—2 %	840,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kopi	5	2—3 %	235.600,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.03 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - tebu	5	1—3 %	221.827,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.08 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - garam	5	10—12 %	2.600,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.09 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kopi	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.10 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kelapa	5	1—3 %	4.057,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.13 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - garam	5	10—12 %	1.300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081624 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.02.14 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - perikanan budidaya	5	1—2 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.16 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan budidaya	5	1—3 %	7.996,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.02.17 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kakao	5	9—11 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.02.19 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kakao	5	7—9 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (angka perhitungan sementara)	5	46,66	14.391,3	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (angka perhitungan sementara)	5	46,23		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota		

SK No 081625 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.03.02 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	9.102,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.03.03.03 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	5.289,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.03.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Nusa Tenggara	1, 5	58,58	2.645.732,4	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	58,67		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara	5	51,28		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Nusa Tenggara	1	19,5—19,8 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	14 kabupaten		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	24 kecamatan		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,50 IPKP		

SK No 081626 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	23 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.03.04.11 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	24,5—25,0 %	22.565,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	68,7—69,2		
02.03.04.12 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	24,7—25,2 %	2.400.043,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	64,4—64,9		

SK No 081627 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.04.14 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua	5	0,46 IPKP	95.678,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.03.04.15 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu	5	0,54 IPKP	679,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN
02.03.04.16 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	1, 5	55,70	56.957,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
02.03.04.17 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat	1, 5	72,25	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.04.18 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	1, 5	64,85	22.013,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081628 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.04.19 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	1, 5	52,45	46.381,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.03.04.20 **PRO-P:** Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	75 %	241,1	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL
02.03.04.21 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	59,00	40,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.03.04.22 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	5	46,14	1.131,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.03.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,21	16.454,6	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	36,50 %		

SK No 081629 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	28 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	27 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.497 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	27 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,90 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.047.767 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	79.327 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	12 materi teknis dan Ranperkada		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	6 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas anah	5	5		
02.03.05.11 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	774 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SK No 081631 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	87,41 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	34 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	18 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		

SK No 081634 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.05.12 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	723 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,48 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	39 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		

SK No 081635 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.03.05.13 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	102.762 bidang	7.069,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	1.868 bidang		
02.03.05.14 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	60.146 bidang	5.121,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	11.505 bidang		
02.03.05.15 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	1.770,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.03.05.16 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada	2.494,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 persetujuan substansi RDTR Kab/Kota		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota		
02.04 **PP:** Pembangunan Wilayah Kalimantan	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	5	5,5—6,0 % per tahun	24.315.028,2	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	1	68,91—78,18 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	4,3—5,1 %		
02.04.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	6.409,0	

SK No 081637 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	6 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan revitalisasi	5	2 jumlah destinasi		
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	3 jumlah KI		
02.04.01.01 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.01.02 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat	5	>1	4.557,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.01.03 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081638 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.01.04 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1	1.852,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.01.05 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.04.01.06 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning	06 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning	06 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara	5	>1	0,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	1—2 %	55.232,8	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet	5	2—3 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	1—2 %		

SK No 081639 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4—6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	2—4 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1—3 %		
02.04.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - karet	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - lada	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02.08 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - karet	5	2—3 %	27.530,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.15 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - karet	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.25 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - lada	5	2—5 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.28 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.30 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - perikanan budidaya	5	5—7 %	6.211,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.32 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081641 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02.34 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.02.35 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kopi	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.37 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kelapa	5	1—2 %	1.820,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.38 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - kelapa	5	1—2 %	1.841,6	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.40 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - karet	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.04.02.41 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - kelapa	5	3—5 %	818,3	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081642 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.02.42 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - perikanan budidaya	5	4—6 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.04.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitungan sementara)	5	47,44	23.709.652,4	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (angka perhitungan sementara)	5	41,86		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (angka perhitungan sementara)	5	48,97		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (angka perhitungan sementara)	5	40,44		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Nusantara (angka perhitungan sementara)	5	40,86		

SK No 081643 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (angka perhitungan sementara)	5	53,20		
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (angka perhitungan sementara)	5	49,68		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (angka perhitungan sementara)	5	39,34		
		09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (angka perhitungan sementara)	5	49,92		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM		
	05 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	5	5.600 ha		

SK No 081644 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.04.03.02 **PRO-P:** Pembangunan Kota Baru di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	5.721,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.04.03.03 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	7.330,6	BADAN PUSAT STATISTIK
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.04.03.04 **PRO-P:** Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara	01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara	5	5.600 ha	23.558.653,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.04.03.05 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	3.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU)

SK No 081645 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.03.06 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	5.291,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.04.03.07 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	84.328,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.03.08 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	45.327,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Kalimantan	1, 5	57,92	509.568,2	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	54,91		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan	5	56,70		
		04 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan	1	6,6—6,9 %		

SK No 081646 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,47 IPKP		
		02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	35 kecamatan		
02.04.04.06 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Barat	1, 5	56,45	2.456,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04.04.07 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	1, 5	60,02	63.898,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.04.08 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat	5	62,82	1.997,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.04.09 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat	5	12 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.04.10 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk	5	0,50 IPKP	38.437,1	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.11 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang	5	0,37 IPKP	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.12 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1, 5	59,85 nilai indeks	250,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.04.04.13 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat	1, 5	60,82	40.738,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.04.14 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang mendukung Pengembangan *Food Estate* sesuai Direktif Presiden dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang Mendukung Pengembangan *Food Estate* sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah	5	28,40	9.201,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Mendukung *Food Estate* Provinsi Kalimantan Tengah	5	54,39		

SK No 081648 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.04.15 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Selatan	1, 5	65,30	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.04.04.16 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar	1, 5	73,60	26.192,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.04.17 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan	5	71,54	2.947,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.04.18 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Timur	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur	1, 5	63,78	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.04.04.19 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur	1, 5	60,05	81.497,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.04.04.20 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur	5	57,25	1.377,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081649 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.04.21 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara	1, 5	53,40	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.04.04.22 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan	1, 5	53,87	7.100,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.23 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	53,71	8.362,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.24 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara	5	20 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.04.25 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,42 IPKP	64.898,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.04.04.26 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,42 IPKP	0,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.04.28 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,66 IPKP	160.212,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.04.04.29 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Timur	5	3 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.04.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,28	34.165,8	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	36,80 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	54 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	49 daerah		
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	3.964 dokumen		

SK No 081651 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	49 daerah		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	5 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,90 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.699.873 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	3.030.071 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	44 materi teknis dan Ranperkada RDTR		

SK No 081652 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	63 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	5 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	18 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah Materi Teknis RDTR Rencana IKN	5	5 materi teknis dan Raperpres		
		09 - Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	2 Raperpu RDTR IKN		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	2.200 desa		
02.04.05.04 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.304 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		

SK No 081653 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,04 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	14 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.05 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	197.907 bidang	4.377,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	379.919 bidang		

SK No 081654 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	5.950 bidang		
02.04.05.06 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	12 rekomendasi kebijakan	3.225,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.07 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.131 dokumen	2.554,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,26 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	37 %		

SK No 081655 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	13 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.08 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	5.976 bidang	3.248,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	120.175 bidang		
02.04.05.09 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.790,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		

SK No 081656 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.05.10 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.115 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,04 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	12 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		

SK No 081657 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.11 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	67.366 bidang	3.623,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	102.007 bidang		
02.04.05.12 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan	1.596,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	5 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.13 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	89 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SK No 081658 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	93,45 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	57 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	9 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.14 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	203.000 bidang	11.084,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	174280 bidang		

SK No 081659 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	26.142 bidang		
02.04.05.15 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	11 rekomendasi kebijakan	2.070,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN	5	1 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN	5	4 rekomendasi kebijakan		
02.04.05.16 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	325 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,71 %		

SK No 081660 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	6 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	5 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	5 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.04.05.18 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan	596,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.04.05.19 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	800 desa	0,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04.05.21 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	700 desa	0,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.04.05.22 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	700 desa	0,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.05 **PP:** Pembangunan Wilayah Sulawesi	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	5	7,1—7,8 % per tahun	4.308.246,7	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi	1	67,73—74,45 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi	1	8,3—8,8 %		
02.05.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	709.029,0	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	8 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	2 jumlah destinasi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	3 kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	2 jumlah KI		
02.05.01.01 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	0,0	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.05.01.02 **PRO-P:** Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara	5	>1	600.988,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.05.01.03 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah	5	>1	102.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 081663 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.01.04 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
02.05.01.05 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara	5	>1	6.040,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.01.06 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar	01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan	5	>1	0,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1—3 %	107.683,1	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2—4 %		

SK No 081664 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada	5	1—2 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	4—6 %		
		07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	1—2 %		
		09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	5	10—12 %		

SK No 081665 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	5	4—6 %		
		11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	5	4—6 %		
02.05.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kelapa	5	4—4 %	4.582,5	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - pala	5	3—4 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - cengkeh	5	5—7 %		
02.05.02.03 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kopi	5	1—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.04 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kakao	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081666 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.05 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kakao	5	3—4 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.07 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kopi	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.08 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kelapa	5	2—3 %	1.692,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.09 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kakao	5	3—4 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.10 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kopi	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.11 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - lada	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - pala	5	1—2 %		

SK No 081667 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.12 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kelapa	5	1—2 %	7.904,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.14 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kakao	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.15 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - lada	5	2—3 %	37.563,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - pala	5	1—2 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - cengkeh	5	5—7 %		
02.05.02.17 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kelapa	5	1—2 %	2.257,0	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081668 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.19 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - kelapa	5	1—3 %	738,4	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.21 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - cengkeh	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.22 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kopi	5	9—10 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.23 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kakao	5	2—3 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.02.27 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - perikanan budidaya	5	1—2 %	6.136,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.29 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - perikanan budidaya	5	1—2 %	11.675,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081669 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.31 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - garam	5	10—12 %	3.900,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.32 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan budidaya	5	4—6 %	8.974,7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.34 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - perikanan budidaya	5	1—2 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.36 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - perikanan budidaya	5	4—6 %	4.455,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.38 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - perikanan budidaya	5	4—6 %	11.472,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.02.39 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kelapa	5	1—2 %	2.079,6	KEMENTERIAN PERTANIAN

SK No 081670 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.02.41 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - tebu	5	5—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.05.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitungan sementara)	5	49,55	2.752.231,6	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara)	5	48,31		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan sementara)	5	49,55		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (angka perhitungan sementara)	5	52,40		
		05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (angka perhitungan sementara)	5	45,88		
		06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitungan sementara)	5	46,92		

SK No 081671 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (angka perhitungan sementara)	5	43,99		
		08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (angka perhitungan sementara)	5	36,20		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	6 kota		
	03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
	04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	2 WM		
02.05.03.03 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM	5.363,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	5	1 WM		
02.05.03.04 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	16.630,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 081672 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.03.05 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	5	1 WM	1.240.634,0	BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.05.03.06 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	5.321,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.05.03.07 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	1.065.464,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.03.08 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	413.461,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.05.03.09 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	5.355,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.05.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Sulawesi	1, 5	62,75	598.899,8	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	55,89		

SK No 081673 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi	5	59,6		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sulawesi	1	12,6—12,9 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	3 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,48 IPKP		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	16 kecamatan		
02.05.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara	5	12 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.08 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Utara	1, 5	64,55	2.570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

SK No 081674 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.09 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Minahasa Utara	1, 5	64,21	11.080,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.10 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna	5	0,50 IPKP	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.11 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane	5	0,46 IPKP	200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.12 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah	1, 5	63,45	570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.13 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morowali, Buol, dan Poso	1, 5	53,85	21.678,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.14 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah	5	57,00	9.544,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081675 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.15 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	14,9—15,4 %	206.517,6	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1	69,0—69,5		
02.05.04.16 **PRO-P:** Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan	2	75,00 %	249.436,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
02.05.04.17 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Selatan	1	65,60	1.570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.18 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	1, 5	60,33	35.715,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081676 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.19 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan	5	55,93	12.865,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.20 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	1, 5	60,25	1.570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.21 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	1, 5	52,13	3.092,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.22 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	5	56,46	13.858,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.23 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Gorontalo	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Gorontalo	1, 5	67,85	570,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081677 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.24 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	1, 5	65,82	4.487,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.25 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo	5	63,54	5.441,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.05.04.26 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Barat	1, 5	60,50	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.27 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah	1, 5	48,63	12.120,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.05.04.28 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat	5	69,78	6.010,4	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081678 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.04.29 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Tengah	5	3 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.04.30 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Gorontalo	5	1 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.05.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,24	140.403,2	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	37,50 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	74 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	66 daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	5.887 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	66 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	6 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,30 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	1.559.602 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	1.000.725 ha		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	137 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	95 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	7 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	7 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	475 desa		

SK No 081681 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.05.05 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.105 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,63 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	36 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	15 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	12 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	12 daerah		

SK No 081682 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.06 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	31.764 bidang	7.909,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	16.224 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	2.028 bidang		
02.05.05.07 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.828,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	4 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		

SK No 081683 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.09 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.696 dokumen	90.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,17 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	37 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		

SK No 081684 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.10 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	95.160 bidang	9.208,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	411.930 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	1.892 bidang		
02.05.05.11 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	3 rekomendasi kebijakan	1.699,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		

SK No 081685 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
02.05.05.12 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.324 dokumen	216,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,03 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	62,00 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	19 daerah		

SK No 081686 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	18 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	18 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.13 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	1.225.119 bidang	6.395,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	1.165.236 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	272.170 bidang		
02.05.05.14 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	14 rekomendasi kebijakan	3.639,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		

SK No 081687 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.16 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	748 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,98 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	16 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	13 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	13 daerah		

SK No 081688 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.17 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	7.170 bidang	11.204,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	6.120 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	204 bidang		
02.05.05.18 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	5 rekomendasi kebijakan	2.754,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.20 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	474 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		

SK No 081689 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	92,59 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.21 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	38.300 bidang	1.844,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	101.121 bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.05.05.22 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan	770,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	12 rekomendasi kebijakan		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
		03 - Jumlah persetujuan substansi prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.23 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	540 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,48 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	7 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	6 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	6 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.05.05.24 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	35.430 bidang	1.392,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	21.672 bidang		
02.05.05.25 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat	01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota	5	2 rekomendasi kebijakan	555,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	2 rekomendasi kebijakan		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 rekomendasi kebijakan		
02.05.05.27 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	475 desa	984,5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.06 **PP:** Pembangunan Wilayah Maluku	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	5	9,2—10,0 % per tahun	714.723,5	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Maluku	1	70,71—71,18 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	1	10,6—11,4 %		
02.06.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya kawasan strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	9.500,0	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3 kawasan		
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		05 - KI Prioritas dan KI pengembangan	5	1 jumlah KI		
02.06.01.01 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	9.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
02.06.01.02 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara	5	>1	0,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.06.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	4—6 %	24.222,9	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	5	2—4 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
02.06.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - pala	5	5—6 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - cengkeh	5	4—6 %		
02.06.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - kelapa	5	5—6 %	5.887,8	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.06.02.03 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - kelapa	5	5—7 %	3.051,3	KEMENTERIAN PERTANIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.02.04 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - pala	5	10—12 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - cengkeh	5	1—2 %		
02.06.02.05 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan tangkap	5	1—2 %	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.06 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan budidaya	5	4—6 %	9.031,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.02.08 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan budidaya	5	5—7 %	4.252,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (angka perhitungan sementara)	5	64,59	72.555,6	

SK No 081696 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (angka perhitungan sementara)	5	46,62		
		03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (angka perhitungan sementara)	5	47,02		
		04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (angka perhitungan sementara)	5	40,23		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	3 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.06.03.01 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	2 kota	5.322,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.06.03.02 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	67.232,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.03.03 **PRO-P:** Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	0,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.06.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Maluku	1, 5	54,45	584.822,2	
		02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	59,57		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku	5	36,62		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Maluku	1	17,2—17,4 %		
	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	8 kabupaten		
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,52 IPKP		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	29 kecamatan		

SK No 081698 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku	5	23 kecamatan	6.231,1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.11 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku	01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	21,7—22,2 %	512.348,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku	1	65,6—66,1		
02.06.04.12 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	6,7—7,2 %	32.305,8	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1	63,8—64,3		
02.06.04.14 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki	5	0,50 IPKP	0,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.04.15 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba	5	0,53 IPKP	1.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.04.16 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku	1, 5	55,75	23.028,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.04.17 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku Utara	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku Utara	1	55,85	3.910,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.04.18 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Maluku Tengah	1, 5	55,77	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.06.04.19 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morotai	1, 5	61,25	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.06.04.20 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	44,71	1.487,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.06.04.21 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara	5	32,58	4.511,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.06.04.22 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku Utara	5	6 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.06.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,02	23.622,8	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30,00 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	20 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	19 daerah		

SK No 081701 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.596 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	19 daerah		
	08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,69 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	225.040 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	235.743 ha		

SK No 081702 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	15 materi teknis dan Ranperkada RDTR		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	5 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	3 materi teknis dan Ranperda RTRW		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	3 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
	12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	1.325 desa		
02.06.05.11 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	440 dokumen	1.018,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	1 daerah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	91,01 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	10 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	10 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.12 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.155 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	90,36 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	10 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	9 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	9 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
02.06.05.13 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	5.556 bidang	8.310,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	2.492 bidang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	3.738 bidang		
02.06.05.14 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	79.830 bidang	6.851,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	94.091 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	21.541 bidang		
02.06.05.15 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	7 materi teknis dan Ranperkada	3.977,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	3 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
02.06.05.16 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	8 materi teknis dan Ranperkada RDTR	1.564,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	2 persetujuan substansi RDTR		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	1 persetujuan substansi RTRW		
02.06.05.17 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Maluku	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	663 desa	1.900,6	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.06.05.18 **PRO-P:** Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Maluku Utara	01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan	2	662 desa	0,0	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
02.07 **PP:** Pembangunan Wilayah Papua	01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua	5	7,3—8,4 % per tahun	7.268.167,0	
		02 - IPM Provinsi di Wilayah Papua	1	62,54—66,55 nilai minimum—nilai maksimum		
		03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	1	22,0—23,6 %		
02.07.01 **KP:** Pengembangan Kawasan Strategis	01 - Berkembangnya Kawasan Strategis	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah	5	>1	176.218,1	
		02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	4 kawasan		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		
		04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	5	1 jumlah destinasi		
		05 - KEK berbasis pariwisata dan industri	5	1 kawasan		
		06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan	5	1 jumlah KI		
02.07.01.01 **PRO-P:** Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua	5	>1	8.379,5	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.07.01.02 **PRO-P:** Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	7.993,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.01.03 **PRO-P:** Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Sorong	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	159.045,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.07.01.04 **PRO-P:** Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni	01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Teluk Bintuni	01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat	5	>1	800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.07.02 **KP:** Pengembangan Sektor Unggulan	01 - Berkembangnya sektor unggulan	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	5	1—2 %	187.836,5	
		02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	5	2—4 %		
		03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	5	1—2 %		
		04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	5	2—4 %		
		05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	5	1—2 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	5	4—6 %		
02.07.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kakao	5	1—2 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kopi	5	5—7 %	0,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.07 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - kakao	5	1—2 %	61.680,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
02.07.02.12 **PRO-P:** Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah populasi ternak sapi	5	150.000—200.000 ekor	126.156,5	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
		02 - Jumlah hasil produksi tanaman hortikultura (sayur) Provinsi Papua	5	32.000—37.000 ton		
		03 - Luas areal tanaman perkebunan	5	330.000—380.000 ha		
		04 - Jumlah hasil produksi tanaman perkebunan	5	850.000—900.000 ton		
		05 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan Provinsi Papua	5	101,6—102,1		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Nilai Tukar Petani subsektor hortikultura Provinsi Papua	5	98,2—98,7		
		07 - Nilai Tukar Petani subsektor Peternakan Provinsi Papua	5	108,1—108,6		
		08 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman perkebunan rakyat Provinsi Papua	5	103,7—104,2		
		09 - Nilai Tukar Petani subsektor perikanan Provinsi Papua	5	112,5—113,0		
		10 - Nilai Tukar Petani subsektor peternakan Provinsi Papua Barat	5	106,1—106,6		
		11 - Nilai Tukar Petani subsektor perkebunan rakyat Provinsi Papua Barat	5	105,3—105,8		
		12 - Nilai Tukar Petani subsektor hortikultura Provinsi Papua Barat	5	101,0—101,5		
		13 - Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan Provinsi Papua Barat	5	104,6—105,1		
		14 - Nilai Tukar Nelayan Provinsi Papua Barat	5	94,7—95,2		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat	5	101,3—101,8		
		02 - Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua	5	102,6—103,1		
		03 - Persentase pengeluaran makanan berpendapatan rendah Provinsi Papua	5	62,9—63,4 %		
		04 - Persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Provinsi Papua	5	56,3—56,8 %		
		05 - Persentase rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan Provinsi Papua Barat	5	46,8—47,3 %		
		06 - Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari Provinsi Papua	5	45,6—46,1 gram		
		07 - Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari Provinsi Papua Barat	5	55,4—55,9 gram		
	03 - Meningkatnya sektor ekonomi wilayah adat dan kawasan strategis di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	5	3,50—4,00 %		
		02 - Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	5	2,50—3,00 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat	5	5,40—5,80 %		
		04 - Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	5	5,50—6,00 %		
		05 - Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	5	2,00—2,50 %		
		06 - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua	5	8,10—9,30 %		
		07 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi	5	>1		
	04 - Meningkatnya sektor Pariwisata di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	5	1 jumlah destinasi		
		02 - Proporsi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB	5	2,70—3,20 %		
02.07.02.13 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - perikanan budidaya	5	4—6 %	0,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.02.14 **PRO-P:** Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - perikanan budidaya	5	5—7 %	0,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.03 **KP:** Pengembangan Kawasan Perkotaan	01 - Berkembangnya kawasan perkotaan	01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (angka perhitungan sementara)	5	46,56	19.670,3	
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (angka perhitungan sementara)	5	40,14		
	02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota		
	03 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota		
02.07.03.01 **PRO-P:** Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua	01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW	01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	5	1 kota	5.473,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
02.07.03.02 **PRO-P:** Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat	01 - Terbangunnya kota baru	01 - Jumlah kota baru yang dibangun	5	1 kota	14.197,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 081714 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04 **KP:** Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal	01 - Jumlah daerah tertinggal	5	30 kabupaten	6.845.338,5	
		02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	5	0,54 IPKP		
		03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	5	27 kecamatan		
	01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi	01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Papua	1, 5	35,30		
		02 - Rata-rata nilai Indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	1, 5	43,81		
		03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Papua	5	37,98		
		04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Papua	1	34,6—34,8 %		

SK No 081715 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.01 **PRO-P:** SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua	01 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah sekolah berpola asrama yang beroperasi	1	3 unit	436.747,5	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		02 - Jumlah pelajar Papua menerima bantuan biaya pendidikan	1	35.000 orang		
		03 - Jumlah guru yang terpenuhi di Wilayah Papua	1	4.500 orang		
	02 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah akb/kota yang mencapai API < 1/1.000 penduduk	1	42 kab/kota		
		02 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	42 kab/kota		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	90 %		
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
	03 - Meningkatnya perlindungan anak, perempuan, keluarga miskin dan partisipasi pemuda di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	1	332.184 keluarga		
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	1.500—2.000 jiwa		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua	5	24 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.04.04 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua	01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua	1, 5	33,45 nilai indeks	39.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.04.07 **PRO-P:** Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	2	70 km	6.073.054,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan	2	2 lokasi		
		03 - Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dikembangkan	2	2 lokasi		
		04 - Jumlah bandara yang dikembangkan	2	7 lokasi		
	02 - Meningkatnya akses infrastruktur dasar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	01 - Persentase akses air minum layak di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	70—90 %		

SK No 081717 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase akses rumah layak huni di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	53 %		
		03 - Rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	97—99 %		
		04 - Jumlah desa *blankspot* yang terlayani infrastruktur TIK di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	2.439 desa		
02.07.04.08 **PRO-P:** Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Air	1	55,4 IKA	72.680,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Indeks Kualitas Air Laut	1	75,0 IKAL		
		03 - Indeks Kualitas Udara	1	94,7 IKU		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	1	99,7 IKL		
	02 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Perubahan Iklim	01 - Indeks Risiko Bencana	1	133,4—133,9		
		02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	1	3,5 menit		
	03 - Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Terhadap *Baseline*	01 - Persentase penurunan emisi GRK nasional terhadap *baseline*	1	42,0—42,5 %		
		02 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap *baseline*	1	45,0—45,5 %		

SK No 081718 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.26 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Jayapura dan Merauke	1, 5	44,57	13.866,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.04.27 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	40,62	1.017,7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.07.04.29 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura	5	0,43 IPKP	120,0	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.30 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke	5	0,64 IPKP	0,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.31 **PRO-P:** Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah	5	0,56 IPKP	197.264,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
02.07.04.33 **PRO-P:** Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Raja Ampat dan Manokwari	1, 5	40,13	7.232,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.34 **PRO-P:** Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage	01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat	5	34,03	4.235,2	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
02.07.04.36 **PRO-P:** Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat	01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat	1, 5	40,85	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.07.04.37 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat	01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat	5	3 kecamatan	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
02.07.04.38 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Barat	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	26,5—27,0 %	0,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 – Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat	1	62,2—62,7		

SK No 081720 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.04.39 **PRO-P:** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua	01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua	1	30,6—31,1 %	120,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN AGAMA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
		02 – Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua	1	55,3—55,8		
02.07.05 **KP:** Kelembagaan dan Keuangan Daerah	01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,58	39.103,6	
	02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	4	30 %		
	03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	4	33 daerah		
	04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	4	34 daerah		

SK No 081721 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	1.227 dokumen		
	06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	4	2 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	4	34 daerah		
	09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,89 %		
	10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	4	34 daerah		
	11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	5	465.098,60 ha		
		02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan	5	678.397 ha		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	15 materi teknis dan Ranperkada		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	26 persetujuan substansi RDTR		
		05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	3 materi teknis dan Ranperda		
		06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
		07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah	5	5		
		08 - Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	5	1 materi teknis dan Raperpres RTR		
		09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	5	10 perkara		
	08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	4	2 daerah		
02.07.05.04 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	725 dokumen	3.877,4	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	89,15 %		
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	11 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	11 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	11 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		

SK No 081724 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.05.05 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	94.863 bidang	2.266,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	114.156 bidang		
02.07.05.06 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	4 materi teknis dan Ranperkada	4.332,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	22 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	2 materi teknis dan Ranperda		
		04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	5	2 persetujuan substansi RTRW		
02.07.05.07 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua	01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*)	01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	4	502 dokumen	0,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
	02 - Meningkatnya kerja sama daerah	01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama	4	1 daerah		
	03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah	01 - Persentase capaian SPM di daerah	4	88,63 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi	01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	4	30 %		
	05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat	01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	4	22 daerah		
	06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	4	23 daerah		
	07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	4	23 daerah		
	08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	4	22 rekomendasi		
	09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	4	2 rekomendasi		
02.07.05.08 **PRO-P:** Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua	01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah	01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah	5	19.117 bidang	4.629,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
	02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang	01 - Jumlah bidang tanah	5	626.929 bidang		
	03 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah K4	01 - Jumlah bidang tanah K4	5	546 bidang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
02.07.05.09 **PRO-P:** Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua	01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas	01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	5	11 materi teknis dan Ranperkada	2.092,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
		02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	5	4 persetujuan substansi RDTR		
		03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	5	1 materi teknis dan Ranperda		
02.07.05.10 **PRO-P:** Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM	01 - Meningkatnya afirmasi ASN melalui Manajemen Talenta ASN di Provinsi Papua dan Papua Barat	01 - Jumlah SDM ASN Orang Asli Papua di K/L	1	250 orang	21.906,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah SDM orang asli Papua di sekolah kedinasan	1	250 orang		
	02 - Narasi Tunggal Papua	01 - Jumlah narasi pembangunan Papua	1, 2, 5	175—225		
	03 - Diseminasi Internasional Pembangunan Papua	01 - Jumlah diseminasi Internasional terkait dengan pembangunan Internasional	1, 2, 5	1		

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

SK No 081727 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03 **PN:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	01 - Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)		2,19 per wanita usia subur usia 15-49 tahun	227.254.595,1	
		02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)		99,00 %		
	02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial		91,00 %		
		02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah		78,00 %		
	03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	01 - Angka Kematian Ibu (AKI)		194 per 100.000 kelahiran hidup		
		02 - Angka Kematian Bayi (AKB)		17,6 per 1.000 kelahiran hidup		
		03 - Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita		17,50 %		

SK No 081728 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Insidensi tuberkulosis		211 per 100.000 penduduk		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		385 kabupaten/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta		482 kabupaten/kota		
		07 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		21,80 %		
		08 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		8,80 %		
		09 - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca		394		
		10 - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika		385		
		11 - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains		399		
		12 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas		9,24 tahun		
		13 - Harapan lama sekolah		13,22 tahun		

SK No 081729 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71,66		
		02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,17—91,44		
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		56,65		
	05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif		38,00 %		
	06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas		48,00 %		
		02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 200		0 PT		
		03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 300		1 PT		
		04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 500		2 PT		
		05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		43,00 %		
		06 - Peringkat *Global Innovation Index*		75—80		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.01 **PP:** Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	89,00 %	5.263.281,2	
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	80,00 %		
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	90,00 %		
		04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun	1	98,00 %		
		05 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	50,00 %		
03.01.01 **KP:** Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	01 - Jumlah pedoman/kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun	1	50 pedoman/kebijakan/SOP	6.438,6	

SK No 081731 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.01.01.01 **PRO-P:** Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan	01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	2.056 inovasi	4.438,6	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	1	100 %		
		03 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	1	100 %		
		04 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	1	100 %		
03.01.01.02 **PRO-P:** Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus	01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	01 - Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif	1	50 daerah	2.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya	1	80 %		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.01.02 **KP:** Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan	01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	1	1 sistem	40.408,5	
03.01.02.01 **PRO-P:** Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan	01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	350 lembaga pengguna	4.913,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1	1.250 lembaga pengguna		
03.01.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu	01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap, dan tepat waktu	01 - Jumlah *database* kependudukan yang *update*	1	1 *database*	35.494,9	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
03.01.03 **KP:** Pendampingan dan Layanan Terpadu	01 - Meningkatnya kualitas pendampingan dan layanan terpadu	01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	1	89 %	5.068.447,9	
		02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	1	80 %		

SK No 081733 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	1	90 %		
		04 - Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%)	1	95 %		
		05 - Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)	1	50 %		
		06 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	1	50 %		
03.01.03.01 **PRO-P:** Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	01 - Terlaksananya dan rujukan bagi penduduk miskin dan rentan	01 - Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan SLRT (kabupaten/kota)	1	514 kabupaten/kota	4.586.819,1	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02 - Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1.028 desa/kelurahan		
03.01.03.02 **PRO-P:** Penguatan Pendampingan Masyarakat	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendamping pembangunan	01 - Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya	1	18.000 orang	481.628,8	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	1	6.000 lembaga		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	02 - Terlaksananya pendampingan melalui pendamping desa	01 - Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	1	36.000 orang		
03.01.04 **KP:** Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	01 - Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	1	53,00	147.986,2	
03.01.04.01 **PRO-P:** Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	1	75 (prov) & 38 (kab/kota) %	700,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.02 **PRO-P:** Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan	01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	01 - Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	4	75 %	1.607,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.01.04.03 **PRO-P:** Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan	01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	01 - Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	4	66,51	145.679,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
03.02 **PP:** Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	91,00 %	139.994.087,1	
		02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	1	12,00 %		

SK No 081735 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia	1	10,00 %		
		04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif	1	15,00 %		
		05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal	1	67,40 %		
		06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal	1	16,93 %		
03.02.01 **KP:** Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	01 - Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	1	3 dokumen	48.905.445,4	
03.02.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Program Jaminan Sosial	01 - Terlaksananya perluasan pemahaman publik akan JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	01 - Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional	1	1 dokumen	48.871.800,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		02 - Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi dan kemitraan SJSN	1	1 dokumen		
03.02.01.02 **PRO-P:** Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya penguatan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional berbasis data	01 - Jumlah *monitoring* dan evaluasi terpadu jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan berbasis digital	1	1 dokumen/sistem	33.645,4	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek yang terintegrasi berbasis NIK	1	100 %		
03.02.02 **KP:** Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan	01 - Akurasi penyaluran bantuan sosial	1	57 %	90.339.297,6	
		02 - Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan	1	70 %		
		03 - Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1	8.000.000 keluarga		
		04 - Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	1	15.600.000 keluarga		
		05 - Penyaluran bantuan LPG 3 kg	1	15.600.000 keluarga		
		06 - Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	1	15.600.000 keluarga		
03.02.02.01 **PRO-P:** Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	1	8.000.000 keluarga	90.339.297,6	KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
		02 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program Kartu Sembako Murah	1	15.600.000 keluarga		

SK No 081737 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik	1	15.600.000 keluarga		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PUSAT STATISTIK
	02 - Tersedianya pasokan hilir migas sesuai kebutuhan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg	1	15.600.000 keluarga		
		02 - Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	2	7.754—7.836 ribu ton		
03.02.03 **KP:** Perlindungan Sosial Adaptif	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang adaptif	01 - Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	500.000 jiwa	2.500,0	
03.02.03.01 **PRO-P:** Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	01 - Terlaksananya perlindungan sosial bagi penduduk korban bencana	01 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana alam	1	100.000 jiwa	2.500,0	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana sosial	1	15.000 jiwa		
		03 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial	1	2.000 jiwa		

SK No 081738 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.02.04 **KP:** Kesejahteraan Sosial	01 - Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial penduduk rentan	01 - Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	24 %	746.844,2	
		02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	1	18 %		
		03 - Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	45.000 jiwa		
03.02.04.01 **PRO-P:** Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kelembagaan bagi penyandang disabilitas	01 - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	50.000 jiwa	339.241,4	KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
03.02.04.02 **PRO-P:** Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan	01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	28.000 jiwa	111.985,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		

SK No 081739 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
03.02.04.03 **PRO-P:** Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (*Long-Term Care*)	01 - Terlaksananya perawatan jangka panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (*Long Term Care*)	01 - Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas (jiwa)	1	600 jiwa	22.800,0	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan sosial lanjut usia terintegrasi	1	10 kab/kota		
03.02.04.04 **PRO-P:** Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan napza	01 - Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	10.000 jiwa	272.817,8	KEMENTERIAN SOSIAL
		02 - Jumlah institusi penerima wajib lapor yang memperoleh penguatan kapasitas	1	150 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 jiwa		
	02 - Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak	01 - Jumlah anak telantar yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	24.000 jiwa		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang memperoleh penguatan kapasitas	1	200 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	300 lembaga		
	03 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang	01 - Jumlah tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	8.000 jiwa		
		02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh penguatan kapasitas	1	135 lembaga		
		03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh peningkatan kapasitas	1	200 jiwa		
	04 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi orang dengan HIV	01 - Jumlah orang dengan HIV yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	1	2.000 jiwa		

SK No 081741 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	05 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil	01 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh pemberdayaan sosial	1	2.800 KK		
03.03 **PP:** Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	01 - Persentase persalinan di fasyankes	1	93,0 %	18.422.650,2	
		02 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	1	62,92 %		
		03 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	1	7,70 %		
		04 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	1	20,00 kelahiran hidup per 1.000 perempuan		
		05 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	75 %		
		06 - Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita	1	7,30 %		
		07 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *Treatment Coverage*)	1	90 %		

SK No 081742 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria	1	110 kabupaten/kota		
		09 - Insidensi HIV	1	0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		
		10 - Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	1	90 %		
		11 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	380 kabupaten/kota		
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	474 kabupaten/kota		
		13 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	90 %		
		14 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		15 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	71 %		

SK No 081743 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		16 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	85 %		
		17 - Persentase obat memenuhi syarat	1	96 %		
		18 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	86 %		
03.03.01 **KP:** Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	01 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1	75 %	2.039.892,8	
		02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	27,57 %		
03.03.01.01 **PRO-P:** Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi	01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	93,00 %	1.485.774,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	1	471 kab/kota		
03.03.01.02 **PRO-P:** Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi	01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO)	1	21,59 %	554.118,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 081744 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.03.02 **KP:** Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat	01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	1	55 %	4.887.759,4	
		02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	1	11,50 %		
03.03.02.01 **PRO-P:** Penurunan *Stunting*	01 - Terwujudnya penurunan *stunting*	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi	1	100 %	4.887.759,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
03.03.03 **KP:** Peningkatan Pengendalian Penyakit	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit	01 - Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	1	55 %	3.687.296,3	

SK No 081745 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC *Success Rate*)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1	385 kab/kota		
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	100 %		
		05 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	1	482 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	1	150 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	24 desa		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	360 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	474 kab/kota		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.03.03.01 **PRO-P:** Pengendalian Penyakit Menular	01 - Terkendalinya penyakit menular	01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1	90 %	2.747.512,9	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
		02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *Treatment Coverage*)	1	90 %		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	1	495 kab/kota		
		04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	1	100%		
		05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1	90 %		
		06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	1	220 kab/kota		
		07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	1	24 desa		
03.03.03.02 **PRO-P:** Pengendalian Penyakit Tidak Menular	01 - Terkendalinya penyakit tidak menular	01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas	1	411 kab/kota	939.783,4	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SK No 081747 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1	474 kab/kota		
03.03.04 **KP:** Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	01 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	380 kab/kota	450.620,4	
03.03.04.01 **PRO-P:** Pengembangan Lingkungan Sehat	01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat	01 - Persentase desa/kelurahan dengan *Stop* Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	1	70 %	200.707,7	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah kabupaten/kota sehat	1	380 kab/kota		
03.03.04.02 **PRO-P:** Penguatan Promosi Germas	01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas	01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas	1	45 %	249.912,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	1	60 %		
03.03.05 **KP:** Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	7.357.081,4	
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	71 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	85 %		
		04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	1	90 %		
		05 - Persentase rumah sakit terakreditasi	1	95 %		
		06 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	94%		
		07 - Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	1	55%		
		08 - Persentase obat memenuhi syarat	1	96 %		
		09 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	86 %		
03.03.05.01 **PRO-P:** Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	01 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	95 %	5.203.902,6	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTAHANAN
		02 - Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	1	95 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	6.110 FKTP		
		04 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1	1.169 FKRTL		
03.03.05.02 **PRO-P:** Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	01 - Persentase puskesmas tanpa dokter	1	0 %	734.541,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	1	71 %		
		03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	1	85 %		
03.03.05.03 **PRO-P:** Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan	01 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1	94 %	363.986,4	KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
		02 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat	1	94 %		
03.03.05.04 **PRO-P:** Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan	01 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan	1	55 lokasi	589.804,8	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

SK No 081750 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun	1	2 dokumen		
		03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional	1	100 %		
03.03.05.05 **PRO-P:** Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	01 - Persentase obat memenuhi syarat	1	96 %	464.846,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase makanan memenuhi syarat	1	86 %		
03.04 **PP:** Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,82 rasio	50.317.503,6	
		02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi	1	0,31 rasio		
		03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca	1	33,00 %		

SK No 081751 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Matematika	1	30,00 %		
		05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Sains	1	42,60 %		
		06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	1	60,20 %		
		07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi	1	29,20 %		
		08 - Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/sederajat	1	98,41 %		
		09 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/sederajat	1	91,08 %		
		10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat	1	69,68 %		
		11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	1	71,20 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)	1	31,89 %		
03.04.01 **KP:** Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	1	100 %	1.484.514,9	
		02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	1	100 %		
03.04.01.01 **PRO-P:** Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	1	2.313 perangkat kurikulum dan pembelajaran	293.008,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran	1	188 satuan pendidikan		
03.04.01.02 **PRO-P:** Peningkatan Kompetensi Pendidik	01 - Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	1	48,83 %	567.571,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.03 **PRO-P:** Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas	1	256.500 satuan pendidikan	184.598,6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA

SK No 081753 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.01.04 **PRO-P:** Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pendidik dan peserta didik yang memanfaatkan *platform* digital pendidikan	1	20 %	262.141,7	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.01.05 **PRO-P:** Integrasi *Softskill* dalam Pembelajaran	01 - Terwujudnya integrasi *softskill* dalam pembelajaran	01 - Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan ekstrakurikuler	1	2.896 satuan pendidikan	177.194,3	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.02 **KP:** Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	1	99,32 %	32.336.765,4	
		02 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	1	96,34 %		
		03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	1	92,80 %		
		04 - Angka Kesiapan Sekolah	1	75,59 %		
03.04.02.01 **PRO-P:** Sarana dan Prasarana Pendidikan	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	1	50.190 lembaga	6.122.419,2	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
03.04.02.02 **PRO-P:** Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	1	100 %	25.308.159,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA

SK No 081754 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.02.03 **PRO-P:** Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Persentase kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99%	1	78,40 %	93.580,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Persentase kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95%	1	68,68 %		
		03 - Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95%	1	23,53 %		
03.04.02.04 **PRO-P:** Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Persentase kab/kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75	1	64,20 %	812.606,4	KEMENTERIAN AGAMA
03.04.03 **KP:** Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	01 - Persentase daerah yang memiliki Indeks Pemerataan Guru dan Ketersediaan Tenaga Kependidikan Baik	1	34,31 %	15.376.233,7	
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	1	48,83 %		
03.04.03.01 **PRO-P:** Revitalisasi LPTK	01 - Terlaksananya revitalisasi LPTK	01 - Jumlah LPTK yang direvitalisasi	1	4 lembaga	40.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SK No 081755 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.03.02 **PRO-P:** Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	1	91,74 %	613.008,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	1	89,23 %		
03.04.03.03 **PRO-P:** Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pemerataan Guru Dikdas Baik	1	45 kab/kota	516.344,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Indeks Pemerataan Guru PAUD dan Dikmas Baik	1	45 kab/kota		
		03 - Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik	1	14 provinsi		
03.04.03.04 **PRO-P:** Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu	1	99,81 %	14.206.880,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.04 **KP:** Penjaminan Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	1	82,56 %	990.161,5	
		02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	1	77,72 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	1	75,90 %		
		04 - Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)	1	130 PT		
		05 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)	1	68,03 %		
		06 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)	1	59,20%		
03.04.04.01 **PRO-P:** Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	1	103.533 satuan pendidikan	402.499,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.04.02 **PRO-P:** Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi dalam peningkatan mutu pembelajaran	1	1,96 %	587.662,2	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Persentase satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi dalam peningkatan mutu pembelajaran	1	2,32 %		
03.04.05 **KP:** Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	1	100 %	129.828,2	

SK No 081757 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.04.05.01 **PRO-P:** Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	1	34 provinsi	25.028,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA
03.04.05.03 **PRO-P:** Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan	1	85,10 %	41.467,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.04.05.04 **PRO-P:** Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Persentase kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	1	38,92 %	63.332,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
03.05 **PP:** Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	01 - Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko	01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	1	9,08 %	1.041.260,2	
		02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	1	menurun %		
		03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	75,60—77,18		
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	54,38 %		
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	1	menurun %		

SK No 081758 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	1	meningkat %		
		07 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	1	meningkat %		
		08 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*	1	0,50 %		
		09 - Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	1	7,05 %		
03.05.01 **KP:** Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1	79,39	43.482,9	
		02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1	69,44		
03.05.01.01 **PRO-P:** Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	1	3,51 %	11.921,9	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah provinsi/kab/kota yang memperoleh peringkat KLA	1	315 provinsi/kab/kota		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.05.01.02 **PRO-P:** Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	1	4,51 %	31.560,9	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
		02 - Persentase anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	1	75 %		
03.05.02 **KP:** Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	01 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1	54,38 %	670.857,4	
03.05.02.01 **PRO-P:** Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	01 - Indeks PUG Nasional	1	74,20	628.110,7	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
		02 - Persentase anggaran responsif gender	1	8,76 %		
03.05.02.02 **PRO-P:** Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya perlindungan perempuan dari kekerasan	01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	1	90 %	42.746,7	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.05.03 **KP:** Kualitas Pemuda	01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	1	meningkat %	326.920,0	
		02 - Persentase usia pemuda 16-30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	1	23,58 %		
03.05.03.01 **PRO-P:** Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	1	75 %	2.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	1	75 %		
03.05.03.02 **PRO-P:** Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko	01 - Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	1	24,92 %	21.750,0	KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.05.03.03 **PRO-P:** Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	1	meningkat %	302.670,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.06 **PP:** Pengentasan Kemiskinan	01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	1	45 %	516.378,7	
		02 - Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah	1	332.757 rumah tangga		
03.06.01 **KP:** Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	0,15 %	20.877,4	
03.06.01.01 **PRO-P:** Fasilitasi Modal Usaha	01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan	01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	1	3.500.000 keluarga	20.877,4	KEMENTERIAN KEUANGAN
03.06.02 **KP:** Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial	01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga)	1	4.200 lembaga	59.705,9	
		02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	1	2.500 orang		
03.06.02.01 **PRO-P:** Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif	01 - Meningkatnya lembaga yang memperoleh fasilitasi keperantaraan usaha	01 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan	1	500 badan usaha	51.103,9	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KEUANGAN

SK No 081762 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.06.02.02 **PRO-P:** Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial	01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	01 - Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok)	1	200 badan usaha	4.422,9	KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.06.02.03 **PRO-P:** Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah KTH mandiri (unit)	1	100 kelompok	4.179,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya) (unit)	1	50 kelompok masyarakat		
		03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal (perhutanan sosial, RHL, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi) (orang)	1	1.500 orang		
03.06.03 **KP:** Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria	01 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	5	0,0047 indeks	295.109,6	
		02 - Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria	5	20 %		
03.06.03.01 **PRO-P:** Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	01 - Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) (ha)	5	735.100 ha	28.860,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SK No 081763 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.06.03.02 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora	01 - Terlaksananya legalisasi atas TORA dan meningkatnya kualitas data pertanahan	01 - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi dan dilegalisasi (bidang)	5	332.757 bidang	109.919,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.03.03 **PRO-P:** Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA	01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	01 - Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria (KK)	5	114.900 kepala keluarga	156.330,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
03.06.04 **KP:** Perhutanan Sosial	01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (ha)	1	1.750.000 ha	140.685,8	
03.06.04.01 **PRO-P:** Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	01 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha)	1	1.750.000 ha	140.685,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
03.07 **PP:** Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing	01 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,60 juta orang	11.699.434,0	
		02 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1	25,10 %		
		03 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	1	60,71 %		

SK No 081764 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	5	231 prototipe		
		05 - Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	5	550 produk		
		06 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	5	180 inovasi		
		07 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	5	2.750 paten		
		08 - Jumlah paten *granted* (domestik)	5	950 paten		
		09 - Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	1	17,00 %		
		10 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	1	132 PUI		
		11 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	2	13 infrastruktur		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		12 - Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi	5	5 unit		
		13 - Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	2	3 unit		
		14 - Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	5	10 produk		
		15 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	5	20 teknologi		
		16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	5	35 teknologi		
		17 - Peringkat pada SEA Games	1	4 peringkat		
		18 - Peringkat pada ASEAN Para Games	1	1 peringkat		

SK No 081766 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.01 **KP:** Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	01 - Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	7.042.758,8	
		02 - PT Vokasi berakreditasi A	1	14 PT Vokasi		
		03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	1	2.082.084 orang		
		04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	1	329.498 orang		
		05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi	1	2,6 juta orang		
		06 - Jumlah pemagangan dalam negeri	1	55.000 orang		
		07 - Jumlah pemagangan luar negeri	1	3.000 orang		
03.07.01.01 **PRO-P:** Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Meningkatnya peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	1	200 kesepakatan	2.176.110,7	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SK No 081767 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.01.02 **PRO-P:** Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	1	1.101 SMK	3.447.531,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.01.03 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi	01 - Jumlah SDM SMK, PT Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan	1	8.700 orang	186.697,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
03.07.01.04 **PRO-P:** Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi	01 - Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	1	676 lembaga	1.055.431,7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
03.07.01.05 **PRO-P:** Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi	01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	1	1.890.345 orang	176.987,5	KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 081768 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.02 **KP:** Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas	01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	1	27.846 artikel	1.214.405,5	
		02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional	1	55.526 sitasi		
03.07.02.03 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Lulusan PT	01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT	01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1	266.200 orang	1.214.405,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KEUANGAN
03.07.03 **KP:** Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	01 - Meningkatnya kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	01 - Jumlah paten *granted* (domestik)	5	950 paten	1.630.356,7	
03.07.03.01 **PRO-P:** Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	01 - Terlaksananya pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	01 - Jumlah hasil inovasi *Flagship* PRN	1	10 produk	299.250,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
03.07.03.02 **PRO-P:** Pengembangan *Research Power-House*	01 - Terlaksananya pengembangan *Research Power-House*	01 - Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	1	350 orang	240.425,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
03.07.03.03 **PRO-P:** Penciptaan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penciptaan ekosistem inovasi	01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya	1	6 lembaga	1.090.681,7	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

SK No 081769 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.04 **KP:** Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	01 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games	1	69 medali emas, 92 medali perak, 80 medali perunggu	1.811.913,0	
		02 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	1	126 medali emas 75 medali perak 50 medali perunggu		
03.07.04.01 **PRO-P:** Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan	01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	01 - Kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan	1	6 kebijakan	15.790,4	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.02 **PRO-P:** Pengembangan Budaya Olahraga	01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	1	38,46 %	48.159,7	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.03 **PRO-P:** Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah	01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade, dan potensi daerah	01 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	1	15 %	1.475.961,9	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM	1	5 %		
		03 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI)	1	20 %		

SK No 081772 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase sekolah khusus/keberbakatan olahraga yang telah terstandardisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	36,84 %		
		05 - Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandardisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	1	4,28 %		
		06 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional	1	30 %		
		07 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Paralimpik pada olahragawan andalan nasional	1	15 %		
		08 - Jumlah pusat pelatihan nasional yang telah beroperasional di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	1	10 provinsi		
		09 - Jumlah atlet elit nasional	1	250 orang		
		10 - Jumlah atlet elit junior nasional	1	500 orang		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		11 - Jumlah atlet talenta muda	1	2.850 orang		
03.07.04.04 **PRO-P:** Penataan Kelembagaan Olahraga	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga	01 - Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	1	21 lembaga	14.165,1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.07.04.05 **PRO-P:** Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional	1	220 orang	10.598,7	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat nasional	1	750 orang		
		03 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional	1	30 orang		
		04 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat nasional	1	200 orang		
03.07.04.06 **PRO-P:** Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional	01 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	1	4 unit	243.966,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	1	4 lembaga		

SK No 081774 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
03.07.04.07 **PRO-P:** Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan	01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	01 - Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pelatihan SDM industri dan promosi olahraga	1	500 orang	3.270,6	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

SK No 081780 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04 **PN:** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	01 - Indeks Capaian Revolusi Mental		73,13	5.842.252,7	
		02 - Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila		79,08		
	02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		61,20		
	03 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat		0,65		
	04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama		75,00		
	05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	01 - Indeks Pembangunan Keluarga		59,00		
		02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan		22,10 tahun		

SK No 081781 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Nilai Budaya Literasi		68,37		
04.01 **PP:** Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	1	79,30	636.743,2	
		02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	1	72,95		
		03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	1	77,88		
		04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	1	63,16		
		05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	1	72,36		
	02 - Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila	06 - Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa	1	85,08		
		07 - Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1	78,94		
		08 - Nilai Dimensi Persatuan Indonesia	1	90,02		

SK No 081783 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	1	77,18		
		10 - Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	1	64,19		
	03 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	11 - Indeks Kerentanan Keluarga	1	10,50		
		12 - Indeks Karakter Remaja	1	69,42		
04.01.01 **KP:** Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	1	35 %	174.347,9	
04.01.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (*Bullying Free School Environment*)	01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	01 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	1	30 %	48.740,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
04.01.01.02 **PRO-P:** Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan	01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	64 %	29.089,8	KEMENTERIAN AGAMA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.01.03 **PRO-P:** Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan	01 - Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dan kepramukaan	1	3.232 orang	96.518,1	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.01.02 **KP:** Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	01 - Skor rata-rata nilai SKM secara nasional	4	76,61	5.200,0	
04.01.02.01 **PRO-P:** Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya	01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	01 - Jumlah instansi dengan nilai SKM "Baik"	4	150 instansi	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
04.01.02.02 **PRO-P:** Penerapan Disiplin, *Reward* dan *Punishment* dalam Birokrasi	01 - Terlaksananya penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi	01 - Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS	4	25 laporan	4.200,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
04.01.03 **KP:** Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	1	77,22	252.561,3	
		02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	1	35		

SK No 081785 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.03.01 **PRO-P:** Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup	01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	35,46 %	232.512,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN AGAMA
04.01.03.02 **PRO-P:** Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesinambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga	01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	01 - Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	1	60,00 %	14.500,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
04.01.03.03 **PRO-P:** Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha	01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	01 - Persentase Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	1	70 %	5.549,1	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
04.01.04 **KP:** Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	01 - Jumlah pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	118 lembaga	33.363,0	
04.01.04.01 **PRO-P:** Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Terwujudnya penguatan Gugus Tugas GNRM dalam rangka pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan	1	88 lembaga	20.274,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SK No 081787 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.04.02 **PRO-P:** Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan	1	30 lembaga	13.088,1	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
04.01.05 **KP:** Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	01 - Meningkatnya kualitas koperasi dan kewirausahaan	01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	5	340 unit (kumulatif)	24.050,0	
		02 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	5	16.000 WUB		
04.01.05.02 **PRO-P:** Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong	01 - Terlaksananya pemasyarakatan kewirausahaan	01 - Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan	5	1.200 orang	1.800,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
04.01.05.03 **PRO-P:** Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	01 - Terlaksananya edukasi cinta produk dalam negeri	01 - Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	5	5.000 orang	13.900,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
04.01.05.01 **PRO-P:** Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif	01 - Terlaksananya pembinaan kepada koperasi	01 - Jumlah koperasi yang menerima pembinaan	5	300 koperasi	8.350,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SK No 081789 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.01.06 **KP:** Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	01 - Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	1	100 %	147.221,0	
04.01.06.01 **PRO-P:** Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara	01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	1	100 %	66.176,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KEMENTERIAN AGAMA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
04.01.06.02 **PRO-P:** Peningkatkan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP	1	100 %	72.007,8	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.03 **PRO-P:** Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	01 - Jumlah rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	1	3 dokumen	5.609,4	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
04.01.06.04 **PRO-P:** Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara	01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	01 - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, ormas, organisasi asing, serta media yang terindikasi menentang ideologi negara	1	3 dokumen	3.427,3	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SK No 081790 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02 **PP:** Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya	1	54,85	969.254,7	
		02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	1	38,60		
		03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	1	46,76		
04.02.01 **KP:** Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	1	30 %	192.241,0	
04.02.01.01 **PRO-P:** Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	01 - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	1	32 %	89.977,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.01.02 **PRO-P:** Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	60 %	61.679,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.01.03 **PRO-P:** Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa	01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	1	10,07 %	40.584,2	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SK No 081792 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.02 **KP:** Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	1	0,31 %	580.427,9	
		02 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	1	36 %		
04.02.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	01 - Jumlah produksi film, musik dan media baru	1	40 produksi	283.504,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.02 **PRO-P:** Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	01 - Jumlah festival skala internasional (*mega events*) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	1	9 festival	143.950,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.03 **PRO-P:** Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	1	50 %	150.973,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.02.04 **PRO-P:** Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	1	3 komunitas	2.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081793 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.03 **KP:** Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	01 - Terwujudnya pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	01 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1	22,58 %	36.032,8	
04.02.03.01 **PRO-P:** Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	01 - Wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	1	7 wilayah adat	21.332,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
04.02.03.02 **PRO-P:** Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	01 - Jumlah penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat	1	35 lembaga	13.700,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.03.03 **PRO-P:** Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	01 - Jumlah layanan informasi potensi ekonomi KIK di seluruh Indonesia	1	33 layanan	1.000,0	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
04.02.04 **KP:** Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	01 - Jumlah pengunjung internasional *mega events* kebudayaan	1	90.000 orang	30.390,7	
04.02.04.01 **PRO-P:** Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	01 - Jumlah pemelajar BIPA	1	85.865 orang	30.390,7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SK No 081794 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.04.02 **PRO-P:** Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan	01 - Jumlah pengunjung internasional *mega events* kebudayaan	1	90.000 orang	0,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05 **KP:** Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	1	60 %	130.162,4	
04.02.05.01 **PRO-P:** Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	01 - Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum (BLU)	1	100 cagar budaya	0,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.02 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	01 - Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	1	5.500 orang	46.337,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.03 **PRO-P:** Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	01 - Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	1	150 kelompok masyarakat	76.164,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.02.05.04 **PRO-P:** Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1	1 layanan	0,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SK No 081795 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.02.05.05 **PRO-P:** Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1	1 layanan	7.660,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.03 **PP:** Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	01 - Indeks Kepuasan Layanan Haji	1	85,99	3.403.987,5	
		02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA	1	83,00		
		03 - Nilai Dimensi Toleransi	1	72,59		
		04 - Nilai Dimensi Kesetaraan	1	76,53		
		05 - Nilai Dimensi Kerja Sama	1	76,16		
04.03.01 **KP:** Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen)	1	89,58 %	1.104.959,7	
04.03.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	01 - Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1	1:5	841.833,3	KEMENTERIAN AGAMA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

SK No 081796 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.01.02 **PRO-P:** Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	01 - Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama (persen)	1	58,50 %	116.278,4	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.03 **PRO-P:** Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	01 - Persentase pesantren yang berwawasan moderasi beragama (persen)	1	4,00 %	2.000,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.04 **PRO-P:** Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	01 - Persentase rumah ibadah yang ramah (persen)	1	55 %	144.848,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.01.05 **PRO-P:** Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	01 - Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang)	1	5.886 orang	0,0	KEMENTERIAN AGAMA

SK No 081797 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.02 **KP:** Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	01 - Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	01 - Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen)	1	88 %	429.740,6	
04.03.02.01 **PRO-P:** Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	01 - Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti (persen)	1	100 %	83.029,3	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
04.03.02.02 **PRO-P:** Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	01 - Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi (persen)	1	15 %	280.730,5	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.02.03 **PRO-P:** Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	01 - Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	1	100 %	65.980,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03 **KP:** Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	01 - Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	01 - Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (persen)	1	75,83 %	161.054,4	
04.03.03.01 **PRO-P:** Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	01 - Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan (kegiatan)	1	19 kegiatan	8.580,7	KEMENTERIAN AGAMA

SK No 081798 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.03.02 **PRO-P:** Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	01 - Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (persen)	1	28,30 %	99.772,8	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.03.03 **PRO-P:** Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	01 - Jumlah *event* keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi (kegiatan)	1	1.907 kegiatan	52.701,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04 **KP:** Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	01 - Terwujudnya peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)	1	55 %	1.597.706,9	
04.03.04.01 **PRO-P:** Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	01 - Terwujudnya fasilitasi pelayanan keagamaan	01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi (unit)	1	865.227 unit	675.280,0	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	01 - Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ hittaya sukhaya (keluarga)	1	361.316 keluarga	25.616,3	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.04.03 **PRO-P:** Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	01 - Persentase produk yang tersertifikasi halal (persen)	1	63 %	174.802,1	KEMENTERIAN AGAMA

SK No 081799 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.03.04.04 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah	01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (persen)	1	85,24 %	722.008,5	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Petugas haji profesional (persen)	1	87,80 %		
04.03.05 **KP:** Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen)	1	53 %	110.525,9	
04.03.05.01 **PRO-P:** Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan	01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (persen)	1	29,01 %	28.427,2	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.02 **PRO-P:** Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat	01 - Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan (persen)	1	55 %	55.128,6	KEMENTERIAN AGAMA
04.03.05.03 **PRO-P:** Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	01 - Terwujudnya pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (persen)	1	94 %	26.970,1	KEMENTERIAN AGAMA
04.04 **PP:** Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	15,00	832.267,2	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.04.01 **KP:** Peningkatan Budaya Literasi	01 - Terwujudnya peningkatan budaya literasi	01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	1:14	370.728,4	
		02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	1:18.000		
		03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	1	21,24 %		
04.04.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca	01 - Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	1	20.161 orang	71.266,2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.04.01.02 **PRO-P:** Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi	01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	01 - Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi	1	330 orang	139.025,7	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi	1	20 lembaga		
04.04.01.03 **PRO-P:** Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	1	863 perpustakaan	160.436,5	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN SOSIAL
04.04.02 **KP:** Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	01 - Terwujudnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	01 - Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	1	46 %	115.341,7	
		02 - Indeks daya hidup bahasa daerah	1	0,57		

SK No 081801 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.04.02.01 **PRO-P:** Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional	01 - Terwujudnya peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	01 - Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	1	32 negara	0,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.02.02 **PRO-P:** Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas	01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	01 - Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	1	165.014 kosakata	75.620,9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
		02 - Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	1	6.423 orang		
04.04.02.03 **PRO-P:** Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa	01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	01 - Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	1	66.000 orang	39.720,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
04.04.03 **KP:** Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	01 - Terwujudnya pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	01 - Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi	1	11.500 orang	309.000,0	
04.04.03.01 **PRO-P:** Peningkatan Budaya Riset dan Ekperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini	01 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	01 - Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi	1	11.500 orang	120.000,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
04.04.03.02 **PRO-P:** Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi	01 - Terfasilitasinya hasil riset dan inovasi	01 - Jumlah mitra terfasilitasi	1	3.000 mitra	189.000,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

SK No 081802 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
04.04.04 **KP:** Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	01 - Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	4,00 %	37.197,1	
04.04.04.01 **PRO-P:** Pengembangan Mitra Perpustakaan (*Library Supporter*)	01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*)	01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	1	500 perpustakaan	12.197,1	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
04.04.04.02 **PRO-P:** Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi	01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	01 - Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	1	100 lokasi	25.000,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05 **PN:** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		67,88 %	105.469.041,5	
		02 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010		63 %		
		03 - Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif)		10,00 %		
		04 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)		37,50 %		
	02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau		2,08 jam/100 km		
		02 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*)		26 %		
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2		91,16 %		
		04 - Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara		89 %		

SK No 081804 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
	03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		6 (berlanjut) kota		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan		70,77 %		
	04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	01 - Rasio elektrifikasi		~ 100 %		
		02 - Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik		1.336 kWh/kapita		
		03 - Penurunan emisi GRK sektor energi		116 juta ton		
	05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)		99 %		
05.01 **PP:** Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Rasio *outstanding* KPR terhadap PDB	2	3,60 %	38.706.566,1	
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	2	94,63 %		
		03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	2	86,00 %		

SK No 081805 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	2	64,20 %		
	02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	97,55 %		
		02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	14,22 %		
		03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	2	28,01 %		
		04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	69,54 %		
		05 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	91,80 %		
		06 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	2	86,03 akses layak termasuk 13 akses aman %		
		07 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2	1,49 %		

SK No 081806 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		08 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	2	77,64 penanganan; 14,57 pengurangan %		
	03 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2	25,50 menit		
	04 - Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	2	185 kab/kota		
	05 - Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	01 - Volume tampungan air per kapita	2	54,50 m^3/kapita		
		02 - Persentase luas sawah beririgasi	2	54,50 %		
		03 - Luas daerah irigasi yang dimodernisasi	2	350.000 ha		
05.01.01 **KP:** Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	01 - Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah	2	4.988 unit	5.373.239,9	
		02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	2	20.000 rumah tangga		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	220.000 rumah tangga		
		04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	2	124.750 unit		
		05 - Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	275 ha		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	2	48 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	2	48 kab/kota		
05.01.01.01 **PRO-P:** Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru	01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah	2	4.988 unit	1.925.183,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.01.02 **PRO-P:** Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	01 - Terlaksananya peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	2	220.000 rumah tangga	12.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	2	20.000 rumah tangga		
05.01.01.03 **PRO-P:** Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah	01 - Terlaksananya pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah	01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	2	124.750 rumah tangga	2.717.650,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.01.04 **PRO-P:** Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan termasuk PSU kawasan skala besar	2	27.825 unit	390.525,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.01.05 **PRO-P:** Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	01 - Terlaksananya fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF)	01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	48 kab/kota	51.248,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
05.01.01.06 **PRO-P:** Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh	01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	2	275 ha	276.133,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SK No 081809 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.02 **KP:** Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	2	19.185.621 sambungan rumah	7.012.500,6	
		02 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	2	47.631.849 rumah tangga		
		03 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	2	9.740.076 rumah tangga		
		04 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat	2	91,8 %		
		05 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	2	62.352 sambungan rumah		
		06 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	2	284.145 sambungan rumah		
		07 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	2	1.730.314 rumah tangga		
		08 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar *sanitary landfill* (RT)	2	4.470.423 rumah tangga		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	2	376.144 rumah tangga		
		10 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	2	473.562 rumah tangga		
		11 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	2	88 kab/kota		
		12 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	2	84 kab/kota		
		13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	1,49 %		
05.01.02.01 **PRO-P:** Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional	2	2.030 liter/detik	6.683.332,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM	2	10.104 liter/detik		
		03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	2	721.779 sambungan rumah		
		04 - Persentase Non-*Revenue Water* (NRW) PDAM	2	27 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	2	28 kab/kota		
		06 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	2	168 kab/kota		
		07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	2	113 kab/kota		
		08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	2	74 kab/kota		
		09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	2	116 kab/kota		
		10 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	2	37 kab/kota		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.02.02 **PRO-P:** Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Persentase PDAM yang memiliki *business plan* menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024	2	65 %	309.185,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Persentase PDAM dengan tarif *Full Cost Recovery*	2	88 %		
		03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll)	2	80 %		
		04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota	2	33 provinsi		
		05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik	2	33 provinsi		
		06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	2	85 %		
05.01.02.03 **PRO-P:** Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi	2	34 provinsi	680,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun	2	4 NSPK		

SK No 081814 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun	2	3 NSPK		
		04 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum	2	102 kab/kota		
		05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM	2	102 kab/kota		
05.01.02.04 **PRO-P:** Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	2	102 kab/kota	19.303,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum	2	514 kab/kota		
		03 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki *effluent* IPAL, IPLT, dan *leachate* TPA yang memenuhi syarat	2	60 kab/kota		
05.01.03 **KP:** Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan	01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2	41,82 m^3/detik	1.295.854,4	
		02 - Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	2	70 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.03.01 **PRO-P:** Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	01 - Tambahan debit air baku	2	2 m^3/detik	1.295.154,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.03.02 **PRO-P:** Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	01 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui	2	22 rekomendasi kebijakan	700,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
05.01.04 **KP:** Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1	0,97	2.864.552,5	
		02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2	2,15		
		03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	2	0,23		
		04 - Rasio kejadian kecelakaan transportasi SDP per 10.000 Pelayaran	2	0,084		
05.01.04.01 **PRO-P:** Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi	01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan	2	199 unit	2.604.685,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun	2	33 provinsi		

SK No 081816 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah UPPKB yang dibangun dan ditingkatkan	2	8 unit		
		04 - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Keselamatan Pelayaran	2	7 unit		
		05 - Jumlah kapal negara KPLP yang dibangun	2	10 unit		
		06 - Jumlah Sarana,prasarana dan sistem navigasi pendukung keselamatan penerbangan	2	3 lokasi		
05.01.04.02 **PRO-P:** Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan	01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian, dan pertolongan	01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten	1	15.509 orang	259.867,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL
		02 - Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan *Safety and Security* SDM Transportasi	1	101.831 orang		
	02 - Terlaksananya Promosi Keselamatan Jalan Nasional	01 - Promosi Keselamatan Jalan Nasional	1	26 promosi		
	03 - Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	01 - Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	8 daerah (prov/kab/kota)		

SK No 081817 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.05 **KP:** Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur	01 - Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di WS Kewenangan Pusat	2	60,59 %	5.607.509,1	
		02 - Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Abrasi, Gelombang Pasang, dan Gunung Api)	2	1.952 Kejadian		
05.01.05.01 **PRO-P:** Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	10 wilayah sungai	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami	2	3 provinsi		
05.01.05.02 **PRO-P:** Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir	2	22 wilayah sungai	5.449.474,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen	2	2 provinsi		

SK No 081818 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir	2	18 kawasan pesisir		
05.01.05.03 **PRO-P:** Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah	2	5 kab/kota	65.534,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah	2	15 CAT		
		03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir	2	5 wilayah sungai		
		04 - Jumlah lokasi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor	2	5 lokasi		
		05 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	2	85 kegiatan		
05.01.05.04 **PRO-P:** Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami	01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami	01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi	2	1 unit	91.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.06 **KP:** Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi	01 - Terbangunnya waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi	01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	2	15,9 miliar m³	16.552.909,5	
		02 - Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	2	22 unit		
		03 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	2	10 unit		
		04 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	2	9 daerah irigasi		
		05 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	2	5.500 ha		
05.01.06.02 **PRO-P:** Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan	01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun	2	13 unit	14.242.404,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.01.06.03 **PRO-P:** Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan	01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya	2	22 unit	1.608.533,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	2	47,4 MW		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.01.06.05 **PRO-P:** Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	2	5.500 ha	701.971,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	2	105.000 ha		
05.02 **PP:** Infrastruktur Ekonomi	01 - Meningkatnya konektivitas wilayah	01 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota	2	93/73/63 %	44.163.416,7	
		02 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	2	415 km		
		03 - Panjang jalan baru yang terbangun	2	303,6 km		
		04 - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	2	6.724 km		
		05 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	2	5 (berlanjut) lokasi		
		06 - Jumlah rute subsidi tol laut	2	35 rute		
		07 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun	2	6 (4 selesai, 2 berlanjut) lokasi		
		08 - Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	2	12 (berlanjut) lokasi		

SK No 081821 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Jumlah rute jembatan udara	2	43 rute		
05.02.01 **KP:** Konektivitas Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas jalan	01 - Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	2	8 lokasi	31.574.355,5	
		02 - Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun	2	379,8 km		
		03 - Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun	2	10.337,9 m		
05.02.01.01 **PRO-P:** Pembangunan Jalan Strategis	01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis	01 - Panjang jalan lintas utama pulau ditangani	2	158,12 km	4.258.720,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Panjang jembatan lintas utama pulau ditangani	2	5.911,1 m		
05.02.01.02 **PRO-P:** Pembangunan Jalan Tol	01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol	01 - Panjang jalan tol yang ditangani	2	4,02 km	1.345.243,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.03 **PRO-P:** Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, Food Estate dan KSPN)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, Food Estate dan KSPN)	01 - Panjang jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, dan KSPN) yang ditangani	2	85,1 km	10.231.809,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.01.04 **PRO-P:** Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal)	01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) yang dibangun	01 - Panjang jalan dan jembatan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun	2	15,41 km	590.290,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.01.05 **PRO-P:** Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran)	01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran)	2	39.999,04 km	15.148.292,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.02.02 **KP:** Konektivitas Kereta Api	01 - Terwujudnya konektivitas kereta api	01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	2	74 (berlanjut) km	4.090.703,8	
		02 - Panjang jalur kereta api yang ditingkatkan	2	329 (berlanjut) km		
05.02.02.01 **PRO-P:** Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota	01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota	01 - Jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api	2	10 lokasi	2.066.783,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.02.02 **PRO-P:** Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	01 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api	2	10 lokasi	1.863.082,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana Kereta Api (IMO)	2	1 paket		
05.02.02.04 **PRO-P:** Penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi	01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia	2	6 layanan	160.838,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Tersedianya dana PSO perkeretaapian	2	1 paket (APBN non-Kemenhub)		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.03 **KP:** Konektivitas Laut	01 - Terwujudnya konektivitas laut	01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	2	27 lokasi	3.590.299,9	
		02 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	2	158 rute		
05.02.03.01 **PRO-P:** Pengembangan Pelabuhan Utama (*Hub*)	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut utama	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	1 lokasi	532.957,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.03.02 **PRO-P:** Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut	01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan	2	21 lokasi	1.057.382,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.03.03 **PRO-P:** Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	01 - Pelabuhan mendukung kawasan strategis prioritas nasional	01 - Jumlah Pelabuhan Pendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional	2	4 lokasi	260.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.03.04 **PRO-P:** Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut	01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	01 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur	2	35 rute	1.739.960,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan angkutan laut perintis	2	117 rute		
		03 - Jumlah layanan angkutan ternak	2	6 rute		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.04 **KP:** Konektivitas Udara	01 - Terwujudnya konektivitas udara	01 - Jumlah layanan angkutan udara dan Angkutan BBM untuk Kargo Perintis	2	43 rute	3.347.812,8	
		02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	2	45 lokasi		
		03 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	228 layanan		
05.02.04.01 **PRO-P:** Jembatan Udara	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	2	7 lokasi	509.138,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah layanan kargo perintis mendukung jembatan udara	2	43 rute		
05.02.04.02 **PRO-P:** Pembangunan Bandara Baru	01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru	01 - Jumlah bandara yang dibangun	2	7 lokasi	1.139.032,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.03 **PRO-P:** Pengembangan Bandara *Hub* Primer	01 - Terlaksananya pengembangan bandara *hub* primer	01 - Jumlah bandara *hub* primer yang direhabilitasi/dikembangkan	2	31 lokasi	1.242.603,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.04.04 **PRO-P:** Pembangunan Bandara Perairan (*Waterbased Airport*) untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	01 - Terlaksananya penyusunan kajian penyiapan pembangunan perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata	01 - Jumlah kajian penyiapan bandara perairan	2	1 lokasi	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.04.05 **PRO-P:** Layanan Subsidi Angkutan Udara	01 - Terlaksananya layanan angkutan udara perintis	01 - Jumlah layanan angkutan udara perintis	2	228 layanan	447.037,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Angkutan BBM angkutan udara perintis	2	8.759 layanan		
05.02.05 **KP:** Konektivitas Darat	01 - Terwujudnya konektivitas darat	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	2	24 lokasi	1.560.244,6	
		02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal tipe A yang dibangun	2	13 lokasi		
		03 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan	2	336 layanan		
		04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	2	325 layanan		
05.02.05.01 **PRO-P:** Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun	2	16 (berlanjut) lokasi	344.929,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.02 **PRO-P:** Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau	01 - Pelabuhan angkutan sungai danau yang dibangun/dikembangkan	2	8 (berlanjut) lokasi	163.617,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 081826 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.02.05.03 **PRO-P:** Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara	01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	2	1 (berlanjut) lokasi	33.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.02.05.05 **PRO-P:** Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang	01 - Terlaksananya penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani	2	325 layanan	805.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani	2	336 layanan		
		03 - Jumlah tayek angkutan multimoda yang dilayani	2	1 layanan		
		04 - Jumlah trayek angkutan barang yang dilayani	2	1 layanan		
05.02.05.06 **PRO-P:** Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A	01 - Terlaksananya peningkatan/revitalisasi terminal penumpang Tipe A	01 - Jumlah terminal penumpang Tipe A yang ditingkatkan/direvitalisasi	2	12 lokasi	213.697,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03 **PP:** Infrastruktur Perkotaan	01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/*flyover*/*underpass* (kota)	2	5 (berlanjut) lokasi	3.017.524,3	
		02 - Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	2	6 (berlanjut) kota		

SK No 081827 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	8 kawasan		
05.03.01 **KP:** Transportasi Perkotaan	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal perkotaan	01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	4 Kota	2.970.824,3	
		02 - Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)	2	11 Kota		
05.03.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	01 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis rel	2	4 kota	1.893.629,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		02 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis jalan	2	6 kota		
		03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS	2	10 unit		
05.03.01.02 **PRO-P:** Pembangunan Fasilitas Alih Moda yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Perekonomian, Permukiman, dan Fasilitas Umum pada Simpul-simpul Transportasi	01 - Terwujudnya pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman, dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	01 - Jumlah kawasan alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun	2	1 Unit	4.356,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SK No 081828 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.03.01.04 **PRO-P:** Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	01 - Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun	2	4 lokasi	226.261,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.03.01.05 **PRO-P:** Pembangunan Jalan Perkotaan	01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan	01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani (termasuk jalan lingkar)	2	10,6 km	297.813,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah lokasi *flyover/underpass* di perkotaan yang dibangun	2	4 lokasi		
05.03.01.06 **PRO-P:** Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terselenggaranya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	01 - Subsidi angkutan umum massal perkotaan	2	12 Layanan	548.764,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
05.03.02 **KP:** Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	2	25,4 % (kumulatif)	31.700,0	
05.03.02.01 **PRO-P:** Pengembangan TIK Perkotaan	01 - Terlaksananya pengembangan TIK perkotaan	01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	2	16.000.000 rumah tangga (kumulatif)	31.700,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		02 - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan *smart city*	5	150 kab/kota (kumulatif)		

SK No 081829 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.03.03 **KP:** Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal	2	7 kab/kota	0,0	
05.03.03.01 **PRO-P:** Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang andal dan terintegrasi	01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP)	2	7 BUMD air minum	0,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah PDAM yang menerapkan *Smart Grid Water Management*	2	3 BUMD air minum		
05.03.04 **KP:** Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Terlaksananya Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan	2	1 kawasan	15.000,0	
05.03.04.01 **PRO-P:** Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	2	1 kawasan	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
05.04 **PP:** Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	01 - Jumlah produksi tenaga listrik	2	406.325 GWh	1.460.859,5	
		02 - Penurunan emisi CO_2 pembangkit	2	5,91 juta ton		
		03 - Jumlah pengguna listrik	2	83.219 ribu rumah tangga-kumulatif		
		04 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	2	1.688.870 kumulatif, sambungan rumah		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		05 - Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif	2	1.276.000 *Barrel per Calendar Day*/BPCD		
05.04.01 **KP:** Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	01 - Susut jaringan	2	8,78 %	176.184,5	
		02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit	2	17 %		
05.04.01.01 **PRO-P:** Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	01 - Kapasitas terpasang EBT tambahan	2	2.099 MW	176.184,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah penambahan sistem transmisi	2	3.519,50/3.900 kms/MVA		
		03 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	43.065/3.206 kms/MVA		
05.04.02 **KP:** Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Penambahan pelanggan baru	2	2.002 ribu pelanggan	1.269.104,3	
		02 - Jumlah penyediaan gas	2	204.680 Setara Barel Minyak (SBM)		
05.04.02.02 **PRO-P:** Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan sistem distribusi	2	43.065/3.206 kms/MVA	1.269.104,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga	2	89 penyalur		
		03 - Tahapan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang	2	1 ruas		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.04.03 **KP:** Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	01 - Jumlah cadangan operasional BBM	2	23 hari	15.570,6	
		02 - *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI)	2	3 jam/pelanggan/tahun		
	02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi	01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi (kumulatif)	2	19.800 km		
05.04.03.01 **PRO-P:** Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi	01 - Jumlah rekomendasi keprospekan migas	2	4 rekomendasi kebijakan	15.223,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	02 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan	01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	2	6.209 MW		
		02 - Jumlah penambahan sistem transmisi	2	3.519,50/3.900 kms/MVA		
05.04.03.02 **PRO-P:** Pembangunan Kilang Minyak Bumi	01 - Terlaksananya pembangunan kilang minyak bumi	01 - Jumlah peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (kumulatif)	2	1.276 ribu BOPD	346,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
05.05 **PP:** Transformasi Digital	01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	1, 2, 5	8,80 %	18.120.674,9	
		02 - Persentase pengguna internet	2	80,70 %		
		03 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2	74 %		
05.05.01 **KP:** Penuntasan Infrastruktur TIK	01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	01 - Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband*	2	99,5 % (kumulatif)	15.277.861,7	
		02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	2	60 % (kumulatif)		

SK No 081832 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Persentase rasio harga layanan *fixed broadband* terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan *up to* 30 Mbps)	5	8 %		
		04 - Persentase rasio harga layanan *mobile broadband* terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	5	0,3 %		
		05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	2	94 %		
		06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	2, 5	75 %		
05.05.01.01 **PRO-P:** Pengembangan Infrastruktur Pitalebar	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar	01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	2	6.764 desa (kumulatif)	12.526.361,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
05.05.01.02 **PRO-P:** Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	01 - Jumlah infrastruktur digital *broadcasting system*	2	45 unit	1.519.546,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
05.05.01.03 **PRO-P:** Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	01 - Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/*Governemnt Network*)	2	75 %	1.231.953,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
05.05.02 **KP:** Pemanfaatan Infrastruktur TIK	01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK	01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	5	4,5—5,7 %	1.101.077,3	
		02 - Persentase K/L/D yang memanfaatkan *cloud* pemerintah (kumulatif)	5	35 %		

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.05.02.01 **PRO-P:** Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	5	35 Aplikasi (kumulatif)	151.380,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
05.05.02.02 **PRO-P:** Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha	01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	01 - Jumlah *start-up* aktif yang terbentuk	5	35 *start up*	949.696,7	KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
05.05.03 **KP:** Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital	01 - Jumlah peserta pelatihan digital *skill* untuk menuju ekonomi digital	1	15.700 peserta	1.741.735,9	

SK No 081834 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
05.05.03.01 **PRO-P:** Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi	01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	01 - Jumlah konten negatif yang diblokir	1, 5	210.000 konten negatif	254.549,9	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
05.05.03.02 **PRO-P:** Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK	01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK	01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	1	5.000.000 orang	882.991,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI
05.05.03.03 **PRO-P:** Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK	01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK	01 - Persentase pengembangan laboratorium BBPPT sebagai pusat TIK	1	80 %	604.194,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

SK No 081835 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06 **PN:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		69,48	10.790.668,6	
	02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB		1,10 %		
	03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*	01 - Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif		27,02 %		
		02 - Persentase penurunan emisi GRK - tahunan		26,80 %		
		03 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK		22,07 %		
06.01 **PP:** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)	5	55,40	2.365.181,8	
		02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	5	60,00		
		03 - Indeks Kualitas Udara (IKU)	5	84,40		
		04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	5	64,50		

SK No 081836 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.01 **KP:** Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	5	1.141 lokasi	1.048.820,6	
		02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	5	3.375 perusahaan		
		03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	5	70 juta ha		
		04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari *baseline*	5	2,00 %		
		05 - Luas kawasan konservasi	5	27 juta ha		
		06 - Luas kawasan konservasi perairan	5	29,10 juta ha		
		07 - Akurasi informasi meteorologi	5	92 %		
		08 - Akurasi informasi klimatologi	5	83 %		
06.01.01.01 **PRO-P:** Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis	5	250 unit	412.104,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis	5	30 unit		

SK No 081837 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	5	34 provinsi		
06.01.01.02 **PRO-P:** Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	01 - Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan	01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	5	3.375 badan usaha	15.683,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah	5	3.375 badan usaha		
		03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	5	35 pelabuhan		
		04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	5	100 badan usaha		
		05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	5	450 badan usaha		
06.01.01.03 **PRO-P:** Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim	01 - Akurasi informasi Meteorologi Publik	5	89 %	89.489,1	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
		02 - Akurasi informasi Meteorologi Penerbangan	5	100 %		
		03 - Akurasi informasi Meteorologi Maritim	5	87 %		

SK No 081838 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Akurasi informasi iklim	5	83 %		
06.01.01.04 **PRO-P:** Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	5	1.330 desa	423.103,1	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG	5	200 KHG		
06.01.01.05 **PRO-P:** Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	01 - Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	300 unit	5.946,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	20 produk		
06.01.01.06 **PRO-P:** Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem	01 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi	5	65 juta ha	68.842,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional	5	15,80 juta ha		
		03 - Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan	5	18 jenis		

SK No 081839 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem	5	17 unit		
		05 - Jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan	5	2 unit		
06.01.01.07 **PRO-P:** Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	5	10 juta ha	33.651,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
		02 - Jumlah layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	5	1 layanan		
		03 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi	5	7,55 juta ha		
06.01.02 **KP:** Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	69,20 juta ton	527.486,1	
		02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari *baseline*	5	50 %		

SK No 081841 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah limbah B3 yang terkelola	5	117,22 juta ton		
		04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari *baseline* 4.546.946,30 kg BOD/hari	5	0,046 %		
06.01.02.01 **PRO-P:** Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	01 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	5	34 lokasi	77.867,3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun	5	77 unit		
06.01.02.02 **PRO-P:** Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	18,90 juta ton	252.460,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,30 juta ton		
06.01.02.03 **PRO-P:** Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	01 - Persentase penghapusan merkuri dari *baseline* tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi	5	20 %	12.859,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin	5	7 unit		

SK No 081842 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.02.04 **PRO-P:** Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun	5	1 unit	184.299,6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan	5	10 unit		
06.01.03 **KP:** Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	330.000 ha	375.587,5	
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	5	285.000 ton		
		03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	40 lokasi		
		04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	5	25 jenis		
06.01.03.01 **PRO-P:** Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	47.210,5	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SK No 081843 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	30.000 ha		
06.01.03.02 **PRO-P:** Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3	01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional	5	7.211 ha	46.102,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang terpulihkan	5	250.000 ton		
		03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non-institusi yang dipulihkan	5	35.000 ton		
06.01.03.03 **PRO-P:** Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	5	40 lokasi	3.800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.03.04 **PRO-P:** Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah	01 - Luas konflik tenurial di Kawasan konservasi yang ditangani	5	620.000 ha	43.114,6	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	5	45.000 ha		
06.01.03.05 **PRO-P:** Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	01 - Jumlah luas Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	5	14.100.000 ha	235.360,0	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SK No 081844 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.01.04 **KP:** Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	5	68 %	413.287,5	
		02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	5	610 kasus		
		03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	5	2.150.000 ha		
		04 - Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	5	7 daerah		
06.01.04.01 **PRO-P:** Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung	5	30 kajian	18.132,9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.01.04.02 **PRO-P:** Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK	5	2.000 badan usaha	125.742,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	5	1 sistem		

SK No 081845 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	5	85 operasi		
		04 - Jumlah layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	5	170 layanan		
06.01.04.03 **PRO-P:** Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	5	500 perkara	269.412,4	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	5	110 perkara		
06.02 **PP:** Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	5	0,10 %	7.645.051,8	
		02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	5	1,00 %		
		03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	5	3,50 menit		

SK No 081846 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.02.01 **KP:** Penanggulangan Bencana	01 - Meningkatnya sistem dan respons peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN	5	1,06	2.703.702,7	
		02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	2	96 %		
		03 - Indeks Risiko Bencana Indonesia	5	132, 50		
06.02.01.01 **PRO-P:** Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana	01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	4	5 layanan	518.483,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
		02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	4	15 kegiatan		
		03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	1	100 kegiatan		
06.02.01.02 **PRO-P:** Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana	01 - Meningkatnya kualitas sistem, regulasi, dan tata kelola bencana yang saling bersinergi	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana	4	14 kajian	6.650,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	2	3 sistem		
06.02.01.03 **PRO-P:** Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan	01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	3	275 kab/kota	1.071.005,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	2	80 %		

SK No 081847 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.02.01.04 **PRO-P:** Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana	01 - Terlaksananya integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	1	50 kajian	0,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
		02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	5	55 dokumen		
06.02.01.05 **PRO-P:** Penguatan Penanganan Darurat Bencana	01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana	01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa	1	0,20 jiwa	383.734,6	KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KESEHATAN
		02 - Persentase waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 jam	1	100 %		
06.02.01.06 **PRO-P:** Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana	01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	2	90 %	7.800,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	1	5 %		
06.02.01.07 **PRO-P:** Penguatan Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana Terpadu	01 - Menguatnya sistem mitigasi multiancaman bencana terpadu	01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpadu	2	1 sistem	716.029,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	1	200 kelompok		
		03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencana	1	514 kab/kota		

SK No 081848 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana	1	0,0053 indeks		
06.02.02 **KP:** Peningkatan Ketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	5	0,650 %	4.941.349,1	
		02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	5	0,060 %		
		03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	5	0,207 %		
		04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	5	0,078 %		
06.02.02.01 **PRO-P:** Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	5	12 kawasan	1.599.397,4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen	5	20 pelabuhan		

SK No 081849 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan	2	23 km		
06.02.02.02 **PRO-P:** Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Tambahan debit air baku di kawasan rawan air	2	5,18 m^3/detik	1.885.389,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi	2	10 wilayah sungai		
		03 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	5	25.000 ha		
06.02.02.03 **PRO-P:** Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian	2	200 unit	1.441.526,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim	5	2.400 orang		
06.02.02.04 **PRO-P:** Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan lingkungan sehat	1	514 daerah (prov/kab/kota)	15.036,0	KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 081850 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.03 **PP:** Pembangunan Rendah Karbon	01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	01 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi - kumulatif	5	9,99 %	780.435,1	
		02 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi - tahunan	5	12,8 %		
		03 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan - kumulatif	5	36,36 %		
		04 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan - tahunan	5	58,3 %		
		05 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah - kumulatif	5	6,78 %		
		06 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah - tahunan	5	9,4 %		
		07 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU - kumulatif	5	4,97 %		
		08 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU - tahunan	5	2,45 %		

SK No 081851 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		09 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan - kumulatif	5	6,80 %		
		10 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan - tahunan	5	7,04 %		
06.03.01 **KP:** Pembangunan Energi Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	01 - Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional	5	17,90 %	201.110,4	
		02 - Intensitas energi primer	5	135,2 SBM/miliar rupiah		
		03 - Penurunan intensitas energi final	5	0,8 SBM/miliar rupiah		
06.03.01.01 **PRO-P:** Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan Energi Baru Terbarukan	01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT	2	2.099 megawatt	177.100,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		02 - Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik	5	14,60 juta kilo liter		
06.03.01.02 **PRO-P:** Efisiensi dan Konservasi Energi	01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	5	100 %	24.010,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
06.03.02 **KP:** Pemulihan Lahan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	5	330.000 ha	336.731,0	

SK No 081852 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional	5	450.000 ha		
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	90 %		
06.03.02.01 **PRO-P:** Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut	01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	5	300.000 ha	0,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya	5	30.000 ha		
06.03.02.02 **PRO-P:** Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	01 - Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	5	25.000 ha	22.804,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		02 - Luas penanaman pada hutan produksi	5	425.000 ha		
06.03.02.03 **PRO-P:** Pengurangan Laju Deforestasi	01 - Berkurangnya laju deforestasi	01 - Penurunan laju deforestasi	5	200.000 ha/tahun	8.942,8	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
06.03.02.04 **PRO-P:** Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian	01 - Jumlah optimasi lahan pertanian	5	100.000 ha	304.984,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
06.03.03 **KP:** Pengelolaan Limbah	01 - Meningkatnya pengelolaan limbah	01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional	5	69,20 juta ton	230.303,0	

SK No 081853 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
06.03.03.01 **PRO-P:** Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional	5	18,90 juta ton	230.303,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional	5	50,30 juta ton		
06.03.04 **KP:** Pengembangan Industri Hijau	01 - Meningkatnya keberlanjutan industri	01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	5	50 perusahaan	9.450,0	
06.03.04.01 **PRO-P:** Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi industri yang lebih berkelanjutan	01 - Jumlah rancangan standar industri hijau	5	5 NSPK	9.450,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
06.03.05 **KP:** Rendah Karbon Pesisir dan Laut	01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	5	6.872 ha	2.840,6	
06.03.05.01 **PRO-P:** Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil	5	40 lokasi	2.840,6	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

SK No 081854 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07 **PN:** Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		78,37	72.057.328,0	
		02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah		78 %		
	02 - Optimalnya kebijakan luar negeri	01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional		96,77		
	03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,57		
	04 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	01 - Indeks Pelayanan Publik Nasional		3,90		
	05 - Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	01 - Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya		100 %		
07.01 **PP:** Konsolidasi Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	4	79,50	21.938.211,6	
		02 - IDI Aspek Kebebasan	4	83,50		

SK No 081855 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - IDI Aspek Kesetaraan	4	79,67		
		04 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	5 dokumen		
07.01.01 **KP:** Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi	01 - Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu	4	76,1	19.638.391,8	
07.01.01.01 **PRO-P:** Penguatan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu	01 - Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu	4	549 satker	19.501.935,3	KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, MAHKAMAH KONSTITUSI RI
07.01.01.02 **PRO-P:** Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	01 - Menguatnya peraturan perundangan bidang politik	01 - Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	3	2 rekomendasi kebijakan	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.01.03 **PRO-P:** Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	01 - Meningkatnya bantuan keuangan partai politik	01 - Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR	1	126.376.418 suara sah	126.376,4	KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SK No 081856 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.01.01.04 **PRO-P:** Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	01 - Menguatnya demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik	01 - Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila	1	400 orang	5.780,1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
07.01.01.05 **PRO-P:** Penguatan Demokrasi di Daerah	01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	1	15 (prov/kab/kota)	3.300,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.02 **KP:** Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan	01 - Terbebas dari ancaman dan/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan	4	95,35	1.897.270,7	
		02 - Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif	4	61,30		
07.01.02.01 **PRO-P:** Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	01 - Terselenggaranya pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran dan berkelanjutan	01 - Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	4	94,80	5.850,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.01.02.02 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	01 - Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN	01 - Netralitas penyelenggara pemilu	4	81,55	1.889.920,7	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SK No 081857 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.01.02.03 **PRO-P:** Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan	01 - Jumlah pengurus ormas yang mendapat penguatan Ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan	1	1.200 orang	1.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.03 **KP:** Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	1	79 %	402.549,1	
		02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas	1	90 %		
		03 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 orang		
07.01.03.01 **PRO-P:** Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	3	5 dokumen	36.184,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.01.03.02 **PRO-P:** Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T	01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T	01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	1	77 %	140.688,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK No 081858 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.01.03.03 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	01 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	1	50.000 orang	181.598,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.04 **PRO-P:** Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK	1	3.000 orang	693,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.06 **PRO-P:** Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	01 - Indeks Kemerdekaan Pers	1	77,00	19.489,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.01.03.07 **PRO-P:** Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	1	59 lembaga penyiaran	23.894,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.02 **PP:** Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	5	14 forum	342.905,2	
		02 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	1	3,95		
		03 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	91,00		
07.02.01 **KP:** Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	01 - Menguatnya integritas NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri	01 - Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri	1	81 %	222.336,9	
		02 - Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	2	47,99		

SK No 081859 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.02.01.01 **PRO-P:** Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara	01 - Terlaksananya penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan	2	100 %	24.381,7	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
07.02.01.02 **PRO-P:** Penguatan Pelindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	01 - Terlaksananya penguatan pelindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	1	97,50	197.955,2	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	97,49		
		03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri	1	98,00		
07.02.02 **KP:** Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	5	133 program/kegiatan	57.274,2	
07.02.02.01 **PRO-P:** Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional	01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	5	171,00 Rp miliar	54.574,2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIAT NEGARA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

SK No 081860 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.02.02.02 **PRO-P:** Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung *(enabling environment)* peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional	01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	5	2,82—2,96 %	2.700,0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
07.02.03 **KP:** Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional	01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	5	86 %	1.591,4	
07.02.03.01 **PRO-P:** Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	5	99 %	1.591,4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
07.02.04 **KP:** Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	01 - Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	5	98 %	61.702,8	
		02 - Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	5	98 %		
		03 - Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh *Stakeholder* dalam Negeri	5	91,11 %		

SK No 081861 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Dalam Negeri	5	95 %		
07.02.04.01 **PRO-P:** Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima	01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	5	290 rekomendasi/prakarsa	58.702,8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
		02 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	5	247 rekomendasi/prakarsa		
07.02.04.02 **PRO-P:** Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB	01 - Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	5	10 peringkat	3.000,0	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
07.03 **PP:** Penegakan Hukum Nasional	01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	01 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	4	4,09	2.083.644,2	
07.03.01 **KP:** Penataan Regulasi	01 - Terlaksananya penataan regulasi	01 - Persentase *judicial review* yang dikabulkan MK dan MA	3	9,15% dan 7,05% %	5.765,9	
07.03.01.01 **PRO-P:** Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi	01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	3	0,20 %	1.000,0	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SK No 081862 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.03.01.02 **PRO-P:** Pembaruan Substansi Hukum	01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum	01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah	3	1 UU	4.765,9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
07.03.02 **KP:** Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata	01 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek *enforcing contracts*	5	80 peringkat	1.427.730,5	
		02 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek *resolving insolvency*	5	24 peringkat		
		03 - Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek *getting credits*	5	24 peringkat		
		04 - Persentase pelaku residivis	5	7.06 %		
07.03.02.01 **PRO-P:** Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha	01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	01 - Persentase eksekusi putusan perdata	5	15 %	9.067,4	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.03.02.02 **PRO-P:** Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif	01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan	1	15 %	1.358.377,8	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 081863 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.03.02.03 **PRO-P:** Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	01 - Terwujudnya dukungan TI di bidang hukum dan peradilan	01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI	5	212 wilayah kerja	37.220,8	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.03.02.04 **PRO-P:** Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim	01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim	01 - Indeks Integritas Hakim	1	7,68	23.064,6	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
07.03.03 **KP:** Penguatan Sistem Anti Korupsi	01 - Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi	01 - Survei penilaian integritas	5	74,00	460.001,0	
07.03.03.01 **PRO-P:** Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Terlaksananya penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	01 - Persentase capaian aksi Stranas PK	5	37,5 %	43.454,1	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.03.03.02 **PRO-P:** Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset	01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset	1	160 orang	416.546,9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KEUANGAN, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

SK No 081864 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.03.04 **KP:** Peningkatan Akses terhadap Keadilan	01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan	01 - Indeks Akses Terhadap Keadilan (persen)	5	71—80 %	190.146,7	
07.03.04.01 **PRO-P:** Penguatan Layanan Keadilan	01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan	01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan (persen)	5	71—80 %	173.383,3	MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.03.04.02 **PRO-P:** Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat	01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan	5	71—80 %	16.763,4	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
07.04 **PP:** Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi	01 - Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	4	4,10	1.509.676,3	
		02 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi	4	3,90		
		03 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	4	3,70		
07.04.01 **KP:** Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	01 - Terwujudnya penguatan implementasi manajemen ASN	01 - Nilai Indeks Sistem Merit Nasional	4	0,7	29.656,4	

SK No 081865 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.04.01.01 **PRO-P:** Manajemen Talenta Nasional ASN Berbasis Sistem Merit	01 - Terbangunnya manajemen talenta nasional ASN	01 - Jumlah K/L/D yang menerapkan manajemen talenta ASN	4	89 K/L	25.656,4	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.01.03 **PRO-P:** Perluasan Implementasi Sistem Integritas	01 - Menurunnya pelanggaran disiplin ASN	01 - Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti	4	95 %	4.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
07.04.02 **KP:** Transformasi Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	01 - Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	4	82,5	39.826,7	
		02 - Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	4	72,5		
		03 - Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Kinerja Pelayanan Publik	4	86,42		
07.04.02.01 **PRO-P:** Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*E-Services*) yang Terintegrasi	01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (*e-services*) yang terintegrasi	01 - Skor Indeks Pada Domain Layanan pada SPBE	4	3,17	7.223,9	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN

SK No 081866 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.04.02.02 **PRO-P:** Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik	01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	01 - Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan	4	737	30.602,8	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
		02 - Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	4	8.935 Orang		
07.04.02.03 **PRO-P:** Penguatan Ekosistem Inovasi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi	01 - Jumlah Inovasi yang memenuhi standar inovasi pelayanan publik	4	45 Inovasi	2.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
07.04.03 **KP:** Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional	01 - Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan	4	56	1.316.216,4	
07.04.03.01 **PRO-P:** Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis yang Efektif	01 - Terlaksananya penataan kelembagaan	01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya	4	21 K/L	2.500,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
07.04.03.02 **PRO-P:** Penerapan SPBE Terintegrasi	01 - Meningkatnya nilai Indeks SPBE Nasional	01 - Nilai Indeks SPBE Nasional	4	2,40	1.313.716,4	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SK No 081867 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.04.04 **KP:** Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien	01 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (K/L)	4	78	123.976,7	
		02 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Provinsi)	4	70		
		03 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Kabupaten/Kota)	4	65		
07.04.04.01 **PRO-P:** Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional	01 - Jumlah Rekomendasi Reformasi Birokrasi Nasional	4	9 Rekomendasi	5.351,4	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
07.04.04.02 **PRO-P:** Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	01 - Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	01 - Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	4	24 Laporan	118.625,3	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
		02 - Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	4	72 Laporan		
		03 - Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	88 Laporan		
		04 - Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	4	730 Laporan		

SK No 081868 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05 **PP:** Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan	01 - Indeks Kekuatan Militer	2	0,21	46.182.890,7	
		02 - Indeks Terorisme Global	5	4,29		
		03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	3	>60 %		
		04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3	3,30		
07.05.01 **KP:** Penguatan Keamanan Dalam Negeri	01 - Menguatnya keamanan dalam negeri	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	4	37,90	881.079,6	
		02 - Indeks Risiko Terorisme (Target)	4	54,16		
		03 - Angka pelanggaran lintas batas negara	4	<200 pelanggaran		
		04 - Angka kejadian konflik	4	40 kejadian		
		05 - Angka korban pengungsi internal	4	≤14.500 orang		
07.05.01.01 **PRO-P:** Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	01 - Meningkatnya deradikalisasi dan penanganan terorisme	01 - *Clearance rate terorisme*	5	79 %	172.157,5	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
		02 - Jumlah Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme	5	125 orang		

SK No 081869 C

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme	5	128 kegiatan		
		04 - Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	5	48 institusi		
07.05.01.02 **PRO-P:** Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan	01 - Terlaksananya pengamanan objek vital dan target rentan	01 - Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan	5	2.129 objek vital dan target rentan	69.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.01.03 **PRO-P:** Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar	01 - Jumlah pos pamtas, posal, pos pol subsektor, dan PLBN yang dibangun	2	56 m²	604.800,8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		02 - Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan	2	200 km		
		03 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankamor	1	180 orang		
		04 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya	2	49 PPKT		
07.05.01.04 **PRO-P:** Penanganan Konflik secara Humanis	01 - Tertanganinya konflik secara humanis	01 - Tertanggulanginya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten	5	21 kasus	33.959,9	KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL
		02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis	1	900 orang		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.01.05 **PRO-P:** Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana	01 - Jumlah korban bencana yang diselamatkan	4	120.000 orang	1.161,4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.02 **KP:** Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)	01 - Tewujudnya kemampuan pertahanan yang kuat dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)	01 - Pemenuhan MEF	4	93 %	33.865.991,5	
		02 - Persentase kontribusi industri pertahanan	5	≥50 %		
07.05.02.01 **PRO-P:** Pengadaan Alutsista	01 - Terlaksananya pengadaan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diadakan	4	14 jenis	15.989.777,4	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.02 **PRO-P:** Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alutsista	01 - Jenis alutsista yang diharwat	4	16 jenis	12.215.117,7	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.03 **PRO-P:** Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan	01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	01 - Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun	2	5 jenis	340.137,9	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.04 **PRO-P:** Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	01 - Jumlah sarpras profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang dibangun	2	4 jenis	1.543.882,1	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.02.05 **PRO-P:** Pembangunan Pertahanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan pertahanan siber	01 - Jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun	4	2 sistem	162.335,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN

SK No 081871 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.02.06 **PRO-P:** Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan	5	1 jenis	3.614.741,4	KEMENTERIAN PERTAHANAN
07.05.03 **KP:** Penguatan Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut	01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	4	224 jumlah	1.621.194,1	
07.05.03.02 **PRO-P:** Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	01 - Terlaksananya operasi keamanan laut yang kuat	01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*	4	100 %	1.620.273,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, BADAN KEAMANAN LAUT
07.05.03.03 **PRO-P:** Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat	01 - *Clearance rate* tindak pidana laut	4	80 %	920,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
07.05.04 **KP:** Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	01 - Angka prevalensi penyalahguna narkotika	1	1,69 %	9.645.301,8	
		02 - *Crime rate*	4	111 /100.000 penduduk		
		03 - Pelayanan publik Polri yang prima	4	9 %		
07.05.04.01 **PRO-P:** Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - *Clearance rate* tindak pidana narkotika	1	88 %	76.134,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI
		02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang	5	3 kawasan		

SK No 081872 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.04.02 **PRO-P:** Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja	1	53,00	85.267,8	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek fisik	1	7,5 %		
		03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek psikologis	1	7,5 %		
		04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan sosial	1	6,5 %		
		05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan	1	5,5 %		
		06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	4	3,16		
07.05.04.03 **PRO-P:** Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	01 - *Clearance rate* tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan	4	84 %	18.772,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SK No 081873 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.04.04 **PRO-P:** Peningkatan Layanan Kepolisian yang Presisi sebagai Kelanjutan Promoter	01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang Presisi sebagai kelanjutan promoter	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian	4	8,4	3.638.324,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - *Clearance rate*	4	66 %		
		03 - *Clearance rate* tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU	4	59 %		
07.05.04.05 **PRO-P:** Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	01 - Terlaksananya pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian	01 - Jumlah almatsus dan alpalkam kepolisian	2	6 paket	5.228.290,8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan	5	35 %		
07.05.04.06 **PRO-P:** Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Anggota Polri	01 - Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri	01 - Jumlah personel yang tersertifikasi diklat profesional	1	4.500 personel	598.512,3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
		02 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara	2	603 unit		
		03 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya	2	1 unit		

SK No 081874 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
		04 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	4	79 %		
07.05.05 **KP:** Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat	01 - Skor *Global Cyber Security Index*	1, 2	88,54	169.323,8	
07.05.05.01 **PRO-P:** Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar *Technical* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	2	17,1	10.901,0	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
07.05.05.02 **PRO-P:** Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	01 - Terlaksananya pembangunan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber yang kuat	01 - Skor Pilar *Organizational* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	4	13,3	122.952,8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, BADAN INTELIJEN NEGARA
		02 - Skor Pilar *Technical* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	2	17,1		
		03 - Skor Pilar *Capacity Development* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	1	18,90		
07.05.05.03 **PRO-P:** Penyelesaian Kejahatan Siber	01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber	01 - *Clearance rate* tindak pidana siber	5	64 %	19.378,9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

SK No 081875 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Dukungan terhadap Arahan Presiden	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
07.05.05.04 **PRO-P:** Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber	01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional bidang siber	01 - Skor Pilar *Cooperation* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI)	1, 5	13,9	16.091,1	BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

KETERANGAN
Dukungan Terhadap Arahan Presiden:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Ratna Silvanna Djaman

SK No 004422 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT*

SK No 004423 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT* PADA PRIORITAS NASIONAL RKP 2023

	Prioritas Nasional / *Major Project*	Rp. Juta
01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
1	Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas	387.895,8
2	Destinasi Pariwisata Prioritas	1.848.385,1
3	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	103.008,1
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	199.161,2
5	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	294.520,7
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	251.191,7
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional	42.185,0
8	*Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	235.469,9
9	Pengelolaan Terpadu UMKM	1.275.211,6
02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
10	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	568.544,3
11	Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	2.298.302,5
12	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	23.561.214,0
13	Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	3.289.473,4

SK No 081878 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Prioritas Nasional / *Major Project*	Rp. Juta
14	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	3.198.874,0
15	Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	353.244,3
16	PKSN Kawasan Perbatasan Negara	414.537,5
17	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	75.516,3
03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
18	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*	81.058.268,4
19	Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas)	456.591,6
20	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	702.742,7
21	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	142.669.775,7
22	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	12.050.020,9
05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
23	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	100
24	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	424.630,7
25	Kereta Api Makassar-Pare Pare	477.051,9
26	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	533.057,7
27	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	1.711.455,5
28	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	346.7

SK No 081879 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Prioritas Nasional / *Major Project*	Rp. Juta
29	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	362.938,7
30	Transformasi Digital	16.790.852,4
31	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	1.371.381,0
32	18 Waduk Multiguna	263.290,3
33	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	385.879,9
34	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	1.080.075,7
35	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	1.993.799,5
36	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	2.592.070,8
37	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	3.777.912,1
38	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	1.527.938,7
39	Pemulihan 4 DAS Kritis	308.063,9
41	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	(dibiayai oleh investasi badan usaha)
42	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	(dibiayai oleh investasi badan usaha)
06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
42	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	184.299,6
43	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	1.620.330,6

SK No 081880 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Prioritas Nasional / *Major Project*	Rp. Juta
07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
44	Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	330.658,8
45	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	166.897,9

Catatan:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
(2) Pada beberapa *Major Project* dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari BUMN/Swasta/Daerah, sehingga belanja K/L hanya sebagai fasilitator. Contoh: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, termasuk *Major Project* terkait pengembangan kewilayahan;
(3) Major Project mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(4) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 001709 C